

Amerika dan Islam Politik

Benturan
Peradaban
atau
Benturan
Kepentingan?

Fawaz A. Gerges

Amerika dan Islam Politik

**Benturan Peradaban
atau
Benturan Kepentingan?**

Fawaz A. Gerges

Amerika dan Politik Islam

Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan

Diterjemahkan dari

America and Political Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?

Karya Fawaz A. Gergez

Terbitan Cambridge University Press, New York, USA, 1999

© Fawaz A. Gergez, 1999

Penerjemah Kili Pringgodigdo, Hamid Basyaib

Cetakan 1, September 2002

Diterbitkan oleh AlvaBet — Anggota IKAPI

Komplek Triloka, Jl. Triloka I No. 18,

Pancoran — Jakarta Selatan 12780

Telp./Fax. (021) 7945561

e-mail: alvabet@alvabet.com — ridee@cbn.net.id

Home Page: www.alvabet.com

Desain sampul: Dee RIANA

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Gerges, Fawaz A.

Amerika dan Islam Politik: *Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?*

oleh Fawaz A. Gerges;

— Jakarta: AlvaBet, Cet. 1, September 2002;

362 hlm.; i-xiv; 15,5 cm.

ISBN 979-3064-04-8

1. Islam dan Politik

I. Judul

2. Islam dan Modernisasi

Untuk Nora Ann

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	xi
1. Memahami Kerangka Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat	1
Kebijakan Luar Negeri AS: Ideologi versus Politik Riil	5
Penjelasan: (A) Peran Budaya dan Sejarah	7
(B) Peran Politik dan Hankam	11
Pembagian Bab dalam Buku Ini	18
Catatan	19
2. Konteks Intelektual Kebijakan Luar Negeri AS	25
Interpretasi Konfrontasionalis tentang Islam:	
Sang “Musuh Baru”	27
Rekomendasi Kebijakan dari Konfrontasionalis	31
Interpretasi Akomodasionis tentang Islam:	
“Tantangan” Baru	34
Rekomendasi Kebijakan dari Akomodasionis	37
Kesimpulan	40
Catatan	42
3. Islam dan Muslim dalam Pandangan Amerika	47
Sketsa Sejarah Singkat	50
Dampak Revolusi Islam di Iran	52
Ketakutan terhadap Terorisme dan Dampaknya bagi Kebijakan AS	54

Peran Media	59
Peran Israel dan Kawan-kawannya	62
Pengaruh Kongres dalam Kebijakan Luar Negeri AS	64
Catatan	67
 4. Pendekatan Pemerintahan Carter, Reagan, dan Bush terhadap Islamis	 75
Terbenturnya Carter dengan Islam Politik: Revolusi Iran	76
Perang Budaya atau Perang Kepentingan Negara?	79
Pengalaman Reagan dengan Kebangkitan Islam: Wacana versus Tindakan	85
Bush dan Krisis Aljazair	89
Pidato The Meridian House: Dasar Kebijakan Baru terhadap Islam	94
Menilai Pidato Meridian House	99
Catatan	102
 5. Pemerintahan Clinton: Menerima Islam Politik	 111
Islam dan Barat: Hidup Berdampingan dan Harmonis?	115
Islam dan Demokrasi	122
Budaya sebagai Faktor dalam Persepsi AS tentang Kelompok Islamis	129
Analisis atas Wacana Pemerintahan Clinton	133
Catatan	139
 6. Republik Islam Iran	 149
Kebudayaan atau Keamanan?	150
Evolusi Kebijakan Amerika terhadap Iran	154
Dari Penekanan sampai Perburuan tak Berampun	157
Perang Washington terhadap Islam Revolusioner	165
Ancaman Iran: Mitos dan Kenyataan	166
Rekomendasi Kebijakan	172
Catatan	175

7. Aljazair	185
Pendirian Awal Clinton terhadap Aljazair:	
“Kewaspadaan yang Prihatin”	186
Mengukur Pendekatan Awal Pemerintahan Clinton	192
Pertikaian AS-Prancis dalam Masalah Aljazair	196
Sebuah Kebijakan Baru: “Pensyaratan Positif”	199
Pelembagaan Kekerasan dan Kekalahan	
dalam Kebijakan AS	203
Rekomendasi Kebijakan	209
Catatan	212
 8. Mesir	 221
Perebutan Kekuasaan Internal	222
Pendekatan Pertama Pemerintahan Clinton	
dengan para Islamis	226
Membalikkan Kebijakan Amerika:	
Dukungan Penuh bagi Mubarak	229
Awal dari Berakhirnya Al-Jamaah dan Jihad?	233
Menimbang Kebijakan AS terhadap Mesir	
dan Kaum Islamisnya	236
Rekomendasi Kebijakan	238
Catatan	241
 9. Turki	 249
Hubungan AS-Turki setelah Akhir Perang Dingin	251
Perang Teluk 1991:	
Memperkokoh Hubungan AS-Turki	253
Memikirkan yang Mustahil:	
Refah dalam Kekuasaan dan Reaksi AS	256
Kampanye Menentang Islamis	260
Catatan Refah dan Peran Amerika	263
Serangan Final Militer dan Tersingkirnya Erbakan	269
Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?	273

Rekomendasi Kebijakan	276
Catatan	279
10. Kesimpulan	293
Temuan Kajian Ini: Retorik	295
Temuan Kajian Ini: Kebijakan	298
Kompleks Iran	305
Apa yang harus Dilakukan?	307
Catatan	312
Referensi	315
Indeks	355

Ucapan Terima Kasih



SAYA mengucapkan terima kasih yang istimewa pada Profesor Oxford James Piscatori, yang pertama kali menugasi saya untuk menulis monograf tentang pendekatan pemerintahan Clinton terhadap Islam politik untuk Dewan Hubungan Luar Negeri, New York. Proyek itu telah menanamkan benih bagi buku ini. Semakin saya mendalami kebijakan Islam Clinton, semakin saya menyadari perlunya mengkontekstualisasi kebijakan ini dengan meneliti bagaimana pemerintahan-pemerintahan sebelumnya memandang serta menanggapi aktivisme Islam. Hasilnya adalah sebuah buku orisinal yang, mudah-mudahan, komprehensif tentang subjek penting yang sejauh ini terasa kurang dianalisis secara memadai dan lengkap, yang akan terus memiliki makna global yang penting pada abad ke-21.

Buku ini mengerjakan sejumlah hal. Pertama, ia mengurutkan debat-debat kebijakan tentang Islamisme di Amerika Serikat dalam masa yang panjang, dan menyajikan uraian komprehensif tentang asal-usul kebijakan itu, diikuti dengan kritik yang berimbang dan rekomendasi-rekomendasi bagi perubahan. Kedua, kajian ini membiarkan para pembuat dan pewarna kebijakan luar negeri berbicara dalam kalimat-kalimat mereka sendiri. Dalam konteks ini, buku ini menyajikan perspektif historis yang penting. Dari perspektif tersebut, orang dapat dengan jelas melihat suatu pola yang berulang dalam proses kebijakan luar negeri AS, yang di

dalamnya para pejabat sangat kuat merasakan perlunya stabilitas dan sangat lemah dalam memandang perlunya perubahan. Ketegangan dalam kebijakan Amerika ini agaknya bisa dijelaskan dengan pertarungan antara *realpolitik* dan idealisme — kerap diungkapkan dalam pragmatis — yang juga sering mencuat untuk wilayah-wilayah lain dan juga untuk masa-masa lain dalam kebijakan luar negeri Amerika.

Ketiga, buku ini bertujuan lebih daripada sekadar menyajikan paparan komprehensif tentang asal-usul kebijakan AS tentang Islamisme. Ia menulik ke dalam pentas politik Amerika untuk menganalisis isu-isu keamanan, sejarah, budaya dan politik, yang dapat membantu menjelaskan fiksasi AS terhadap Islam dan kaum Muslim. Lebih lanjut, kajian ini menyoroti keragaman faktor-faktor regional dan internasional, seperti pembusukan politik dalam rezim-rezim Timur Tengah dan berakhirnya Perang Dingin, yang mewarnai pemikiran para pejabat Amerika mengenai fenomena kontemporer Islamis. Analisis khususnya berfokus pada upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan Timur Tengah pro-Barat untuk mempengaruhi perumusan kebijakan AS dengan menyudutkan para aktivis Islam sebagai musuh abadi Barat. Dengan kata lain, perhatian khusus akan diberikan pada pengaruh internal dan eksternal maupun pada aneka bentuk advokasi yang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan AS.

Keempat, selain mengamati konteks domestik, regional, dan internasional dalam kebijakan AS terhadap Islam politik, buku ini menerapkan dan menguji pernyataan-pernyataan para pejabat Amerika di empat studi kasus yang representatif — Iran, Aljazair, Mesir, dan Turki. Tujuan studi-studi kasus ini bukanlah untuk menyajikan tinjauan menyeluruh tentang setiap negara tersebut yang di dalamnya Islam politik berperan sebagai sebuah faktor yang dipertimbangkan dalam kepentingan-kepentingan AS. Tujuannya adalah untuk memilih kasus yang mewakili suatu spektrum luas Islamisme, yang merentang dari Islam populis radikal

hingga partai-partai politik berorientasi Islami yang ingin berperan menurut aturan-aturan main pemilihan umum. Metodologi komparatif ini mengungkapkan nuansa perbedaan dan persamaan-persamaan dalam pendekatan AS terhadap aktivisme Islam, termasuk sisi-sisi mayoritas (*mainstream*) dan revolusionernya.

Kelima, buku ini menyinggung debat tentang benturan peradaban (*clash-of-civilizations*) dan menilai bobot relatif kebudayaan dan nilai-nilai pada kata-kata dan tindakan para pejabat AS mengenai Islamisme. Salah satu pertanyaan penting dan sentral yang muncul adalah sejauh mana kebudayaan dan agama telah menggantikan ideologi dan kepentingan nasional sebagai variabel-variabel independen dalam kebijakan luar negeri Amerika. Kajian ini secara tak langsung mempertimbangkan apakah garis-garis kepentingan nasional yang baku telah berubah besar dalam politik dunia; dengan melakukan hal ini, buku ini mengangkat sejumlah implikasi empiris dan konseptual bagi studi dan praktik hubungan internasional.

Kajian ini didasarkan pada sejumlah besar wawancara dengan para pejabat Amerika di Departemen Luar Negeri, para anggota Dewan Keamanan Nasional, dan partisipan kebijakan lainnya. Saya juga banyak menggunakan dokumen-dokumen negara, disertai dengan kajian-kajian analitis yang menantang pemikiran Washington. Pidato-pidato resmi, naskah-naskah kebijakan, testimoni kongresional, serta sumber-sumber primer dan sekunder lainnya dirajut untuk menyajikan suatu uraian luas tentang debat mengenai apakah Islam politik adalah pengganti Komunisme sebagai “kerajaan setan” (*evil empire*) di masa pasca Perang Dingin.

Dalam menulis buku ini saya banyak berutang budi pada para kolega yang telah membaca lebih dari satu rancangan naskah, yang telah berbagi pandangan-pandangan kritis mereka bersama saya. Mereka ini termasuk Avi Shlaim, John Entelis, John Esposito, Michael Hudson, Mike Suleiman, Daniel Bell, William Quandt, Yvonne Haddad, Yezid Sayigh, Bill Mesmer, Douglas Simon, Peter Gellman, dan Etel Solingen. Saya berterima kasih be-

sar untuk komentar-komentar para pembaca di Cambridge University Press yang telah sangat membantu memperbaiki naskah awal. Editor saya di Cambridge, Alex Holzman, patut mendapat penghargaan untuk kesabaran dan profesionalismenya.

Saya juga berutang intelektual pada para kolega dan mahasiswa saya di Sarah Lawrence College yang tanggapan-tanggapan kritisnya telah memaksa saya memikirkan kembali sebagian dari gagasan-gagasan awal saya. Dua dari ssisten-asisten penelitian saya, Benjamin Banayan dan Louis Somma, sangat membantu dalam mengumpulkan sumber-sumber serta menata kepustakaan. Saya tak mungkin menyelesaikan buku ini tanpa bantuan besar yang saya terima dari para pustakawan di Sarah Lawrence. Sha Fagan, Judy Kicinski, dan Janet Alexander selalu dengan sigap melayani permintaan saya untuk buku-buku dan bahan-bahan penelitian.

Menulis buku itu tak gampang. Ia membutuhkan disiplin dan suatu tingkat egoisme dan keterangan tertentu, sebab seorang penulis harus menghabiskan banyak waktunya yang berharga jauh dari keluarga dan teman-temannya. Dalam hal ini saya ingin mendedikasikan esai ini pada Nora untuk cinta dan dukungan tanpa syaratnya. Proyek ini tak akan terwujud tanpa limpahan dorongan semangatnya yang tulus. Meski saya berusaha keras untuk menghindari anak-anak terkasih saya, Annie-Marie dan Bassam, dengan bersembunyi di ruang studi saya, untunglah saya gagal. Kehadiran Bassam dan Annie-Marie telah menyelamatkan saya dari kebiasaan kerja yang berlebihan. Buku ini juga milik mereka.

Fawaz A. Gerges

New York

Memahami Kerangka Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat



BUKU INI menelaah pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara Islam dari masa Carter sampai Clinton¹, dengan fokus pada pemikiran para elit kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara dan gerakan-gerakan Islam. Lembaga eksekutif seperti presiden dan para penasihat terdekatnya termasuk dalam kelompok elit ini. Begitu pula para birokrat keamanan nasional dari lembaga eksekutif, juga kekuatan politik dalam negeri, khususnya para pembuat opini dan kelompok-kelompok penekan (*pressure group*). Banyaknya pengaruh dalam negeri ini mampu menggerakkan kebijakan AS ke arah yang berlawanan pada saat yang sama. Pengaruh-pengaruh ini termasuk opini masyarakat, pers, kelompok-kelompok kepentingan swasta, program-program akademis untuk pembuatan kebijakan, kelompok-kelompok pemikir (*think tank*), Kongres, dan lembaga-lembaga lainnya. Kebijakan luar negeri AS adalah produk sebuah spektrum menyeluruh dari realitas-realitas politik dalam negeri.²

Buku ini mencoba memetakan berbagai penilaian masyarakat dan beberapa pandangan pribadi kalangan elit kebijakan luar negeri AS terhadap kebangkitan Islam untuk menyingkap pan-

dangan dari beberapa era pemerintahan yang berbeda dalam kebijakan Amerika, kesinambungannya, serta ragamnya. Perbandingan yang dilakukan secara hati-hati terhadap wacana masyarakat dan pernyataan-pernyataan pribadi menunjukkan berbagai tema, nilai, serta pandangan-pandangan yang bergaung saat ini, yang merupakan hal penting untuk memahami perumusan dan tindakan-tindakan yang diambil dalam kebijakan AS tentang Islam.³

Penelitian ini menganalisis lebih jauh kebijakan-kebijakan AS yang sudah ada. Tantangan analitisnya adalah untuk mengukur hubungan rumit antara gagasan dan tindakan, untuk melihat apakah pandangan atau posisi dari beberapa masa pemerintahan AS memang berfungsi sebagai panduan yang bisa diandalkan dalam memahami kebijakan mereka, dan juga untuk melihat apakah ada kontradiksi antara kalimat-kalimat pembuat kebijakan dan tindakan mereka. Strategi penelitian seperti ini serius melihat masalah tahapan analisis dengan membedakan secara jelas tahap retorika atau wacana dari tahap kebijakan atau tindakan.

Buku ini memunculkan sejumlah pertanyaan sistematis yang berfungsi sebagai alat analitis untuk membuat kerangka analisis dan menyusun data. Apakah para pemimpin AS dan dinas-dinas pemerintahannya melihat Islam politik (*political Islam*) sebagai ancaman monolitik bagi kepentingan Barat, atau apakah mereka juga memahami karakternya yang eklektik dan seringkali mendua? Sejauh mana pandangan resmi AS sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang nyata diterapkan oleh kepemimpinan yang berbeda-beda?

Lebih lugas lagi: adakah konsensus di antara elit kebijakan luar negeri AS tentang keselarasan antara Islam dan demokrasi? Apakah perbedaan budaya mempengaruhi diagnosis para pemimpin AS terhadap kebangkitan Islam? Sampai di mana hubungan historis yang pahit dan penuh masalah antara dua peradaban ini mempengaruhi pemikiran dan pandangan orang-orang di kedua belah pihak tentang diri mereka satu sama lain? Atau, apakah lebih tepat jika sentimen anti-Islam yang muncul di AS dijelaskan

dengan mengaitkannya pada masalah politik saat ini dibanding dengan mengaitkannya pada hal-hal historis dan budaya?

Peran apa yang dimainkan media massa utama (*mainstream*) dan pemberian beasiswa untuk studi Islam dalam melegitimasi pendekatan AS kepada negara-negara Islam maupun dalam membentuk sikap-sikap para politisi AS? Apa saja masukan yang diberikan Kongres, Israel, dan negara-negara Timur Tengah yang pro-Barat dalam mencetak pandangan Amerika terhadap negara-negara Islam? Apakah pandangan-pandangan serta kesalahpandangan populer tentang Islam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika? Tujuan utama penelitian ini adalah menentukan sampai di mana kebijakan AS didorong oleh para pembentuk opini, diarahkan oleh emosi-emosi publik, oleh berita media, serta oleh pertimbangan-pertimbangan politis dalam negeri semata.

Jelas terlihat dari bukti yang ada bahwa berbagai pandangan masyarakat AS terhadap negara-negara Islam menunjukkan upaya sadar untuk menerima serta untuk menjangkau kelompok Islam moderat. Dan Islam sama sekali tidak dilihat sebagai ancaman bagi Barat. Pemerintahan Bush (senior) dan Clinton, misalnya, sangat memuji agama Islam dan budayanya. Mereka memahami pentingnya penekanan kembali akan nilai-nilai tradisional dalam dunia Islam. Kedua pemerintahan tersebut menolak hipotesis “perang peradaban”; keduanya melihat pergolakan dewasa ini sebagai sesuatu yang berada di luar bingkai peradaban. Malahan, keduanya menekankan peran Amerika sebagai “jembatan” antara sistem-sistem spiritual yang berbeda.

Jika dilakukan pengamatan yang lebih dekat dan kritis terhadap pandangan pemerintahan yang berbeda-beda itu, terlihat beberapa ketidakkonsistenan dan situasi “tarik urat”. Pendekatan AS terhadap kaum Muslim dibentuk dengan beberapa ambiguitas dan ketegangan. Para pembuat keputusan di Amerika tampaknya ragu-ragu dalam mengambil posisi yang pasti dan mantap terhadap kebangkitan Islam. Keraguan ini berakar dari ketidakmam-

puan Washington dalam memprediksi dan mengukur dampak-dampak kebijakan luar negeri pada negara-negara Islam saat mereka memegang kekuasaan.

Ada tiga hal yang mendasari posisi Amerika terhadap Islam politik. Pertama, AS tidak ingin terlihat tak bersahabat bagi negara-negara Islam; ini dikhawatirkan bakal memperparah sikap mereka terhadap Amerika. Para pejabat pemerintah AS tidak mau mengulangi kesalahan yang dibuat saat menghadapi revolusi Islam di Iran. Alasan kedua, AS ragu-ragu untuk secara terbuka mendukung kelompok Islam manapun kecuali jika menguntungkan bagi kepentingan regionalnya ataupun kepentingan sekutunya. Pejabat-pejabat Amerika mengidap kecurigaan besar pada tujuan kebijakan luar negeri para aktivis Islam berikut agenda mereka. Alasan terakhir: di dalam lingkaran para pembuat kebijakan luar negeri AS terdapat sebetulnya ketidakpercayaan tentang kemungkinan terjadinya hubungan baik antara negara Islam dan demokrasi. Pandangan Amerika, yang sudah dijejali dengan masukan-masukan implisit mengenai perilaku politik Islam, melihat Islam revolusioner itu antidemokratis dan otoriter. Sehingga, bukannya memberikan panduan kebijakan yang konkret, pernyataan-pernyataan resmi AS jadinya berbentuk bahasa yang mendua dan bisa memunculkan beragam interpretasi.

Bukan itu saja. Terdapat bukti luas bahwa pernyataan-pernyataan resmi pemerintah AS seringkali tidak sejalan dengan tindakan mereka terhadap negara-negara dan gerakan-gerakan Islam. Ada jurang antara tindakan dan pernyataan para pemimpin Amerika. Pembuat kebijakan negeri ini tampaknya ragu-ragu untuk menerapkan pendirian liberal mereka ketika merumuskan kebijakan terhadap negara-negara Islam, dengan berpihak kuat pada rezim-rezim sekular Timur Tengah. Meski para pemimpin AS tidak menerima hipotesis “perang budaya”, kebijakan Amerika pasca Perang Dingin tampaknya diwarnai oleh ketakutan akan “ancaman Islam”. Di mata AS, beberapa pandangan militan negara Islam serta program politik mereka tampak bersifat merombak (re-

visionis) dan mengancam. Ini membuat Washington tidak mungkin mendukung mereka dan mengabaikan sekutu-sekutu setianya.

Memang benar, beberapa gerakan Islam sangat provokatif dan konfrontasional, tidak bersedia untuk mengakui batas-batas kekuasaan serta identitas dan perbedaan antar negara. Ayatullah Khomeini dari Iran, misalnya, menganggap asing konsep perbedaan negara. Baginya, “Dalam Islam tidak ada garis batas.”⁴ Sebagian negara Islam terus menerus menyatakan adanya kerusakan spiritual di Barat dan membanggakan vitalitas dan kemantapan Islam. Realitas ini menguatkan pendirian resmi AS bahwa negara-negara Islam itu secara intrinsik anti-Barat dan anti-demokrasi. Tapi untuk mengimbangi, elit penentu kebijakan luar negeri Amerika melihat mereka yang apolitis sebagai negara-negara Islam “baik”; dan Islam moderat adalah pemerintahan yang pro-Barat, seperti Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri AS: Ideologi versus Politik Riil

Kebijakan luar negeri AS sering dibicarakan dalam lingkup ketegangan dialektik antara dua pola yang berlawanan: pragmatisme-realisme dan legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika mondar-mandir antara politik riil dan moralisme. Bagi para pendukung dan praktisinya, realisme adalah sebuah pemahaman yang tertib, jernih, dan tegas tentang perumusan kebijakan yang didasari pada kepentingan negara yang didefinisikan dengan baik. Esensi realisme ini adalah kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional.⁵

Sebaliknya, legalisme-moralisme menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta nilai-nilainya. Nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari kebesaran bangsa, berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis di dalam dan luar negeri. Sebagian besar orang Amerika

menganggap dirinya masyarakat yang superior dalam moral dan politik, bagai sebuah kota gemerlap di atas bukit, membawa misi universal dengan didorong anggapan diri yang merasa istimewa. Mereka yang tidak sepaham mengatakan, suatu kebijakan luar negeri aktif yang ditujukan untuk kebesaran bangsa-bangsa akan membahayakan kebebasan yang merupakan warisan kaum Republik.⁶

Tapi seringkali pandangan dominan di antara para penentu kebijakan yang berpengaruh bergerak sepanjang ruang lebar di antara dua titik ekstrem, tujuan politik riil dan moral. Perdebatan yang terjadi antara para realis dan moralis ini berakar dari gaya bangsa Amerika yang didasari letak geografis, perjalanan sejarah, sistem ekonomi, dan nilai-nilai serta budaya politiknya. Gaya Amerika ini menjadikan AS bergerak bagai pendulum dari kondisi isolasionisme di masa damai ke aktivitas moral di masa perang.⁷

Bagaimanapun, sepanjang abad yang lalu salah satu hal yang selalu ada dalam kebijakan luar negeri AS adalah semangat untuk “menerapkan demokrasi di luar negeri sebagai cara untuk menjaga keamanan nasional”.⁸ Walaupun bangsa Amerika mengaitkan demokrasi dengan perdamaian dan otoritarianisme dengan agresi, dikotomi sederhana ini tidak dijadikan dasar bagi kebijakan luar negeri Washington. Sejarahwan John Gaddis mengamati, secara tradisional Amerika Serikat mengaitkan keamanan negaranya dengan keseimbangan pembagian kekuasaan di dunia. Sesekali, elit pembuat kebijakan luar negeri mereka membungkus perimbangan kekuasaan ini di balik topeng idealis dan menggunakan pandangan demokratis hanya sebagai pemanis. Idealisme demokrasi dikorbankan di altar perhitungan politik riil untuk kepentingan diri sendiri. Kebijakan para intervensionis juga dibenarkan dengan alasan membuat dunia ini “aman untuk demokrasi”.⁹ Pendirian AS tentang Islam politik kaya dengan ketegangan-ketegangan yang juga bisa ditemukan dalam tindakan Washington terhadap gerakan serta negara-negara dari ideologi lain.

Penjelasan: (A) Peran Budaya dan Sejarah

Buku ini membahas dua penjelasan kunci dalam hal budaya, sejarah dan politik yang menjadi dasar kecurigaan dan ambivalensi AS terhadap para Islamis. Misalnya saja, walaupun budaya tidak selalu merupakan faktor dominan yang diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan Islam AS, nilai-nilai budaya rakyat Amerika berperan penting dalam membentuk sebagian besar persepsi para pembuat kebijakan mengenai negara-negara Islam. Kebudayaan, seperti didefinisikan Clifford Geertz dan lainnya, adalah pola yang diturunkan sepanjang sejarah mengenai makna serta simbol-simbol dan juga sebuah kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, tata cara dan gaya hidup yang dianut bersama. Dengan ketergantungan dan kepekaan para pemimpin Amerika pada persetujuan publik melalui pengumpulan-pengumpulan pendapat umum (*polling*), nilai-nilai budaya masyarakatnya berpengaruh langsung pada banyak aktivitas negara ini di kancah internasional — termasuk kebijakan AS terhadap negara-negara Islam. Sebagian besar penentu kebijakan cenderung dipengaruhi budaya yang dominan.¹⁰

Walaupun ancaman militer dari dunia Islam bagi Barat sudah mereda pada akhir abad ke-17, tantangan religius dan intelektual dari Islam terus memenuhi imajinasi banyak orang di Barat. Persepsi budaya orang Amerika umumnya menganggap bangsa Arab atau Muslim berbahaya, tidak dapat dipercaya, tidak demokratis, barbar, dan primitif. Sejak awal 1980an, segala peristiwa di dunia Muslim merupakan berita traumatis di Amerika Serikat. Seorang editor *New York Times* menulis bahwa “berkat politik internasional saat ini, satu bentuk rasialisme etnis meraih tempat terhormat di AS: rasialisme terhadap orang Arab (Muslim).”¹¹

Tidak lama setelah revolusi Iran, sebuah pengumpulan pendapat dari orang-orang yang mewakili arus utama (*mainstream*)

Amerika menunjukkan bahwa pendapat pluralitas Amerika yang dijangking langsung seusai revolusi Iran melihat “Islam” sebagai budaya yang tidak bersahabat dan sinonim dengan gambaran perilaku revolusioner Republik Islam Iran. Menurut jajak pendapat ini, persepsi orang Amerika tentang orang Arab/Muslim/Iran (jajak pendapat ini mengasosiasikan erat antara Muslim dan Arab dengan Iran) adalah: mereka mengancam orang; dengan “seluruh” atau “sebagian besar” Muslim digambarkan sebagai orang “barbar” dan “kejam” (*cruel*) oleh 44 persen responden, “berbahaya dan licik” (*treacherous and cunning*) oleh 49 persen, dan 50 persen mengatakan “suka perang dan haus darah” (*warlike and blood-thirsty*).¹²

Beberapa jajak pendapat dan penelitian yang dilakukan sejak 1981 telah membuktikan bertahannya stereotip negatif yang dianut mayoritas orang Amerika tentang bangsa Arab/Muslim. Michael Suleiman yang telah banyak menulis tentang topik ini menyimpulkan: banyak orang Amerika cenderung melihat orang Arab/Muslim sebagai orang-orang yang sangat kaya dan imoral, atau sebagai kaum Badui yang selalu dikaitkan dengan padang pasir tempat mereka tinggal.¹³ Saat Perang Teluk tahun 1991, banyak orang Amerika yang memperlihatkan rasa permusuhan kepada orang Amerika keturunan Arab. Sikap ini juga ditunjukkan oleh orang-orang yang datang dari negara-negara sekutu AS yang menentang Irak.

Kriminalitas yang didasari kebencian terhadap orang Arab/Muslim mencapai puncaknya di masa itu, meningkat setelah digencarkannya Operasi *Desert Storm*.¹⁴ Kenyataan ini membuat Presiden Bush menyatakan penyesalan atas kekerasan yang didasari kebencian ini dan meminta seluruh negeri agar toleran dan menghargai keragaman.¹⁵ Lima jajak pendapat nasional yang dilakukan di tahun 1990an menyingkap fakta tentang pluralitas orang Amerika yang meyakini bahwa “kaum Muslim merupakan orang-orang yang cenderung fanatik”, dan Islam “pada dasarnya adalah agama antidemokrasi”.¹⁶

Sebuah jajak-pendapat yang dilakukan lembaga Gallup pada 1994 membandingkan pandangan-pandangan rakyat Amerika dengan pandangan para pemimpin Amerika, yaitu mereka yang berada di posisi-posisi senior dengan bobot internasional di bidang pemerintahan, bisnis, media, dan akademis. Jajak pendapat ini menunjukkan, dari sejumlah masyarakat Amerika yang disurvei, 36 persennya percaya bahwa “suatu ekspansi Islam fundamentalis yang mungkin terjadi” merupakan sebuah ancaman “gawat” bagi kepentingan AS. Sebaliknya, 52 persen “pemimpin” Amerika lebih yakin dibanding masyarakat umum AS bahwa ekspansi Islam fundamentalis merupakan sebuah ancaman penting. Malahan, elit pengambil kebijakan luar negeri ini menempatkan ancaman Islam di posisi ke tiga dari delapan kemungkinan ancaman gawat yang disebutkan dalam survei itu.¹⁷

Dengan kata lain, Islam dilihat oleh banyak orang Amerika sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai budaya mereka. Pandangan rakyat Amerika terhadap umat Muslim ini mungkin saja berakar dari sejarah religius negeri ini, dan bisa ditelusuri sampai ke konflik historis antara umat Kristen dan Islam — sebuah pertikaian yang diturunkan dan dipopulerkan dari generasi ke generasi melalui sejarah, sastra, cerita rakyat, media, dan wacana akademis.¹⁸

Memang benar Amerika Serikat tidak menerapkan kontrol penjajahan langsung pada masyarakat Arab/Muslim, juga tidak membangun struktur penguasaan seperti rekan-rekan Eropanya. Toh, seperti diperlihatkan Robert Allison dalam *The Crescent Obscured*, orang-orang Amerika mewarisi dari bangsa Eropa yang beragama Kristen sebuah gambaran tentang Islam sebagai agama yang lahir dari tirani, sebuah agama yang menganggap sah tekanan politik dan kemandekan ekonomi. Menurut tesis Allison ini, orang-orang Amerika tidak peduli apakah gambaran tentang Islam ini tepat atau tidak, tapi mereka tetap mempercayainya tanpa sikap kritis dan demi kepentingan politiknya. Menurut Allison, dari waktu ke waktu orang Amerika sering menggunakan dunia

Islam sebagai rujukan untuk membuat keistimewaan diri mereka lebih menonjol, yaitu kemerdekaan, kekuatan, dan kemajuan peradabannya.¹⁹

Dalam bukunya yang kritis itu, Allison menyingkapkan latar belakang budaya dan historis bagaimana bangsa Amerika memandang Islam dan kaum Muslim. Ia juga memperlihatkan bahwa orang Amerika dengan mudahnya kembali memegang pandangan tersebut, khususnya selama masa krisis. Hasilnya, orang Amerika mempunyai persediaan stereotip negatif yang tak habis-habis tentang dunia Muslim yang dilestarikan dan diperkukuh oleh media massa. Stereotip-stereotip ini berperan penting dalam pembuatan kebijakan AS terhadap negara-negara Arab dan Islam.²⁰

Di tengah-tengah timbunan kesan dan gagasan Amerika tentang Islam ini terdapat bukan saja ketakutan dan keterkejutan, tapi juga kesalahpahaman mendalam mengenai penggabungan agama dan politik. Campuran keduanya ini tampaknya menggoyang aspek-aspek fundamental tradisi liberal Amerika, yaitu pemisahan gereja dan negara serta kecilnya peran yang dimainkan agama dalam pembentukan identitas sebuah masyarakat sekular. Pemisahan ini tidak berarti Amerika bukan negara beragama. Tidak seperti di negara-negara industri lainnya, agama memainkan peran penting dalam budaya Amerika. Tapi elit penguasa AS yang sekular, serta rekan-rekan Baratnya, menganut pasca-Pencerahan/Renaissans, sebuah pemahaman moderen akan agama sebagai sistem kepercayaan yang personal dan bukan sebagai cara hidup total. Mereka melihat fenomena Islamis yang ingin memapankan kembali bentuk aturan tradisional yang mencakup semua bidang ini sebagai hal yang abnormal karena meninggalkan norma moderen yang sudah diterima. Maka jadilah Islam itu “sukar dipahami, ekstrem, dan mengancam”.²¹

Graham E. Fuller, mantan wakil kepala Dewan Intelijen Nasional CIA, mengatakan, “Sebagai sebuah negara, kita tidak punya bekal budaya yang cukup untuk mengerti semangat dari kebijakan religius.” Ini mirip dengan apa yang diamati Gary Sick, seo-

rang anggota staf Dewan Keamanan PBB untuk Iran, dalam analisisnya tentang krisis AS-Iran di akhir 1970an dan awal 1980an. Ia melihat, bias budaya para pejabat Amerika yang sangat besar telah secara fundamental mengganggu pemetaan kekuatan politik di Iran, membuat mereka meremehkan kekuatan dan kekuasaan para mullah.²²

Ketakutan akan bangkitnya Islamisme juga berakar pada pengaitan yang keliru dalam pikiran orang Amerika antara perilaku dan bentuk pemerintahan negara-negara Islam, suatu kecenderungan untuk mengasumsikan motif-motif berdasarkan kekelompokan. Kecenderungan AS untuk mencampuraduk bentuk pemerintahan dengan perilaku pemerintahan itu menimbulkan kesalahpahaman yang berulang-ulang, dan seringkali berlebih-lebihan, akan bahaya yang sebenarnya dihadapi negara ini.²³ Menurut pandangan ini, karena kaum Islamis kelihatannya anti-demokrasi maka kita tidak punya kesamaan tujuan dengan mereka. Diasumsikan juga bahwa pemerintah Islam bisa mengancam perimbangan kekuatan antar negara, dan di dalam negeri mereka bersikap represif. Dalam pandangan ini terkandung dua hipotesis: (1) Islam tidak sejalan dengan demokrasi, dan (2) para Islamis terlahir sebagai “perebut-kembali kekuasaan” (*irredentist*). Kalaupun dua pernyataan ini benar, dan ini masih bisa diperdebatkan, tidak berarti bahwa bentuk kekuasaan menentukan perilaku; tidak berarti sebuah pemerintahan Islam dengan sendirinya mengabaikan realitas politik dan bertindak secara ideologis.²⁴

(B) Peran Politik dan Hankam

Kalau kita mencoba menjelaskan sikap AS terhadap kebangkitan Islam hanya dengan melihat faktor budaya dan sejarah, kita bisa tersesat. Masalah politik dan pertahanan-keamanan sekarang ini merupakan hal penting, mungkin lebih penting ketimbang kedua faktor tadi, karena berdampak langsung pada persepsi para pemimpin AS tentang kepentingan utama mereka. Ini termasuk perhitungan strategis Amerika dalam peta Arab-Israel, rawannya

akses terhadap minyak Teluk Persia, rentannya pertahanan rezim-rezim Timur Tengah pro-Amerika dari serangan kaum Islamis, jatuhnya komunisme Soviet, masa jeda terorisme, dan kemungkinan makin berkembangnya senjata nuklir.

Karena sejak lama elit pembuat kebijakan AS waspada akan potensi radikal terjadinya segala bentuk revolusi berikut tantangan terhadap prinsip-prinsip ketertiban dan hak negara, mereka selalu menunjukkan kebencian pada revolusi-revolusi yang menyimpang dari norma-norma konstitusional, liberal, dan kapitalis Amerika. Tujuan kebijakan luar negeri Amerika selalu terkait erat dengan pencapaian stabilitas, yang sebagian dipahami sebagai suatu proses perubahan yang teratur.²⁵ Di sinilah ditemukan alasan bagi benturan Amerika dengan nasionalisme revolusioner selama masa Perang Dingin dan kini dengan pengganti dan ahliwarisnya: Islam revolusioner.

Para pengambil keputusan AS terutama takut pada dampak-dampak kebijakan luar negeri Islam revolusioner, bila kekuatan ini bangkit. Yang paling ditakuti elit kebijakan luar negeri Amerika adalah efek-efek pengguncangan oleh militan Islam terhadap stabilitas dan keamanan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia serta terhadap proses perdamaian Arab-Israel, dua tiang utama dalam kebijakan luar negeri AS di kawasan ini.²⁶ Di mata AS, dua tiang diplomasi tradisional Amerika ini terancam lebih besar oleh perlawanan Islam internal dibanding oleh kekuatan-kekuatan luar. Hal yang jadi rujukan pejabat-pejabat AS adalah revolusi Islam tahun 1979 di Iran, yang mencoba mengeksplor radikalisme politik ke negara-negara Islam tetangganya. Pengalaman Iran ini telah berpengaruh pada cara berpikir Washington terhadap Islam revolusioner dan populis, yang dilihat kejam, anti-demokrasi, dan anti-Amerika.²⁷

Selanjutnya, dalam benak banyak orang Amerika, ancaman “Islam ekstremis” makin berganda dengan adanya terorisme internasional maupun domestik dan “hantu” bom nuklir Islam, khususnya bom Iran. Seperti dikatakan Presiden Reagan: “Saya kira

kita tidak berlebihan dalam melihat betapa pentingnya dampak kebangkitan fundamentalis Islam terhadap dunia di abad mendatang — apalagi jika, dan ini mungkin terjadi, elemen-elemennya yang paling fanatik berhasil memiliki senjata nuklir dan kimia berikut alat untuk mengirimkannya ke lawan-lawan mereka.”²⁸

Pensinoniman Islam dengan “terorisme” telah sangat mencoreng wajah Muslim di Amerika Serikat, sehingga menghalangi para pembuat kebijakan AS dalam mencapai suatu kebijakan akomodasionis terhadap para Islamis. Beberapa jajak pendapat yang dilakukan di tahun 1990an menunjukkan dengan jelas bahwa pandangan orang Amerika terhadap Islam dan Muslim dipengaruhi secara dramatis oleh judul-judul berita terbaru, khususnya yang terkait dengan kecurigaan akan terorisme. Sebagai contoh, sebuah jajak pendapat yang kebetulan dilakukan tepat pada hari terjadinya pengeboman di Oklahoma tahun 1995 memperlihatkan kenaikan tajam dalam sikap-sikap negatif terhadap Muslim. Setelah akhirnya jelas bahwa pengeboman itu tidak ada kaitannya dengan terorisme Islamis, beberapa jajak pendapat berikutnya menunjukkan penurunan yang stabil dan signifikan secara statistik dalam hal sikap-sikap “bersahabat” terhadap Muslim dalam beberapa isu penting.²⁹

Sikap mendua serta ketakutan Washington juga bisa dijelaskan dari adanya perubahan sifat ancaman global terhadap kepentingan Amerika di masa pasca Perang Dingin. Cara pandang barisan kebijakan luar negeri ini terhadap Islam politik disebabkan berubahnya sikap orang-orang Amerika terhadap bekas Uni Soviet. Akhir 1980an menjadi saksi, bukan saja atas keruntuhan politik Uni Soviet, tapi juga atas menguatnya aktivisme Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Makin berkurangnya ancaman Soviet mendorong para pemimpin Amerika untuk mengukur kembali bahaya-bahaya baru yang mengancam kepentingan AS serta sekutu-sekutunya. Dengan kecenderungan Amerika yang ingin jadi pahlawan dalam perang suci — persaingan AS-Soviet dipandang sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan —

maka ada godaan untuk mencari ancaman ideologis global lain sebagai pengisi “kevakuman ancaman” yang timbul karena runtuhnya Komunisme.³⁰

Di antara semua musuh potensial, gagasan tentang bangkitnya Islam yang terpadu, yang tak lekang oleh jaman dan monolitik, makin populer di Barat.³¹ Seperti dikatakan seorang koresponden *New York Times*, “Sebuah ancaman sedang menggema di benak masyarakat: jihad Islam.”³² Ahli-ahli strategi Amerika telah menyatakan bahwa “negara-negara jahat” seperti Irak, Iran, Sudan, dan berbagai kelompok Islamis, adalah pembawa ancaman besar bagi stabilitas regional. Dalam pandangan AS, negara-negara “pembangkang”, “pelanggar hukum”, dan “jahat” ini mendanai terorisme dan arus perdagangan senjata penghancur skala besar. Negara-negara ini juga dianggap memakai dan menyalahgunakan wacana ideologi Islam dengan memberikan bantuan moral dan material kepada “Muslim-muslim ekstremis” yang punya kecenderungan menyabot proses perdamaian di Timur Tengah serta mengacaukan stabilitas politik negara-negara Arab pro-Barat.³³

Contohnya, dalam laporannya pada 19 Maret 1990, Satuan Tugas DPR AS (*House of Representatives*) yang menangani masalah terorisme dan perang luar biasa (*Unconventional Warfare*) memperingatkan bahwa “masjid” berada di garis depan dalam jihad kaum militan-radikal melawan dunia kontemporer Barat: “Gabungan dari kebangkitan gerakan Islam radikal dan pentingnya minyak bagi ekonomi Barat menjadikan perjuangan untuk Timur Dekat suatu konfrontasi genting antara pejuang kebangkitan Islam dengan dunia Yahudi-Kristen.”³⁴ “Mitos” konfrontasi ini secara paradoks makin diperkuat dengan suatu kombinasi ganjil dari kubu-kubu politik yang berlawanan: rezim-rezim Timur Tengah, yang berada di bawah ancaman oposisi Islam garis-keras; para kritikus di Barat, yang ingin menjadikan dunia Muslim sebagai lawan baru; dan beberapa militan Islam, yang tidak menyukai pengaruh Barat yang kian besar dan mendukung konfrontasi.³⁵

Kelompok-kelompok penting di Amerika Serikat menyeja-

jarkan ancaman Komunisme Soviet dan ancaman Islam politik, dan mereka meminta para pejabat AS untuk “membendung” (*contain*) dan bukannya “melunakkan” (*appease*) sang musuh baru. Tapi saran-saran kebijakan “pembendungan” yang bersifat “mendahului” (*preemptive*) ini bukan satu-satunya topik debat publik di Amerika. Sekelompok intelektual — kecil tapi penting — mempertanyakan ketepatan dan penerapan wacana dominan tentang Islam politik di AS.³⁶ Orang-orang dari kelompok ini tidak melihat aktivitas Islam sebagai ancaman absolut tapi lebih sebagai tantangan berupa fenomena yang ambigu, beragam, dan terpecah-pecah. Lebih jauh lagi, beberapa pengamat Amerika melihat para Islamis baru ini bahkan mungkin sedang memainkan peran politik yang konstruktif dalam mereformasi dan meliberalkan masyarakat mereka, sama seperti yang dilakukan para reformis Protestan di Eropa lima ratus tahun silam.³⁷

Pandangan akomodasionis terhadap Islam politik ini penting ditekankan untuk menunjukkan keragaman dan ambivalensi di lingkungan intelektual Amerika Serikat. Suara-suara akomodasionis seperti ini sama banyak dan lantanginya seperti suara-suara kubu konfrontasionis. Penjelasan-penjelasan yang berakar pada penyederhanaan dan determinisme budaya gagal menangkap kompleksitas dan cairnya arus intelektual Amerika ini. Meski antipati budaya yang cukup besar mewarnai pandangan publik Amerika tentang Islam, namun di lingkungan cendekiawan yang terjadi tidaklah demikian.³⁸

Kini, rezim-rezim Timur Tengah yang pro-Barat berada dalam kondisi krisis. Mereka telah gagal membangun institusi-institusi konstitusional yang sah dan stabil serta gagal melayani rakyat mereka sendiri. Sebagai akibat dari ketidakpuasan di dalam negeri, rezim-rezim ini makin rentan terhadap gelombang ideologis yang ada di negerinya. Salah satu yang terkuat adalah yang menggunakan simbol-simbol Islam untuk mendiskreditkan dan mengganti elit penguasa yang sekular dengan syariat Islam. Untuk meningkatkan basis kekuatan mereka dan melumpuhkan lawan, pe-

merintah-pemerintah Timur Tengah yang sedang tertekan menawarkan berbagai perbaikan ekonomi dan politik. Tapi, seperti banyak tindakan politis lainnya, liberalisasi menghasilkan akibat-akibat berlawanan: Islamis selama ini terbukti efektif serta pandai dalam memobilisasi massa dan sangat lihai dalam menjalankan permainan pemilu. Mereka berhasil meraih kemenangan-kemenangan politis yang mencengangkan di seluruh kawasan Timur Tengah Arab dan Afrika Utara, dan hal ini menyibakkan kelemahan dan ketidakpopuleran pemerintah-pemerintah yang sedang berkuasa.

Untuk membenarkan usaha penumpasan mereka terhadap kelompok-kelompok Islamis, rezim-rezim yang didukung AS ini, bersama dengan Israel, menyatakan bahwa Islamis tidak dapat dipercaya karena sekali mereka berkuasa, mereka akan membuang sistem *checks and balances* konstitusi dan menegakkan negara agama (teokrasi) yang totaliter. Pemerintah-pemerintah pro-Barat ini juga memperingatkan AS akan watak transhistoris dari ancaman Islamis ini bagi stabilitas kawasan, juga bagi kepentingan-kepentingan Barat.³⁹

Orang tidak akan dapat mengerti kebijakan Amerika terhadap Islam politik tanpa mempertimbangkan situasi di Israel, Turki, Mesir, dan Arab Saudi — empat sekutu regional penting Amerika. Selama kaum Islamis terus melawan proses perdamaian Arab-Israel dan menyerang rezim-rezim pro-Barat, kepentingan global AS akan selalu terkait. Tapi, makin erat Amerika mengidentifikasi kepentingannya dengan kepentingan sekutu-sekutunya, makin terlibatlah ia dalam pertikaian berdarah dengan aktivis-aktivis Islam, karena untuk saat ini mereka tetap berpotensi untuk menjadi kekuatan oposisi paling efektif di kawasan ini.

Paradoksnya, sebagian Islamis tampak membenarkan pandangan-pandangan Barat dengan menyetujui bahwa mereka memang akan menggantikan Komunisme sebagai tantangan besar bagi Barat, dan mereka bahkan lebih efektif karena penantangan mereka mendapat inspirasi dari Tuhan.⁴⁰ Sebagian pandangan

Islamis menganggap Barat sebagai peradaban yang menjajah, padu, dan tidak bersahabat. Aktivis-aktivis ini menyulut elemen-elemen di Amerika dan di dunia Muslim yang menyatakan perang terhadap kebangkitan kembali Islam. Tampaknya ideologi-ideologi dalam kubu Islamis adalah musuh terbesar mereka sendiri. Dengan risiko dianggap berlebihan, kalimat Regis Debray bisa ditulis ulang menjadi: "Islam telah mengislamisasi anti-Islam."⁴¹

Seperti bisa dilihat, pemikiran pejabat Amerika terbentuk dalam konteks polarisasi internal dan eksternal. Para pembuat kebijakan Amerika, yang harus berhadapan dengan bentuk-bentuk advokasi yang mengejutkan seperti ini, cenderung skeptis dan ambivalen terhadap fenomena Islamis ini. Tapi ada hal yang mengimbangi: pernyataan-pernyataan pejabat AS tentang Islam politik penuh nuansa, menjauh dari sikap tak bersahabat dan dari penyederhanaan yang berlebihan. Pejabat-pejabat Amerika menyadari keragaman dalam berbagai gerakan Islamis, dan tidak melihat adanya peran internasional yang terorganisasi atau monolitik di balik aktivitas politik mereka. Selain sedikit perkecualian, elit kebijakan luar negeri AS tampaknya tidak sejalan dengan klaim bahwa Islam merupakan ancaman bagi Barat. Walaupun muncul spekulasi yang meluas tentang suatu pertempuran baru antar peradaban seperti dikemukakan oleh beberapa pembentuk opini di media dan kalangan akademis, pandangan ini tidak mendapat dukungan secara resmi di Washington. Pernyataan dan sikap para pemimpin AS diwarnai oleh sejumlah pandangan realisme-skeptisisme yang cukup mencerahkan.

Secara keseluruhan, jelas terlihat bahwa masalah-masalah politik dan hankam mutakhirilah — melebihi isu-isu budaya, propaganda, dan sejarah — yang merupakan alasan kecemasan Amerika terhadap Islamisme. Hal ini menjadi penting, karena kita melihat kecenderungan kedua kubu — Muslim dan Barat — untuk menggambarkan hubungan mereka yang rumit sebagai sebuah pertempuran budaya dan peradaban. Perkawinan antara konsep-konsep historis Barat tentang Islam dengan letupan masalah-

masalah mutakhir telah menjadikan aktivisme Islam kabar buruk bagi seluruh dunia Barat.

Pembagian Bab dalam Buku Ini

Buku ini terdiri dari sembilan bagian utama dan sebuah kesimpulan. Bab 1 memperkenalkan pembaca pada kekuatan-kekuatan yang berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika. Bab 2 dan 3 memusatkan perhatian pada konteks domestik dalam pembuatan kebijakan AS serta hubungan-hubungan erat antara gagasan dan arah-arrah kebijakan. Bab 2 membahas dan mengukur debat-debat mengenai Islam politik di lembaga-lembaga intelektual AS yang relevan. Merespon Islam politik, para pembentuk opini dan akademisi Amerika cenderung membagi isu-isu secara hitam-putih, tersebar di antara kubu konfrontasionis dan akomodasionis. Bab 3 mengamati bagaimana publik AS mempersepsi dan menghubungkan diri mereka dengan Islam dan Muslim. Bab ini juga menganalisis perkembangan penting sejarah, budaya, dan politik mutakhir yang membentuk sikap-sikap Amerika terhadap Islam politik. Salah satu argumen menyatakan bahwa pandangan-pandangan yang dipegang erat oleh Kongres dan masyarakat membatasi ruang gerak pejabat-pejabat Amerika dalam mencapai suatu kebijakan akomodasionis bagi kaum Islamis.

Bab 4 dan 5 menganalisis pidato-pidato dan pendirian-pendirian para pejabat dalam pemerintahan Carter, Reagan, Bush, dan Clinton terhadap Islam politik. Kedua bab ini membandingkan posisi setiap pemerintahan untuk memahami evolusi kebijakan Amerika Serikat. Baik Carter maupun Reagan, keduanya gagal memecahkan masalah-masalah politik Islam ini. Meski revolusi Islam di Iran telah membuat Carter dan Reagan waspada akan kekuatan dan tekanan dari Islam populis, respon mereka tetap saja sebatas anekdot dan tidak menyeluruh. Kepemimpinan Bush mengungkapkan pernyataan kebijakan lengkap yang pertama terhadap kebangkitan Islam dalam pidato *Meridian House*-nya (Juni

1997), yang menggariskan konteks intelektual yang selanjutnya menjadi landasan Presiden Clinton dalam mengangkat masalah Islamis tersebut.

Untuk membandingkan dan mengkontraskan pandangan-pandangan resmi AS dengan kebijakan-kebijakan nyata, bab 6 sampai 9 membicarakan kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran, Aljazair, Mesir, dan Turki, secara berurutan. Keempat studi kasus ini merepresentasikan lingkup luas para Islamis yang saat ini berkuasa atau sedang berusaha meraih kekuasaan. Politik Islam di keempat negara ini berkisar dari Islam populis sampai partai-partai politik berorientasi Islam yang bersedia mengikuti aturan main dalam proses pemilu. Dengan memakai pendekatan komparatif, buku ini mengedepankan persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan dalam kebijakan Amerika terhadap lingkup aktivisme Islam, termasuk sisi-sisi *mainstream* maupun revolusionernya. Gabungan analisis historis dan studi-studi kasus yang berkaitan dengan kebijakan ini akan membantu pemahaman yang lebih baik tentang teori dan praktik kebijakan luar negeri AS secara umum.

Bab 10, yang merupakan bab kesimpulan, merangkum temuan-temuan penting. Bab ini juga menyampaikan pelajaran-pelajaran yang didapat serta saran-saran mengenai dampak kebijakan AS dalam hubungan Islam dan Barat, karakter serta struktur pemerintahan dalam masyarakat Muslim, serta prospek demokrasi di dalamnya.❖❖

Catatan

1. Kajian ini menggunakan sejumlah istilah — Islam politik (*political Islam*), kaum Islamis (*Islamists*), kebangkitan/revivalisme Islam (*Islamic revivalism*), Islamisme (*Islamism*), dan aktivisme Islam (*Islamic activism*) — untuk menunjuk gejala kontemporer Islamis. Para aktivis Islam meyakini bahwa Islam memiliki teori politik dan negara dan mengandung ajaran tentang aktivisme politik dan sosial. Pelbagai istilah selalu digunakan secara bergantian di sepanjang buku ini. Istilah “fundamentalisme Islam” (*Islamic fundamental-*

ism”), yang sering dipakai oleh media, publik, dan sebagian akademisi, gagal menangkap kompleksitas dan sifat eklektik dari kebangkitan Islam. Lihat Nazih N. Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London: Routledge, 1991), terutama bab 1, untuk penjelasan konseptual dan pendefinisian yang amat baik tentang Islam politik kontemporer.

2. William B. Quandt, *Camp David: Peacemaking and Politics* (Washington, DC.: The Brookings Institution, 1986), h. 6-29.
3. Michael H. Hunt, *Ideology and U.S. Foreign Policy* (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), h. 15-16.
4. Dikutip oleh Fred Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East* (London: I. B. Tauris, 1995), h. 110.
5. Glenn H. Hastedt, ed., *American Foreign Policy: Past, Present, Future* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1997), h. 28-34; Hunt, *Ideology and U.S. Foreign Policy*, h. 1-18.
6. Louis Hartz, *The Liberal Tradition in America* (New York: Harcourt Brace & World, 1955); Kenneth M. Dolbeare dan Patricia Dolbeare, *American Ideologies* (Chicago: Markham, 1971); Dexter Perkins, *The American Approach to Foreign Policy* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962), h. 72-97; John Spanier dan Steven W. Hook, *American Foreign Policy Since World War II* (Washington, DC.: Congressional Quarterly, 13th ed., 1995), h. 15-18; Hunt, *Ideology and U.S. Foreign Policy*, h. 19-45.
7. Seyom Brown, *The Faces of Power: United States Foreign Policy from Truman to Clinton* (New York: Columbia University Press, 1994), h. 7; John Spanier dan Steven W. Hook, *American Foreign Policy Since World War II*, h. xii; Ronald Steel, *Temptations of a Superpower* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), h. 18-19.
8. Dikutip oleh Tony Smith, *America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the 20th Century* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), h. 348.
9. John Lewis Gaddis, *The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations* (New York: Oxford University Press, 1992), h. 9-11; Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkoff, *American Foreign Policy: Pattern and Process* (London: Macmillan Education, 1987), h. 259; Robert J. Art, “America's Foreign Policy,” dalam Roy C. Macridis, ed., *Foreign Policy in World Politics* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985), h. 122-3.
10. Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books,

- 1973), h. 89; Richard J. Payne, *The Clash with Distant Cultures: Values, Interests, and Force in American Foreign Policy* (New York: State University of New York Press, 1995), h. xiv, xvi, xvii, 5-9; William A. Haviland, *Cultural Anthropology* (Forth Worth, TX: Holt, Rinehart & Winston, 1990), h. 38.
11. "It's Racist, But Hey, It's Disney," *New York Times*, 14 Juli 1993; Michael W. Suleiman, *The Arabs in the Mind of America* (Brattleboro, VT.: Amana Books, 1988), h. 147; Payne, *The Clash with Distant Cultures*, h. 96-7.
12. Shelley Slade, "The Image of the Arab in America: Analysis of a Poll on American Attitudes," *Middle East Journal* 35, no. 2 (Spring 1981), h. 144-5, 147, 157.
13. Suleiman, *The Arabs in the Mind of America*, h. 147.
14. 1990 ADC Annual Report on Political and Hate Violence (Washington, DC: American-Arab Anti-Discrimination Committee, Februari 1991), dan "Hate Crimes Chronology, Update," 6 Februari 1991, dalam ADC report; Nabeel Abraham, "The Gulf Crisis and Anti-Arab Racism in America," dalam Cynthia Peters; ed., *Collateral Damage: The 'New World Order' at Home and Abroad* (Boston, MA: South End Press, 1992), h. 255-72.
15. Abraham, "The Gulf Crisis and Anti-Arab Racism in America," h. 268-9; CBS Poll, 9 Januari 1991. "U.S. Views Threat by Iraq as Strategy to Split Critics," *New York Times*, 25 September 1990.
16. Kelima poll ini meliputi survei Roper pada Juli 1993; survei *Los Angeles Times* 1993; survei gabungan oleh Dewan Muslim Amerika dan Zogby Group pada 1993; poll Gallup Oktober 1994; dan survei Institut Arab Amerika 1995. Lihat David Pollock dan Elaine El Assal, ed., *In the Eye of the Beholder: Muslim and Non-Muslim Views of Islam, Islamic Politics, and Each Other* (Washington: Office of Research and Media Reaction, United States Information Agency, Agustus 1995), h. 52-3; "Muslims Don't Fare Well in Poll," *The Pantagraph*, 13 Mei 1993.
17. Pollock dan El Assal, ed., *In the Eye of the Beholder*, h. 53-4.
18. Robert J. Allison, *The Crescent Obscured: The United States and the Muslim World, 1776-1815* (New York: Oxford University Press, 1995); Fuad Sha'ban, *Islam and Arabs in Early American Thought: The Roots of Orientalism in America* (Durham, North Carolina: The Acorn Press, 1991); Maxime Rodinson, *Europe and the Mystique of Islam*, terj. Roger Veinus (London: I. B. Tauris, 1987), h. 72-3.
19. Allison, *The Crescent Obscured*, h. 3 5-59; Michael W. Suleiman,

- “Palestine and the Palestinians in the Mind of America,” dalam Suleiman, ed., *U.S. Policy on Palestine: From Wilson to Clinton* (Normal, IL: Association of Arab American University Graduates, 1995), h. 9-14.
20. Allison, h. 3-225; Michael W. Suleiman, “The Effects of American Perceptions of Arabs on Middle East Issues,” dalam Edmund Ghareeb, ed., *Split Vision: The Portrayal of Arabs in the American Media* (Washington, DC: American-Arab Affairs Council, 1983), h. 338; Payne, *The Clash with Distant Cultures*, h. 139.
 21. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York: Oxford University Press, 1992), h. 198-201; Payne, *The Clash with Distant Cultures*, h. 26-31.
 22. Fuller, “The Appeal of Iran,” *The National Interest* (Fall 1994), h. 92; Sick, *All Fall Down: America’s Fateful Encounter with Iran* (London: I. B. Tauris, 1985), h. 164-8, 219-20.
 23. Gaddis, *The United States and the End of the Cold War*, h. 11-4.
 24. Sejarahawan John Gaddis secara meyakinkan menegaskan bahwa suatu perimbangan kekuasaan (*balance of power*) tidak bergantung pada homogenitas ideologis negara-negara yang membentuknya. Negara-negara atau gerakan-gerakan politik yang menganut bentuk-bentuk pemerintahan yang sangat berbeda dapat dan sering berbagi kepentingan yang sama, sebagaimana Amerika Serikat pernah menjalin hubungan dengan bekas Uni Soviet maupun Cina. Ibid., h.15.
 25. Stanley Hoffmann, *Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War* (Cambridge: Ballinger, 1983), h. 11-12, 275; William B. Quandt, *Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1967-1976* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1977), h. 16; Spanier dan Hook, *American Foreign Policy Since World War II*, h. 11-12; Hunt, *Ideology and U.S. Foreign Policy*, h. 92-124, 171-5.
 26. Edward H. Djerejian, “War and Peace: The Problems and Prospects of American Diplomacy in the Middle East,” pidato di depan Los Angeles World Affairs Council, 30 November 1993, *U.S. Department of State Dispatch*, 20 Desember 1993, h. 874.
 27. Wawancara dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
 28. Ronald Reagan, *An American Life: The Autobiography* (New York: Pocket Books, 1990), h. 409.
 29. Hal baru yang sangat menarik ini adalah salah satu temuan dalam kelima *poll* yang disebut di atas. Lihat Pollock dan El Assal, ed., *In*

the Eye of the Beholder, h. 52.

30. Spanier dan Hook, *American Foreign Policy Since World War II*, h. 16; Leon Hadar, "The Media and Islam," dalam Richard W. Bulliet, ed., *Under Siege: Islam and Democracy*, Occasional Papers 1 (New York: The Middle East Institute of Columbia University, 1994), h. 64, 66; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 4.
31. Para pejabat AS dengan jelas mengakui bahwa Amerika Serikat sedang menghadapi seperangkat potensi risiko baru. Ini meliputi transisi ekonomi yang bergolak, perkembangbiakan persenjataan penghancur massal, peningkatan konflik etnis, dan sejumlah besar masalah lintas-negara, seperti kepadatan penduduk, narkoba, pengungsi, terorisme, dan ancaman "Islam ekstremis." Lihat Bill Clinton, "A Strategy for Foreign Policy," pidato di Foreign Policy Association, New York, April 1992, dalam *Vital Speeches* 58, no. 14, Mei 1992, h. 422-5; Warren Christopher, "America's Leadership, America's Opportunity," *Foreign Policy*, no. 98 (Spring 1995), h. 8, 20-2, 25-7; Anthony Lake, "From Containment to Enlargement: Current Foreign Policy Debates in Perspectives," pidato di John Hopkins University, School of Advanced International Studies, Washington, DC, September 1993, h. 15, 17-18.
32. Elaine Sciolino, "The Red Menace Is Gone. But Here's Islam," *New York Times*, Minggu, 21 Januari 1996, seksi *Week in Review*.
33. Anthony Lake, "Building a New Middle East: Challenges for US Policy," pidato Penasihat Keamanan Nasional di Washington Institute for Near East Policy, Washington, DC, 17 Mei 1994, dalam *U.S. Department of State Dispatch*, Agustus 1994, h. 36-9; Robert H. Pelletreau dalam "Symposium: Resurgent Islam in the Middle East," transkrip dalam *Middle East Policy* 3, no. 2. (1994), h. 1-5, 16-7.
34. "The Times of the Crusades Are Back," dalam *The House Republican Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare*, Washington, DC, (Juli 1989-Mei 1991), h. 1-2, 11.
35. Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation*, h. 2, 6.
36. Rashid al-Ghannoushi, pemimpin Partai Kebangkitan Tunisia di pengasingan, mengakui bahwa upaya sejumlah cendekiawan Barat dan sektor media tertentu, yang telah memberi sumbangan besar dalam menjembatani jurang ideologis antara dunia Islam dan Barat Kristen, menunjukkan pembalikan ke orientalisme dan egosentrisme lama. Lihat Ghannoushi, "Islamic Civilization Need Not Clash with Western Civilization," dalam *Islam: Opposing Viewpoints* (USA: Greenhaven Press, 1995), h. 51.
37. Leon Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," dalam *ibid.*,

- h. 203; David Ignatius, "Islam in the West's Sights: The Wrong Crusade?" *Washington Post*, 8 Maret 1992; Robin Wright, "Islam, Democracy and the West," *Foreign Affairs* (Summer 1992), h. 131,133.
38. Edward Said, seorang kritikus yang tajam atas wacana Barat tentang Islam, menegaskan bahwa "ada konsensus tentang 'Islam' sebagai sejenis kambing hitam bagi apa saja yang tidak kita sukai menyangkut pola ekonomi, sosial dan politik. Bagi kalangan kanan, Islam mencerminkan barbarisme; bagi sayap kiri, teokrasi abad pertengahan; bagi kalangan tengah, sebetuk eksotisme yang menjijikkan." Lihat Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York: Pantheon Books, 1981), h. x, xv. Meski Islam masih dipandang negatif di Amerika Serikat sekarang, panggung intelektual dan politik jauh lebih beragam daripada di tahun 1980an, ketika Said menulis kritiknya.
39. Sebagai contoh, Presiden Mesir Hosni Mubarak mengecam pemerintah AS karena menjalin kontak dengan "kaum teroris dari Ikhwanul Muslimin," memperingatkan para pejabat Amerika bahwa kelompok-kelompok ini "tak akan setuju dengan Amerika Serikat." Lihat Mary Anne Weaver, "The Battle for Cairo," *The New Yorker*, 30 Januari 1995, h. 69. Demikian pula, Presiden Tunisia Zeine Abedin Ben Ali memperingatkan Barat bahwa tujuan akhir kaum Islamis adalah "membangun negara teokratis dan totalitarian," seperti dikutip dalam *Le Figaro*, 2 Agustus 1994. Duta Besar Aljazair di Washington menggemakan sentimen ini dalam *Washington Post* 1 April 1995: "Adalah kebijakan yang keliru untuk membedakan antara kaum fundamentalis moderat dan ekstrem. Tujuan mereka semua sama belaka: membangun negara Islam murni, yang akan menjadi sebuah teokrasi dan totalitarian."
40. Pesan Khomeini kepada Gorbachev, *BBC Summary of World Broadcasts*, ME/03 54/A/4-6, 10 Januari 1989; Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation*, h. 111, 163.
41. Halliday, h. 193. Pernyataan ini tidak berarti menjustifikasi atau merasionalisasi sentimen anti-Muslim, tapi untuk menunjukkan perpaduan yang ganjil antara stereotip-stereotip penganjur maupun penentang aktivisme Islam.

Konteks Intelektual Kebijakan Luar Negeri AS



SEPERTI seringkali terjadi, debat kebijakan yang vital terjadi di sekitar proses pembuatan kebijakan, di dalam lingkungan akademis dan intelektual. Walaupun beberapa pembuat opini dan para akademisi, dengan kesetiaan pada berbagai lembaga dan pemberi dana, terikat dengan posisi mereka dalam hirarki institusional, mereka tidak begitu saja melepas kebebasan untuk menyesuaikan pikiran mereka sendiri. Para akademisi dan komentator lebih bebas daripada para penentu kebijakan sehingga terdapat ruang luas bagi pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi, untuk bisa menangkap dan mengapresiasi dinamika serta dialektika yang rumit mengenai kebijakan AS, kita perlu menempatkannya di lahan akademis dan intelektual yang mendasarinya berikut ini.

Bab ini membicarakan pandangan-pandangan berbeda para pembentuk opini serta akademisi terhadap Islam politik. Tidak ada topik lain yang bisa menandingi tajamnya perbedaan kubu yang terjadi di panggung intelektual AS tentang isu ini. Kebanyakan dari para pembentuk opini menganut garis konfrontasionalis atau akomodasionis.¹ Bab ini bermaksud menyoroti pernyataan-pernyataan kedua kubu dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan mereka yang berlawanan, mengingat tujuan dari keduanya adalah mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika. Pan-

dangan-pandangan para konfrontasionalis dan akomodasionis ini terwakili cukup merata di kalangan elit penyusun kebijakan luar negeri AS. Dengan membandingkan dan mengkontraskan berbagai posisi kedua kubu, kita berharap bisa lebih terang melihat bagaimana beban politik dalam negeri mempengaruhi perumusan kebijakan dan landasan intelektualnya.

Ada dua tema yang menjauhkan kubu akomodasionis dan konfrontasionalis. Pertama adalah optimisme lawan skeptisisme menyangkut prospek demokrasi dalam masyarakat-masyarakat Muslim, dan juga menyangkut pretensi-pretensi demokratis kalangan Islamis. Di tengah jantung “debat besar” ini terdapat keyakinan bahwa demokrasi, lebih disukai yang versi Amerika, adalah sebuah model untuk dicontoh semua orang yang kurang beruntung. Hal yang menjelaskan sekaligus menyatukan para akomodasionis dan konfrontasionalis adalah keyakinan sejati bahwa demokrasi melahirkan moderasi serta membuang jauh-jauh konflik dan perang. Tema kedua menyangkut spekulasi tentang agenda politis para Islamis begitu mereka meraih kekuasaan: Apakah mereka akan bertindak seakan merebut kembali kekuasaan yang pernah hilang (*irredentist*) dan menganut kebijakan-kebijakan anti-Barat, atau akankah realitas-realitas politik mencairkan kobaran ideologis para Islamis dan melunakkan perilaku mereka?

Keindahan dari perdebatan besar ini: kedua kubu memberikan jawaban-jawaban yang sangat berbeda ketika mereka menggunakan analogi-analogi dan referensi dari perbendaharaan kata era Perang Dingin. Namun kemiripan debat akomodasionis-konfrontasionalis ini dengan perdebatan Perang Dingin terasa ironis. Kedua kubu tampak seperti mengulang pertempuran, tapi di sini Islamisme menggantikan Komunisme sebagai “musuh baru” atau “tantangan” bagi kepentingan-kepentingan vital Amerika Serikat.

Interpretasi Konfrontasionalis tentang Islam: Sang “Musuh Baru”

Kebanyakan konfrontasionalis, yang sering melabel semua aktivis Islam dengan sebutan “fundamentalis Islam”, menganggap bahwa dalam praktiknya, Islam dan demokrasi itu berlawanan.² Para konfrontasionalis berpendapat, “kaum fundamentalis Islam”, seperti halnya totalitarian Komunis, sudah terlahir antidemokrasi dan sangat anti-Barat, dan dalam berbagai hal menjadikan Barat sebagai sasaran. Sebagai contoh, Bernard Lewis menyimpulkan sikap fundamentalis Islam dalam proses pemilihan umum dengan kalimat: “satu orang, satu suara, satu kali saja (*“one man, one vote, once”*).”³ Gilles Kepel dan Lewis lebih jauh menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak selaras dengan fundamentalisme Islam maupun dengan Islam itu sendiri.⁴

Samuel Huntington dari Universitas Harvard menyatakan: Tradisi-tradisi budaya yang mengakar amat dalam membatasi perkembangan demokrasi. Huntington menyinggung bahwa Islam secara intrinsik tidak demokratis. Menurut dia, satu-satunya negara Arab yang mempertahankan suatu bentuk demokrasi dalam waktu cukup lama adalah Lebanon yang beragama Kristen. “Sekali Muslim jadi mayoritas,” kata Huntington, “demokrasi Lebanon runtuh.”⁵ Menurut Huntington dan Martin Indyk — ketika itu di *Washington Institute for Near East Policy*, sebuah platform pro-Israel yang efektif — di dunia Arab, pemerintahan demokratis gaya Barat (justru) memperkuat kekuatan-kekuatan politik anti-Barat.⁶ Dalam nada serupa, Bernard Lewis menganggap pengaruh Islamis bagi pemerintahan telah membuahkan hasil yang sama sekali tidak lebih baik, malah lebih buruk.⁷

Menurut Amos Perlmutter, watak sejati Islam bukan hanya menolak demokrasi tapi sepenuhnya membenci dan memusuhi seluruh budaya politik demokratis; Islam merupakan “sebuah gerakan revolusioner yang agresif, sama militan dan kejamnya dengan gerakan Bolshevik, Fasis, dan Nazi di masa lalu”; Islam tidak bisa didamaikan dengan Barat yang Kristen serta sekular dan,

karenanya, Amerika Serikat harus memastikan gerakan ini “dilumpuhkan sejak lahir.”⁸

Konfrontasionalis lebih jauh meyakini bahwa persaingan antara Islam dan Barat bukan cuma urusan materi dan kepentingan politik; pertarungan di antara keduanya merupakan suatu perang budaya dan peradaban. Dalam sebuah artikelnya yang terkenal, Huntington meyakini sangat pentingnya budaya dalam politik internasional: “Sumber konflik yang mendasar dalam dunia baru ini bukanlah bersifat ideologis atau ekonomi. Hal yang membelah-belah umat manusia dan sekaligus merupakan sumber konflik yang utama adalah kebudayaan. Perang peradaban akan mendominasi peta politik global.”⁹

Perselisihan-perselisihan yang paling penting, menurut Huntington, akan terjadi sepanjang garis kebudayaan yang memisahkan Barat dari peradaban-peradaban non-Barat: “Di kedua sisi, interaksi antara Islam dan Barat dilihat sebagai perang peradaban.” Ia memprediksi bahwa perang dunia berikutnya adalah sebuah perang antar peradaban.¹⁰ Jauh sebelum Huntington melontarkan hipotesisnya, Bernard Lewis telah membunyikan bel tanda bahaya: pertikaian yang terjadi saat ini “tidak kurang dari sebuah perang peradaban — sebuah reaksi, yang mungkin irasional tapi sungguh historis, dari rival lama melawan warisan Yahudi-Kristen kita, diri sekular kita, dan pengembangan kedua hal ini ke seluruh dunia.”¹¹

Untuk mendukung pernyataannya, Huntington menunjuk keterlibatan pasukan Amerika dalam berbagai pertempuran dengan “teroris-teroris” Iran, Arab, dan Islam, yang didukung oleh paling sedikit tiga pemerintahan Timur Tengah.¹² Ia menambahkan, peperangan antara orang-orang Arab/Muslim dengan Barat ini mencapai puncaknya dalam Perang Teluk tahun 1991, saat gerakan-gerakan fundamentalis Islam di seluruh dunia mendukung Irak dan bukannya mendukung pemerintah Kuwait dan Arab Saudi yang didukung Barat.¹³ Setelah perang itu, tambahnya, para pemimpin NATO makin melihat adanya ancaman-ancaman potensial

dan instabilitas di perbatasan selatan mereka: “Tidak ada tanda-tanda bahwa interaksi militer berusia seabad antara Barat dan Islam ini akan mereda. Malah mungkin akan mengganas.”¹⁴

Dalam konteks ini, para konfrontasionalis menyejajarkan antara ancaman Komunis dan Islam: seperti Komunisme, kebangkitan kembali Islam bukan hanya sebuah gerakan dakwah (*prose-lytising*) tapi juga gerakan untuk mengubah (*revisionist*). Kebangkitan Islam ini, menurut Daniel Pipes, adalah “sebuah kekuatan yang *atavistic* dan militan yang didorong oleh kebencian terhadap pemikiran-pemikiran politik Barat, mengajak kembali ke medan permusuhan sepanjang jaman melawan Kristen.”¹⁵ Dalam kata-kata Mortimer Zuckerman, “Kita sedang berada di garis depan pertempuran yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sebuah halangan besar bagi para ekstremis yang ingin membenamkan nilai-nilai Barat yang jahat itu ke dalam laut, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para pejuang Kristen (*Crusaders*).”¹⁶

Bagi para pembela paham ini, Islam telah menggantikan posisi Komunisme sebagai ancaman strategis yang menentukan di masa pasca-Perang Dingin: “Ancaman baru ini sama jahatnya dengan Kerajaan Setan yang tua itu.”¹⁷ Daniel Pipes terang-terangan menyatakan bahwa “fundamentalis Islam menentang Barat lebih keras dibanding yang pernah dan sedang dilakukan Komunisme. Komunisme tidak sepaham dengan kebijakan-kebijakan kita, tapi tidak ada masalah dengan keseluruhan pandangan kita tentang dunia, termasuk cara kita berpakaian, kawin dan berdoa.”¹⁸ Dalam beberapa tulisannya, Pipes tidak menunjukkan perbedaan jelas antara Islam sebagai agama dan Islam politik sebagai ideologi, walaupun ia dengan yakinnya menganggap telah membedakan. Baginya, Islam karena itu sungguh berlawanan dengan Barat: “Orang-orang Amerika mengenali seorang lawan saat mereka melihatnya,” dan “seperti halnya Komunisme saat Perang Dingin, Islam adalah sebuah ancaman bagi Barat.”¹⁹

Aliran pemikiran seperti ini mendorong mantan asisten Richard Nixon, Walter McDougall, untuk mengajak Rusia bersekutu

guna bersama-sama mempertahankan garda depan dunia Kristen (*Christendom*) melawan musuh bersama mereka — dunia Muslim.²⁰ Peter Rodman, bekas pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, sependapat dengan Daniel Pipes: “Seperti radikalisme kiri, kemarahan Islam tidak hanya diarahkan ke Barat, tapi juga terhadap elit moderat dan pro-Barat di dalam masyarakat mereka sendiri.”²¹

Konfrontasionalis mengklaim bahwa terdapat tali-tali politis di antara berbagai gerakan Islam.²² Mereka yakin bahwa para fundamentalis Islam membentuk jaringan internasional yang terus berkembang: “Iran adalah pusat baru Komintern dunia. Sama-sama mesianis dan ideologis, kejam dan tegas, amat sangat memusuhi liberalisme Barat.”²³ Efek teori domino dianggap telah terjadi. “Satu dua keberhasilan,” ujar Jonathan Paris, “dapat mengubah fundamentalisme Islam menjadi sebuah bola salju revolusioner yang bisa menembus semua perbatasan ke arah suatu *ummat* yang lebih besar, atau mencapai kesatuan melalui Jihad.” Satu-satunya yang dibutuhkan adalah seorang fundamentalis Arab Sunni yang karismatik, seorang Nasser berjenggot, untuk menyatukan Muslim menjadi sebuah kekuatan politik pan-Islam.²⁴

Paris berteori bahwa runtutan kejadian seperti itu akan membentuk sebuah “pasukan penakluk” terdiri dari Muslim yang siap dan ingin berperang dengan Barat.²⁵ Tidaklah mengejutkan jika konfrontasionalis mengajak untuk menumpas kebangkitan Islam sebelum ia menyebar menjadi virus mematikan: “Empat per lima bagian dunia yang bukan Islam,” tegas Paris, “tidak bisa menoleransi perlawanan kejam Jihad terhadap diri mereka, yang dilakukan oleh seperlima bagian yang Islam.”²⁶ Dengan argumentasi ini, Islam ditempatkan sebagai bukan hanya musuh baru bagi Barat, tapi juga musuh bagi seluruh kemanusiaan.

Rekomendasi Kebijakan dari Konfrontasionalis

Analogi dengan Perang Dingin ini sungguh mencengangkan. Para intervensionis mengajukan konsep-konsep lazim Perang Dingin untuk meningkatkan kekhawatiran dan ketakutan publik akan sebuah ancaman baru Islam. Mereka membunyikan alarm untuk membangunkan para pembuat kebijakan AS dari tidur mereka dan mendorong mereka untuk menghentikan serangan suku Islam ini. Bagi cara berpikir mereka, kemakmuran kelompok-kelompok teroris yang didanai negara serta senjata-senjata penghancur di Timur Tengah itu mengancam Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya.²⁷ Penganut paham konfrontasionalis berpendapat bahwa ekstremisme Islam akan segera mencapai pantai-pantai Amerika melalui para imigran dan turis Muslim.²⁸ Sejalan dengan itu, para konfrontasionalis meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mencegah masuknya semakin banyak fundamentalis Islam dan menganggap bahwa “mereka yang telah berada di Barat berpotensi melakukan kekerasan.”²⁹ Mereka juga mendorong Amerika untuk mengambil langkah-langkah aktif — seperti yang telah dilakukan Barat terhadap Uni Soviet — untuk menghentikan paham mesianis baru ini.³⁰

Pipes melangkah lebih jauh lagi dengan menyerukan bukan hanya penghentian Islamis, tapi juga penumpasan dan pembebasan. Ia menuangkannya dalam ungkapan lugas: Islamis harus diperangi dan dikalahkan.³¹ Ia menyesali fakta bahwa “pendekatan halus Kiri” terhadap Islam fundamentalis telah menjadi sebuah wacana yang hegemonis di Amerika Serikat.³² Konfrontasionalis lain memperingatkan Barat untuk tidak berpuas diri dengan kegagalan Islam baru-baru ini, karena era Islam tampaknya baru lahir: Barat harus menyadari bahwa absolutisme Islam telah menggantikan ideologi-ideologi sekular dan radikal lainnya sebagai ancaman utama.³³ Lagi-lagi, pemikiran bahwa AS harus menghentikan kemajuan Islamis di mana-mana ini menggaungkan teori domino Perang Dingin.³⁴

Didukung keyakinan mereka bahwa demokrasi tidak sejalan

dengan Islam, penganut kubu konfrontasionalis meminta AS untuk tidak menekan sekutu-sekutu Timur Tengahnya untuk membuat perjanjian-perjanjian mengenai reformasi hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi: Tekanan untuk demokratisasi yang prematur bisa secara fatal melemahkan rezim-rezim pro-AS dan mempercepat terjadinya penggulingan kekuasaan oleh diktator-diktator kejam penganut teokrasi. Dalam pandangan ini, demokrasi di Timur Tengah adalah suatu kemewahan yang tidak mungkin diperoleh rezim-rezim Timur Tengah yang bersahabat itu, karena bisa menyebabkan kekuatan-kekuatan antidemokrasi merebut kekuasaan mereka.³⁵

Contohnya, sebelum bergabung dengan Dewan Penasihat Keamanan Nasional di masa Clinton, Martin Indyk melihat upaya rezim-rezim pro-Barat untuk mengokohkan legitimasi mereka dengan mengadakan pemilihan umum malah membuka kesempatan bagi para Islamis untuk meraih kekuasaan melalui cara-cara legal.³⁶ Mirip dengan pandangan ini, Jeane Kirkpatrick mengatakan ia tidak bisa mempercayai kemampuan bangsa Arab dan Muslim dalam membuat keputusan-keputusan politik melalui pemilihan umum: "Dunia Arab adalah satu-satunya wilayah di dunia tempat saya tidak yakin bahwa jika rakyat diberi kebebasan mengambil keputusan, mereka bisa membuat pilihan yang rasional."³⁷ Pandangan Judith Miller pun senada dengan Kirkpatrick: "Pemilihan umum malah lebih mungkin untuk membuka jalan bagi rezim-rezim militan Islam yang sebenarnya justru antidemokrasi."³⁸

Dalam pandangan Indyk, Kirkpatrick, dan Miller, ketidakinginan bangsa Arab dan Muslim untuk mencontoh Barat yang demokratis adalah pertanda dari irasionalitas dan kemunduran. Sehingga, solusinya adalah mempertahankan *status quo* otoriter dan meninggalkan segala eksperimen dengan politik elektoral. Indyk, Kirkpatrick, dan Miller begitu saja mengambil beberapa asumsi baku: (1) Bangsa Arab/Muslim telah diberi banyak kesempatan untuk memilih pemerintahan liberal, tapi mereka memilih wakil-wakil rakyat yang otokratik; (2) politik Islam memang secara

alamiah antidemokrasi dan anti-Barat; (3) tidak seperti kebanyakan orang, kaum Muslim belum siap dengan demokrasi; dan (4) rezim-rezim otoriter yang sudah melembaga adalah kaum jahat yang lebih mendingan (*the least of the two evils*), jadi Amerika Serikat harus terus mendukung mereka.

Meski banyak konfrontasionalis yang merasa pemerintahan-pemerintahan di Timur Tengah memperlakukan rakyat mereka dengan buruk, mereka yakin rezim-rezim ini membantu Amerika menetralkan sebuah ideologi radikal — Islam politik — dan mengamankan kepentingan-kepentingan AS.³⁹ Karenanya, Miller menyarankan pejabat-pejabat AS yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan baru tentang Islam dalam bersikap skeptis terhadap mereka yang berusaha untuk meliberalkan Arab melalui Islam. Sebab menurut pandangannya, para Islamis telah mempelajari dengan baik seni menipu dengan memanipulasi kalimat-kalimat demokrasi. Miller juga menasihati Washington untuk melawan secara terbuka pendeklarasian “negara-negara Islam” karena ketidakselarasan mereka dengan nilai dan kebenaran-kebenaran Barat.⁴⁰

Robert Satloff dari *Washington Institute for Near East Policy* menganjurkan AS untuk mengambil langkah-langkah aktif guna bergabung dalam pertempuran yang dilakukan pemerintah-pemerintah Timur Tengah melawan kaum Islamis. AS harus selalu dalam posisi menyerang, walaupun “hal ini menjadikan kita mengakrabi perilaku-perilaku kotor seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang penuh kebencian.” Bukankah, tambah Satloff, ini “perang kita juga.”⁴¹

Para konfrontasionalis tampaknya tidak terganggu dengan masalah pelanggaran HAM serta biaya politik dari sebuah intervensi. Mereka melihat pertikaian yang terjadi dengan dunia Muslim sekarang ini sebagai bagian dari konfrontasi yang lebih luas antara Barat yang demokratis dan kawan-kawan sekularnya melawan “despotisme Timur”. Bukannya menciptakan dunia yang lebih damai, keruntuhan Uni Soviet malah melahirkan sebuah

perang budaya baru yang lebih mematikan antara Islam dan Barat. Dalam perang peradaban ini, Amerika Serikat tidak boleh hanya berdiam diri. Jawabannya adalah pertempuran dan penumpasan, bukan perjanjian dan pengurangan senjata.⁴²

Interpretasi Akomodasionis tentang Islam: “Tantangan” Baru

Kubu akomodasionis menolak deskripsi Islamis yang digambarkan para konfrontasionis sebagai anti-Barat atau antidemokrasi. Mereka membedakan antara tindakan-tindakan kelompok oposisi politik Islamis dengan minoritas ekstremis yang cuma sedikit. John Esposito dan Leon T. Hadar, dua pelopor akomodasionis, berargumen bahwa sudah terlalu sering para akademisi, pemerintah, dan media menonjolkan tindakan-tindakan kelompok keras yang kecil-kecil dan mengecilkan peran gerakan-gerakan nonpolitis maupun politis moderat. Pembentukan gambaran Islam yang monolitik, menurut Esposito, mengarah ke suatu penyederhanaan agama yang melihat konflik-konflik politik di dunia Islam dalam ungkapan religius — yaitu sebagai pertikaian Islam-Kristen.⁴³

Penganut paham akomodasionis yakin bahwa baik di masa lalu maupun sekarang, ancaman sebuah Islam yang monolitik selama ini adalah mitos Barat yang berulang lagi, sebuah mitos yang jauh dari realitas sejarah Muslim. Mereka memandang dunia Islam sebagai dunia yang lebih terkotak dan terpilah, bukan seperti yang seringkali dianggap; keragaman, dan bukannya kesatuan yang abadi, merupakan faktor penentu utama dalam perumusan kebijakan luar negeri di dunia Arab/Islam.⁴⁴ Sama sekali tidak antidemokrasi, Islam, menurut para akomodasionis, memiliki banyak interpretasi politis yang saling berlawanan, termasuk demokrasi dan kediktatoran, republikanisme, juga monarki; fleksibilitas, bahkan kecairan, dan bukannya kekakuan, adalah norma dalam tradisi Islam.⁴⁵

Selanjutnya, para akomodasionis ini mempertanyakan komitmen pemerintah-pemerintah Barat dan Muslim terhadap demokratisasi. Robin Wright dari *Los Angeles Times* dan sejumlah orang lainnya menyesalkan pemerintahan Bush (senior) yang lebih memilih sebuah “negara polisi” untuk Aljazair ketimbang sebuah demokrasi Islam; kalau memang tidak demikian, menurut mereka, bagaimana pemerintah menjelaskan kebungkaman mereka ketika proses demokratis di Aljazair dihentikan, tapi bisa bersuara lantang dan aktif membela pluralisme politik di negara lain?⁴⁶

Sebagian akomodasionis juga mengkritik posisi AS dalam pengembangan besar-besaran senjata penghancur masal di kawasan Timur Tengah yang Muslim. Jochen Hippler mengungkapkan, keprihatinan Barat akan pengembangan senjata nuklir di kawasan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan aktual militer, tapi lebih berkaitan dengan pengontrolan minyak di Teluk Persia. Hippler menambahkan, tidak setujunya Barat terhadap “bom Islam” didasari ketakutan akan pemberontakan Dunia Ketiga untuk keluar dari struktur kekuasaan yang mendominasi.⁴⁷

Tidak seperti para konfrontasionis yang menganggap Islam politik sebagai ideologi utopis yang radikal, akomodasionis melihat kebangkitan Islam sebagai hasil dari kepedihan sosial-ekonomi dan politik; akarnya lokal. Mereka berargumen bahwa beragam gerakan Islam ini sangat didorong oleh langkanya kesempatan ekonomi dan kebebasan politik.⁴⁸ Akomodasionis juga menentang pendapat lawan debat mereka tentang sikap-sikap anti-Barat yang inheren dalam diri para Islamis:

Hanya sedikit Muslim yang dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam interaksinya dengan orang-orang Barat menganut paham tak bersahabat atau harus berkonfrontasi. Dunia Barat adalah kenyataan sehari-hari bagi hampir semua Muslim; Barat adalah sebuah kebudayaan yang isinya dikagumi Muslim: pendidikan, teknologi, konsep-konsep kebebasan, menghargai HAM, hukum, serta taraf hidup yang

meningkat.⁴⁹

Apa yang ditentang oleh Islamis, menurut akomodasionis, adalah kebijakan-kebijakan tertentu Barat, yang dilihat mempertahankan kelangsungan dominasi Barat serta ketergantungan dan posisi bawahan masyarakat Muslim; kebijakan-kebijakan ini termasuk dukungan Washington terhadap rezim-rezim korup dan represif Timur Tengah, dukungan tanpa syarat AS bagi Israel, serta sejarah panjang intervensi ekonomi dan militer Amerika di kawasan ini. Secara khusus, masalah Israel menciptakan beban emosional dan historis yang begitu berat bagi dunia Muslim — inilah titik sentral kekecewaan yang dirasakan umat Muslim terhadap Amerika Serikat.⁵⁰

Bagaimanapun bisa dibenarkannya beberapa kebijakan ini di mata para pejabat dan pengamat AS, kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kecurigaan besar terhadap AS dan memunculkan perasaan bahwa rakyat di kawasan tersebut bukanlah penentu nasib mereka sendiri.⁵¹ Persepsi mereka sebagai korban kebijakan Barat ini membuat kaum Muslim seringkali menunjukkan “mentalitas korban konspirasi” (*plot mentalities*), menyalahkan kekuatan eksternal atas kesulitan-kesulitan ekonomi dan politik mereka. Menurut para akomodasionis, dampak dari kecenderungan menganut teori konspirasi ini adalah penolakan nilai-nilai universal oleh banyak Muslim. Orang-orang Islam takut perjuangan HAM dan demokratisasi oleh Barat merupakan sebagian alat baru yang diciptakan untuk memaksakan nilai-nilai Barat pada umat Muslim dan Dunia Ketiga, lagi-lagi dengan berkedok nilai-nilai universal.⁵²

Masalah demokrasi memisahkan jauh kubu akomodasionis dan konfrontasionis. Kubu yang disebut belakangan mengklaim bahwa tidak adanya demokrasi di negara-negara Muslim bisa dijelaskan dengan melihat faktor-faktor internal seperti agama, budaya, dan sejarah. Bertolak belakang dengan anggapan ini, akomodasionis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan politis — termasuk ikut campurnya Barat dalam urusan dalam negeri

Muslim — merupakan penyebab bertahannya otoritarianisme di masyarakat Muslim. Dalam upaya mereka memahami langkanya pranata-pranata demokratis di Timur Tengah, kubu akomodasionis lebih menekankan pentingnya variabel-variabel eksternal ataupun perkembangan-perkembangan dalam negeri yang terinspirasi oleh hal-hal eksternal. Beberapa contohnya misalnya dampak dari penjajahan, berdirinya pemerintahan politik otokratik yang didukung oleh Amerika, kerugian-kerugian akibat konflik Arab-Israel, serta intervensi luar yang terus terjadi. Akomodasionis melangkah lebih jauh lagi dengan menantang makna demokrasi seperti yang digariskan oleh Barat. Tidak seperti mereka yang berlawanan pendapat, para akomodasionis berusaha menganut bentuk demokrasi yang lebih luas, bentuk demokrasi yang menghargai praktik dan tindakan-tindakan yang Islami.

Rekomendasi Kebijakan dari Akomodasionis

Berlawanan dengan konfrontasionis, akomodasionis menganjurkan Amerika Serikat agar tidak menentang penerapan hukum Islam atau aktivitas gerakan-gerakan Islam, jika program-program tersebut tidak mengancam kepentingan vital AS. Gelombang Islamis yang dominan, menurut mereka, merepresentasikan suatu tantangan dan bukannya ancaman bagi Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Lebih lanjut, John Entelis meyakini, bangkitnya fundamentalisme memunculkan bukan hanya tantangan tapi juga peluang, termasuk potensi bagi reformis dan pemerintahan yang lebih representatif. Akomodasionis juga meminta pemerintah Amerika untuk mengenali, menerima, atau paling sedikit menoleransi perbedaan-perbedaan ideologis antara Barat yang Kristen dengan Islam: “Penerimaan jauh lebih efektif dibanding konfrontasi dalam berhadapan dengan lawan, dan dalam kasus ini lawan tersebut lebih merupakan bayangan ketimbang kenyataan.”⁵³

Beberapa akomodasionis memahami bahwa banyak Muslim di Timur Tengah umumnya kurang akrab dengan proses demokratis.

Tapi mereka tetap saja menganjurkan pemerintah AS untuk mendukung akar-akar otentik demokrasi Islam walaupun hal ini berarti elemen-elemen populis naik berkuasa. Mereka selanjutnya menegaskan bahwa para Islamis harus menghadapi realitas masyarakat mereka dan fakta bahwa mereka hidup dalam dunia global yang saling bergantung. Kendati para Islamis ini mencakup sebagian absolutis yang menolak struktur politik yang sudah mapan, mayoritas dari mereka, menurut prediksi kubu akomodasionis, akan menjalankan fungsinya dalam sistem politik tersebut.⁵⁴

Jauh dari idealistis, sebagian akomodasionis menekankan bagi pejabat AS tentang pentingnya menganut kebijakan-kebijakan yang lebih beragam nuansanya dengan membedakan elemen-elemen pragmatis dalam gerakan-gerakan Islam dari aktivis-aktivis militan yang tidak bisa berdialog. Meski para akomodasionis ini menganjurkan AS untuk secara berangsur melibatkan elemen-elemen pragmatis itu dalam proses politik, mereka menyarankan untuk memarginalkan aktivis-aktivis militan tadi dengan cara-cara yang tidak memicu penggunaan kekerasan di kedua sisi. Hal ini karena, menurut pandangan mereka, pengerahan kekuatan selama ini tidak efektif dalam menyelesaikan krisis pemerintahan dan legitimasi di bagian dunia ini.⁵⁵

Akan keliru jika kita membayangkan akomodasionis sebagai orang-orang idealis yang radikal. Kritik mereka terhadap wacana dominan mengenai Islam politik lebih didasarkan pada perhitungan serta kekhawatiran yang pragmatis dan bukannya disebabkan kekaguman romantis atau rasa menghargai terhadap kaum Muslim. Pelan tapi pasti, terkikisnya tatanan politik yang berlaku membuat para akomodasionis merekomendasikan pendekatan inklusif, bukan eksklusif, yang bisa mengamankan kepentingan AS untuk jangka panjang. Dalam konteks ini, saran-saran kebijakan akomodasionis berakar dari realitas politik dan bukannya sentimentalitas. Menurut Richard Bulliet dari Universitas Columbia, akomodasionis justru tidak mengabaikan politik riil, mereka tergerak untuk menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat

dan menghindari pertikaian dengan Muslim.⁵⁶

Dalam nada serupa, Esposito dan Wright berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan Barat akan jauh lebih mudah dijaga dengan mengambil kebijakan-kebijakan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah Muslim yang bersahabat. Mereka juga meminta Washington untuk membuat kebijakan publik yang jelas dan konsisten guna mendukung terbukanya celah-celah demokrasi nyata yang melibatkan para Islamis, dan bukannya menoleransi rezim-rezim otoriter yang meninggalkan mereka. Sebagian akomodasionis mengungkapkan suatu perkembangan yang mungkin terjadi: dukungan AS terhadap rezim-rezim represif itu akan memperkuat gelombang anti-Amerikanisme dan mendorong radikalisisasi.⁵⁷

Untuk menghindari terjadinya kemungkinan alternatif ini, tegas Fuller dan Lesser, dibutuhkan pemahaman yang baik akan sejarah Islam serta pandangan-pandangan Muslim mengenai Barat. Dua tema kunci mewarnai dengan jelas persepsi Muslim atas hubungannya dengan pihak lain, yaitu: “berubahnya peradaban Islam yang sudah lama diagungkan, serta satu hal yang dirasakan luas oleh kaum Muslim bahwa mereka dikuasai Barat dan berada dalam posisi lemah dan rentan.”⁵⁸

Fuller dan Lesser juga berpendapat bahwa jika para pemimpin Amerika mau peka dengan kekecewaan-kekecewaan Muslim, mereka bisa memilih untuk memperbaiki ataupun mengikis sumber-sumber kekecewaan Muslim ini jika memungkinkan. Kedua penulis ini menambahkan, para pembuat kebijakan AS tidak boleh terus mengabaikan harapan, aspirasi, serta ketakutan-ketakutan Muslim: “Makin luas dan dalam lingkup kekecewaan itu, makin besar kemungkinan konsolidasi mereka yang secara keseluruhan akan menjadi daftar kesalahan Barat yang makin panjang.”⁵⁹

Untuk menghindari jebakan budaya yang terpolarisasi ini, akomodasionis mengimbau Washington untuk memahami reaksi-reaksi negatif dan tak bersahabat dari umat Islam terhadap segala bentuk intervensi eksternal dalam urusan internal mereka. Dukungan tradisional Barat bagi pemerintah-pemerintah Timur Te-

ngah yang kuat tapi korup dan tak efektif, sebagaimana langkah-langkah militer terhadap pemimpin-pemimpin Arab yang menentang seperti Qaddafi, dilihat sebagai keangkuhan Barat yang tidak diminta untuk mendisiplinkan dunia Arab.⁶⁰ Menurut Fuller dan Lesser, sumber kekecewaan besar berikutnya yang harus dipahami AS adalah rivalitas antar negara Arab serta jurang pemisah di antara negara-negara Arab yang kaya minyak dan tetangga-tetangga mereka yang miskin. Untuk menghindari terjadinya kekacauan yang bisa meledak dari terbentuknya kancah koalisi Muslim yang tak bersahabat, kedua penulis ini mendorong pemerintah AS untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif, moderat dan adil terhadap masyarakat Muslim.⁶¹

Fuller dan Lesser setuju bahwa tidak ada satu pun tindakan intervensi Barat yang secara langsung menimbulkan konfrontasi di Timur Tengah. Tetapi, mereka tetap memperingatkan para pemimpin Barat bahwa timbunan kekecewaan Muslim bisa memuncak menjadi ketegangan serius, mendorong kebangkitan para Islamis menjadi kuat karena gelombang dukungan massa.⁶²

Kesimpulan

Analisis sebelumnya mengenai posisi-posisi akomodasionis dan konfrontasionalis serta saran-saran kebijakan mereka menunjukkan jelas keragaman dan kecairan peta intelektual Amerika. Islam politik jadi perbincangan hangat di kalangan akademis dan pembuat kebijakan. Diskusi mereka sama sekali tidak membulat menjadi interpretasi monolitik atas kebangkitan Islam. Para akademisi dan ahli-ahli kebijakan Amerika terbelah dalam evaluasi mereka terhadap kaum Islamis dan cara menghadapi mereka.

Pemetaan terhadap ketegangan-ketegangan yang muncul di lingkungan intelektual Amerika ini penting untuk menarik perhatian pembaca akan kemajemukan pandangan dan tiadanya kesepakatan dalam isu Islam politik. Pertentangan, ketidakpastian serta tiadanya kesatuan mewarnai pandangan-pandangan orang Ame-

rika terhadap Islamis. Ini merupakan hal penting untuk dikedepankan karena Amerika seringkali digambarkan sebagai monolit, berbicara dalam satu suara. Contohnya, dalam dunia Muslim, hipotesis perang peradaban itu dilihat sebagai representasi dari pandangan pemerintah AS dan elit kebijakan luar negerinya. Padahal faktanya, tesis ini tidak mampu mengambil hati banyak orang di dalam komunitas intelektual AS atau lembaga-lembaga kebijakan. Perbedaan-perbedaan subtil serta ketegangan-ketegangan yang meramalkan percaturan intelektual dan politik Amerika kurang dipertimbangkan di luar negeri.

Faktanya, para akomodasionis cukup efektif dalam berkompetisi dengan para konfrontasionis agar didengar dan menarik perhatian para pembuat kebijakan di Washington. Paling tidak di tingkat wacana, para diplomat AS menggunakan simbol-simbol serta terminologi para akomodasionis untuk menggambarkan pendirian mereka tentang Islam politik. Tokoh-tokoh pemerintahan Bush dan Clinton menolak tegas keseluruhan konsep perang peradaban seperti yang dikemukakan para konfrontasionis, dan mereka menandakan komitmen untuk memperkuat simpul-simpul yang mendekatkan kedua peradaban itu. Keberhasilan para akomodasionis terlihat dari meningkatnya kepekaan para pejabat AS akan kecairan, ambigius serta beragamnya kebangkitan Islam. Akomodasionis telah mempengaruhi gaya para pembuat kebijakan AS dalam menangani isu ini.

Di sisi lain, konfrontasionis telah meninggalkan jejak mereka dalam kebijakan-kebijakan individual AS terhadap Iran, Irak, dan gerakan Islamis lainnya di pentas konflik Arab-Israel. Jika orang mencari satu ciri pokok yang menggambarkan konfrontasionis, itu adalah identifikasi terang-terangan mereka dengan Israel. Konfrontasionis selama ini paling efektif ketika membidik wilayah-wilayah kebijakan yang berkaitan dengan konflik Arab-Israel — topik yang mendapatkan cukup konsensus di Amerika Serikat. Tapi mereka kurang berhasil dalam membentuk keseluruhan pendekatan Amerika terhadap Islam politik. Cukup adil ji-

ka dikatakan bahwa ketegangan-ketegangan serta ketidaksepakatan yang ada di antara para akademisi dan pembuat kebijakan sebanding dengan hal-hal serupa yang ada di dalam lingkaran-lingkaran resmi pemerintah.❧

Catatan

1. Namun, orang tidak melihat suatu kejelasan dan keteguhan terhadap penggambaran yang gamblang saat mengkaji pemilahan intelektual di AS tentang aktivisme Islam.
2. Bernard Lewis, "Islam and Liberal Democracy," *Atlantic Monthly* (Februari 1993), h. 91; Daniel Pipes, "Same Difference: The Islamic Threat - Part I," *National Review* (7 November 1994), h. 63; Judith Miller, "The Challenge of Radical Islam," *Foreign Affairs* (Spring 1993), h. 45, 51.
3. Lewis, "Islam and Liberal Democracy," h. 91. Lihat juga Peter W. Rodman, "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?," *Middle East Quarterly* (Desember 1994), h. 64; Pipes, "Same Difference," h. 63; Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 45, 47.
4. Kepel lebih jauh menegaskan bahwa "penolakan terhadap sekadar ciri kecil demokrasi pun sesungguhnya inheren dalam doktrin religius Islam." Lihat karyanya, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, terj. Alan Braley (University Park: Pennsylvania State University Press, 1994), h. 194; Lewis, "Islam and Liberal Democracy," h. 93.
5. Samuel Huntington, "Religion and the Third Wave," *The National Interest* (Summer 1991), h. 41. Lihat juga Huntington, "Will More Countries Become Democratic?," *Political Science Quarterly* 99, no. 2 (Summer 1984), h. 214.
6. Huntington, "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Summer 1993), h. 32; Huntington, "Religion and the Third Wave," h. 41; Martin Indyk, "Concluding Remarks: The Implications for U.S. Policy," dalam "Islam and the U.S.: Challenges for the Nineties" Soref Symposium, Washington, DC, The Washington Institute for Near East Policy, 27 April 1992, h. 51; Jonathan S. Paris, "When to Worry in the Middle East," *Orbis* (Fall 1993), h. 553, 557.
7. Lewis, "Islam and Liberal Democracy," h. 93.
8. Amos Perlmutter, "Wishful Thinking About Islamic Fundamentalism," *Washington Post*, 19 Januari 1992.

9. Huntington, "The Clash of Civilizations?" h. 22.
10. Ibid., h. 25, 31-2, 39.
11. Bernard Lewis, "The Roots of Muslim Rage," *Atlantic Monthly* (September 1990), h. 60.
12. Huntington, "The Clash of Civilizations?" h. 31.
13. Ibid., h. 3 5.
14. Ibid., h. 31-2, 35.
15. "Political Islam Is a Threat to the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, (USA: Greenhaven Press, 1995), h. 192. Lihat juga Pipes, "Same Difference," h. 63; Rodman, "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?" h. 64.
16. "Beware of Religious Stalinists," *U.S. News and World Report*, 22 Maret 1993, h. 80.
17. Charles Krauthammer, "Iran: Orchestrator of Disorder," *Washington Post*, 1 Januari 1993. Lihat juga Huntington, "The Clash of Civilizations?" h. 45.
18. "Same Difference," h. 64.
19. "Political Islam Is a Threat to the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 190.
20. Dikutip oleh Pipes, "Same Difference," h. 64.
21. Rodman, "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?" h. 61.
22. Ibid., h. 63. Martin Kramer, "Islam vs. Democracy," *Commentary* (Januari 1993), h. 39; Paris, "When To Worry in the Middle East," h. 558.
23. Krauthammer, "Iran: Orchestrator of Disorder." Lihat juga Pipes, "Same Difference," h. 63, dan dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 7; Kramer, "Islam vs. Democracy," h. 39.
24. Paris, "When to Worry in the Middle East," h. 558.
25. Ibid. h. 558.
26. Ibid. h. 559.
27. Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 55.
28. Ibid., h. 56; Martin Kramer, "The Jihad Against the Jews," *Commentary* (Oktober 1994), h. 41; jihad di Amerika, film dokumenter PBS yang dibuat oleh wartawan Steven Emerson dan ditayangkan pada 21 November 1994 (SAE Productions, 1994).

29. Kramer, "The Jihad Against the Jews," h. 42.
30. Krauthammer, "Iran: Orchestrator of Disorder"; Huntington, "The Clash of Civilizations?" h. 49.
31. "Same Difference," h. 63.
32. Ibid., h. 65.
33. Judith Miller, "Faces of Fundamentalism," *Foreign Affairs* 73, no. 6 (November/Desember 1994), h. 142.
34. David Ignatius, "Islam in the West's Sights: The Wrong Crusade?" *Washington Post*, 8 Maret 1992; Leon T. Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 200.
35. Lewis, "Islam and Liberal Democracy," h. 98; Rodman, "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?" h. 64; Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 52-3; Paris, "When to Worry in the Middle East," h. 560.
36. Indyk, "Concluding Remarks," h. 51.
37. Dikutip oleh Kramer, "Islam vs. Democracy," h. 37.
38. Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 52.
39. Ibid., h. 55; Pipes, "Same Difference," h. 64.
40. "The Challenge of Radical Islam," h. 51, 54. Miller mengkritik pemerintahan Bush karena bertindak kurang keras terhadap Islamis.
41. "An American Strategy to Respond to Political Islam," Soref Symposium, dalam Y. Mirsky, Matt Ahrens, and J. Sultan, eds., *Challenges to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities* (Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, Mei 1993), h. 38.
42. Krauthammer, "Iran: Orchestrator of Disorder"; Rodman, "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?" h. 64; Huntington, "The Clash of Civilizations?" h. 49; Pipes, "Same Difference," h. 64; Pipes in "Symposium: Resurgent Islam," h. 5; Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 45.
43. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, h. ix, 180-1, 202, 208-9, 215. Lihat juga Leon T. Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 198.
44. Richard W. Bulliet, "Rhetoric, Discourse, and the Future of Hope," dalam Bulliet, ed., *Under Siege: Islam and Democracy*, h. 8-9, 11; R. Scott Appleby, "Democratization in the Middle East Does Not Threaten the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 223; Mehdi Noorbaksh, "The Middle East, Islam and the United States: The

- Special Case of Iran,” *Middle East Policy* 2, no. 3 (1993), h. 79, 82; Jahangir Amuzegar, “The Truth and Illusion of Islamic Fundamentalism,” *SAIS Review* 13 (Summer/Fall 1993), h. 129; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 182-3, 193, 213; Hadar, “Political Islam Is Not a Threat to the West,” h. 204.
45. Robin Wright, “Islamist’s Theory of Relativity,” *Los Angeles Times*, 27 Januari 1995; John O. Voll dan John L. Esposito, “Islam’s Democratic Essence,” *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994), h. 3-9; Gary Sick, “Islam and the Norms of Democracy,” dalam Bulliet, ed., *Under Siege*, h. 38-9; Hadar, “Political Islam Is Not a Threat to the West,” h. 204.
 46. Wright, “Islam, Democracy and the West,” *Foreign Affairs* (Summer 1992), h. 137-8. Lihat juga Yvonne Yazbeck Haddad, “The ‘New Enemy’? Islam and Islamists after the Cold War,” dalam Michel Moushabeck dan Phyllis Bennice, eds., *Altered States: A Reader in the New World Order* (New York: Olive Branch Press, 1993), h. 91; Appleby, “Democratization in the Middle East Does Not Threaten the West,” h. 229; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 186-7, 189, 204, 205, 214; Noorbaksh, “The Middle East, Islam and the United States,” h. 84, 86, 91; demikian pula, Ignatius kritis terhadap pemerintahan Bush karena mempedulikan Arab Saudi dan tak pernah menggubris kata demokrasi. Ignatius menimpakan banyak kesalahan pada Arab Saudi atas kebijakan AS: “Kalau orang Saudi bersin, Departemen Luar Negeri langsung demam. Karena orang Saudi tak suka pada demokrasi Arab, kita juga tak suka. Karena orang Saudi adalah kekuasaan *status-quo*, kita pun menjadi kekuasaan *status-quo*. Karena orang Saudi tampak senang dengan kebuntuan politik di seluruh dunia Arab, kita pun senang.” Lihat Ignatius, “Islam in the West’s Sights,” dalam *Washington Post*.
 47. Hippler, “The Islamic Threat and Western Foreign Policy,” dalam Jochen Hippler dan Andrea Lueg, ed., *The Next Threat: Western Perceptions of Islam* (Boulder, CO: Pluto Press, 1995), h. 118-19.
 48. Bulliet, “Rhetoric, Discourse, and the Future of Hope,” h. 8-9; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 206, 210, 212; Hadar, “Political Islam Is Not a Threat to the West,” h. 204; William Quandt, “The Middle East: What Is Our Long Term Vision?” (diskusi yang diadakan oleh Middle East Policy Council), *Middle East Policy* 3, no. 3 (1994), h. 8.
 49. Graham E. Fuller dan Ian O. Lesser, *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West* (Boulder, CO: Westview Press; 1995), h. 102-3.
 50. Kubu akomodasionis berharap resolusi konflik Arab-Israel dapat membantu menyembuhkan sejumlah luka dan memperbaiki jemba-

tan koeksistensi dalam warisan Yahudi-Kristen-Islam.

51. Fuller dan Lesser, *A Sense of Seige*, h. 40, 42.
52. Ibid., h. 38, 42.
53. Wright, "Islam, Democracy and the West," h. 143; lihat juga John H. Entelis, "Islam and Democracy: A Dilemma for U.S. Policy — A Panel Discussion," dalam "Islam and the U.S.," *Borer Symposium*, h. 43.
54. Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," h. 203; Wright, "Islam, Democracy and the West," h. 143-5; Esposito dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 13.
55. Fuller dan Lesser, *A Sense of Siege*, h. 119.
56. Pidato di sebuah seminar di Middle East Institute, Columbia University, 29 Februari 1996.
57. Wright, "Islam, Democracy and the West," h. 139, 143-5; Entelis, "Islam and Democracy," h. 43; Voll dan Esposito, "Islam's Democratic Essence," h. 11; R. Scott Appleby, "Democratization in the Middle East Does Not Threaten the West," h. 229; Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," h. 203-4; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 208, 213.
58. Fuller dan Lesser, *A Sense of Siege*, h. 27.
59. Ibid., h. 109-10.
60. Ibid., h. 111-12.
61. Ibid., h. 114, 117.
62. Ibid.

Islam dan Muslim dalam Pandangan Amerika



MENURUT cendekiawan terkemuka Prancis, Maxime Rodinson, “Umat Kristen di Barat mempersepsi dunia Muslim sebagai bahaya, jauh sebelum Islam dilihat sebagai masalah nyata.”¹ Pandangan ini disepakati oleh sejarawan Inggris Albert Hourani, yang berpendapat bahwa Islam sejak awal kemunculannya merupakan masalah bagi Eropa yang Kristen. Memandang Islam dengan campuran ketakutan dan ketakmengertian, bangsa Kristen tidak bisa menerima kenabian Muhammad ataupun kesejatan wahyu yang diturunkan kepadanya. Hal yang paling luas diyakini umat Kristen, menurut Hourani, ialah bahwa “Islam adalah agama palsu, Allah bukanlah Tuhan, Muhammad bukan seorang nabi; Islam dikarang oleh orang-orang yang berniat dan berwatak buruk, serta didukung kekuatan pedang.”² Seperti dikatakan oleh seorang *Crusader* abad ke-13 dan polemis Oliver dari Paderborn: “Islam diawali dengan pedang, dipertahankan dengan pedang, dan dengan pedanglah akan diakhiri.”³

Interaksi berabad-abad telah menorehkan sejarah pahit antara dunia Islam dan Barat yang beragama Kristen, sebagian besar disebabkan kedua peradaban mengklaim sebuah misi dan pesan universal, serta sama-sama merasa mewarisi kekayaan budaya Yahudi-Kristen dan Yunani-Romawi.⁴ Dipisahkan oleh kon-

flik dan disatukan oleh ikatan-ikatan material dan spiritual yang sama, umat Kristen dan Muslim merupakan sebuah tantangan religius, intelektual, sekaligus militer terhadap satu sama lain.⁵ Seorang pemikir Jerman abad ke-19, Friedrich Schleiermacher, beranggapan orang-orang Kristen dan Muslim “masih saja berloba untuk menguasai ras manusia.”⁶ Tetapi, gambaran permusuhan Barat-Muslim yang tidak juga mereda ini bisa disalahartikan. Bandul hubungan Barat-Muslim telah berayun di antara rivalitas/konfrontasi dan kolaborasi/akomodasi. Walaupun konflik yang timbul dari faktor-faktor budaya, religius, dan ideologis ini telah menjadi norma, politik riil dan kepentingan antar negara juga membentuk hubungan antar kedua peradaban.

Secara historis, kekuatan-kekuatan Barat merasa nyaman saja bersekutu dengan Muslim melawan sesama kekuatan Kristen. Sepanjang abad ke-19, Prancis, Inggris, dan Jerman bersatu dengan bangsa Muslim Ottoman melawan musuh-musuh Eropa mereka. Meski ada kelemahannya yang sudah inheren, kekaisaran Ottoman merupakan pemain integral dalam sistem keseimbangan kekuasaan (*balance-of-power*) antar negara Eropa. Penghancuran kekaisaran ini pada tahun 1918 terjadi sebagai akibat bergabungnya ia dengan Jerman dalam Perang Dunia I melawan kekuatan Sekutu. Inggris dan Prancis juga bersekutu dengan Muslim Arab untuk mengimbangi kekuatan Ottoman dan Jerman. Antara tahun 1919 dan dekade 1950an, kepentingan Eropa di masyarakat Muslim lebih dipengaruhi oleh keharusan yang muncul dari kebijakan kolonial dan dekolonisasi, bukan karena sentimen-sentimen agama.⁷ Pejabat-pejabat Inggris dan Prancis berkolaborasi dengan siapapun yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, entah ia Islamis atau nasionalis. Kekuatan pendorong kebijakan Timur Dekat yang dianut Paris dan London adalah kontrol politik dan perhitungan ekonomi, bukan variabel agama atau budaya.

Tidak seperti Eropa, Amerika Serikat tak terlibat dalam hubungan panjang dan berdarah dengan negara-negara maupun masyarakat Muslim. Amerika tidak pernah secara langsung men-

guasai tanah Arab dan Muslim ataupun membentuk sistem rumit penjajahan seperti yang dilakukan Eropa. Pada bagian awal abad ke-20, Amerika — yang tidak terikat dengan kebutuhan-kebutuhan kolonial atau geografis — membangun hubungan yang santun dan dinamis dengan bangsa Arab dan Muslim, yang melihat Amerika sebagai negeri yang progresif, tanpa menghiraukan reaksi Eropa.

Bahkan setelah negara ini menjadi adikuasa, Amerika lebih tak terhambat lagi oleh faktor-faktor kolonial, historis, dan budaya, dibanding kawan-kawan Eropanya. Kontrol politik dan ekonomilah yang menjadi pendorong kebijakan Washington untuk Timur Dekat. Lebih lanjut, bertolak belakang dengan orang-orang Eropa, bangsa Amerika tidak tampak terganggu dengan munculnya komunitas Muslim imigran di tengah-tengah mereka; di Amerika Serikat, yang menjadi fokus ketakutan para asimilasionis akan “ancaman imigran” adalah orang-orang Spanyol.⁸ Walaupun tantangan religius dan intelektual Islam terus mewarnai imajinasi banyak orang di Amerika, namun yang mengusik benak orang-orang Amerika adalah dampak-dampak hankam dan strategis dari politik massa Islam, bukan isu religius dan intelektual itu sendiri.

Bab ini mengamati bagaimana publik, media, kelompok kepentingan, dan elit-elit kebijakan luar negeri AS, termasuk Kongres, mempengaruhi pembentukan kebijakan Amerika terhadap Islam politik. Seperti bab sebelumnya, bab ini memusatkan perhatian pada konteks dalam negeri dari politik Amerika, khususnya keterkaitan di dalam masyarakat, politik, dan pemerintah. Setelah memaparkan analisis mengenai perkembangan historis, budaya, dan politik saat ini, yang menjelaskan sikap-sikap bangsa Amerika terhadap kebangkitan kembali Islam, bab ini menegaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan hankam dan strategis kontemporer — bukan cuma budaya dan ideologi — merupakan hal penting dalam melihat kesibukan Amerika dalam mengurus masalah Islamisme.

Sketsa Sejarah Singkat

Lahirnya peran global AS setelah Perang Dunia II secara dramatis mengubah sikap-sikap elit kebijakan luar negeri terhadap perubahan politik yang begitu pesat di Dunia Ketiga. Walaupun para pemimpin AS pada paruh pertama abad ke-20 mendukung konsep penentuan nasib sendiri (*self determination*) dan menentang kelangsungan kolonialisme, pada paruh kedua abad tersebut mereka mencurigai ideologi dan gerakan-gerakan populis Dunia Ketiga. Di akhir era 1940an, bersiaga dari bayangan ancaman Uni Soviet serta memastikan keamanan rezim-rezim Timur Tengah yang pro-Barat, menempati posisi lebih penting dalam agenda kebijakan luar negeri AS dibanding berdamai dengan nasionalisme Dunia Ketiga. Memang benar, beberapa petinggi di masa pemerintahan Truman, Eisenhower, dan Kennedy menyuarakan persekutuan antara Amerika Serikat dengan kekuatan-kekuatan nasionalis lokal untuk menahan ekspansi Soviet, tapi suara mereka merupakan minoritas.⁹

Ternyata yang lebih didengar adalah suara para pembuat kebijakan AS yang tidak mempercayai kaum nasionalis Dunia Ketiga dan mencurigai mereka bersekutu dengan Soviet untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa di kawasan itu. Secara keseluruhan, antara tahun 1955 dan 1970, kebijakan AS di dunia Arab disusun untuk melawan nasionalisme Arab sekular yang dipimpin Presiden Mesir, Gamal Abdel-Nasser. Di mata Amerika, pembawa ancaman hankam bagi monarki-monarki konservatif dan pro-Barat adalah nasionalisme revolusioner, bukan Islam politik. Label-label simbolis seperti “ekstremis” dan “satelit” melekat pada elemen-elemen nasionalis radikal di seantero Timur Tengah.¹⁰

Ironisnya, sepanjang era 1950an dan 60an, AS berharap bisa membangun aliansi dengan negara-negara Islam yang cukup prestisius untuk mengimbangi “komunisme tak bertuhan” dan kekuatan-kekuatan nasionalis sekular yang diwakili Nasser. Di pertengahan 1960an, salah satu sebab memburuknya hubungan

AS-Mesir adalah keyakinan Nasser bahwa Presiden Lyndon Johnson telah mendorong Raja Faisal ibn 'Abd al-Aziz dari Arab Saudi agar mendanai sebuah persekutuan religius Islam untuk mengucilkan Mesir dari dunia Arab.¹¹ Sama pentingnya, di tahun-tahun 1950an dan 60an, AS menunjukkan sikap ambivalen dan bermusuhan terhadap nasionalisme Arab yang revolusioner, ketika politik Islam saat itu dilihat sebagai pelindung kepentingan Barat. Dalam pertikaian antara Islam dan nasionalisme populis, Amerika berpihak pada Islam. Kebijakan Amerika saat itu didorong oleh pertimbangan-pertimbangan Perang Dingin dan perhitungan strategis, bukan oleh sejarah, budaya, atau ketakutan intrinsik lain ataupun kebencian terhadap Islam.

Persepsi AS tentang situasi di Timur Tengah serta sifat dari ancaman tersebut berubah radikal di tahun 1970an, sebagian besar dikarenakan ledakan politik Islam yang menghambur masuk ke dalam percaturan politik. Peristiwa-peristiwa regional — seperti perang Arab-Israel tahun 1973, akibat dari embargo minyak Arab, revolusi Iran di tahun 1978-79 yang diikuti dengan krisis penyan-deraan — mengejutkan banyak pejabat Amerika sehingga mereka memandang Islam sebagai ancaman bagi kepentingan-kepentingan Barat.¹² Lagi-lagi, perhitungan keamanan, serta pertimbangan-pertimbangan politis dan ekonomis yang terkait, menjadi dasar perubahan pandangan Amerika Serikat.

Jika Nasser bertempur dalam perang Arab-Israel tahun 1967 di bawah bendera nasionalisme Arab, penerusnya, Anwar Sadat, bisa dikatakan bertarung dalam Perang Ramadan tahun 1973 di bawah bendera Islam. Penegasan keislaman yang baru ini didampingi dengan boikot minyak oleh OPEC, yang melonjakkan harga minyak serta menimbulkan inflasi, dan menurut Zbigniew Brzezinski, Asisten Presiden Jimmy Carter untuk Urusan Keamanan Nasional, “berdampak tajam bagi kehidupan sehari-hari hampir setiap orang Amerika; belum pernah kita merasakan pengaruh seperti ini di masa damai.”¹³ Untuk pertama kalinya sejak masa kolonialisme, pemerintah AS harus menghadapi kekuatan Islam.¹⁴

Selanjutnya, di awal era 1970an Presiden Libya Muammar Qaddafi menggunakan simbol-simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaan populisnya serta menekan gerakan-gerakan revolusioner di seluruh Timur Tengah dan Afrika. Menurut seorang pejabat AS yang saat itu duta besar untuk sebuah negara di Afrika Tengah, diplomat-diplomat Amerika, baik di Washington maupun di Afrika, terganggu dengan proklamasi Qaddafi akan negara Islam, promosinya akan Islam sebagai agama “bangsa hitam” di Afrika, serta penyebaran “radikalisme” dan “terorisme” Islamnya ke seluruh dunia. Mereka ngeri kalau Islam radikal bergerak maju menguasai seluruh penjuruk padang pasir. Kenyataannya, kampanye Islam Qaddafi mempengaruhi pandangan resmi AS tentang kebangkitan kembali Islam, jauh sebelum revolusi Iran.¹⁵

Dampak Revolusi Islam di Iran

Dari semua perkembangan regional di era 1970an, revolusi Iran dan krisis sandera merupakan yang paling mempengaruhi barisan elit kebijakan luar negeri dan pandangan publik Amerika tentang Islam. Terbiasa merasa negara mereka sebagai yang paling demokratis dan dermawan, orang-orang Amerika sungguh terguncang mendengar Ayatullah Khomeini dari Iran menyebut negara mereka “Setan Besar”. Seperti diamati seorang pejabat AS di tahun 1995, “pengalaman dengan Iran sangat mempengaruhi cara berpikir Amerika tentang Islam.”¹⁶

Pemerintah AS tidak pernah berhadapan dengan bentuk konfrontasi semacam ini, yang menurut mereka “irasional” dan tak bisa ditoleransi. Presiden Carter menggambarkan negosiasi-negosiasinya dengan para mullah Iran dengan ungkapan, “Kita menghadapi sekumpulan orang gila.”¹⁷ Dengan menyekap 52 orang Amerika sebagai tawanan selama 444 hari, Iran yang dikuasai Khomeini itu menjadikan tiap hari terasa menyiksa bagi Amerika Serikat, menimbulkan kebencian mendalam dan ketakberdayaan yang amat sangat. Makin lama Iran menjadi sebuah obsesi nasional.¹⁸

Seperti yang telah dilakukan pada nasionalisme Arab di tahun-tahun 1950an dan 60an, label-label seperti “ekstremis”, “teroris”, dan “fanatik” juga dilekatkan pada revolusi Islam di Iran.¹⁹ Dalam sebuah jajak pendapat terhadap kelompok *mainstream* Amerika tahun 1981, 76 persen responden menempatkan Iran dalam posisi yang buruk; 56 persen mengungkapkan kata “tawanan” muncul dalam benak mereka jika Iran disebut; kata-kata lain yang muncul berkaitan dengan Iran adalah “Khomeini”, “minyak”, dan “Syah”; banyak juga yang menyebut “kemarahan”, “kebencian”, “kekacauan”, dan “negara bermasalah”.²⁰ Cap Islam revolusioner yang melekat pada Iran tampak berbenturan dengan Amerika Serikat. Di bawah pengaruh revolusi Iran, jadilah Islamisme menggantikan posisi nasionalisme sekular sebagai ancaman hankam bagi kepentingan AS, dan kekhawatiran akan perang antara Islam dan Barat mengkristal dalam pikiran bangsa Amerika. Salah satu alasan utama yang diajukan mantan Menteri Luar Negeri AS Cyrus Vance untuk menjelaskan ketidaksetujuannya mengirim pasukan militer guna menyelamatkan tawanan Amerika di Iran adalah bayangan terjadinya perang Islam-Barat: “Khomeini dan pengikutnya, dengan watak Syiah mereka yang gandrung akan kesyahidan, malah mengharapakan adanya aksi militer Amerika sebagai kesempatan untuk menyatukan dunia Muslim melawan Barat.”²¹

Di tingkat praktis, kerugian besar yang diderita Amerika di Timur Tengah adalah lenyapnya Syah Iran, seorang sekutu kuat Amerika yang dipercaya Presiden Richard Nixon dan menteri luar negerinya, Henry Kissinger, untuk menjadi polisi bagi Teluk Persia.²² Di saat yang sama, ketakutan AS bahwa revolusi Iran akan menggoncangkan negara-negara tetangga di sekitar Teluk makin beralasan dengan adanya pernyataan keras Khomeini bahwa Arab Saudi dan kerajaan-kerajaan Teluk lainnya itu “tidak Islami”, juga ejekannya bagi hubungan mereka dengan AS sebagai “Islam Amerika”. Khomeini selanjutnya mengajak negara-negara Teluk untuk “bergabung di jalan revolusi, gunakan kekerasan, dan melanjutkan perjuangan mereka meraih kembali hak-hak dan

sumber daya mereka.”²³

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya hanya menambah ketakutan-ketakutan AS akan kekuatan perlawanan Islam. Di akhir 1979, Arab Saudi, klien terpenting Amerika di Timur Tengah, terguncang dengan dikuasainya Masjid Al Haram di Mekah selama dua minggu oleh Islamis radikal yang memecah monopoli keluarga kerajaan Saudi dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 1981 dan serangan berdarah terhadap tentara dan basis Amerika di Lebanon, Kuwait, dan tempat-tempat lain, menambah kekhawatiran para pemimpin AS akan meluasnya “fundamentalisme” Iran.²⁴

Revolusi Islam di Teheran mewarnai sikap AS terhadap Islam politik. Hasilnya adalah, menurut catatan beberapa pengamat, cap Islam revolusioner Iran membayangi sebagian besar debat yang terjadi saat ini di AS mengenai kebangkitan Islam politik. Poll yang disebutkan di atas menunjukkan sejauh mana Islam dan Iran dikaitkan oleh kelompok *mainstream* Amerika. Ketika ditanya apa yang muncul dalam benak mereka ketika kata-kata “Muslim” atau “Islam” disebut, dua jawaban yang paling sering muncul dan dalam jumlah yang sama adalah “Muhammad” dan “Iran”.²⁵ Politik dalam Islam dicampuradukkan dengan politik di Iran, karena begitu banyak orang Amerika tidak sanggup membayangkan hubungan dengan pemerintah Islam manapun tanpa Amerika Serikat tidak mendapat label “Setan Besar”.²⁶ “Persepsi AS tentang pengalaman dengan Iran,” ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, “diproyeksikan ke dalam hubungan kita dengan bangsa Arab di Timur Tengah.”²⁷

Ketakutan terhadap Terorisme dan Dampaknya Bagi Kebijakan AS

Terorisme muncul sebagai salah satu isu politik terpenting di Amerika Serikat. Sebagian pejabat dan pengamat di AS mengait-

kannya dengan militan Islam, khususnya Iran. Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher mengatakan, “Iran adalah negara sponsor terorisme nomor satu di dunia,” dan Iran merepresentasikan “salah satu ancaman terbesar atau bahkan ancaman terbesar bagi kedamaian dan stabilitas di kawasan ini.”²⁸

Berbeda dari rekan-rekan Eropanya, AS bisa dikatakan lolos dari horor terorisme selama era Perang Dingin. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang para teroris membidikkan sasaran di Amerika Serikat sendiri. Rentetan ledakan mengguncang ketenangan Amerika, menimbulkan ketakutan akan serangan-serangan berikutnya dan seruan untuk melakukan tindakan balasan bagi para pelaku dan negara-negara pendukungnya. Mungkin contoh yang paling mudah diingat adalah pengeboman World Trade Center pada Februari 1993, yang menyebabkan sepuluh Muslim dituduh menjalankan “perang terorisme urban” melawan Amerika dan merencanakan pembunuhan Presiden (Mesir) Mubarak.²⁹ Persidangan berikutnya — bersama dengan terbongkarnya rencana para pelaku untuk menggencarkan aksi berdarah guna menghancurkan gedung PBB dan bangunan-bangunan utama New York lainnya dan untuk menekan AS agar menghentikan dukungannya bagi Israel dan Mesir — memperbesar rasa takut Amerika akan ancaman keamanan yang dihubungkan dengan kaum Islamis.

Menurut Profesor Richard Bulliet dari Universitas Columbia, orang-orang Amerika agak meyakini gagasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian Muslim “menunjukkan budaya fanatik dan teroristik yang tidak bisa ditoleransi atau dipahami.” Bulliet khawatir di Amerika Serikat sedang tumbuh sebuah bentuk baru anti-Semitisme, yang bukan didasari pada teori-teori ras Semitik, tapi pada Islam: “Tidak lama lagi kita akan mencapai suatu kondisi yang di dalamnya orang tak lagi perlu bukti untuk meyakini bahwa ancaman teroris selalu datang dari kaum fanatik Muslim yang religius.”³⁰ Beberapa pengamat makin memanas situasi dengan memperingatkan tentang adanya suatu jaringan internasional yang terkoordinasi dari kelompok-kelompok

“teroris Islam” di seluruh Amerika Serikat dengan senjata tertuju ke arah kepentingan-kepentingan Barat.³¹

Meski tidak ada bukti yang menunjukkan eksistensi sebuah “*Internationale Islam*”, pengeboman World Trade Center (1993) itu sangat merusak citra umat Muslim dan keberadaan mereka di Amerika. Seperti dikatakan James Brooke di harian *New York Times*, “dengan dikaitkannya Muslim dan terorisme domestik dalam benak banyak orang Amerika,” pengeboman itu menjadikan Muslim sasaran empuk rasisme dan diskriminasi politik.³² Contohnya, dalam survei pertama dari dua survei yang disebar tak lama setelah pengeboman itu untuk melihat sikap Amerika terhadap Islam, lebih dari 50 persen responden mengatakan bahwa “Muslim itu anti-Barat dan anti-Amerika.”³³ Di survei kedua, para responden diminta untuk menilai berbagai kelompok religius, dari yang paling disenangi sampai yang paling tak disukai. Muslim berada di puncak daftar yang paling tidak disenangi.³⁴

Peledakan di kota New York itu berdampak lebih luas lagi bagi kebijakan luar negeri Amerika. Seperti dikatakan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, pengeboman World Trade Center itu — dan karena kaitannya dengan perkembangan Hamas di Tepi Barat dan Gaza, dengan Hizbullah di Lebanon, serta kaum Islamis militan lainnya di Sudan dan Aljazair — merepresentasikan kemunduran dalam upaya pemerintahan Clinton untuk menggariskan kebijakan akomodasionis dan positif terhadap Islam.³⁵ Beberapa rezim Timur Tengah, khususnya Israel dan Mesir, berupaya memanfaatkan pengeboman itu dengan menekan AS agar makin mendukung mereka dalam memerangi kelompok-kelompok oposisi Islamis lokal. Di Amerika Serikat, mereka yang meyakini hipotesis perang peradaban berikut berbagai variasinya, menggunakannya untuk menerapkan kebijakan keras pada golongan Islamis.

Karenanya, peledakan WTC itu membuka lebar peluang bagi para konfrontasionalis di AS dan luar negeri untuk melobi pemerintahan Clinton agar merumuskan kebijakan yang lebih keras

terhadap para Islamis. Sebelum debu-debu sempat dibersihkan dari pengeboman sebuah gedung pemerintah di Oklahoma City pada April 1995, beberapa “pakar teroris” media sudah mengaitkannya dengan bangsa Arab, Muslim, dan orang-orang Timur Tengah.³⁶ Seorang komentator dari *New York Times* menegaskan bahwa walaupun pembantaian Oklahoma dilakukan oleh teroris Amerika, sebagian besar dari “serangan lain yang ditujukan pada orang Amerika berasal dari Timur Tengah”³⁷ — meski bukti-bukti yang dipaparkan FBI dan Deplu AS tidak menunjukkan hal itu.

Sumber-sumber FBI pada 1993 menyatakan, memang benar bahwa kaum radikal berlatar belakang Muslim yang mengebom WTC; tapi kendati tuduhan itu benar, sepanjang tahun tersebut ini merupakan satu-satunya tindak kekerasan yang dilakukan kelompok berlatar belakang Muslim di dalam negeri AS. Sebaliknya, berikut ini catatan FBI mengenai serangan teroris selama periode 1982-1992: terorisme oleh orang-orang Puerto Rico, 72 serangan; oleh kelompok-kelompok kiri, 23 serangan; oleh kelompok Yahudi, 16 serangan; oleh orang-orang Kuba anti-Castro, 12 kali; dan terorisme kelompok sayap kanan, 6 kali.³⁸ Sedangkan serangan teroris anti-Amerika yang terjadi di luar AS menunjukkan pola yang mirip: Tahun 1994, 44 kali terjadi di Amerika Latin, 8 serangan di Timur Tengah, 5 di Asia, 5 di Eropa Barat, dan 4 kali di Afrika.³⁹

Di tengah suasana panas seperti inilah Muslim di Amerika Serikat menjadi sasaran gangguan setelah pengeboman Oklahoma City, 1995. Tiga hari sesudah peledakan itu, terjadi lebih dari 200 penyerangan terhadap Muslim Amerika.⁴⁰ Pengeboman Oklahoma City ini menunjukkan bayangan negatif yang laten mewarnai pandangan masyarakat AS tentang Islam dan Muslim. Pengeboman ini juga memperlihatkan kesediaan media, jika membicarakan bangsa Arab/Muslim, untuk mengabaikan prinsip pemberitaan yang adil dan akurat. Perlu ditekankan bahwa sejarah media dalam menstereotipkan orang-orang Arab/Muslim ini seiring dengan budaya politik yang skeptis dan ambivalen tentang “orang-

orang lain” yang asing itu.

Di saat-saat krisis, konfrontasionalis naik daun dan mendominasi media dan berceramah ke mana-mana. Pada titik kritis inilah sikap Amerika terhadap bangsa Arab/Muslim mengeras. Beberapa jajak pendapat yang disebutkan sebelum ini membenarkan realitas ini. Bukannya memperlakukan peristiwa terorisme sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebagian pengamat melebih-lebihkannya dan menggambarkan mereka sebagai bagian dari perang sistematis melawan peradaban Barat. Mereka tidak melihat terorisme secara apa adanya — sebagai suatu tindakan putus asa dan kasuistis — tapi memandangnya sebagai bagian dari sikap anti-Barat dan anti-Amerikanisme. Dalam hal ini, teroris makin meracuni persepsi Amerika tentang Islam dan Muslim.

Bagusnya, ketika mendengar tuduhan-tuduhan awal bahwa pengeboman Oklahoma City bergaya terorisme Timur Tengah, Presiden Bill Clinton segera mengingatkan agar tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan: “Masalah ini tidak berkaitan dengan negeri atau asal seseorang. Tidak pula terkait dengan agama siapapun. Ini adalah pembunuhan. Ini kejahatan, dan ini tidak benar. Manusia di manapun, di seluruh dunia, akan mengutuk hal ini, apapun kepercayaan religius mereka, dan kita tidak boleh menstereotipkan siapapun.”⁴¹

Tetap saja, akibat langsung dari pengeboman Oklahoma City itu adalah dikeluarkannya RUU Perlawanan terhadap Terorisme (*Omnibus Counterterrorism Act*) tahun 1995, yang disetujui DPR (*House of Representatives*) dan Senat, dan kemudian disahkan menjadi Undang-undang oleh Presiden Clinton. Salah satu klausul di dalamnya mengizinkan pemerintah AS untuk memakai bukti dari sumber-sumber rahasia dalam proses pen deportasian orang asing yang dicurigai terlibat dalam terorisme, tanpa harus mengungkapkan sumber informasi tersebut. Klausul berikutnya membolehkan pemerintah untuk mendeportasi orang-orang asing yang memberi bantuan dana bagi organisasi-organisasi yang telah mendapat cap teroris oleh pemerintah.⁴²

Walau pejabat-pejabat pemerintahan Clinton tidak mengakui, para pengamat melihat pengesahan UU Perlawanan terhadap Terorisme ini sebagian ditujukan bagi “terorisme Timur Tengah”, nama lain untuk “terorisme Islam”.⁴³ Dalam dengar pendapat dengan Senat bulan April 1993, Laurence Pope, Pejabat Koordinator untuk Perlawanan terhadap Terorisme, mengamati: “Dua puluh tahun lalu, nasionalisme sekular adalah ideologi yang disukai di dunia Arab. Dan ideologi itulah yang dipakai teroris sebagai kedok tindakan mereka. Makin lama, ideologi Islam, ideologi Islam ekstremis, yang digunakan sebagai kedok.”⁴⁴ Seorang pejabat Amerika yang menangani masalah terorisme di Dewan Keamanan Nasional mengkonfirmasi pandangan ini: Di mata Amerika, Islamis telah menggantikan posisi nasionalis pan-Arab sebagai otak di balik terorisme di Timur Tengah; terorisme masa kini pada dasarnya terilhami oleh agama, bukan nasionalisme.⁴⁵

Meski menyetujui penilaian di atas, dua pejabat Dewan Keamanan Nasional lainnya menegaskan bahwa walau individu dan negara-negara yang melakukan terorisme tidak merepresentasikan Islam, mereka bisa dianggap demikian kalau Amerika Serikat dipandang sebagai anti-Islam. Walaupun pemerintahan Clinton, menurut para pejabat ini, tidak menerima pandangan pemerintah Israel, Mesir, dan Aljazair yang menyatakan kelompok oposisi Islam *mainstream* mempraktikkan teror, pemerintahan ini gagal secara efektif melihat perbedaan antara Islamis yang melibatkan diri di panggung politik dan Islamis yang menjalankan kekerasan. Kaburnya garis yang memisahkan dua kelompok ini bisa menjelaskan ambiguitas pernyataan-pernyataan kebijakan AS pada Islam politik.⁴⁶

Peran Media

Biarpun pemerhati masalah Amerika membenarkan bahwa pemberitaan negatif media utama mengenai Islam dan Muslim mempengaruhi persepsi serta sikap publik terhadap masyarakat Muslim, mereka kesulitan untuk mendeskripsikan hubungan

kompleks antara media tersebut dan kebijakan AS. Bagi beberapa pihak, “media dominan adalah anggota lembaga elit korporat itu sendiri,” sehingga ketegangan yang mendasar antara kebijakan luar negeri dan lembaga media memang jarang terjadi.⁴⁷ Dalam sudut-pandang ini, beberapa faktor menunjang situasi tersebut termasuk ketergantungan besar media pada sumber-sumber pemerintah untuk berita mereka, tidak adanya pesaing di masyarakat terhadap kampanye propaganda pemerintah, dan pemakaian senjata ideologis oleh pemerintah seperti anti-Komunisme, musuh yang ditampilkan sebagai setan, atau ancaman-ancaman hankamnas yang potensial. Hanya sesekali para jurnalis yang berada di luar jalur berani mempertanyakan dasar-dasar kebijakan resmi.⁴⁸

Sebuah perspektif yang agak berbeda melihat bahwa media menempatkan diri seakan harus sejalan dengan prasyarat seperti yang berlaku di era Perang Dingin dengan mengatasnamakan keamanan nasional, sehingga menghasilkan “jurnalisme keamanan nasional.”⁴⁹ Setelah Perang Dingin berakhir, Leon Hadar mengajukan pandangannya bahwa media, menuruti inisiatif mereka sendiri atau jejak-jejak elit kebijakan luar negeri AS, berspekulasi tentang munculnya musuh-musuh global yang baru. Dalam pandangan Hadar, hal ini menjelaskan minat pers pada Islam politik dan Iran, atau yang ia sebut “Bahaya Hijau (*the Green Peril*).”⁵⁰

Menurut pandangan ini, pers bukanlah bagian dari kelompok penentu kebijakan luar negeri tapi merupakan partisipan sukarela dalam perumusan kebijakan luar negeri dengan membantu “menggariskan batas-batas ruang pembuatan kebijakan.”⁵¹ Ini terbukti dalam kasus Islam dan Muslim, yang sering digambarkan secara negatif, sehingga menjadikan posisi mereka tidak menguntungkan dalam pandangan publik AS. Walaupun opini massa tidak terlalu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan luar negeri, namun opini elit sangat didengar; para pengambil keputusan dan anggota elit kebijakan memperoleh sebagian besar informasi dari pers.⁵² Satu pandangan menganggap media sebagai tangan

kanan negara, dengan pemberitaan negatifnya tentang Islam yang mendukung dan merefleksikan ketakutan serta prasangka para pembuat kebijakan AS, sedang pandangan lainnya melihat pers sebagai partisipan tak langsung dalam proses ini dalam batas ikut membentuk iklim pembuatan kebijakan. Kedua pandangan ini punya kesamaan: sama-sama menganggap bahwa pemberitaan tentang Islam dan Muslim banyak mengungkap pembuatan kebijakan Amerika Serikat.

Banyak pejabat AS yang tidak mengakui adanya hubungan antara penggambaran negatif tentang Islam di media dengan kebijakan Amerika. Asisten Menteri Luar Negeri Robert Pelletreau, misalnya, baik dalam debat publik maupun antar cendekiawan, mengkritik tajam peliputan media yang tendensius — yang menyamakan Islam dengan fundamentalisme dan ekstremisme Islam — tapi ia tidak memperhitungkan dampak pemberitaan media pada pembuatan kebijakan luar negeri dan sebaliknya.⁵³ Perumus kebijakan AS lainnya, kendati setuju bahwa arus informasi terjadi dalam segala tingkat antara lembaga-lembaga nonpemerintah dan pembuat kebijakan, menegaskan bahwa keinginan pembuat kebijakan Amerika untuk saling bertukar pikiran dengan media dan akademisi bergantung pada situasi yang ada dan kebutuhan akan manajemen krisis. Sebuah komentar yang sering terdengar adalah bahwa para pemimpin AS mendasarkan keputusan-keputusan mereka pada persepsi mereka tentang kepentingan nasional.⁵⁴

Ditambah lagi, cara para pejabat AS mendefinisikan kepentingan nasional terkait erat dengan persepsi mereka tentang realitas — dan kebijakan tidak dirumuskan dalam ruang hampa. Peran Kongres, media, dan pertimbangan-pertimbangan situasi dalam negeri, semua ini mendorong kebijakan dan mempengaruhi opini dalam komunitas kebijakan luar negeri, khususnya pada isu-isu semacam konflik Arab-Israel dan Islam politik.⁵⁵ Samuel Lewis, mantan direktur staf Perencana Kebijakan Departemen Luar Negeri, mengakui bahwa pemberitaan miring oleh media tentang “kelompok-kelompok Islamis ekstremis” membentuk persepsi

bangsa Amerika mengenai Islam, dan hal ini menyulitkan kerja para perumus kebijakan AS.⁵⁶ Malah, penggambaran negatif media tentang Muslim, menurut jajak pendapat yang disebutkan di atas, telah menjadi bagian integral dari kesadaran publik.⁵⁷

Peran Israel dan Kawan-kawannya

Haim Baram, seorang penulis Israel, melihat sejak kejatuhan Uni Soviet dan runtuhnya Komunisme, para pemimpin Israel telah mencoba untuk meraih dukungan AS dan Eropa dalam perang melawan fundamentalisme Islam, yang mereka gambarkan teramat dramatis sebagai musuh besar; strategi mereka disusun untuk meyakinkan opini publik dan perumus kebijakan Amerika Serikat tentang nilai strategis Israel yang akan terus berlanjut dalam sebuah dunia yang kacau balau.⁵⁸ Sebuah tinjauan sepintas tentang pendirian-pendirian para politisi Israel menggambarkan keyakinan kuat mereka mengenai ancaman Islam politik. Contohnya, sudah sejak tahun 1992 mantan Presiden Israel Herzog mengatakan pada parlemen Polandia bahwa “penyakit (fundamentalisme Islam) ini menyebar cepat dan membawa bahaya bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi seluruh umat manusia.”⁵⁹

Dalam kunjungan yang kerap dilakukannya ke Amerika Serikat, mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin sering menyebut “bahaya Islam” untuk meyakinkan bangsa Amerika bahwa “Iran menyimpan ancaman yang sama seperti Moskow di masa lalu.” Ketika mengunjungi AS beberapa hari setelah pengeboman WTC tahun 1993, Rabin berkata pada Clinton, “fundamentalisme yang digerakkan Iran sedang menyebar ke dalam institusi-institusi Muslim di Barat.”⁶⁰ Shimon Peres, bekas perdana menteri Israel, lebih lugas lagi: “Setelah kejatuhan Komunisme, fundamentalisme telah menjadi bahaya terbesar di jaman ini.” Dalam pidatonya yang lain, Peres mengungkapkan lagi kejahatan Nazisme dan Komunisme, mengingatkan adanya gelombang ancaman fundamentalisme Islam yang, menurut dia, “seperti Komunisme yang mengambil slogan Machiavelli yang menganggap tujuan mengha-

lalkan segala cara, sehingga ini menjadi surat izin untuk berbohong, untuk menghancurkan, untuk membunuh.”⁶¹

Menurut Elaine Sciolino dan Arthur Lowrie, bekas pejabat Departemen Luar Negeri AS, momentum kampanye anti-Islamis di Amerika ini menunjukkan bahwa “pandangan yang dianut para pemimpin Israel makin diyakini pendukung mereka dan pihak-pihak lain.”⁶² Lalu sejauh mana pandangan Israel dan upaya lobi mereka mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika bagi Islam politik? Kebanyakan pejabat AS di Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional tidak mengakui adanya koneksi Israel dalam perumusan kebijakan Amerika terhadap Islamis, dan menyatakan bahwa kepentingan nasional AS adalah satu-satunya pertimbangan.⁶³

Tentu ada saja beberapa suara yang beda. Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, “kita cukup banyak dipengaruhi oleh gambaran Israel tentang kelompok Islamis. Cukup luas pengaruh pandangan Israel tentang fundamentalisme Islam membentuk persepsi pejabat-pejabat AS akan fenomena ini.”⁶⁴ Pejabat lain dari departemen ini mengamati bahwa kecurigaan AS terhadap kaum Islamis ada kaitannya dengan sikap kelompok ini pada perdamaian dengan Israel, sebuah isu kebijakan luar negeri yang sangat penting bagi AS.⁶⁵

Janji Presiden Clinton di depan parlemen Yordania bulan Oktober 1994 untuk menghentikan “kekuatan-kekuatan gelap teror dan ekstremisme” jelas ditujukan ke arah kelompok-kelompok Islamis militan, yang menentang proses perdamaian Arab-Israel.⁶⁶ Nada yang bisa ditangkap dari suara para pejabat Amerika, di barisan pimpinan pemerintahan yang berbeda-beda, sangat siaga dan responsif terhadap gambaran Israel tentang keamanannya di Timur Tengah. Arthur Lowrie, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, menegaskan bahwa kebijakan Clinton dalam pembendungan-ganda terhadap Iran dan Irak serta pernyataannya di tahun 1995 mengenai embargo besar-besaran atas Iran dipengaruhi upaya-upaya lobi dan tekanan politik kawan-kawan

Israel.⁶⁷ Mirip dengannya, penulis sebuah artikel di *Economist* mencurigai Clinton bergantung pada informasi yang diberikan Israel agar tampak tegas dalam isu hangat hari ini — terorisme.⁶⁸ Pandangan yang diangkat *Economist* ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang masukan dari kelompok-kelompok kepentingan dan penekan dalam membentuk kebijakan.

Pengaruh Kongres dalam Kebijakan Luar Negeri AS

Lebih daripada di negara manapun di dunia, Kongres memainkan pengaruh yang menentukan bagi kebijakan AS terhadap Timur Tengah, dengan tampilnya lembaga ini sebagai pengambil keputusan dalam tiga dekade terakhir, meski presiden punya daya dan ruang gerak lebih besar di bidang geopolitik ini. Tokoh-tokoh pemerintahan Clinton yang saya wawancarai menunjukkan ketidaksukaan mereka akan suasana umum di Kongres. Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional menyatakan bahwa Kongres dan publik menganut pandangan-pandangan “simplistik” dan “berprasangka” terhadap Islam dan Muslim.⁶⁹ Menurut Elain Sciolino dari *The New York Times*: “Dengan tidak adanya ancaman kuat lain bagi AS, radikalisme Islam juga telah mengkhawatirkan Kongres secara berlebihan.”⁷⁰

Sebuah pemandangan umum Kongres memperlihatkan kece-
masan besar terhadap ancaman-ancaman keamanan berkaitan
dengan bangkitnya Islam politik. Ini termasuk terorisme, kepemilikan senjata nuklir, dan keamanan Israel dan negara-negara Teluk. Mantan Ketua DPR Newt Gingrich menyerukan “sebuah strategi AS yang koheren untuk memerangi totalitarianisme Islam.”⁷¹ Acara dengar pendapat Kongres sering meriah dengan isu-isu ancaman yang dilancarkan Timur Tengah dan “terorisme” Islam pada keamanan Amerika dan Barat.⁷² Anggota DPR Ileana Ros-Lehtinen menuduh Departemen Luar Negeri yang tidak menganggap serius kesamaan watak di kalangan “ekstremisme Islam” dan malah menonjolkan sifat eklektik dan keragamannya; dalam pandangannya, kelompok-kelompok Islam mewakili gerakan mo-

nolitik “yang bersumpah untuk menumpas Setan Besar Amerika demi kejayaan global Islam.”⁷³

Ketua Komisi Hubungan Internasional DPR, Benjamin Gilman, Republikan-New York, menyerang kebijakan terorisme pemerintahan Clinton yang dianggapnya tidak efektif. Gilman memanfaatkan bobolnya pertahanan dan keamanan dengan pengeboman WTC untuk menuntut perubahan besar dalam Undang-undang imigrasi AS: “Kita tidak bisa terus membiarkan orang-orang ini (Syekh Omar Abdul Rahman dan pengikutnya) masuk ke negara kita. Hukum telah keliru. Kita telah membiarkan Amerika kita menjadi tempat sampah para preman, teroris, dan orang-orang yang tidak punya kebaikan apapun. Mereka cuma ingin menghancurkan Amerika. Saya menuntut dilakukannya perubahan, dan harus segera dimulai besok pagi.”⁷⁴

Apakah Kongres memang berpengaruh dalam pendekatan AS terhadap Islam politik? Sejumlah pejabat Amerika telah mengungkapkan bahwa persepsi publik dan Kongres tentang Islam memang berpengaruh dan membatasi proses perumusan kebijakan.⁷⁵ Penggambaran gerakan Islam sebagai kekuatan jahat, menurut seorang mantan pejabat Deplu, membikin Amerika sulit untuk mengambil kebijakan yang konstruktif.⁷⁶ Sebuah contoh bagus adalah persetujuan pemerintah Clinton pada Desember 1995 untuk mengirim bantuan tertutup sebesar US\$ 20 juta untuk mengubah pemerintahan Iran atau paling tidak mengubah perilakunya.⁷⁷

Ketua DPR Newt Gingrich, mantan anggota *ex-officio* Komisi Intelijen DPR, yang juga berhak mengangkat anggota dari partai Republik, menggunakan pengaruhnya terhadap pembelanjaan pemerintah untuk mendorong Presiden mendanai “misi rahasia”, dengan mengabaikan masukan dari CIA dan pemerintah bahwa tidak ada alternatif lain bagi kepemimpinan Iran saat itu dan bahwa kebijakan seperti itu sangat mungkin menyulut paranoia dan anti-Amerikanisme di Teheran.⁷⁸ Hasilnya adalah Kongres “melumpuhkan” gerak Presiden, memaksanya mengambil tindakan

yang dapat mengundang pukulan balik bagi kepentingan AS. Dengan setuju menjalankan rencana “rahasia” Gingrich, Clinton tunduk pada keinginan Kongres dalam isu kebijakan luar negeri yang penting. Ini satu cara Kongres untuk secara tak langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS.

Contoh lainnya adalah keputusan Presiden Clinton pada April 1995, yang pertama kali diumumkan di depan Kongres Yahudi Sedunia (*World Jewish Congress*), untuk menerapkan embargo perdagangan total terhadap Iran dalam upaya mengubah perilaku negara itu. Lagi-lagi, keputusan Presiden ini, seperti diamati Todd S. Purdum dari *New York Times*, dipenuhi warna politik dalam negeri. Pejabat-pejabat pemerintahan Clinton sangat sadar bahwa sentimen anti-Iran hangat di Senat dan DPR, dengan adanya beberapa usul yang ditujukan untuk menghukum bukan saja Iran tapi juga perusahaan-perusahaan asing yang terus berbisnis dengannya. Dengan bertindak sendirian, Gedung Putih berharap bisa melangkah mendahului dan menggagalkan RUU anti-Iran yang diajukan kubu Republik di Kongres.⁷⁹

Tapi tindakan-tindakan Presiden ini tidak berhasil melunakkan para anggota Senat dan DPR yang berpengaruh. Dalam sebuah sidang dengar-pendapat di Capitol Hill, Kongreswan Gilman melihat celah untuk menambah sanksi bagi Iran dengan mengingatkan Asisten Menlu Pelletreau bahwa pemerintah tidak bisa bertindak tanpa tekanan terus menerus dari Kongres. Gilman juga menyatakan bahwa pandangan Kongres tentang embargo ekonomi tersebut sebagai “sebuah awal dan bukan akhir dari proses,” dan ia menuntut dilancarkannya tekanan terhadap perusahaan-perusahaan asing yang masih berbisnis dengan Iran.⁸⁰ Sekali lagi, Presiden tunduk pada kemauan Kongres ketika Kongres mengajukan rancangan legislasi untuk menghukum perusahaan asing manapun yang menginvestasikan US\$ 40 juta atau lebih di sektor perminyakan dan industri Iran. Meski diperingatkan Eropa dan Jepang, Clinton menyetujui rancangan ini menjadi undang-undang pada musim panas 1996.

Tekanan efektif yang diterapkan Kongres pada pemerintahan Clinton menunjukkan besarnya pengaruh badan legislatif dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Kasus Iran hanyalah satu contoh yang memperlihatkan bagaimana Kongres memantau ketat kebijakan luar negeri AS selain juga terlibat dalam perumusannya.❀

Catatan

1. *Europe and the Mystique of Islam*, h. 3.
2. *Islam in European Thought* (New York: Cambridge University Press, 1991), h. 7-8, 10.
3. Norman Daniel, *Islam and the West: The Making of an Image* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960), h. 127.
4. Rodinson, *Europe and the Mystique of Islam*, bab 1.
5. Hourani, *Islam in European Thought*, h. 8; John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, h. 25; Bernard Lewis, "Islam and Liberal Democracy," h. 89.
6. *Der Christliche Glaube in Samtliche Werke*, ed. kedua, vol. 3, pt. 1, (Berlin, 1842), h. 47; *The Christian Faith English Trans.* (Edinburgh, 1928), h. 37.
7. Fuller dan Lesser, *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West*, h. 19-20.
8. Fred Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East*, h. 182-4.
9. Dean Acheson, *Present at the Creation: My Years in the State Department* (New York: New American Library, 1969); Fawaz A. Gerges, "The Kennedy Administration and the Egyptian-Saudi Conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism," *Middle East Journal* 49, no. 2 (Spring 1995), h. 1-20.
10. Francis J. Russell, "U.S. Policies Toward Nasser," makalah oleh Asisten Khusus Menteri Luar Negeri pada 4 Agustus 1956, dalam *Foreign Relations of the United States: Suez Crisis*, 1956, vol. 16 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1989), h. 86, 142. Lihat juga Richard W. Cottam, "U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy," dalam Nikki R. Keddie dan Mark J. Gasiorowski, ed., *Neither East Nor West: Iran, the Soviet Union and the United States* (New Haven, CT: Yale University Press, 1990), h. 267-70.
11. *Foreign Relations of the United States, 1955-1957: Arab-Israeli*

- Dispute*, 1 Januari-26 Juli, 1956, vol. 15 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1989), h. 325-6, 341, 343, 355, 362, 422-3. Lihat Departemen Luar Negeri AS, "Memorandum of Conversation. Subject: U.S.-UAR Relations, 17 September 1965," dalam *The Lyndon B. Johnson National Security Files, the Middle East: National Security Files, 1963-1969* (Frederick, MD: University Publications of America, 1989), bundel ke-8 dari 8. Lihat juga Ahmed Hamroush, *Qissa taura 23 Yulio: Karif Abdel-Nasser* [Kisah Revolusi 23 Juli: Musim Gugur Abdel Nasser], vol. 5 (Cairo: Maktaba al-Madbuli, 1984), h. 82-3.
12. Esposito, *The Islamic Threat*, h. 17; Cottam, "U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy," h. 277; Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*, h. x.
 13. Brzezinski, *Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983), h. 532-3.
 14. Esposito, *The Islamic Threat*, h. 17; Said, *Covering Islam*, h. x, 33.
 15. Menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri, wawancara di Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
 16. Ibid. Para pejabat AS lainnya, yang pernah ditemui oleh John Esposito, melihat Islam politik melalui prisma Iran/Khomeini. Lihat Esposito, ed., *Symposium: Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), h. 9.
 17. Dikutip dalam Gary Sick, *All Fall Down: America's Fateful Encounter with Iran*, h. 277.
 18. Ibid., h. 275.
 19. Jimmy Carter, *Keeping Faith: Memoirs of a President* (New York: Bantam Books, 1982), h. 12, 499, 506.
 20. Di sini perlu ditambahkan koreksi. Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa pandangan yang rendah terhadap Arab/Muslim sebagian besar karena persepsi orang Amerika bahwa orang Arab/Muslim tak suka pada Amerika Serikat dan anti-Kristen. Temuan ini mengungkapkan bahwa pandangan rendah orang Amerika terhadap kaum Muslim hanya sekadar reaksi yang defensif. Misalnya, di antara orang-orang Amerika yang percaya bahwa umat Muslim menghormati agama Kristen, 45,8 persen menilai baik orang Arab. Sebaliknya, di antara para responden yang percaya bahwa kaum Muslim membenci agama Kristen, hanya 28,5 persen yang berpandangan baik terhadap orang Arab. Lihat Shelley Slade, "The Image of

- the Arab in America: Analysis of a Poll on American Attitudes,” *Middle East Journal*, h. 148-9, 158.
21. *Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy* (New York: Simon & Schuster, 1983), h. 408, 410.
 22. Kissinger mengatakan bahwa “Iran di bawah Shah, pendeknya, merupakan salah satu sahabat Amerika yang terbaik, terpenting dan paling loyal di dunia”. Lihat bukunya, *White House Years* (Boston: Little, Brown & Company, 1979), h. 1262.
 23. Cottam, “U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy,” h. 276. Lihat juga Jacob Goldberg, “The Shi’i Minority in Saudi Arabia,” dalam Juan R.I. Cole dan Nikki R. Keddie, ed., *Stoicism and Social Protest* (New Haven, CT: Yale University Press, 1986), h. 242-3.
 24. Brzezinski, *Power and Principle*, h. 484, 533; Esposito, *The Islamic Threat*, h. 21-2.
 25. Slade, “The Image of the Arab in America,” h. 148-9, 157. Permusuhan Iran terhadap Amerika Serikat, berikut penekanannya pada konflik antara Islam dan Barat, hanya semakin menguatkan persepsi tentang orang Arab dan Muslim sebagai bersikap inheren anti-Kristen dan anti-Barat.
 26. Fuller dan Lesser, *A Sense of Siege*, h. 22.
 27. Wawancara lanjutan, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
 28. “Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran,” State Department Briefing, dalam *Federal News Service*, 1 Mei 1995, h. 1.
 29. *New York Times*, 2 Oktober 1995.
 30. Pengantar, dalam Bulliet, ed., *Under Siege: Islam and Democracy*, Occasional Papers 1 (New York: The Middle East Institute of Columbia University, 1994), h. iii; lihat juga h. 4, 11. Ironisnya, umat Kristen abad pertengahan percaya bahwa kaum Muslim itu barbar, makhluk irasional, dan tindakan-tindakan Muhammad sering dikedukakan sebagai contoh tentang bagaimana Islam mendorong dan memuji penggunaan kekerasan. Jacques de Vitry menulis bahwa “penggunaan kekerasan dalam Islam diturunkan dari praktik-praktik Muhammad sendiri.” Dikutip dalam Daniel, *Islam and the West*, h. 123-4.
 31. Lihat dokumenter PBS tentang jihad di Amerika, ditayangkan 21 November 1994.
 32. “Attacks on U.S. Muslims Surge Even as Their Faith Takes Hold,” *New York Times*, 28 Agustus 1995.

33. Survei yang disponsori oleh National Conference on Inter-Group Relations, Ford Foundation, dan Joyce Foundation. Dilaksanakan antara 6 dan 8 Agustus 1993 oleh L. H. Research. Jumlah responden adalah 2.755.
34. Survei yang disponsori oleh American Muslim Council dan dilaksanakan antara 16 dan 23 Maret 1993 oleh John Zogby Group International. Jumlah responden adalah 905.
35. Lanjutan wawancara Princeton, 27 Mei 1995.
36. *CBS Evening News*, 19 April 1995; *New York Times*, 20 April 1995; *Washington Post*, 20 April 1995; *International Herald Tribune*, 26 April 1995; Lihat juga Arthur L. Lowrie, "The Campaign Against Islam and American Foreign Policy," *Middle East Policy* 4, no. 1 and 2 (September 1995), h. 213.
37. A. M. Rosenthal, "Things America Can Do to Curtail Terrorism, Domestic and Foreign," dimuat ulang di *International Herald Tribune*, 26 April 1995.
38. Federal Bureau of Investigation, *Terrorist Research and Analytical Section*, 1995.
39. Departemen Luar Negeri AS, *Patterns of Global Terrorism* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, April 1995), h. 67.
40. Brooke, "Attacks on U.S. Muslims Surge," *New York Times*, 28 Agustus 1995.
41. Dikutip dalam *New York Times*, 21 April 1995.
42. Untuk latar-belakang tentang isu-isu yang kompleks di seputar undang-undang kontraterorisme, lihat artikel-artikel relevan dalam *New York Times*, 21, 24, 27, 29, dan 30 April; 8 dan 9 Juni; dan 3 Oktober 1995.
43. Anthony Lewis, "This Is America," *New York Times*, 1 Mei 1995. Beberapa kelompok Zionis mengatakan bahwa mereka berharap tindakan ini dapat diterapkan untuk menguras potensi-potensi sumbangan di Amerika Serikat bagi kelompok-kelompok teroris seperti Hamas, sebagaimana dilaporkan dalam *New York Times*, 21 April 1995.
44. Dengar pendapat Komisi Hukum Senat. *Terrorism and America: A Comprehensive Review of the Threat, Policy, and Law*, 21 April 1993. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, Serial No. J-103-9, 1994.
45. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995. Hal serupa diungkapkan oleh seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri yang

- diwawancarai pada 27 Mei 1995 di Princeton.
46. Wawancara, Washington, DC, 29 dan 30 Maret 1995.
 47. Edward S. Herman, "The Media's Role in U.S. Foreign Policy," *Journal of International Affairs* 47, no. 1 (Summer 1993), h. 25. Lihat juga Leon V. Sigal, *Reporters and Officials: The Organization and Politics of Newsmaking* (Lexington, MA: D.C. Heath, 1973), h. 42-9.
 48. Sigal, *Ibid.*, h. 42-60; Herman, "The Media's Role in U.S. Foreign Policy," h. 26.
 49. William Dorman menekankan penegasan ini dengan menyebut bahwa media AS tidaklah monolit dan bahwa para wartawan tidak menerima perintah dari pejabat di Washington; tetapi, "dampak-dampak ideologi itu beroperasi melalui jalinan budaya ketimbang karena pengarahan." Lihat karyanya, "Media, Public Discourse, and U.S. Policy Toward the Middle East," dalam H. Amirahmadi, ed., *The United States and the Middle East: A Search for New Perspectives* (Albany: State University of New York Press, 1993), h. 289, 291-2, 304.
 50. Leon Hadar, "The Media and Islam," dalam Bulliet, ed., *Under Siege*, h. 64.
 51. Dorman, h. 289, 291.
 52. *Ibid.*, h. 297. Pada tingkat lain, Andrea Lueg menegaskan bahwa penggambaran negatif media Barat tentang Islam merupakan sumber utama bagi konsepsi Barat tentang Islam dan wilayah tempat mayoritas besar umat Muslim berada. Lihat Lueg, "The Perception of Islam in Western Debate," dalam Hippler dan Lueg, ed., *The Next Threat: Western Perceptions of Islam*, (Boulder, CO: Pluto Press, 1995), h. 7, 15-16.
 53. Pelletreau dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 2.
 54. Wawancara dengan para pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 55. Wawancara dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 56. Wawancara dengan Lewis, Chicago, IL, 23 Februari 1995.
 57. Slade, "The Image of the Arab in America," h. 144-5, 147, 150, 157.
 58. Haim Baram, "The Demon of Islam," *Middle East International*, 2 Desember 1994, h. 8.
 59. Dilaporkan dalam *Guardian*, 19 June 1992.
 60. Dilaporkan dalam *New York Times*, 23 Februari 1993. Lihat juga

Baram, "The Demon of Islam," h. 8.

61. Dikutip oleh Elaine Sciolino, "The Red Menace Is Gone," *New York Times Sunday*, 21 Januari 1996, seksi *Week in Review*. Lihat juga Todd Purdum, "Clinton to Order a Trade Embargo Against Tehran," *New York Times*, 1 Mei 1995.
62. Sciolino, *ibid.*, dan Lowrie, "The Campaign Against Islam and American Foreign Policy," h. 212.
63. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995. Wawancara dengan seorang pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
64. Wawancara Princeton, 27 Mei 1995.
65. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Departemen Luar Negeri, 27 Maret 1995.
66. "Remarks by President Clinton to the Jordanian Parliament," *The White House, Office of the Press Secretary*, Amman, Yordania, 26 Oktober 1994, h. 1.
67. Lowrie, "The Campaign Against Islam and American Foreign Policy," h. 215-16.
68. "Punishing Iran," 6 Mei 1995. dalam testimoni di depan Komisi Luar Negeri DPR pada Juli 1993, Menteri Muda untuk Urusan Global Timothy Wirth mengakui bahwa pemerintah AS memiliki "kontak-kontak yang amat sangat baik dengan intelijen Israel," khususnya tentang Iran. Lihat U.S. House of Representatives, *The Future of U.S. Anti-Terrorism Policy*, "Hearing Before the Subcommittee on International Security, International Organizations, and Human Rights of the Committee on Foreign Affairs, 13 Juli 1993" (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1993), h. 23.
69. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
70. "The Red Menace Is Gone," 21 Januari 1996.
71. Dikutip dalam Sciolino dalam *Ibid.*
72. Menurut Anggota DPR Ileana Ros-Lehtinen, ketua Subkomisi tentang Afrika, "Militer Islam telah muncul sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap keamanan Barat." Lihat "The Threat of Islamic Extremism in Africa," Testimoni Ileana Ros-Lehtinen, Komisi Hubungan Internasional, U.S. House of Representatives, *Federal News Service*, 6 April 1995, h. 1.
73. *Ibid.*
74. Menurut Gilman, kutipan ini diambil dari surat yang dikirim kepadanya oleh seorang konstituennya di New York, seperti dikutip

oleh Laurence Pope selama dengar pendapat di Komisi Hukum Senat, "Terrorism and America", h. 2. Ungkapan Gilman harus ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas. Pengeboman-pengeboman World Trade Center dan Oklahoma City, menurut sosiolog Nathan Glazer dari Harvard, memusatkan perhatian di Amerika Serikat pada "Para imigran Timur Tengah beserta kegiatan-kegiatan politik mereka, meski pelakunya [dalam kasus Oklahoma] ternyata berada di kelompok lain." Lihat Nathan Glazer, "Debate on Aliens Flares Beyond the Melting Pot," *New York Times*, 23 April 1995.

75. Namun demikian, para diplomat ini menekankan bahwa kebijakan AS terhadap Islam politik pada akhirnya ditentukan oleh pernyataan-pernyataan resmi, yang tidak "sensasional dan didorong oleh perasaan panik." Diambil dari wawancara dengan seorang pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995 dan wawancara dengan seorang pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
76. Lowrie, "The Campaign Against Islam," h. 215.
77. Tim Weiner, "U.S. Plan to Change Iran Leaders Is an Open Secret Before It Begins," *New York Times*, 26 Januari 1996.
78. Ibid.
79. Purdum, "Cinton to Order a Trade Embargo Against Tehran," *New York Times*, 1 Mei 1995. Lihat juga "Punishing Iran," dalam *Economist*, h. 14.
80. "Hearing with Defense Department Personnel; House International Relations Committee; International Economic and Trade Subcommittee — U.S. Sanctions on Iran," *Federal News Service*, 2 Mei 1995, h. 4.

Pendekatan Pemerintahan Carter, Reagan, dan Bush terhadap Islamis



Belum lama ini kita melihat kemungkinan terjadinya, secara harfiah, sebuah perang agama — kaum Muslim kembali ke gagasan lama bahwa jalan ke surga adalah dengan mati melawan orang Kristen atau Yahudi.¹

— Presiden terpilih Ronald Reagan

MEMAHAMI jurang perbedaan antara para akomodasionis dan konfrontasionalis penting bukan hanya karena hal ini mempengaruhi politik dalam negeri Amerika Serikat, tapi juga karena ia memberikan dasar intelektual bagi kebijakan Amerika terhadap Islam politik. Berbagai persepsi pemerintahan AS tentang Islamis menyamai pandangan dua aliran yang berlawanan ini. Menurut seorang anggota staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, pandangan kedua aliran ini cukup kuat menyebar dalam kelompok pembuat kebijakan AS: “Kalangan garis-keras ingin langsung bertempur dengan Islamis militan, sedangkan para liberal memilih dialog, diplomasi, dan rekonsiliasi dengan kaum Islamis.”²

Terbenturnya Carter dengan Islam Politik: Revolusi Iran

Meski Presiden Carter dan Reagan menyaksikan kebangkitan gerakan Islam di Timur Tengah, tapi karena menghadapi pilihan kebijakan yang sulit di wilayah ini, tidak satu pun dari mereka yang memaparkan secara terbuka gagasan-gagasan sistematis mengenai Islam politik. Keduanya sibuk mengurus persaingan Perang Dingin dengan Uni Soviet. Yang dilihat sebagai musuh utama saat itu adalah Komunisme, bukan aktivisme Islam. Di samping makin intensnya semangat Islamis dalam beberapa masyarakat Muslim, fokus strategi para pejabat pemerintahan Carter dan Reagan tidak berpindah dari Uni Soviet, dan mereka lebih melihat kaum Islamis baru sebatas gangguan dibanding sebagai ancaman serius. Lebih jauh lagi, pemerintahan Carter dan Reagan menunjukkan kemauan untuk meredam perbedaan-perbedaan mereka dengan Islamis dan merapatkan barisan AS dengan mereka untuk bersama melawan orang Rusia. Dukungan Amerika untuk kaum mujahidin, gerakan perlawanan Afghanistan, adalah satu contoh kasus.

Tapi tetap saja, pengalaman pertama Carter dan Reagan dengan Islamis, dan ketidakmampuan mereka berespon efektif terhadap gelombang-gelombang Islamis baru, secara negatif mempengaruhi pandangan Amerika tentang Islam dan Muslim pada umumnya. Hanya sedikit peristiwa yang berdampak kritis bagi pandangan dan kebijakan AS terhadap Islam politik dibanding terhadap revolusi Iran tahun 1979 itu. Revolusi Islam di Iran dan hilangnya satu negara klien yang penting mengagetkan pemerintahan Carter dan bisa dianggap sebagai kemundurannya yang terbesar. Untuk sedikitnya satu dekade, Amerika telah membangun hubungannya dengan Iran hampir secara eksklusif melalui satu orang Shah. Pada 1972, Presiden Richard Nixon telah memberitahu Shah bahwa ia bisa membeli senjata konvensional Amerika manapun yang ia inginkan, dan menunjuknya sebagai polisi di Teluk Persia.³ Sehingga, “jatuhnya Shah,” seperti dinyatakan mantan Asisten Urusan Keamanan Nasional Brzezinski, “meru-

pakan bencana secara strategis bagi AS dan secara politis bagi Carter sendiri.”⁴

Sejak awal krisis Iran, tugas Presiden Carter dipersulit dengan saran-saran berlawanan dari para pembantunya. Di satu sisi, pejabat-pejabat pemerintah menganjurkan penerapan pendekatan yang paling efektif bagi kaum revolusioner baru ini. Di sisi lain, “banyak dari sumber intelijen Carter,” menurut James Bill, “memberikan gambaran yang sangat meleset tentang Iran.”⁵ Walau pada mulanya Duta Besar AS untuk Teheran, William Sullivan, menyerukan untuk mengucilkan Khomeini dan bekerja sama hanya dengan Syah, ia lama kelamaan berubah pikiran dan menyarankan untuk membuka dialog antara militer Iran dan Khomeini. Dialog semacam itu, menurut Sullivan, bisa melicinkan transisi ke sebuah perjanjian politik baru.⁶

Dengan mengesampingkan Sullivan dan beberapa pandangan di Departemen Luar Negeri, kebanyakan pejabat AS secara terang-terangan tidak setuju dengan pengalihan perhatian pada Khomeini. Mereka khawatir akan dampak buruk dari perebutan kekuasaan oleh Khomeini atas kepentingan Barat: Iran di bawah Khomeini adalah sasaran empuk bagi kaum kiri radikal dan kekuatan-kekuatan religius. Brzezinski meyakini bahwa Khomeini merepresentasikan kekuatan “fundamentalisme Islam yang menentang secara terbuka pemerintahan yang sedang berkuasa.”⁷ Mirip dengannya, Jenderal Robert Huyser, yang dikirim ke Teheran untuk “mendukung militer melakukan kudeta,” sampai pada kesimpulan serupa: kembalinya Khomeini ke Iran merupakan potensi terbesar untuk sebuah bencana dahsyat.⁸

Dari semua penasihat Carter, Brzezinski dan Jenderal Huyser paling gigih melobi untuk solusi militer bagi Iran — dibutuhkan suatu “pengambilalihan militer”, menurut mereka. Berlawanan dengan Brzezinski dan Huyser, Duta Besar Sullivan menyampaikan bahwa struktur politik Iran sedang runtuh, termasuk militernya.⁹ Saran-saran yang bertolak belakang ini menjadikan Carter tak mampu mengambil keputusan, dan posisinya pun

lemah. Inilah yang kemudian mendorong Carter untuk mengikuti saran Brzezinski. Setelah perginya Syah dari Teheran, sebagian pembuat kebijakan AS mendorong angkatan bersenjata Iran untuk melakukan kudeta pada saat Khomeini memutuskan untuk pulang dari pengasingannya di Paris. Seperti dinyatakan Carter: "Ancaman kudeta militer adalah cara terbaik untuk mencegah Khomeini mengambil kekuasaan."¹⁰

Tapi tetap saja, untuk urusan penyusunan kebijakan yang konsisten terhadap Iran, Amerika Serikat tidak mampu. Kesulitan ini muncul bukan hanya karena saran-saran yang berlawanan dalam pemerintahan Carter, tapi juga karena pemerintahan ini, menurut pejabat urusan Iran Henry Precht, salah informasi mengenai kaum religius baru yang menguasai kehidupan politik di Iran. Lebih jauh lagi, menurut pakar Iran James Bill, para pendukung kuat Pahlevi di Amerika berusaha untuk mengecilkan revolusi tersebut dengan menggambarkan kaum revolusioner itu sebagai orang-orang tak beradab, barbar, dan fanatik. Mereka juga melukiskan revolusi itu sendiri sebagai perilaku menyimpang yang acak-acakan dan tidak mendapat dukungan dari bangsa Iran.¹¹ Ini belum lagi ditambah dengan perilaku kaum revolusioner itu yang anti-Amerika dan menjalankan "ekspor revolusi" ke negara-negara tetangga.¹²

Bukannya melihat peluang rekonsiliasi dengan para ulama berpengaruh di Teheran setelah Syah terguling, pemerintahan Carter malah menjauh dari para Islamis yang tak dikenal dan sulit dipahami ini, dan lebih memilih untuk berurusan dengan kaum moderat berpendidikan Barat yang secara resmi memegang pemerintahan sementara.¹³ Pendukung perubahan dalam pemerintahan Carter biasanya terpentok dengan isu Iran.¹⁴ Selain tidak mempercayai para mullah, para pejabat AS juga menganggap remeh kekuatan politik dan besarnya pengaruh seruan mereka. Untuk "preman-preman jalanan" yang menyulut sentimen anti-Amerika dan untuk berbagai pernyataan serta tindakan "irasional" Khomeini, yang tersisa pada Carter hanyalah rasa muak.¹⁵ "Kita

sedang menghadapi orang-orang sinting di Iran,” tulis Kepala Staf Carter, Hamilton Jordan.¹⁶

Perang Budaya atau Perang Kepentingan Negara?

Di tengah-tengah salah-tafsir Amerika terhadap panggung Iran ini, menurut Gary Sick, anggota staf Dewan Keamanan Nasional untuk Iran dan pembantu utama Brzezinski selama krisis Iran, terdapat sebuah bias budaya yang amat besar: Yang terjadi adalah pandangan-dunia dan sistem nilai yang bertentangan — dunia dari sudut-pandang teokratis Islam Khomeini di satu sisi, dan pandangan sekular Barat Carter di sisi seberang. Menurut Sick, walaupun Khomeini dan Carter sama-sama religius, tidak ada kesamaan dalam kepercayaan mereka: “Khomeini adalah arketip dari seorang nabi masa silam yang muncul dari padang pasir dengan visi berkobar tentang kebenaran absolut. Tuhannya adalah tuhan yang kejam dan penuntut balas — penuh kemarahan, meminta pengorbanan bagi pelanggaran manusia terhadap hukum suci tuhan... Khomeini adalah manusia yang dipenuhi kebencian — kebencian pada Syah, kebencian pada Carter dan Amerika, kebencian pada mereka yang berani menentang pandangannya.”¹⁷

Sick menambahkan, ketegangan antara kaum religius dan sekular ini merupakan faktor utama yang menjadikan baik Iran maupun Barat gagal untuk saling memahami dan mengukur dengan baik ketakutan dan aspirasi masing-masing. Dalam penjelasannya akan krisis AS-Iran, Sick menitikberatkan pada jurang tak terjembatani antara dua kebudayaan yang sangat berbeda, seperti terlihat dalam kepribadian Carter dan Khomeini yang sungguh kontras: “Kita terpenjara oleh asumsi-asumsi budaya kita sendiri.”¹⁸

Sick menegaskan bahwa para pejabat Amerika menganggap ganjil seruan Khomeini untuk mendirikan negara Islam; ini sangat berlawanan dengan seluruh sejarah moderen tradisi Barat beserta lembaga-lembaga sekularnya. Dengan sendirinya elit kebijakan lu-

ar negeri AS tidak siap untuk menghadapi hal yang tak disangka-sangka ini — kemunculan sebuah republik Islam yang dipimpin para ulama. Para pejabat AS gagal memahami kaum revolusioner baru yang lahir dari masjid-masjid ini. Bias budaya yang diidap para pejabat pemerintahan Carter ini, menurut Sick, “melekat sangat erat sehingga amat mengganggu proses pengamatan dan analisis yang normal tempat kita semua bergantung.”¹⁹

Sick menambahkan lebih lanjut bahwa bahkan setelah Khomeini membentuk negara Islamnya, penilaian kebijakan pemerintahan Carter terus terganggu oleh keyakinan budaya intrinsik bahwa sifat “ekstrem eksotis” rezim Khomeini di Teheran — dengan karakternya yang liar dan irasional, serta pelanggaran atas semua aturan-aturan normal perilaku politik yang patut — akan menghancurkan dirinya sendiri:

Banyak dari emosi mendalam yang merasuki proses pembuatan kebijakan selama krisis penyanderaan ini, dalam pandangan saya, dapat dilacak pada landasan kepercayaan bahwa kita sedang berhadapan bukan hanya dengan sebuah pemerintahan yang melanggar hukum bangsa-bangsa, tapi juga dengan sebuah rezim yang secara historis tidak sah, tidak patut, pantas disingkirkan. Saya merasa bahwa kita semua, dengan membaca pidato-pidato dan berita-berita yang muncul dari Teheran, pernah mengalami semacam kepenatan fisik.²⁰

Krisis penawanan yang berlangsung selama 14 bulan itu menimbulkan lebih dari ujian kekuatan antara Amerika Serikat dan Iran, ia merupakan suatu perang kebudayaan. Krisis ini sungguh menghabiskan energi Carter dan negara ini lebih dari peristiwa-peristiwa lain.²¹

Dengan berlarutnya drama penyanderaan ini, pemerintahan Carter menyadari bahwa isu ini semakin membelah Amerika dan Islam, memperuncing perasaan anti-Muslim di Amerika Serikat. Kemarahan bangsa Amerika, menurut Sick dan Harold Saunders, juga dirasakan oleh para pembuat kebijakan AS di semua tingkat,

yang berniat untuk menekan keras Khomeini agar membebaskan para sandera.²² Presiden Carter tidak bisa menyembunyikan kegeramannya setelah melihat mahasiswa-mahasiswa Iran berdemonstrasi di depan Gedung Putih untuk mendukung revolusi Iran. Ia memutuskan untuk mengusir para mahasiswa yang masa berlakunya sudah habis keluar dari Amerika: “Saya tidak akan membiarkan bajingan-bajingan itu menghina negara ini di depan Gedung Putih! Kalau saja saya bukan presiden, saya sudah turun ke jalan dan menghantam demonstran-demonstran pembela Khomeini itu.”²³

Diplomat-diplomat Amerika curiga Khomeini mendorong, walaupun bukan mendalangi, para mahasiswa Islamis militan untuk menduduki kedutaan AS dan menahan sandera guna melanjutkan revolusi Islamnya di tanah air dan meraih angka kemenangan politis di luar negeri. Dalam pandangan Amerika, elemen-elemen moderat tiba-tiba saja diremehkan oleh kaum ekstremis religius itu.²⁴ Seperti dikatakan Presiden Carter: “Semua upaya kita tidak membuahkan hasil. Di Iran, kaum militan telah menjadi pahlawan dalam semalam. Khomeini memuji tindakan mereka.”²⁵ Menteri Luar Negeri Cyrus Vance juga membunyikan bel waspada: “Kita harus tegas tapi hati-hati menghadapi kelompok fanatik Muslim yang tak dikenal dan tak terduga ini.”²⁶

Brzezinski menyaran Carter agar mengambil langkah-langkah besar, bukan hanya untuk menghukum Iran tapi juga “menggulirkan Khomeini”. Carter menuruti: “Saya berniat menghukum mereka segera setelah orang-orang kita dibebaskan; benar-benar menghajar mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka tidak bisa main-main dengan kita.”²⁷ Presiden, menurut Sick, terdorong untuk mengakhiri hubungan dengan Iran pimpinan Khomeini ini. Carter berkata ia ingin “mengeluarkan orang-orang kita dari Iran dan memutuskan hubungan. Brengsek mereka. *Fuck them.*”²⁸

Dalam tingkat yang lebih dalam, pemerintahan Carter khususnya khawatir akan pukulan balik revolusi Islam dan dampak potensial yang bisa meluap ke negara-negara tetangga sekitar Teluk.

Pikiran mereka lebih dipenuhi oleh perhitungan strategis dan keamanan, dan bukan variabel-variabel budaya. Hal yang disebut belakangan ini secara tak langsung mengganggu penilaian kebijakan beberapa diplomat Amerika. Presiden Carter merujuk pada hal ini ketika ia memberitahu kepala stafnya, Hamilton Jordan, agar mereka berhenti “bicara tentang perbedaan budaya dan irasionalitas Khomeini,” dan lebih baik memikirkan konsekuensi-konsekuensi strategis yang serius dari langkah-langkah yang diambil Iran.²⁹

Konsekuensi dalam bidang hankam dari revolusi Islam ini berlipat ganda. Contohnya, pada bulan November 1979, gaung revolusi Iran bergema di Arab Saudi setelah para Islamis sempat menduduki Masjidil Haram di Mekkah. Pendudukan rumah ibadah tersuci umat Islam ini menimbulkan gelombang mencekam di seluruh dunia Muslim dan di dalam kelompok elit perumus kebijakan luar negeri AS. Berikutnya, diplomat-diplomat Amerika disearang dan kedutaan-kedutaannya dibakar di Pakistan, Libya, Kuwait, dan Afghanistan. Keberanian Iran dan tantangannya terhadap Amerika menghasilkan akibat yang menentukan dalam kebijakan-kebijakan AS selanjutnya terhadap Iran, negara-negara Teluk Persia, dan gerakan-gerakan Islam lainnya. Amerika Serikat, tegas Shireen T. Hunter, bukan hanya ingin menundukkan Iran, sehingga membuktikan keroposnya revolusi Islam pada kaum Muslim lainnya, tapi juga ingin mencapai hal ini tanpa memberi Iran kesempatan untuk mendapatkan bantuan senjata dari Rusia atau menyebabkan disintegrasi.³⁰

Di tahap ini, persaingan AS-Soviet bermain di kancah masalah-masalah Dunia Ketiga, termasuk Islam revolusioner. Mereka ini hanya dilihat melalui kaca mata Perang Dunia, dan kaum Islamis saat itu tidak dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan hankam AS. Revolusi Islam Iran merupakan pengalaman pertama Washington dengan Islam politik.

Khawatir kalau gelombang anti-Amerika mengalir ke seluruh dunia Muslim, Menlu Vance memerintahkan evakuasi semua personel yang tak terlalu dibutuhkan dari pos-pos sensitif di seluruh

kawasan Teluk Persia. Menurut Saunders, Vance mengungkapkan kecemasannya akan keamanan para diplomat dan warganegara AS di negara-negara Muslim. Vance maupun Saunders tidak yakin bahwa serangan atas target-target Amerika tak akan terulang di dunia Muslim.³¹ Brzezinski juga waspada: “Kebangkitan fundamentalisme Islam di wilayah ini, yang berpuncak dalam bentuk kejatuhan Syah dan ledakan Iran di bawah Khomeini, menciptakan bahaya kontinu bagi kepentingan kita, tumpuan bergantungnya kelangsungan hidup Barat secara keseluruhan.”³² Pejabat-pejabat Amerika merasa perlu untuk memahami doktrin-doktrin Islam Syiah dan kebangkitan Islam fundamentalis. Mereka tiba-tiba tersadar bahwa kembalinya Islam politik ini adalah untuk waktu lama.³³

Di sisi lain, serbuan Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979 mengingatkan para pengambil keputusan di Amerika bahwa benturan strategis dengan kubu Komunis bernilai lebih tinggi dibanding konfrontasi dengan Islamis baru yang muncul di Teheran.³⁴ Konfrontasi dengan Islamis ini sangat kecil artinya dibandingkan dengan perseteruan Perang Dingin yang telah memusingkan AS sejak akhir dekade 1940an. Dalam catatan hariannya, Carter menulis bahwa serangan Soviet terhadap Afghanistan adalah “perkembangan internasional paling serius sejak saya menjadi presiden.”³⁵ Dampak tindakan Soviet ini, tambah Carter, “bisa menimbulkan ancaman paling serius sejak Perang Dunia II.”³⁶

Lebih jauh lagi, serangan terhadap Afghanistan membuat pemerintahan Carter makin menganggap penting untuk memobilisasi kekuatan Islamis guna melawan Soviet dengan mengambil hati “ulama fundamentalis” yang sedang dominan di Iran melalui semangat anti-Komunis. Untuk membendung Komunisme Soviet, ujar Brzezinski, harus dihindari apapun yang bisa memecah perlawanan Islam terhadap Soviet, khususnya konfrontasi militer AS-Iran: “Saat ini bagi saya tampak makin penting untuk membentuk sebuah koalisi Islam anti-Soviet.”³⁷ Seperti dalam dekade 1950an dan 1960an, Amerika Serikat ingin memakai Islam untuk meng-

hantam kekuatan-kekuatan radikal dan sekular, serta sekutu ateis mereka, Uni Soviet.

Para penasihat pemerintahan Carter mulai menyadari kemungkinan-kemungkinan baru untuk bekerjasama dengan kebangkitan Islam dan berharap untuk memperkuat sumberdaya ideologis dan material guna melawan ekspansi Komunis. Hal yang paling memenuhi pikiran para pejabat AS adalah pelajaran di tahun-tahun 1950an dan 1960an, saat Islam dipakai sebagai senjata ideologis dalam pertempuran melawan nasionalisme pan-Arab yang sekular. Sehingga, di samping adanya gejolak revolusi Islam di Iran berikut dampak globalnya di beberapa negara Muslim, pemerintahan Carter tidak sanggup menyajikan sebuah pernyataan kebijakan yang jelas, apalagi sebuah kebijakan matang, mengenai Islam politik. Bagi para pejabat AS, kebangkitan Islam adalah gangguan sementara saja di tengah Perang Dingin. Kebijakan luar negeri Amerika masih saja berkisar pada penangkalan Komunisme Soviet, bukan Islamisme.

Namun, revolusi Islam di Iran dan krisis penyanderaan tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang kuat pada persepsi bangsa Amerika tentang Islam dan Muslim umumnya. Di mata AS, Iran yang Islam itu mengancam keamanan dan stabilitas kepentingan regional Amerika dan juga kepentingan sekutu-sekutunya di Timur Tengah.³⁸ Memang benar, dampak Iran ini lebih dari sekadar akademis. Sejak itu ia telah menimbulkan “dampak mendalam” pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah yang lebih luas.³⁹ Di dalam negeri, ketidakmampuan Carter untuk memberi respon efektif terhadap Republik Islam Iran — apalagi membebaskan tawanan Amerika dari sana — serta kegagalannya mengkomunikasikan kebijakannya mengenai Iran dan mengenai sandera-sandera tersebut kepada publik Amerika, merupakan batu besar yang merintanginya terpilih kembali sebagai presiden: “Iran, bagai sebongkah batu karang yang menggelantung di leher sang presiden, telah menariknya turun.”⁴⁰

Pengalaman Reagan dengan Kebangkitan Islam: Wacana versus Tindakan

Tidak seperti pejabat-pejabat pemerintahan Carter yang, paling sedikit, berusaha untuk tidak “melakukan atau mengatakan hal-hal yang akan membuat kita terlalu berbeda dari seluruh dunia Islam,” para pembantu Reagan sering menyebut fundamentalisme Islam dalam ungkapan-ungkapan yang sangat bermusuhan.⁴¹ Pendirian-pendirian pemerintahan Reagan tentang Islam politik makin mengeras. Contohnya, Menteri Luar Negeri George Shultz menyamakan fundamentalisme Islam dengan “ekstremisme radikal”.⁴² Menteri Pertahanan Caspar Weinberger melihat Syiah sebagai “sekte Muslim paling fanatik dan sangat anti-Barat. Mereka tidak melihat pentingnya kelangsungan hidup umat manusia.”⁴³

Dalam beberapa kesempatan, Reagan sendiri memakai bahasa yang kasar saat mengacu pada Islam dan Muslim. Setelah terpilih pada 1980, dalam wawancaranya dengan majalah *Time* ia menyatakan umat Muslim meyakini kepercayaan mereka bahwa jika mereka tidak berhasil membunuh seorang Kristen atau Yahudi, mereka tidak akan masuk surga.⁴⁴ Setelah serangan Israel ke Lebanon di tahun 1982, Presiden Reagan mengajukan usul untuk melibatkan kaum moderat Arab dalam proses perdamaian Arab-Israel sebelum sebuah gelombang fundamentalis antidamai menghadang pemerintahan-pemerintahan pro-Barat.⁴⁵ Dalam pengumumannya di tahun 1986 untuk mengebom Libya, Reagan menyebut Presiden Libya Muammar Qaddafi sebagai “manusia buas”; ia juga menyatakan bahwa terorisme Libya adalah bagian dari gerakan fundamentalisme Muslim dunia.⁴⁶ Mirip dengan ini, di tahun 1990, Wakil Presiden Dan Quayle melihat kaitan langsung antara “kebangkitan Komunisme, kebangkitan Nazisme, dan bangkitnya fundamentalisme Islam radikal.”⁴⁷ Seorang pejabat senior AS lainnya menyatakan di tahun 1994 bahwa dengan matinya Komunisme, “Islam adalah alternatif globalnya.”⁴⁸

Sikap benci pemerintahan Reagan mengungkapkan gaya ideo-

logis presiden baru itu, selain merefleksikan peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan kaum Islamis. Namun, meruncingnya pandangan para pejabat pemerintahan Reagan tidak membawa fokus baru atau peralihan dalam prioritas kebijakan luar negerinya. Seperti para pendahulunya, pemerintahan Reagan tak terlalu peduli pada fenomena Islam. Dengan perkecualian kasus Iran — termasuk pendukung Syiahnya di Lebanon yang sudah dicoba dibendung oleh Reagan — pemerintahan ini tidak menghadapi tantangan Islamis besar-besaran bagi *status quo* di Timur Tengah.⁴⁹

Yang dilihat Reagan sebagai musuh sejatinya bukanlah Islamisme, tapi Komunisme Soviet dan klien-klien lokalnya. Di bawah Reagan, kebijakan AS tetap setia mendukung unsur-unsur religius konservatif melawan kekuatan-kekuatan nasionalis dari kaum sekular, sosialis, maupun Dunia Ketiga. Walau pernyataan-pernyataan publik pemerintahan ini sangat tidak bersahabat terhadap Islamis baru, tidak ada perubahan dalam tindakan yang mengikuti pandangannya itu. Sebagai contoh, pemerintahan Reagan sangat mendukung koalisi kaum mujahidin dalam perjuangan mereka melawan pendudukan tentara Soviet. Paradoksnya, tindakan Reagan ini memperkuat “elemen-elemen Islam paling militan” dalam aliansi mujahidin itu, khususnya Partai Islam.⁵⁰ Pemerintahan Reagan sangat terpaku pada perlawanan menghadapi Komunisme Soviet. Reagan jelas-jelas menunjukkan bahwa ia akan membantu perjuangan manapun yang melawan gerakan Komunis totaliter. Ia sering menekankan bahwa dukungannya bagi “pejuang kebebasan” mujahidin yang berorientasi Islam disebabkan perjuangan mereka melawan Soviet.⁵¹

Ternyata gerilyawan Islam dukungan AS di Afghanistan kelak berbalik menghantui Amerika dan sekutu-sekutunya. Setelah berhasil mengalahkan tentara Soviet dan rezim boneka Komunis di Kabul, sejumlah veteran Afghanistan saling mengarahkan senjata ke kening kawan mereka sendiri dan ke sasaran-sasaran di AS dan Timur Tengah, memuntahkan kemarahan dan frustrasi mere-

ka di jalan-jalan New York, Kairo, Aljir, Benghazi, Islamabad, dan Riyadh.⁵² Sebagian sekutu Washington menyalahkan Amerika Serikat karena “menciptakan basis bagi sebuah jaringan teroris Islam dengan mendukung orang-orang yang disebut sebagai pejuang Islam melawan pendudukan Soviet di Afghanistan.”⁵³

Keakraban Reagan dengan faksi-faksi mujahidin Islamis di Afghanistan harus ditempatkan dalam konteks fase kedua dari Perang Dingin. Seperti para pendahulunya di tahun-tahun 1950an dan 1960an, Presiden Reagan membariskan AS bersama negara-negara serta kelompok-kelompok Islamis — Afghanistan, Arab Saudi, dan Pakistan — untuk memerangi apa yang ia sebut “kerajaan setan” beserta klien-klien Dunia Ketiganya. Logika yang sama bisa menjelaskan peralihan cepat posisi konfrontasionalis pemerintahan Reagan terhadap Republik Islam Iran menjadi berpan-dangan akomodasionis di pertengahan 1980an.

Dalam konteks ini, episode *Iran-gate*, saat AS menyuplai senjata untuk Iran sebagai harga pembebasan tawanan orang-orang Amerika di Lebanon, menandai keinginan pemerintahan Reagan untuk bekerjasama dengan “kekuatan-kekuatan moderat Islam sebagai sekutu dengan tujuan untuk meredam niat agresif Uni Soviet.”⁵⁴

Dengan mempersenjatai Iran, pemerintahan Reagan berharap memperbaiki kerusakan hubungan AS-Iran dan menarik kekuatan Islamis untuk berpihak pada Barat. Selanjutnya, dengan goyahnya pemerintahan Islam di Teheran, beberapa pejabat pemerintahan Reagan khawatir kalau Iran menjadi sasaran empuk ekspansi Soviet. “Rezim Khomeini ini,” ujar Direktur CIA William Casey, “sedang runtuh dan akan mencapai titik yang menentukan; kita akan segera melihat sebuah pergolakan untuk suksesi. AS hampir tak punya kartu lagi untuk dimainkan; sedangkan Rusia punya banyak.”⁵⁵ Di sinilah bisa ditemukan sebab-sebab dari skandal *Iran-gate*.

Sebuah ralat parsial diperlukan di sini. Episode *Iran-gate* ini sama sekali tidak merepresentasikan peralihan strategis dalam

pendirian pemerintahan Reagan akan kekuatan kebangkitan Islam, tapi merupakan sebuah gerakan taktis, merefleksikan “ketidakkonsistenan, ketidakpastian, dan tiadanya fokus strategis pada militansi politik Islam.” Kebijakan luar negeri Amerika di pertengahan tahun 1980an, tegas Richard Cottam, terpecah menjadi dua kecenderungan yang berlawanan: Dewan Keamanan Nasional ingin mengangkat Islam politik untuk tujuan-tujuan Amerika melawan Soviet, sedangkan pandangan dominan di Departemen Luar Negeri mengajukan kebijakan yang tampaknya memperlakukan kaum militan Islam dan Iran sebagai sasaran negatif AS yang luar biasa.⁵⁶

Diangkatnya kebijakan *Iran-gate* ke muka publik mempermalukan Reagan, menekannya untuk menerima saran Departemen Luar Negeri untuk lebih condong pada Baghdad dalam perang Iran-Irak. Hasilnya, hubungan AS-Iran makin memburuk, berpuncak pada ditembak jatuhnya sebuah pesawat sipil Iran oleh kapal perang AS *USS Vincennes* pada Juli 1988 dan diberlakukannya lagi embargo ekonomi terhadap Iran oleh Reagan pada November 1988. Seperti pendahulunya juga, pejabat-pejabat pemerintahan Reagan menyangsikan kalau hubungan normal dengan Teheran bisa terjadi. Seperti dikatakan Weinberger: “Saya rasa selama kepemimpinan di Iran masih seperti sekarang, sia-sia mengharapkan akan ada suatu perjanjian yang cukup berharga dengan pemerintah semacam itu.”⁵⁷

Berbeloknya pendekatan Reagan pada Iran ini, menurut Cottam, menjadikan Teheran sebagai musuh pengganti baru: Dengan ketidakmauan dan ketidakmampuan Uni Soviet berperan sebagai musuh yang meyakinkan selama paruh kedua dekade 1980-an, bergeserlah kebijakan AS dengan menjadikan Iran sebagai sasaran. Kebijakan luar negeri Amerika tidak lagi berkisar menghentikan Komunisme. Berikutnya yang terjadi, cara para pejabat pemerintahan Reagan melihat Islam politik, papar Cottam, sangat berkaitan dengan sikap mereka yang berubah pada Uni Soviet.⁵⁸

Walaupun pemerintahan Reagan sering melontarkan komen-

tar negatif tentang militansi Islam, mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan kebijakan apapun mengenai subjek ini. Kaum Islamis tidak dilihat sebagai ancaman koheren yang selalu ada bagi stabilitas ketenteraman internasional. Tapi, pandangan para pejabat AS tentang politik Islam kelak berubah di akhir 1980an. Naiknya George Bush ke kursi presiden di tahun 1989 bersamaan dengan kebangkitan besar Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara serta jatuhnya Uni Soviet. Tidak seperti Carter dan Reagan, Bush tak punya kesanggupan untuk berdiam diri menghadapi badai politik yang mengguncang rezim-rezim mapan Timur Tengah.

Bush dan Krisis Aljazair

Ketika Presiden Bush mulai menjabat di tahun 1989, sebuah perdebatan besar mengenai Islam politik meletup di kalangan elit kebijakan luar negeri AS. Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam diskusi-diskusi ini menyatakan bahwa selama tahun 1980an, Amerika Serikat tidak merasa perlu mengeluarkan kebijakan terhadap kaum Islamis karena Iran merupakan satu-satunya negara agama di kawasan itu. Tapi di akhir 1980an, gerakan-gerakan Islam menyebar ke seantero dunia Arab dan Afrika Utara. Perkembangan baru ini, bersama dengan jatuhnya Komunisme dan munculnya isu global demokratisasi, membawa persoalan kebangkitan Islam ini menjadi perhatian kebijakan luar negeri AS; “kita perlu tahu apakah Islam selaras dengan demokrasi.”⁵⁹

Para pejabat pemerintahan Bush menempatkan perhatian khusus pada kemenangan impresif kaum Islamis dalam pemilihan parlementer di Mesir, Tunisia, dan Yordania. Di Sudan, sebuah kudeta militer tahun 1989 yang dipimpin Jenderal Omar Hassan al-Bashir mendirikan pemerintahan setengah-matang, bersekutu dengan Front Islam Nasional. Tapi sebuah kemenangan Front Penyelamatan Islam (*Front Islamique du Salut* atau FIS) di Aljazair dalam putaran pertama pemilu pada Desember 1991 membuat Washington terjaga. Tinggal selangkah lagi FIS meraih kekuasaan karena rezim Aljazair menerapkan sistem elektoral yang mirip den-

gan sistem dua-putaran ala Prancis dengan format pemenang-meraih-semuanya (*winner takes all*).⁶⁰ Di awal Januari 1992, barisan garis-keras dalam militer Aljazair menggagalkan pemilu itu, melarang berdirinya FIS, dan menangkap ratusan orang dari segala pangkat di dalamnya, menyeret negara ini ke dalam perang saudara yang berdarah dan berlarut. Sampai buku ini diterbitkan perang tersebut telah memangsa 80.000 korban jiwa.

Ini adalah ujian kritis pertama yang mengharuskan pemerintahan Bush untuk memberikan reaksi, walaupun belum mampu membuat sebuah kebijakan yang matang, terhadap kaum Islamis di Aljazair. Pemerintahan ini menghadapi tantangan untuk membuktikan apakah pandangan mereka tentang pluralisme politik bisa diuji dan diterapkan di dunia Arab/Muslim. Reaksi pemerintahan Bush terhadap krisis Aljazair cukup menonjol justru karena pasifnya, berlawanan dengan kelantangannya dalam mendukung pluralisme politik di lain tempat. Bush satu suara dengan almarhum Presiden Prancis François Mitterand, yang mendukung kegagalan pemilu oleh militer Aljazair.

Ketidakpastian pemerintahan Bush berkaitan dengan kudeta tentara di Aljazair itu terlihat dalam ambivalensi di awalnya dan kegamangan yang muncul setelahnya. Pada mulanya, Departemen Luar Negeri AS menyesalkan penghentian proses pemilu tersebut dan berharap ada cara untuk melanjutkan langkah menuju demokrasi. Tapi, bukannya mengecam perebutan kekuasaan oleh militer di bulan Januari 1992 itu, Departemen Luar Negeri AS malah menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar konstitusi Aljazair. Lalu karena khawatir dianggap memihak para jenderal militer ini, pada hari berikutnya Deplu AS merevisi lagi posisinya untuk membantah kritik yang mengatakan bahwa Amerika telah mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi di depan altar politik riil. Walaupun pejabat-pejabat pemerintahan Bush tidak menyalahkan dihentikannya pemilu itu, mereka memutuskan untuk mengambil posisi netral sebagai jalan terbijak agar AS tampak lebih rendah hati.⁶¹

Namun, pendirian Bush telah luas dipandang sebagai persetujuan implisitnya akan tindakan junta militer Aljazair, dan ini memperkuat pandangan yang banyak diyakini Muslim bahwa AS tidak serius dengan demokrasi di Timur Tengah Arab ini. Kendati pemerintahan Bush sering menegaskan kenetralan posisi mereka, pemerintahan ini tidak mempercayai adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam tubuh FIS. Tak mengejutkan ketika hasil penyelidikan Senat di kemudian hari menunjukkan bahwa posisi Bush saat itu hanya “semacam anggukan dan kedipan mata.”⁶² Sebagian pejabat AS menyepakati penilaian itu. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa “dengan tidak mengatakan atau tidak melakukan apapun, pemerintahan Bush justru mendukung pemerintahan Aljazair.”⁶³ Para diplomat Amerika lainnya secara pribadi setuju bahwa kemenangan yang diraih kaum Islamis di Aljazair dianggap bisa menimbulkan dampak anti-Barat, dan ini akan meluap menembus perbatasan-perbatasan dan menimbulkan kekacauan di negara-negara lain.⁶⁴

Pejabat-pejabat pemerintahan Bush terutama khawatir akan “berderapnya fundamentalisme Islam” di Afrika. Pemilu di Aljazair makin menambah ketakutan mereka bahwa pemerintahan Islam, yang dilihat antipati terhadap politik sekular dan budaya Barat, akan memunculkan tantangan baru bagi perumus kebijakan Barat setelah rontoknya Komunisme.⁶⁵ Dalam pandangan ini, persepsi AS terhadap Islamis berkaitan dengan akhir Perang Dingin dan kekosongan strategis yang tercipta karena runtuhnya Uni Soviet. Saat Amerika Serikat sedang mengkonsentrasikan energinya melawan “kerajaan setan” di era Perang Dingin, AS mulai mengalihkan perhatiannya pada setan-setan yang lebih kecil di awal tahun 1990an. Beberapa pemimpin dan perumus kebijakan AS mulai berspekulasi mengenai kemampuan Islam populis dan revolusioner untuk menggantikan posisi Komunisme Rusia sebagai musuh global baru yang bisa menjadi sasaran strategi baru Amerika.

Dalam kondisi seperti inilah reaksi awal pemerintahan Bush

terhadap krisis Aljazair harus dilihat. Menteri Luar Negeri James Baker menegaskan, pemerintahan AS tidak suka pada hasil pemilu Aljazair tersebut karena Amerika melihat FIS sebagai perpanjangan tangan dari fundamentalisme radikal Islam, yang merupakan “antitesis terhadap Barat — terhadap nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip pasar bebas, serta nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini.”⁶⁶ Tidaklah mengagetkan jika pemerintahan Bush menutup mata terhadap pembelokan proses demokrasi oleh militer di Aljazair.

Kutipan pernyataan Menlu Baker berikut ini menunjukkan alasan di balik kebijakan pemerintahan Bush terhadap Aljazair:

Ketika saya di Departemen Luar Negeri, kami menjalankan kebijakan untuk tidak mengikutsertakan fundamentalis-fundamentalis radikal di Aljazair, walaupun kami menyadari hal ini tidak sejalan dengan dukungan kita pada demokrasi. Secara umum, jika kita mendukung demokrasi, kita mesti mengambil apa yang diberikan demokrasi. Jika demokrasi memberi Anda fundamentalis Islam radikal, kita seharusnya menerima. Kami tidak mau menerima itu di Aljazair karena kami merasa pandangan-pandangan fundamentalis radikal amat berlawanan dengan apa yang kita yakini dan kita dukung, dan bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.⁶⁷

Keraguan pemerintahan Bush untuk seirama dengan gelombang Islam di Aljazair, sebuah negara pinggiran dalam peta kebijakan luar negeri AS, mempertontonkan ambivalensi para perumus kebijakan Amerika terhadap kaum Islamis. Menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional, pemerintahan Bush takut kalau “Aljazair akan seperti Iran.”⁶⁸ Pejabat Amerika lainnya mengatakan bahwa reaksi pemerintahan Bush terhadap krisis Aljazair tidak hanya dipengaruhi oleh ketakutannya akan revolusi Islam di Iran, tapi juga oleh atmosfir politik secara umum di era 1980an: “Ketika krisis Aljazair meletus, dalam pikiran para pengambil keputusan Amerika muncul Iran yang fundamentalis.”⁶⁹

Amerika juga khawatir akan potensi dampak negatif yang bisa ditimbulkan sebuah pemerintahan Islam di Aljazair pada proses perdamaian Arab-Israel, dan juga cemas akan luapannya ke Mesir dan negara-negara Afrika Utara.⁷⁰

Kenyataan ini sedikit menjelaskan keputusan pemerintahan Bush setelah Perang Teluk yang membiarkan rezim Irak menghancurkan kebangkitan kaum Syiah, karena takut akan naiknya kekuatan Islam Iran. Pemerintahan AS juga mencoba untuk membangun aliansi-aliansi untuk membatasi pengaruh Iran; Amerika mulai menggandeng Turki dan Arab Saudi yang pro-Barat sebagai kekuatan-kekuatan pengimbang bagi rezim-rezim Muslim di Asia Tengah, dan ini menjadi alasan kunjungan Menlu Baker di tahun 1992 ke kawasan ini. Baker menyerukan negara-negara Asia Tengah baru untuk mencontoh Turki yang sekular dan tidak mengikuti tetangganya, Iran. Ia menyatakan secara terbuka bahwa republik-republik berpenduduk mayoritas Muslim itu mempunyai “lebih banyak kesamaan dengan nilai-nilai Amerika, dan punya masa depan lebih baik bersama Barat, dibanding prospek mereka dengan Iran beserta Islam mereka yang bercap fundamentalis.”⁷¹

Walaupun para pejabat AS, yang diwawancarai secara terpisah, meyakini bahwa sikap mendukung jenderal-jenderal Aljazair itu merupakan “kekeliruan”, mereka juga mengingatkan agar tidak salah menafsir pendirian awal Washington. Mereka mengatakan bahwa Bush maupun Baker tidak secara jelas dalam memikirkan situasi di Aljazair; keduanya ambivalen, dan ini menjelaskan ketegangan Amerika menghadapi Aljazair.⁷²

Kalkulasi keamanan dan strategis berada di balik kecurigaan Amerika pada kaum Islamis. Para pejabat AS tampaknya melihat Islam politik sebagai gerakan populis dengan akar historis yang mirip dengan gerakan nasionalisme revolusioner Dunia Ketiga. Washington selama ini tidak punya kecenderungan ke arah mendukung kelompok-kelompok atau negara Dunia Ketiga yang populis. Sebagai sebuah adikuasa yang sudah puas dengan *status quo*, Amerika Serikat tidak menoleransi tantangan-tantangan revolu-

sioner, walaupun kurang berarti, bagi keamanan internasional; prestise, kepentingan, sekutu-sekutu, dan reputasi AS dipertaruhkan di sini. Dengan menyetujui kudeta militer di Aljazair, para penentu kebijakan AS lebih mementingkan stabilitas daripada bereksperimen dengan demokrasi. Jenderal-jenderal Aljazair adalah taruhan yang lebih aman dibanding para Islamis yang tak dikenal dan belum pernah dicoba itu. Sekali lagi, Amerika Serikat menjamin satu dari “dua setan” itu sudah “dijinakkan” untuk memastikan posisi dominannya di Timur Tengah. Prinsip-prinsip Kantian (filsuf Immanuel Kant — *Pen*) dikorbankan di hadapan altar politik riil.

Pidato *The Meridian House*:

Dasar Kebijakan Baru terhadap Islam

Ambivalensi pemerintahan Bush terhadap FIS makin terlihat dalam sebuah pidato berjudul “Amerika Serikat, Islam dan Timur Tengah dalam Dunia yang sedang Berubah”, yang disampaikan oleh Edward Djerejian, yang saat itu Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat, di Meridian House International, Washington, pada Juni 1992.⁷³ Pejabat-pejabat pemerintahan Bush saat itu merasa berkewajiban untuk merumuskan suatu pernyataan kebijakan yang koheren dan jernih tentang aktivisme Islam — sebuah pernyataan yang akan membantu mereka mengkomunikasikan dan menjelaskan pendekatan Bush kepada publik Amerika dan dunia. Hasilnya adalah pidato Meridian ini, yang merupakan pernyataan menyeluruh pertama yang disampaikan oleh sebuah pemerintahan AS untuk masalah Islamis. Pidato ini merepresentasikan upaya kritis yang dilakukan pemerintahan Bush untuk menyelesaikan ketegangan dan ambiguitas dalam pendekatan AS terhadap kebangkitan Islam. Pernyataan ini juga mengawali perubahan yang halus tapi penting dalam pendirian pemerintahan Bush mengenai Aljazair khususnya dan Islam politik umumnya.

Pidato Meridian ini, bersama pernyataan-pernyataan lain yang

dikemukakan para pejabat pemerintahan Bush, membentuk suatu konteks intelektual yang bisa menjadi dasar pemerintahan selanjutnya dalam memandang fenomena Islamis. Pidato ini merepresentasikan respon pemerintahan Bush terhadap runtuhnya Uni Soviet, Perang Teluk tahun 1991, proses perdamaian Arab-Israel, dan ketegasan baru serta keberhasilan pemilu bagi gerakan-gerakan politik Islam.

Dalam sebuah komentar implisit terhadap kaum Islamis Al-jazair pada pidato tersebut, Djerejian memperingatkan bahwa “kita mencurigai mereka yang menggunakan proses demokrasi untuk berkuasa, lalu menghancurkan proses itu sendiri untuk meraih kekuasaan dan dominasi politik. Meski kita meyakini prinsip ‘satu orang, satu suara’, kita tidak mendukung prinsip satu orang, satu suara, satu kali (*one man, one vote, once*).”⁷⁴ Tapi ada hal yang mengimbangi: pidato Meridian itu memunculkan suara positif dan fleksibel dalam persepsi AS tentang Islam.

Pengeroposan situasi keamanan di Aljazair, ditambah ketidakmampuan militer menghancurkan kaum Islamis, mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk menggariskan ulang dan mengevaluasi kembali posisinya. Dalam konteks ini, pemerintahan Bush menyetujui upaya Aljazair dalam reformasi politik dan ekonomi serta liberalisasi. Juga muncul keraguan akan kekuatan penyelesaian secara militer bagi konflik yang meningkat antara kaum Islamis dan rezim ini; sebaliknya, yang dicari adalah penyelesaian secara politik. Walaupun para pejabat Amerika paham bahwa pemberantasan kekerasan itu dibutuhkan, mereka meminta agar orang-orang yang ditangkap karena alasan keamanan diberi hak menjalani proses hukum.

Djerejian menegaskan kembali kelangsungan dan pentingnya dua tiang utama — penyelesaian konflik Arab-Israel dan akses ke minyak Teluk Persia — yang telah menjadi masalah dasar yang utama bagi kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah untuk beberapa dekade. Akhir dari Perang Dingin, menurut sang Asisten Menlu, membutuhkan tambahan tiang ketiga bagi kebijakan

Amerika: yaitu inti dari nilai-nilai fundamental — seperti dukungan pada hak asasi manusia, pluralisme, partisipasi masyarakat luas dalam pemerintahan, dan penolakan terhadap ekstremisme, penekanan, dan terorisme. Tapi Djerejian juga dengan empatik menolak penafsiran kaum konfrontasionalis tentang Islam politik, yang memperlakukannya sebagai musuh baru:

Pemerintahan AS tidak melihat Islam sebagai suatu “isme” lain yang menantang Barat atau mengancam perdamaian dunia. Itu merupakan respon simplistik terhadap sebuah kenyataan yang kompleks... Perang Dingin tidak digantikan oleh suatu kompetisi baru antara Islam dan Barat. Barisan *Crusaders* sudah lama tamat. Bangsa Amerika melihat Islam sebagai kekuatan peradaban historis di antara banyak kekuatan yang telah mempengaruhi dan memperkaya kebudayaan kita.⁷⁵

Senada dengan para akomodasionis, Djerejian mengatakan bahwa terdapat begitu banyak keragaman, dan tentunya juga ambiguitas, di antara kelompok-kelompok yang mencoba untuk mereformasi masyarakat mereka mengikuti prinsip-prinsip Islam: “Kita tidak melihat adanya upaya internasional yang monolitik di balik gerakan-gerakan ini.” Lebih jauh lagi, ia menunjukkan simpati pada diangkatnya kembali prinsip-prinsip Islam di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Tapi Djerejian membedakan antara kelompok-kelompok Islamis moderat dan ekstremis, menuduh Iran dan Sudan mendukung dan mengeksploitasi kelompok-kelompok ekstremis itu untuk menyebarkan terorisme ke seluruh penjuru kawasan ini. Djerejian tampaknya ingin menunjukkan bahwa kelompok Islamis ekstremis mempunyai jaringan yang bersatu, sedangkan kaum Islamis *mainstream* tidak.

Di saat yang sama, Djerejian menerima pandangan akomodasionis yang mengatakan bahwa ekstremisme Islam bisa dijelaskan dalam kerangka politik frustrasi: Ketiadaan kesempatan politik dan sosio-ekonomilah yang menyulut kaum Islamis, bukan seperti yang dikira kubu konfrontasionalis, yaitu adanya ideologi utopis

atau kebencian intrinsik terhadap Barat. Maka, untuk meredam ancaman ekstremisme ini, Djerejian menyarankan sebuah strategi privatisasi, liberalisasi, dan dijalankannya ekonomi pasar.⁷⁶

Djerejian kurang jelas dalam memaparkan kaum Islamis mana yang ia anggap moderat, dan ia tidak bisa menyebutkan satu pun nama kelompok yang masuk kategori ini.⁷⁷ Tapi ia memang menekankan bahwa perlawanan AS terhadap unsur-unsur ekstremis tidak ada hubungannya dengan orientasi religius atau sekular mereka: “Agama bukan faktor penentu — positif ataupun negatif — dalam kualitas hubungan kita dengan negara lain. Yang kita lawan adalah ekstremisme dan kekerasan, penyangkalan, intoleransi, intimidasi, pemaksaan, dan teror yang seringkali menyertainya.”⁷⁸

Djerejian mengingatkan pendengarnya bahwa Amerika Serikat mempunyai hubungan erat dengan negara-negara yang sistem politiknya kuat berakar pada prinsip-prinsip Islam. Ia tidak mengatakan bahwa negara-negara tersebut — Arab Saudi dan Pakistan — telah lama menjadi klien tradisional Amerika. Gangguan bagi kepentingan Amerika muncul dari tempat lain, gerakan-gerakan politik berorientasi Islam yang tak terhitung dan menuntut perubahan serta menyerukan reformasi dalam negara dan masyarakatnya.

Sayangnya, pidato Meridian ini tidak mengklarifikasi pendekatan yang dilakukan pemerintahan Bush pada kelompok-kelompok Islamis itu sendiri. Walau Djerejian menegaskan bahwa agama bukanlah faktor yang diperhitungkan dalam kebijakan luar negeri AS, kategori-kategori yang ia buat sarat dengan komentar-komentar implisit tentang perilaku politik kaum Islamis. Keragu-raguannya untuk memaparkan secara gamblang fenomena kebangkitan Islam memperlihatkan kehati-hatian pemerintahan Bush mengenai isu ini dan kegamangan mereka untuk menanganinya langsung.

Pendirian pemerintahan Bush dalam isu pemilu juga bermasalah. Djerejian mengatakan, pemerintah AS akan mendukung

rezim-rezim yang mengambil langkah-langkah spesifik dalam melangsungkan pemilihan umum dan membuka kebebasan politik serta akan melawan mereka yang memanfaatkan proses demokrasi untuk merebut kekuasaan. Tapi tetap, sebuah pertanyaan yang mengganggu muncul: Bagaimana bisa pemerintah menentukan apakah sebuah kelompok tertentu berniat merusak proses demokrasi setelah mereka berhasil meraih kekuasaan secara legal? Baik pidato Meridian maupun pernyataan-pernyataan selanjutnya oleh para pejabat pemerintahan Bush tidak ada yang menyebutkan kelompok Islamis mana pun yang memiliki aspirasi demokratis murni.⁷⁹ Atau mungkinkah kapasitas Djerejian dimaksudkan untuk membenarkan persetujuan AS atas penghentian proses pemilu di Aljazair?

Saat memimpin dengar-pendapat di Komisi Hubungan Luar Negeri pada bulan Maret 1992, Anggota DPR Lee Hamilton menanyakan pada Djerejian apakah pemerintahan Bush menerima hasil pemilu di Aljazair. Sang Asisten Menlu menolak untuk menjawab pertanyaan itu, dengan alasan pemilu tersebut bisa saja dijalankan dengan tidak jujur. Setelah pengecekan silang dilakukan lagi oleh Hamilton, jawaban Djerejian menunjukkan sejauh mana pemerintahan Bush menerima alasan rezim Aljazair untuk membatalkan pemilu: “Apa yang terjadi di Aljazair adalah pemerintahan mereka mengambil sebuah keputusan, dan pada dasarnya keputusan itu diambil karena mereka merasa pihak yang memenangkan suara pada pemilu itu adalah orang-orang yang tidak punya komitmen terhadap proses demokrasi, dan sekali kelompok ini berkuasa, mereka akan merusak proses yang mereka jalani untuk meraih kekuasaan itu.”⁸⁰

Sekali lagi Djerejian gagal menegaskan apakah ia setuju atau tidak dengan tindakan pemerintahan Aljazair. Jadi tidak heran kalau orang menduga pernyataan-pernyataannya dalam pidato Meridian itu merupakan pembelaan atas dukungan AS bagi penghentian proses pemilu di Aljazair. Mirip dengan ini, dalam sebuah dengar-pendapat sebelumnya pada Februari 1992, Menlu Baker

tidak terdengar menyalahkan kudeta militer di Aljazair itu, dan ia juga menunjukkan ketidakpercayaannya pada niat dan pretensi demokratis kaum Islamis.⁸¹

Poin ambigius lain yang terdapat dalam pidato Djerejian di Meridian adalah penekanannya pada nilai-nilai fundamental tertentu yang dianggap penting, yang menjadi masukan bagi kebijakan luar negeri AS dalam lingkup regional maupun global. Nilai-nilai ini — termasuk penghormatan dan dukungan pada hak asasi manusia, pluralisme, perempuan, dan hak-hak minoritas — juga mempengaruhi kebijakan AS terhadap Islam politik.⁸² Meski Djerejian menyangkal ia mengidap ambisi-ambisi untuk memaksakan sebuah model “buatan Amerika” pada masyarakat lain, ia menegaskan bahwa pemerintah AS ingin membangun hubungan kuat dengan negara atau masyarakat-masyarakat yang “juga menganut nilai fundamental yang sama.”⁸³ Tentu saja, kita ingin tahu sampai sejauh mana rezim-rezim otoriter Timur Tengah — yang secara tradisional merupakan sekutu kental Washington — bersama dengan Amerika Serikat memegang prinsip-prinsip demokratis fundamental itu.

Lebih lanjut, penekanan pada isu nilai-nilai tersebut mengidap bahaya karena banyak kaum Islam politik yang menolak nilai-nilai fundamental Amerika, yang dianggap sebagai refleksi dari upaya dominasi budaya dan sebuah cara sinis untuk melucuti prinsip-prinsip Islam yang dianut umat Muslim. Benturan nilai-nilai ini seringkali bermakna sebuah perang peradaban bagi kedua pihak, karena kaum Islamis sendiri meyakini nilai-nilai mereka bersifat universal.⁸⁴

Menilai Pidato *Meridian House*

Pernyataan-pernyataan kebijakan penting dari pemerintahan Bush tidak memberi jawaban bagi banyak pertanyaan, dan sama sekali tidak menjelaskan kebijakan AS terhadap Islamis. Djerejian menyusun beberapa perbedaan dan kategori, menunjukkan kete-

gangan sudut-pandang Amerika dalam melihat fenomena Islamis. Pidato Meridian tersebut tidak memberikan panduan yang spesifik bagi perumus kebijakan AS, karena dalam sebagian besar isu penting yang dihadapi pemerintah Amerika, pidato ini ambigu dan bermakna ganda. Misalnya, orang sulit untuk menyimpulkan apakah pemerintahan Bush sungguh-sungguh punya komitmen pada prinsip-prinsip pemilu yang bebas dalam sebuah kasus yang di dalamnya ada sekelompok Islamis yang bisa memenangkan pemilu. Apakah Amerika Serikat mau menerima pemerintahan Islamis di Mesir atau Aljazair? Pernyataan-pernyataan Djerejian bisa punya banyak tafsir, dan ini memungkinkan pemerintahan Bush untuk mengambil posisi di antara wacana liberal barunya dalam pluralisme dan keharusan untuk melindungi sekutu-sekutu Timur Tengahnya.

Sama saja, perbedaan yang dilakukan Djerejian antara Islamis baik dan jahat tidak memberi penjelasan kuat. Tapi ada satu hal yang jelas: Ekstremisme, tak peduli apa akar sekular atau religiusnya, merupakan musuh Amerika. Selanjutnya, walaupun Djerejian melihat Islam sebagai salah satu agama besar dunia dan mengakui Islam sebagai sebuah kekuatan peradaban dalam sejarah, ia tak berani membicarakan secara kritis politik dan agenda kaum Islamis *mainstream*. Orang bisa mendapat kesan bahwa kendati pemerintahan Bush memperlihatkan interpretasi mencecahkan mengenai Islam, mereka tetap curiga terhadap politik dan agenda Islamis baru ini. Di samping adanya nada akomodasionis baru dalam pidato Meridian itu, pendekatan Bush kepada kaum Islamis terus diwarnai dengan ketakutan-ketakutan dari masa silam. Dicampurnya Islam dengan politik membuat para pejabat Amerika merasa tak nyaman; mereka jelas khawatir kalau sampai Islamis politis menggunakan agama Islam sebagai ideologi, “membungkus pesan mereka dengan merek otoritarianisme baru”, dan mengancam stabilitas keamanan kawasan yang dikuasai AS.

Di samping ketegangan-ketegangan dan ambiguitas di dalamnya, pidato Meridian tersebut merepresentasikan sebuah deklarasi

liberal dan upaya sadar dari pemerintahan Bush untuk membangun jembatan ke dunia Islam. Sebagian pemimpin Islamis senang akan posisi baru Bush yang peka dan moderat terhadap Islam. Sebagai contoh, Rashid Ghannousyi, pemimpin Partai Pembaruan dari Tunisia yang melarikan diri, membanjiri Djerejian dengan pujian atas pernyataan dan klarifikasinya mengenai posisi pemerintahan Amerika. Ghannousyi memuji Djerejian karena mengakui kontribusi Muslim bagi peradaban dunia dan tidak melihat Islam sebagai monolit. Pandangan positif semacam ini, tambah Ghannousyi, bisa mengantarkan Islam dan Barat yang Kristen ke “ambang sebuah hubungan baru yang saling menguntungkan.”⁸⁵

Namun tetap saja, pidato Meridian itu tidak diikuti dengan peralihan kebijakan yang searah. Tema-tema liberal dalam pidato Djerejian tidak diterjemahkan menjadi panduan kebijakan yang praktis. Para pejabat Amerika ragu-ragu untuk menuangkan wacana baru ini dalam perumusan kebijakan luar negeri mereka. Pemerintahan Bush juga tidak melancarkan tekanan pada klien-klien tradisional Muslimnya untuk memaparkan proses politik mereka, memberi tempat bagi oposisi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Amerika Serikat hanya melakukan sedikit upaya, itupun kalau ada, untuk meyakinkan rezim-rezim Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Saudi akan perlunya sebuah visi politik yang lebih inklusif. Walau Uni Soviet sudah tumbang dan Irak kalah di tahun 1991, kebijakan Timur Tengah AS masih berkisar pada isu-isu keamanan tradisional dan mengorbankan isu-isu perkembangan sosial dan liberalisasi politik.

Selain ke Israel, Mesir, dan Turki, sejumlah besar senjata Amerika terus disalurkan ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).⁸⁶ Walau pemerintahan Bush mengakui peran Republik Islam Iran dalam pembebasan tawanan Amerika di Beirut, mereka tetap menuduh Iran dan Sudan membantu dan mendanai terorisme internasional serta menolak proses perdamaian Arab-Israel.⁸⁷

Pentingnya pidato Meridian terletak pada dimensi-dimensi simbolis dan psikologisnya, bukan pada sisi praktis atau konkret-

nya: Pernyataan Meridian ini menciptakan parameter-parameter luas tempat pemerintahan-pemerintahan berikutnya bisa berdasarkan pendirian mereka terhadap Islamis. Sebagai pernyataan resmi Amerika yang pertama tentang Islamisme, pidato Meridian ini membangun kerangka intelektual yang akan mempengaruhi perencanaan kebijakan Amerika selama bertahun-tahun. Dalam konteks ini pula Presiden Bill Clinton sendiri mengenal lebih dekat fenomena Islamis itu, setelah meneruskan warisan Bush dalam urusan Islam politik, lengkap dengan semua ketegangan, kesempatan, dan ambiguitas di dalamnya. Terlihat adanya manifestasi dari kelanjutan diplomasi AS di Timur Tengah dalam bentuk diperintahkannya Djerejian, sang arsitek utama dalam kebijakan Islam era Bush, oleh Clinton selama masa pertama pemerintahannya, selain beberapa pejabat lain dari masa Bush. ❀

Catatan

1. "An Interview with Ronald Reagan," *Time*, 17 November 1980, h. 37.
2. Wawancara, Washington, DC, 27 Maret 1995.
3. Gary Sick, *All Fall Down*, h. 31-2, 157; Rouhollah K. Ramazani, ed., *Iran's Revolution* (Washington, DC: Middle East Institute, 1990), h. 4950. George Ball, bekas Menteri Muda Luar Negeri, mengatakan bahwa dengan "menobatkan Shah sebagai pengawal kepentingan Barat di seluruh wilayah Teluk, Nixon tanpa sadar mendorong sang megalomania yang akhirnya berperan besar pada kejatuhan Shah." Dikutip dalam William Shawcross, *The Shah's Last Ride* (London: Pan Books, 1989), h. 167.
4. Zbigniew Brzezinski, *Power and Principle*, h. 354, 398.
5. James A. Bill, *The Eagle and the Lion* (New Haven, CT: Yale University Press, 1988), h. 258.
6. Barry Rubin, *Paved with Good Intentions: The American Experience and Iran* (New York: Oxford University Press, 1980), h. 237; Sick, *All Fall Down*, h. 60, 150, 152.
7. Brzezinski, *Power and Principle*, h. 377-8, 385, 394.
8. Sick, *All Fall Down*, h. 60, 150, 152.
9. Brzezinski, *Power and Principle*, h. 3 54-98; Rubin, *Paved with Good Intentions*, h. 247; Sick, *All Fall Down*, h. 170. Dalam memoirnya,

Brzezinski sangat kritis terhadap Menteri Luar Negeri Cyrus Vance dan Sullivan atas penentangan mereka terhadap aksi militer. Kegagalan AS di Iran menyudutkan Brzezinski dan stafnya, yang menyalahkan para pejabat Departemen Luar Negeri bagi kejatuhan Shah. Mereka ini dipandang bernyali ciut dan mungkin tak setia pada Carter dan juga Shah sendiri. Lihat Bill, *The Eagle and the Lion*, h. 276; Rubin, *Paved with Good Intentions*, h. 247.

10. Dikutip dalam Brzezinski, *Power and Principle*, h. 387. Lihat juga Sick, *All Fall Down*, h. 151, 153.
11. Bill, *The Eagle and the Lion*, h. 276-7.
12. Fred Halliday, *Islam and the Myth of Confrontation*, h. 64, 70.
13. Robin Wright, *Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam* (New York: Simon and Schuster, 1985), h. 270; Sick, *All Fall Down*, h. 187. Warren Christopher, yang sebagai Menteri Muda Luar Negeri berperan terpenting dalam diskusi-diskusi di dalam pemerintahan AS dan dalam negosiasi-negosiasi dengan Iran, mengakui bahwa baru pada akhir musim panas 1980 para pejabat AS menggeser perhatian mereka dari orang-orang Iran berpendidikan Barat ke kelompok fundamentalis sayap-kanan yang saat itu sudah berkuasa. Lihat Christopher, ed., "Introduction," dalam *American Hostages in Iran: The Conduct of a Crisis* (New Haven, CT: Yale University Press, 1985; a Council on Foreign Relations Book), h. 7.
14. Rubin, *Paved with Good Intentions*, h. 197.
15. *Keeping Faith: Memoirs of a President*, h. 451, 453.
16. *Crisis: The Last Year of the Carter Presidency* (New York: G. H. Putnam's Sons, 1982), h. 39.
17. *All Fall Down*, h. 164, 219-20.
18. Ibid., h. 164, 220. Christopher menggemakan keterangan/pendapat Sick dengan menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan untuk membebaskan para sandera Amerika, Aljazair berperan sangat penting dalam menafsir kedua proses penalaran dan kebudayaan yang amat berbeda itu bagi kedua pihak. Lihat Christopher, "Introduction," *American Hostages in Iran*, h. 9. Demikian pula, Harold Saunders menyebut bahwa tantangan yang dihadapi oleh tim krisis AS untuk Iran adalah bagaimana menjembatani jurang yang lebar antara pandangan-dunia orang Iran dan orang Amerika. Lihat Saunders, "The Crisis Begins," dalam *American Hostages in Iran*, h. 47, 52.
19. Sick, *All Fall Down*, h. 164-6.
20. Ibid., h. 167-8.

21. Christopher, "Introduction," h. 1.
22. Sick mengancam para pejabat AS yang terus meremehkan kehadiran Khomeini di tampuk kekuasaan dan semangatnya untuk menerapkan hukuman guna meraih tujuan-tujuan revolusionernya. Lihat Sick, *All Fall Down*, h. 206-7; Saunders, "The Crisis Begins," h. 47; Brzezinski, *Power and Principle*, h. 484.
23. Dikutip dalam Jordan, *Crisis*, h. 40.
24. Christopher, "Introduction," h. 3; Sick, *All Fall Down*, h. 197, 207. Harold Saunders, mantan Asisten Menteri Luar Negeri urusan Timur Dekat dan Asia Selatan, menegaskan bahwa krisis sandera ini lebih merupakan pertarungan kekuasaan internal di antara para revolusioner "Islam fundamentalis" dan sekular ketimbang suatu episod dalam hubungan internasional Iran. Dalam konteks ini, seorang negarawan terkemuka Islam mengatakan kepada Menteri Vance bahwa "Anda tak akan bisa membawa pulang para sandera itu sebelum Khomeini selesai menyiapkan semua institusi revolusi Islam." Lihat Saunders, "The Crisis Begins," dalam *American Hostages in Iran*, h. 45-7.
25. Carter, *Keeping Faith*, h. 458. Kata ini segera menunjukkan dengan jelas betapa tak sadarnya para perumus kebijakan AS tentang pertarungan kekuasaan berdarah yang mengiringi revolusi Iran sejak kelahirannya.
26. Dikutip dalam Jordan, *Crisis*, h. 38.
27. Dikutip dalam Brzezinski, *Power and Principle*, h. 482-4. Lihat juga Sick, *All Fall Down*, h. 206.
28. Dikutip dalam Sick, *All Fall Down*, h. 210.
29. Jordan, *Crisis*, h. 66.
30. *Iran and the World* (Bloomington: Indiana University Pres, 1990), h. 59-60.
31. Sick, *All Fall Down*, h. 233; Saunders, "Diplomacy and Pressure, November 1979-Mei 1980," dalam *American Hostages in Iran*, h. 91.
32. Brzezinski, *Power and Principle*, h. 484, 533.
33. Saunders, "Diplomacy and Pressure," h. 124. Pernyataan Saunders tentang Islam Syiah menggarisbawahi salah satu asumsi simplistik yang lazim di hari-hari pertama revolusi Islam dan terus berlanjut sejak itu bahwa politik kebangkitan Islam pada dasarnya adalah suatu fenomena Syiah. Di masa-masa setelah meledak revolusi Iran, banyak sekali analisis di seputar akar-akar revolusioner dan radikal dalam Islam Syiah, seraya mengabaikan pesan kompleks dan

- universal Islam politik. Peristiwa-peristiwa berikutnya di Arab Saudi, Mesir, Sudan, dan Aljazair, yang kebanyakan penduduknya Muslim Sunni, menunjukkan kecilnya perbedaan Sunni-Syiah. John L. Esposito dan James H. Piscatori, "The Global Impact of the Iranian Revolution: A Policy Perspective," dalam Esposito, ed., *The Iranian Revolution: Its Global Impact* (Miami: Florida International University Press, 1990), h. 318-19.
34. Gary Sick, "Military Options and Constraints," dalam *American Hostages in Iran*, h. 151.
 35. Carter, *Keeping Faith*, h.473.
 36. *Weekly Compilation of Presidential Documents*, U.S. Government Printing Office, vol. 16, no. 4, 28 Januari 1980, h. 194-6.
 37. *Power and Principle*, h. 470, 478, 485, 489. Lihat juga Saunders, "Diplomacy and Pressure," h. 113-14; Sick, "Military Options and Constraints," h. 151.
 38. Esposito dan Piscatori, "The Global Impact of the Iranian Revolution: A Policy Perspective," h. 317.
 39. Sick, *All Fall Down*, h. 221.
 40. Ibid., h. 318; Brzezinski, *Power and Principle*, h. 398, 509; Rubin, *Paved with Good Intentions*, h. 257; George Lenczowski, *American Presidents and the Middle East* (Durham, NC: Duke University Press, 1990), h. 201; Saunders, "The Crisis Begins," h. 48.
 41. Saunders, "Diplomacy and Pressure," h. 124.
 42. "The Future of American Foreign Policy: New Realities and New Ways of Thinking," testimoni di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat pada 31 Januari 1985, *U.S. Department of State Bulletin*, Mei 1985.
 43. *Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon* (New York: Warner Books, 1990), h. 137.
 44. "An Interview with Ronald Reagan," h. 37.
 45. Leslie Gelb, "U.S. Sees Opportunities and Risks in Mideast After War in Lebanon," *New York Times*, 31 Oktober 1982.
 46. "Reagan Address on U.S. Air Strike against Libya, 14 April 1986," dalam *Historic Documents of 1986* (Washington, DC, Congressional Quarterly, 1987), h. 347-54.
 47. "Commencement Address at the U.S. Naval Academy for the Class of 1990, Annapolis, Maryland, 30 Mei 1990," dalam *U.S. Naval Academy Archives*, Nimitz Library, h. 5-6.
 48. John Esposito, dikutip dalam "Symposium: Resurgent Islam in the

- Middle East,” *Middle East Policy* 3, no. 2 (1994), h. 9.
49. Baru pada akhir 1980an dan awal 1990an gerakan-gerakan berorientasi Islam meraih kemenangan-kemenangan besar dalam pemilu-pemilu di Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, dan Lebanon.
 50. Richard W. Cottam, “U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy,” dalam *Neither East nor West*, h. 279-80. Lihat juga Lenczowski, *American Presidents and the Middle East*, h. 226-7.
 51. Dilaporkan dalam *New York Times*, 26 Januari dan 17 April 1988. Lihat juga Lenczowski, h. 227; Cottam, h. 280.
 52. *New York Times*, 10 September dan 20 November 1995; *Al Hayat*, 14 November 1995.
 53. *New York Times*, 5 April 1993.
 54. Cottam, “U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy,” h. 282-4.
 55. Dikutip dalam Bob Woodward, *Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987* (New York: Simon & Schuster, 1987), h. 407.
 56. Cottam, “U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy,” h. 282-5.
 57. Weinberger, *Fighting for Peace*, h. 354. Menteri Luar Negeri George H. Shultz menggemakan sentimen ini: “Our guys got taken to the cleaners.” Lihat testimoni di depan Dengar Pendapat Gabungan House-Senate dalam Investigasi Iran-Contra, 23 Juli 1987, seperti dikutip dalam *Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contra Affairs, 13 November 1987* (Washington, DC: Government Printing Office, 1987), h. 245. Lihat juga Esposito dan Piscatori, “The Global Impact of the Iranian Revolution: A Policy Perspective,” h. 326.
 58. “U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy,” h. 284-6.
 59. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
 60. Andrew J. Pierre dan William B. Quandt, “Algeria’s War on Itself,” *Foreign Policy*, no. 99 (Summer 1995), h. 135.
 61. John M. Goshko, “U.S. Modifies Statement on Algerian Move,” *Washington Post*, 15 Januari 1992. Editorial *New York Times* 14 Januari dan 24 Juli 1992 mengecam pemerintahan Bush karena bersikap “ragu yang memalukan” untuk mengutuk gerakan militer Aljazair yang tidak sah dan tak bijaksana terhadap oposisi politik Islamis.
 62. *The Battle Looms: Islam and Politics in the Middle East: Study Commissioned by the Senate Committee on Foreign Relations*

- (Washington: U.S. Government Printing Office, 1993), h. 2, 6. Studi ini mengkritik pemerintahan Bush yang lebih peduli pada kemungkinan FIS menduduki kekuasaan ketimbang pada realitas kompleks politik Aljazair. Demikian pula, laporan ini juga merekomendasikan pemerintahan baru Clinton untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan tak mendua dalam mendukung pemulihan proses demokrasi dan hak-hak azasi manusia di Aljazair. Lihat h. 7.
63. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
 64. *Washington Post*, 14 dan 15 Januari 1992.
 65. Barbara Crossette, "U.S. Aide Calls Muslim Militants Big Concern in World," *New York Times*, 1 Januari 1992.
 66. "Interview with James A. Baker III," *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994), h. 83.
 67. Ibid.
 68. Wawancara, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 69. Wawancara, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 70. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
 71. Dikutip dalam Thomas L. Friedman, "Republics Promise to Protect Rights," *New York Times*, 13 Februari 1992. Lihat juga Friedman, "Baker's Trip to Nations Unready for Independence," *New York Times*, 16 Februari 1992; Robin Wright, "Islam, Democracy and the West," h. 143; Ignatius, "Islam in the West's Sights: The Wrong Crusade?" *Washington Post*, 8 Maret 1992; Leon T. Hadar, "Political Islam Is Not a Threat to the West," dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 200-1.
 72. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995. Wawancara dengan pejabat Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 73. *U.S. Department of State Dispatch*, 2 June 1992, h. 3.
 74. Sebagai tambahan untuk pidato Meridian, lihat Edward H. Djerejian, "One Man, One Vote, One Time," *New Perspectives Quarterly* 10, no. 3 (Summer 1993), h. 49.
 75. Semua rujukan pada Djerejian di sini dan selanjutnya diambil dari transkrip Meridian House, kecuali disebut lain.
 76. Lihat "Hearing of the House Foreign Affairs Committee; Developments in the Middle East," *Federal News Service*, 17 Maret 1992, h. 33.
 77. Penyederhanaan ini dicela oleh penggantinya, Robert Pelletreau,

yang kemudian mengidentifikasi sejumlah Islamis yang oleh Amerika Serikat dianggap moderat. Lihat bab berikutnya.

78. Setelah Djerejian menyampaikan pidatonya, dilaporkan bahwa ia terdengar bertanya pada seorang pensiunan duta besar AS, “Apakah pesan tentang Islamnya cukup jelas?” Pesan ini rupanya memang hal utama yang ingin dia sebarluaskan. Lihat Gene Bird, “Administration Official Assures Middle East the ‘Crusades Are Over,’” *Washington Report on Middle East Affairs* 11, no. 2 (Juli 1992), h. 29.
79. John L. Esposito, seorang akomodasionis lantang, juga mempertanyakan keyakinan pemerintah tentang sejumlah gerakan Islam yang dituduh mau membajak demokrasi dengan cara “satu orang, satu suara, satu kali” (*one man, one vote, one time*). Esposito menyoal: Apakah pemerintahan Bush dan sekutu-sekutunya percaya pada demokrasi yang bebas-risiko? Pada kenyataannya, risiko-risiko memang ada, sebab tidak mungkin ada demokrasi yang bebas-risiko. Lihat Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* h. 186-7, 189, 204, 205, 214, dan “Symposium: Resurgent Islam in the Middle East,” h. 11.
80. “Hearing of the House Foreign Affairs Committee: Developments in the Middle East,” h. 32-3.
81. “Hearing of the House Committee on Foreign Affairs: U.S. Foreign Policy,” *Federal News Service*, 6 Februari 1992, h. 38-9.
82. Ibid.
83. Djerejian juga mengingatkan para anggota Komisi Hubungan Luar Negeri DPR bahwa pemajuan kepentingan bisnis dan ekonomi Amerika di Timur Tengah merupakan prioritas penting dalam agenda pemerintahan Bush. Ibid., dan Djerejian, “One Man, One Vote, One Time,” h. 49.
84. Untuk contoh tentang pandangan kaum Islamis, lihat Yvonne Yazbeck Haddad, “The ‘New Enemy’?: Islam and Islamists after the Cold War” dalam *Altered States: A Reader in the New World Order*, h. 89, 92.
85. Rashid Ghannoushi, “Islamic Civilization Need not Clash with Western Civilization,” dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 51.
86. Edward H. Djerejian, “U.S. Policy Goals in the Near East,” pidato di depan Asosiasi Nasional Arab Amerika, Washington, DC, 11 September 1992, *U.S. Department of State Dispatch*, 14 September 1992, h. 704.
87. Ibid. Lihat juga Djerejian, “Review of U.S. Efforts to Achieve Near East Policy Goals,” pernyataan di depan Subkomisi untuk Eropa dan Ti-

mur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 24 Juni 1992, *U.S. Department of State Dispatch*, 29 Juni 1992, h. 517.

Pemerintahan Clinton: Menerima Islam Politik



Ada pihak yang yakin bahwa antara Amerika dan Timur Tengah terdapat rintangan-rintangan agama yang tak teratasi dan halangan lainnya bagi keharmonisan; mereka yakin bahwa kepercayaan dan budaya kita tak terelakkan pasti terbentur. Tapi saya tahu mereka keliru. Amerika tidak menganggap peradaban kita harus berbenturan. Kita menghargai Islam.¹

— Presiden Bill Clinton

WALAUPUN kepresidenan Bush sempat menyaksikan berbagai terobosan internasional yang penting secara historis — runtuhnya Uni Soviet, bersatunya Jerman, dan Perang Teluk tahun 1991 — pemerintahan ini tidak melahirkan sebuah visi atau panduan baru bagi kebijakan luar negeri AS. Bush memang hebat dalam menangkap rincian, tapi ia menertawakan “urusan visi” ini, lebih memilih pendekatan pragmatis dengan akal sehat sebagai pedoman efektif dalam bertindak.² Pemerintahan Bush juga tidak secara mendalam memikirkan bagaimana mereka menghadapi isu-isu strategis, ideologis, dan moral yang muncul di akhir Perang Dingin. Bukannya melahirkan peristiwa-peristiwa besar, Bush dan Menteri Luar Negeri James Baker hanya memberi reaksi terhadap

setiap peristiwa yang muncul di panggung internasional.³

Meski begitu, Bush dan Baker mewariskan pada Bill Clinton sebuah lanskap politik Timur Tengah yang menyimpan janji teramat besar. Koalisi internasional yang dibentuk Bush telah berhasil membebaskan Kuwait dan mengalahkan Saddam Hussein. Menjawab kritik dari negara-negara Arab dan Dunia Ketiga tentang standar-ganda Amerika terhadap Israel, Bush dan Baker telah berhasil sedikit menggertak pemerintahan Likud pimpinan Perdana Menteri Yitzhak Shamir untuk mengikuti konferensi perdamaian tahun 1991 di Madrid, Spanyol, dan memaksa mereka untuk menghentikan pembangunan pemukiman-pemukiman baru di daerah pendudukan Palestina. Mereka juga mengupayakan pendekatan yang tak garang terhadap Iran, sehingga mampu mengurangi ketegangan-ketegangan. Singkatnya, dengan lenyapnya Uni Soviet, Amerika Serikat menikmati hegemoni tanpa saingan di Timur Tengah, dan pendukung maupun penentangannya sama-sama menoleh padanya untuk kepemimpinan.

Berbeda dari pendahulunya, Presiden Clinton pada awalnya hanya menghabiskan sedikit waktu untuk melibatkan diri dalam pembuatan kebijakan luar negeri; ia lebih senang berurusan dengan politik dalam negeri — di sinilah gairahnya. Terutama dalam masa pertama jabatannya, presiden ini secara khusus mendelegasikan perumusan kebijakan luar negeri pada sebuah tim pembantu pilihan — Menteri Luar Negeri Warren Christopher, Wakil Menteri Strobe Talbott, Menteri Pertahanan William J. Perry, Penasihat Keamanan Nasional W. Anthony Lake, dan wakil Lake, Samuel R. Berger. Setelah dipilih untuk kedua kalinya, Clinton menyusun tim kebijakan luar negeri baru: Menteri Luar Negeri Madeleine Albright, Menteri Pertahanan William Cohen, Penasihat Keamanan Nasional Samuel Berger, dan Strobe Talbott, yang masih menjabat Wakil Menteri.⁴

Tapi perubahan personel Clinton ini lebih merupakan sebuah perubahan dalam gaya, bukan substansi. Keragu-raguannya untuk mengangkat penasihat-penasihat keamanan nasional yang

asertif dan berkemauan kuat menunjukkan keinginannya untuk tidak menganggap remeh kebijakan luar negeri dan mengurusnya sendiri. Hal yang pasti, Presiden telah lebih terlibat dalam hubungan-hubungan internasional dalam tiga tahun terakhir, kendati memang fokusnya pada perdagangan dunia dan ekonomi global. Clinton kelihatan akhirnya menyadari kaitan erat antara ekonomi-politik dan politik internasional. Berbagai perjalanannya ke luar negeri menunjukkan suatu kesadaran baru tentang sulitnya memisahkan politik internal dan luar negeri.

Selama dua tahun pertama Clinton menjabat presiden, tiadanya keterlibatan aktif Presiden dalam perumusan kebijakan luar negeri, ditambah dengan ambiguitas dan kompleksnya era pasca-Perang Dingin, memunculkan pertanyaan kritis akan kepemimpinan Amerika dan kemauan untuk menopang beban kewajiban-kewajiban dunia. Tapi walau begitu, kedua tim kebijakan luar negeri Clinton menegaskan perlunya keterlibatan terus menerus dengan dunia luar dan perlunya memperkuat benih-benih demokrasi pasar yang sedang tumbuh di banyak negara.⁵

Dalam kasus Timur Tengah ini, keterlibatan Amerika yang terus berlangsung memperlihatkan komitmen untuk meningkatkan proses perdamaian Arab-Israel dan mengamankan aliran minyak yang murah dari dataran Arab. Dua sasaran ini dilihat sebagai ancaman bagi kelompok “Islamis ekstremis”, yang mendapat dukungan dari Republik Islam Iran dan rezim Sudan yang berbasis Islam. Irak dan Libya, walaupun bagi Amerika tak terlalu berarti, juga dianggap ancaman oleh Washington.

Strategi global pemerintahan ini — mengenalkan dan mengembangkan demokrasi dan ekonomi pasar — menunjukkan kontradiksi yang biasa terjadi dalam kebijakan Amerika terhadap Timur Tengah dan Afrika Utara. Seperti pendahulunya yang berasal dari Partai Republik, tantangan yang dihadapi pemerintahan Clinton yang Demokrat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara anggapan kebutuhan yang kuat akan stabilitas dan kebutuhan yang kurang dirasakan akan perubahan. Ini sangat

menggambarkan kondisi Timur Tengah, tempat batas-batas digariskan dengan tegas antara rezim-rezim otoriter yang ingin mengontrol dan gerakan-gerakan oposisi yang berusaha mengganti orde lama dengan yang baru. Kebanyakan dari kelompok oposisi ini menggunakan wacana dan ideologi Islam sebagai alat legitimasi dalam perjuangan mereka melawan rezim-rezim yang sedang berkuasa. Semangat revolusioner mereka telah menyalakan kembali ketakutan Amerika akan kemungkinan lahirnya kekuatan radikal baru dari Dunia Ketiga, yang bisa dengan militannya tak bersahabat bagi Amerika Serikat.

Hal yang makin merumitkan situasi, dalam pandangan AS, adalah daya tarik, kekuatan, dan potensi untuk makin meningkat dari sebuah pesan politik yang diinspirasi Islam dan dari makin terkikisnya kekuasaan politik yang ada. Sama sekali bukannya mereda, kaum Islamis terus menantang *status quo* di Mesir, Aljazair, wilayah Tepi Barat dan Gaza, Yordania, Arab Saudi, Tunisia, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sejak awal kepresidenan Clinton, masalah Islamis ini sudah menempati agenda utama kebijakan luar negerinya.

Sebagai contoh, pada bulan Februari 1993 pemerintahan ini mengadakan seminar seminggu tentang politik Islam di Departemen Luar Negeri, yang dihadiri oleh para perumus kebijakan senior, termasuk Menteri Luar Negeri Warren Christopher, dan Madeleine Albright, yang ketika itu duta besar untuk PBB. Seorang pejabat Gedung Putih menyimpulkan hasil pertemuan tersebut dengan mengatakan, "Kita punya kebijakan untuk Islam dan Islamisme." Tapi yang dilakukan pemerintahan ini sebenarnya hanya menyusun daftar "ihwal untuk dibicarakan" guna menangani masalah Islamis ini.⁶ Departemen Luar Negeri AS membentuk sebuah kelompok studi yang terdiri dari pejabat-pejabat menengah untuk memantau dan menganalisis kebangkitan Islam. Tidak lama kemudian, seorang diplomat senior Deplu memuji kerja kelompok studi ini karena menyumbangkan pemahaman kritis dan bernuansa tentang fenomena Islam. (Hasil kerja kelompok

studi ini dirahasiakan; kelompok ini maupun temuannya tidak pernah diungkap kepada publik.) Deplu AS juga menyelenggarakan konferensi besar di kawasan Timur Tengah dan mengundang banyak pejabat Amerika dari berbagai lembaga. Tujuannya untuk membuat elit kebijakan luar negeri AS lebih peka dan menyatukan segala sumber daya dan kemampuan untuk secara efektif menghadapi kaum Islamis baru ini.⁷

Tidak seperti pemerintahan Bush yang hanya mengeluarkan satu pernyataan resmi — yaitu “Pidato Meridian” — tentang kebangkitan Islam, para pejabat pemerintahan Clinton, dari angkatan muda maupun senior, secara berkala menyampaikan pidato-pidato besar mengenai subjek ini. Antara tahun 1993 dan 1996, Presiden, Wakil Presiden, dan bahkan sang Ibu Negara melakukan tindakan-tindakan simbolis penting untuk menghilangkan semua kesalahpahaman dalam pandangan Amerika tentang Islam dan Muslim. Pernyataan-pernyataan pemerintahan ini berisi data empiris yang memukau, dan dari sini orang bisa melihat pandangan resmi AS mengenai Islam politik. Meski bab ini menyampaikan seluruh ragam sudut-pandang pemerintahan Clinton tentang Islam politik, bab ini secara khusus menggali lebih dalam dua pernyataan kebijakan yang utama: pidato Anthony Lake pada bulan Mei 1994 untuk *Washington Institute for Near East Policy*, dan pernyataan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Hubungan Timur Dekat Robert Pelletreau di depan Dewan Timur Tengah pada bulan dan tahun yang sama.⁸

Islam dan Barat: Hidup Berdampingan dan Harmonis?

Anthony Lake menyatakan bahwa Timur Tengah menghadapi pilihan berat: satu mengarah ke masa depan yang isinya kaum ekstremis, dengan senjata-senjata penghancur massal mendominasi Timur Tengah dan merupakan ancaman bagi keberadaan Israel dan teman-teman Amerika lainnya di kawasan ini, dan satunya lagi ke arah kemajuan demokrasi, kemakmuran ekonomi, serta stabilitas dan keamanan regional. Bagi Lake, jurang fundamen-

tal di Timur Tengah membagi dua area, yaitu kekerasan, kemunduran dan isolasi di area pertama, dan di sisi sebaliknya: perdamaian, kemerdekaan, dan dialog.

Seperti para konfrontasionalis komentator, Lake melihat persetujuan di Timur Tengah dalam kerangka moral, yakni sebagai perang antara kekuatan baik dan jahat; batas-batas demarkasi digariskan dengan jelas, tanpa ambiguitas atau ketidakpastian. Di satu sisi terdapat “negara-negara reaksioner penghantam” (*backlash states*) seperti Iran, Sudan, Irak, dan Libya, yang harus dihentikan dan dikucilkan karena mereka mendanai terorisme dan senjata-senjata nonkonvensional.⁹ Di sisi lain terdapat kubu moderat, “negara-negara Timur Tengah yang mirip satu sama lain, yang tujuannya sama dengan kita: pasar bebas, pengembangan demokrasi, dan pengontrolan terhadap pembuatan senjata-senjata penghancur massal.”¹⁰ Lake tidak menyebut negara-negara mana saja yang ia maksud dengan demokratis dan tidak menghendaki senjata-senjata penghancur massal. Alasannya sederhana. Timur Tengah hanya punya sedikit demokrasi, tapi punya banyak senjata penghancur massal.

Presiden Clinton juga melihat konflik di Timur Tengah secara hitam-putih. Dalam pidatonya di depan parlemen Yordania pada Oktober 1994, ia mengatakan bahwa Amerika Serikat memang melihat adanya persaingan di Timur Tengah dan di tempat lain — “persaingan antara tirani dan kemerdekaan, antara teror dan keamanan, rasialisme dan toleransi, isolasi dan keterbukaan. Ini adalah pertikaian lama antara ketakutan dan harapan.”¹¹

Tapi, sependapat juga dengan para akomodasionis, Lake dan Clinton menolak pandangan kaum garis-keras bahwa dalam dunia pasca-Perang Dingin ini, perang peradaban menempatkan Barat lawan Islam: Kini, konflik sebenarnya yang merongrong dunia, menurut Lake, bukanlah konflik peradaban:

Di Timur Tengah, seperti juga di seluruh dunia, memang ada kesenjangan fundamental. Tapi yang terbagi bukan peradaban atau agama; tidak, garis pemisah itu berada di antara pe-

merintah yang menekan dan pemerintah yang responsif, antara isolasi dan keterbukaan, antara moderat dan ekstremisme....

Musuh kita adalah pemaksaan dan ekstremisme, dalam bungkus agama ataupun sekular. Kita tegas terhadap mereka yang ingin menjalankan agendanya melalui teror, intoleransi, dan pemaksaan.¹²

Presiden Clinton pun tak jauh berbeda. Meski dengan nada moralnya yang tidak ambigius ia menolak hipotesis konfrontasionalis tentang “perang peradaban”, Clinton melihat pertikaian yang ada sebagai pencerah peradaban.¹³ Konflik yang menyelimuti Timur Tengah saat ini, menurut Clinton, tidak ada hubungannya dengan Islam, tapi lebih terkait dengan “kekuatan teror dan ekstremisme, yang membungkus dirinya dalam wacana agama dan nasionalisme, tapi perilakunya berlawanan dengan ajaran-ajaran agama dan melecehkan patriotisme mereka sendiri.”¹⁴

Dalam nada yang sama, Djerejian menegaskan sebelumnya bahwa Amerika Serikat harus berhati-hati jangan sampai membesar-besarkan ancaman Islam terhadap kepentingan Amerika: “Jika tidak, kita bisa jadi korban akan ketakutan yang keliru dan salah persepsi kita sendiri.”¹⁵ Juga mirip dengan Djerejian, pengantinya, Pelletreau, mengingatkan agar Amerika tidak menstereotipkan sebuah perkembangan regional yang penting — maksudnya kebangkitan Islam — dengan menyesalkan fakta bahwa media Amerika sering menggambarkan Islam sebagai “gerakan satu warna yang membenci Barat, selalu siap untuk menggunakan kekerasan dan terorisme untuk mencapai tujuannya. Gambaran semacam itu, tentu saja, sempit, terlalu menyederhanakan dan tidak tepat.”¹⁶ Kritik Djerejian dan Pelletreau harus dilihat sebagai penolakan kuat terhadap saran kebijakan konfrontasionalis.

Pejabat-pejabat pemerintahan Clinton menawarkan interpretasi yang lebih liberal tentang Islam politik dibandingkan para pembantu Bush. Djerejian, Lake, dan Pelletreau, misalnya, menga-

takan bahwa kembali ditekankannya nilai-nilai tradisional dunia Muslim bukan berarti niscaya akan berbenturan dengan Barat atau dengan nilai-nilai demokratis.¹⁷ Malah sebaliknya, nilai-nilai tradisional ini, tegas Presiden Clinton, selaras dengan nilai-nilai Barat: “Nilai-nilai tradisional Islam — setia pada kepercayaan dan ikhtiar, pada keluarga dan masyarakat — selaras dengan prinsip-prinsip terbaik yang dianut Amerika. Karenanya, kita tahu bahwa bangsa kita, kepercayaan kita, kebudayaan kita, bisa hidup harmonis berdampingan.”¹⁸ Clinton sering mengutip pesan toleransi yang dibawa Nabi Muhammad bagi pengikutnya dan umat agama lain.¹⁹

Dengan menolak pandangan banyak konfrontasionalis di Timur Tengah maupun di Amerika Serikat, pernyataan-pernyataan Presiden ini dimaksudkan untuk melepaskan segala bentuk keraguan dalam pikiran orang akan sebuah perang yang tak terelakkan antara dunia Islam dan Barat yang beragama Kristen. Dalam pidatonya di depan parlemen Yordania, Clinton memilih untuk mengajukan tema AS sebagai “jembatan” antara dua sistem spiritual yang berbeda, dan bukan sebagai negara pembela agama: “Setiap hari di negeri kami, jutaan warganegara kami menjawab panggilan Muslim (*adzan*) untuk salat”; nilai-nilai mereka “selaras dengan nilai-nilai ideal yang terbaik dari bangsa Amerika.”²⁰

Dilaporkan bahwa pada saat itu Clinton memutuskan untuk mengangkat gagasan toleransi Muslim guna mengembangkan suatu strategi dasar untuk menawarkan dukungan bagi kaum moderat di dalam komunitas Muslim yang lebih besar. Dengan pernyataan-pernyataan kuatnya ini, Clinton bukan hanya menceburkan diri ke kancah debat intelektual besar di dunia Barat dan Muslim, tapi juga menegaskan kembali kepercayaannya pada ko-eksistensi dan dialog, bukannya pada konfrontasi.²¹ Menurut seorang diplomat AS, yang terlibat bersama beberapa pejabat lain menuliskan pidato Clinton untuk parlemen Yordania itu, para pembantu Presiden ingin menempatkannya dalam catatan sejarah sebagai pendukung tesis harmoni dan menolak tesis perang peradaban.²²

Lima bulan sesudahnya, dalam sebuah konferensi pers bersama Raja Hassan, Presiden Clinton menyampaikan pesan yang sama:

Islam bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk toleransi dan moderasi di dunia ini, dan nilai-nilai tradisionalnya serasi dengan idealisme terbaik Barat. Seperti yang saya katakan dalam pidato saya untuk parlemen-parlemen Yordania dan Israel, Amerika Serikat sangat respek pada Islam dan ingin bekerja sama dengan umatnya di seluruh dunia untuk menjaga perdamaian dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita semua.²³

Presiden kembali menyuarakan tema serupa sebulan kemudian dalam upacara penyambutan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto. Clinton memuji Pakistan untuk upayanya menggabungkan idealisme suatu negara demokrasi muda dengan tradisi dan praktik-praktik agama Islam: “Ia (Bhutto) terpilih untuk memimpin sebuah negara yang bertujuan untuk mempertemukan tradisi-tradisi terbaik Islam dengan idealisme demokratis modern.”²⁴ Selain mengemukakan bantuan Pakistan dalam memerangi terorisme internasional, Clinton menekankan peran positif yang bisa dilakukan Pakistan, sebagai negara Islam demokratis moderat dengan jumlah rakyat 130 juta orang, di dunia Muslim.²⁵

Clinton menekankan orientasi moderat Pakistan di kawasan bersuhu politik panas itu: sebuah negara Islam yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara Muslim yang baru bangkit di Asia Tengah. Kalau pemerintahan Bush mencoba untuk menjual Turki sebagai contoh bagi negara-negara Muslim bekas Uni Soviet, pemerintahan Clinton lebih condong ke Pakistan. Tapi kedua pemerintahan ini memang kurang memberi perhatian bagi catatan pelanggaran HAM Turki dan Pakistan yang menyedihkan. Para pembuat kebijakan AS tampak lebih tertarik pada orientasi kebijakan luar negeri kedua negara ini — yang terlihat lebih “moderat” dan, yang terpenting, pro-Barat. Dalam konteks inilah pejabat-pejabat Amerika menilai warna Islam di Turki dan Pakistan sebagai tole-

ran, progresif, dan menarik.

Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 1994, Clinton tampil menarik perhatian di Masjid Istiqlal, Jakarta. Di sana ia menyatakan bahwa “walaupun kita menghadapi masalah terorisme di Timur Tengah, hal ini tidak terkait secara inheren dengan Islam — tidak dengan agamanya, tidak dengan budayanya.”²⁶ Pernyataan-pernyataan Clinton menunjukkan sebuah pola konsisten akan sebuah kepatutan politik terhadap Islam — tentu saja dalam tingkat wacana dan simbolisnya. Ia juga merangkul Muslim, mengangkat persamaan antara Barat Kristen dan Islam, dan menolak simplifikasi dan stereotip tentang Islam dan Muslim. Pendirian Presiden ini menempatkannya di tengah-tengah kubu akomodasionis. Tapi kemudian persoalan kritis yang harus diselesaikan berkisar di seputar konsistensi antara wacana dengan kebijakan-kebijakan nyata pemerintahan ini (lihat di bawah).

Pejabat-pejabat muda dan senior lainnya telah menyusun landasan untuk wacana Clinton tentang Islam. Keberlangsungan hidup agama (baca: Islam), tegas Lake, tidak hanya khusus untuk Muslim; ini adalah bagian dari sebuah upaya universal yang dilakukan orang di mana saja untuk mencari cara-cara meraih pemerintahan yang responsif, mendapatkan hak asasi manusia yang mendasar, dan memperoleh sebuah panduan moral untuk hidup mereka.²⁷ Untuk lebih menegaskan, dalam pidato berbeda, Pelletreau merinci lagi pesan positif Lake dengan menyampaikan bahwa ada manifestasi tertentu dari kebangkitan Islam yang “sangat anti-Barat dan ditujukan bukan hanya untuk melepaskan pengaruh Barat dalam masyarakat mereka, tapi untuk menolak segala bentuk kerja sama dengan Barat atau menolak evolusi moderen di negeri mereka. Kecenderungan seperti ini jelas tak bersahabat bagi kepentingan AS.”²⁸

Hal yang membedakan ekstremisme Islam, menurut Lake dan Pelletreau, adalah digunakannya Islam sebagai topeng untuk menyembunyikan tujuan kekuasaan politik mereka yang sebenarnya: “Bukan Islam yang menjadi isu.” Gagasan Lake dan

Pelletreau disampaikan lebih kuat lagi oleh *Counselor* Departemen Luar Negeri Timothy Wirth dalam sebuah dengar-pendapat di Capitol Hill pada bulan Juli 1993. Wirth menyatakan dengan jelas perbedaan antara terorisme dan ideologi politik Islamis:

Penyalahgunaan wacana politis Islam oleh kelompok-kelompok ini jangan sampai membuat kita tidak bisa membedakan terorisme dengan Islam. Kita, tentu saja, tidak punya masalah dengan Islam atau dengan orang yang mempraktikkan agama tersebut. Yang menjadi masalah adalah pemakaian kekerasan dan terorisme oleh siapa saja, apapun agamanya, kebangsaannya atau etnisnya.²⁹

Pembedaan Wirth ini penting karena ia menolak adanya hubungan antara tindakan Islamis tertentu dengan Islam, baik sebagai agama ataupun ideologi. Ia juga menolak konsep pertanggungjawaban kolektif dan turut bersalah karena punya kaitan (*guilt by association*). Pandangan Wirth digemakan lagi oleh Djerejian dua minggu kemudian: “Kita tidak boleh sekalipun membiarkan tindakan oleh sebuah minoritas keras dari kepercayaan apapun untuk membentuk sikap kita terhadap semua kelompok-kelompok.”³⁰ Perbedaan yang digariskan Wirth maupun Djerejian ini membentuk dasar penegasan selanjutnya oleh Lake dan Pelletreau bahwa Islam bukanlah sebuah faktor dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan luar negeri AS terhadap negara atau kelompok manapun.³¹

Pelletreau menegaskan lebih jauh bahwa Amerika Serikat mempertimbangkan serius peran absah yang dimainkan Islam dalam masyarakat dan pemerintahan-pemerintahan di Timur Tengah, walau terjadi penyalahgunaan simbol-simbol dan idealisme Islam oleh sebagian ekstremis.³² Seperti halnya Djerejian, Lake dan Pelletreau memuji kontribusi yang begitu banyak diberikan Islam untuk peradaban dunia dalam seribu empat ratus tahun ini, menekankan ikatan-ikatan historis yang erat serta nilai-nilai utama antara Islam dan kepercayaan Kristen-Yahudi yang dianut sebagian besar orang Amerika: “Kita tidak bermusuhan

dengan Islam. Kita menghargainya sebagai satu dari agama-agama besar dunia dan sebagai sebuah gerakan peradaban besar.”³³

Ditambah lagi, Lake menolak anggapan konfrontasionalis bahwa fundamentalisme Islam telah menggantikan Komunisme internasional sebagai calon ancaman bagi Barat. Lake dan Djerejian menunjukkan kesangsian mereka terhadap rekomendasi kubu konfrontasionalis agar “Amerika Serikat, sebagai tinggal satu-satunya adikuasa yang sedang mencari sebuah ideologi baru untuk diperangi, harusnya mulai memimpin perjuangan (*crusade*) baru melawan Islam.”³⁴ Meminjam istilah yang mirip dari pidato Meridian, Pelletreau mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak melihat Islam sebagai “isme” berikutnya yang menantang dan mengancam keamanan Barat. Ia lalu menambahkan sebuah kualifikasi penting: “Tapi, kita sangat tidak menerima ketika kita diberi cap ‘Setan Besar’ (ungkapan lazim Khomeini untuk menyebut Amerika Serikat), atau saat budaya dan nilai-nilai yang kita anut dilecehkan, atau warganegara kita ditawan atau ketika kekerasan dan terorisme dilakukan tanpa alasan ataupun untuk meraih ambisi politik.”³⁵

Islam dan Demokrasi

Seperti juga para pendahulunya, wacana Islam politik yang diyakini pemerintahan Clinton mencampur pandangan akomodasionis dan konfrontasionalis, berganti-ganti menggunakan bahasa dari kedua kubu. Kurang jelas apakah sikap plin-plan ini adalah bagian dari strategi yang disadari pemerintahan ini atau disebabkan ketakpastian dan ambivalensi akan agenda riil kaum Islamis. Hal yang jelas adalah kebijakan AS, seperti yang akan ditegaskan di bawah, penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tak terselesaikan.

Senada dengan Djerejian, Pelletreau mengamati bahwa walaupun Amerika Serikat sangat prihatin terhadap eksploitasi Iran dan Sudan atas kelompok-kelompok ekstremis Islam di seluruh Timur

Tengah dan Afrika Utara, “kita tidak melihat sebuah kekuatan internasional monolitik yang diterapkan pada beragam gerakan Islam yang aktif di kawasan ini.”³⁶ Para pejabat pemerintahan Clinton — mereka yang tidak menerima anggapan konfrontasionalis tentang adanya sebuah jaringan Islamis yang terkoordinasi — telah memaparkan bahwa terdapat keragaman yang amat besar dalam berbagai gerakan Islamis ini.

Maka dalam hal ini dibutuhkan perbaikan. Pandangan minoritas di dalam pemerintahan pertama Clinton meyakini bahwa suatu jaringan regional perusuh fundamentalis memberikan dukungan material dan inspirasi spiritual kepada para ekstremis religius. Martin Indyk, misalnya, menegaskan bahwa baik Republik Islam Iran maupun Sudan telah memperlihatkan “jangkauan regional mereka dengan cara memancing di air keruh mulai dari Teluk, lalu ke Mesir dan Lebanon sampai ke Aljazair.”³⁷ Sehingga, tantangan yang dihadapi Amerika Serikat, tambah Indyk — mantan direktur eksekutif *Washington Institute for Near East Policy* — adalah bagaimana menolong rezim-rezim bersahabat Timur Tengah menghadapi ancaman yang berkembang ini dengan menghentikan ekstremisme. Indyk inilah yang menciptakan istilah “pembendungan ganda” (*dual containment*) terhadap Iran dan Irak sebagai metode, di antara berbagai cara, untuk mengisolasi dan melumpuhkan para ekstremis nasionalis dan religius.³⁸

Martin Kramer, seorang akademisi Israel yang mengenal Indyk, mengatakan bahwa Indyk “yakini kaum Islamis merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika.”³⁹ William Quandt juga pernah menyatakan bahwa Indyk adalah salah seorang dari sedikit pejabat Amerika yang bisa dikatakan melihat Islam politik sebagai ancaman.⁴⁰ Apakah posisi Indyk yang menggantikan Pelletreau sebagai Asisten Menlu untuk Hubungan Timur Dekat — jangan lupa bahwa Indyk merupakan pengusung paham konfrontasionalis dan Pelletreau berpandangan akomodasionis — membawa sebuah perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap aktivisme Islam? Apakah pengangkatan Indyk akan mengubah keseimbang-

an antara posisi akomodasionis dan konfrontasionalis yang ada saat itu di dalam pemerintahan Clinton? Atau akankah Indyk setia pada prinsip-prinsip utama kebijakan AS? Sejauh ini, digantinya Pelletreau oleh Indyk sebagai asisten Menlu belum membawa perubahan dalam pendekatan yang dipakai Amerika. Indyk tampaknya masih setia pada doktrin kebijakan AS, walau ia berpan-dangan vokal terhadap Iran, Irak, Sudan, dan Libya.

Di saat Djerejian dan Pelletreau mengatakan bahwa manifestasi tertentu dari kebangkitan Islam memprihatinkan, Lake menambahkan bahwa “ekstremisme Islam” — khususnya beberapa gerakan Islamis yang memakai kedok kebangkitan Islam untuk membelenggu kebebasan dan mempraktikkan terorisme — menimbulkan ancaman bagi kepentingan AS dan sekutu-sekutunya.⁴¹ Perbedaan yang digariskan Lake antara Islam sebagai agama dan “ekstremisme Islam” sebagai gerakan politik-militer ini menimbulkan masalah: pembedaan yang dibuatnya tidak memperjelas, malah makin mengaburkan perkara. Hal kritis di sini adalah bukanlah mempertanyakan apakah Islam itu agama hebat atau bukan, tapi menentukan bagaimana pembuat kebijakan AS melihat peran Islam di dalam proses politik yang lebih luas. Berlawanan pandangannya tokoh-tokoh pemerintahan Clinton dalam isu manifestasi politik-militer dari fenomena Islamis ini memperlihatkan ketidaknyamanan dan ketegangan mereka ketika mencampurkan agama dan politik. Posisi ini juga tampak terjadi lagi dalam pemerintahan Clinton periode kedua.

Menurut Lake, pemerintah AS memantau ketat ekstremis-ekstremis Islam di Aljazair, Mesir, Sudan, Yordania, Lebanon selatan, serta Tepi Barat dan Gaza, dan ia memperingatkan bahwa Amerika akan menekan kaum Islamis militan yang berniat menyebarkan pengaruh mereka melalui pemaksaan.⁴² Pejabat-pejabat pemerintahan Clinton lainnya telah menegaskan bahwa mereka menentang penggunaan cara-cara revolusioner atau “terorisme internal” oleh kaum Islamis, walaupun dilakukan “di negara-negara yang menekan atau melarang keras mereka ikut serta dalam penye-

lenggaraan negara.” Kekerasan bukanlah jalan yang sah untuk ikut serta dalam politik, tegas Pelletreau, dan gerakan-gerakan oposisi yang menggunakan atau membiarkan kekerasan dan terorisme sebagai jalan mencapai kekuasaan politik akan menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional, dan hal ini kemudian mengancam kepentingan Amerika.⁴³ Pejabat Amerika lainnya mengatakan bahwa Washington akan melawan gerakan ekstremis Islamis manapun yang menggunakan kekerasan untuk mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan.⁴⁴

Upaya Pelletreau untuk merasionalkan posisi AS “berdasar moralitas” ini menimbulkan pertanyaan. Pemerintahan Clinton diketahui mendukung dan membantu aktivitas militer elemen-elemen oposisi di Iran, Irak, dan Libya untuk menggulingkan rezim-rezim di sana. Sebaliknya, jawaban Pelletreau menunjukkan bahwa pemerintahan AS menentang tindak kekerasan kaum Islamis yang melawan sekutu-sekutu AS tanpa peduli apakah aksi-aksi itu merupakan reaksi yang bisa dibenarkan untuk melawan tindakan represif berbagai negara Muslim.

Selanjutnya, walaupun “ekstremisme” (atau “ekstremisme Islam”) merupakan istilah operasional yang digunakan Lake, istilah ini tidak terdefinisikan dengan jelas. Dipakainya label ini oleh Lake membuka banyak kemungkinan interpretasi. Sebaliknya, Djerejian dan penggantinya, Pelletreau, menawarkan definisi ekstremisme Islam yang jauh lebih luas: kaum Islamis yang bergerak di luar batas-batas hukum — menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka dan menentang proses demokrasi — adalah ekstremis; sedangkan kelompok-kelompok Islamis yang sah adalah yang bergerak di dalam rambu-rambu hukum. Pelletreau menyatakan lebih lanjut: “Kita akan melawan mereka yang menggunakan konfrontasi politik dan religius untuk menggantikan tindakan konstruktif.”⁴⁵

Dalam pandangan AS, ekstremisme tidak hanya sinonim dengan penggunaan kekerasan tapi juga dengan agenda politik Islamis. Maka Djerejian merumuskan kembali kebijakan luar negeri

Amerika di Timur Tengah dalam kalimat-kalimat yang ambisius — sebagai diplomasi preventif dan penolakan: (Kebijakan luar negeri AS) merupakan strategi penyerangan yang dirancang bukan hanya “untuk mencegah pecahnya konflik dan mengupayakan resolusi damai persengketaan, tapi juga untuk mengubah perilaku dan membatasi cara-cara yang bisa dipakai perusuh potensial dan untuk menyingkirkan ekstremis-ekstremis yang menginginkan kekacauan dan konflik.”⁴⁶

Definisi baru Djerejian akan strategi AS ini senada dengan seruan ambisius Indyk pada peran Amerika Serikat — sebagai “kekuatan dominan di Timur Tengah dan penjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan itu” — untuk menggunakan pengaruhnya guna (1) mengubah Timur Tengah, dan (2) menciptakan suatu orde baru di kawasan ini yang dilandasi penolakan terhadap nasionalisme sekular (Arab) revolusioner dan ekstremisme religius (Islamis).⁴⁷ Walaupun ada pernyataan-pernyataan Djerejian dan Indyk ini, pemerintahan Clinton belum juga memakai tindakan-tindakan Islamis ataupun wacana-wacana mereka serta dugaan atas rencana mereka itu sebagai ukuran untuk merumuskan kebijakan menghadapi mereka. Perubahan dalam kebijakan Amerika semacam itu akan meningkatkan potensi kesalahpahaman yang makin jauh antara Amerika Serikat dan kelompok Islamis.

Pemerintahan Clinton yang pertama tampaknya menerima pandangan pendahulunya bahwa pemilihan umum jangan dipakai sebagai satu-satunya kriterium untuk mengukur proses demokrasi. Dalam pidatonya di Washington Institute, Lake mengajukan suatu definisi baru demokrasi, yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok Islamis “membajak” demokrasi melalui pemilu; definisi ini mencakup bukan hanya pemilu tapi juga sebuah sistem peradilan yang independen dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁴⁸ Pelletreau juga menekankan pentingnya nilai-nilai demokratis Barat. “Nilai-nilai sosial kita,” menurut dia, menyebabkan AS menentang mereka yang menekan kaum minoritas, tidak menghargai perbedaan, melakukan terorisme, dan

melanggar HAM. Ia menambahkan: "Kita mencurigai mereka yang menggunakan proses demokrasi untuk berkuasa hanya supaya mereka bisa menghancurkan proses itu sendiri untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi politik."⁴⁹

Meski belum pernah dinyatakan secara eksplisit, ada sisa-sisa skeptisisme yang mewarnai pandangan-pandangan para pejabat AS akan keselarasan Islam politik dengan demokrasi, dan para pengambil keputusan Amerika pun tetap ambivalen. Ada kecenderungan kuat dalam lingkaran-lingkaran kebijakan AS yang melihat kelompok Islam Timur Tengah sebagai perkecualian dibanding daerah lain yang mengalami liberalisasi.⁵⁰ Para pejabat Amerika mengakui bahwa isu demokrasi di kawasan Arab Timur Tengah berada di urutan bawah dalam skala prioritas pemerintahan Clinton, walaupun banyak pihak yang menyatakan sebaliknya.⁵¹ Sebuah pengungkapan dari seorang pejabat merangkum pandangan Amerika Serikat: Pemerintahan Clinton tidak akan menentang kelompok Islamis asalkan mereka membatasi fokusnya pada isu-isu dalam negeri.⁵² Pejabat lain lebih lugas: "Kita siap untuk hidup bersama dengan rezim-rezim Islam selama mereka tidak membahayakan atau mengancam kepentingan nasional vital kita. Kita tidak punya urusan intrinsik dengan hak asasi manusia di Timur Tengah."⁵³

Sebagian besar pejabat pemerintahan Clinton yang diwawancarai penulis menekankan kekhawatiran mereka akan dampak potensial dari agenda kebijakan luar negeri kaum Islamis, bukan dari politik dalam negeri mereka. Akhir Perang Dingin tidak membawa perubahan radikal dalam sikap AS terhadap kepemimpinan politik di Timur Tengah. Pendirian Amerika terhadap demokratisasi di wilayah ini sangat berlawanan dengan sikap mereka terhadap daerah lainnya di dunia. Seperti dikatakan seorang pejabat AS, "Konsep perluasan tidak pernah terpikirkan oleh pemerintahan Clinton. Para pengambil keputusan Amerika skeptis terhadap proses demokratisasi karena mereka tidak yakin apakah seluruh orde di wilayah ini akan hancur atau tidak."⁵⁴ Skeptisisme ini

menjelaskan pandangan Washington yang terkondisikan untuk lebih memilih stabilitas dan bukannya eksperimentasi politik di Timur Tengah.⁵⁵

Bagi pandangan Amerika, Timur Tengah, tidak seperti wilayah lainnya, tetap berada di luar lingkaran negara-negara demokratis: angin perubahan tidak menghembus rezim-rezim otoriter di sana. Orang membayangkan lebih jauh kenapa AS tidak memilih untuk berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Muslim otoritatif yang bisa diprediksi dan bisa diatur daripada berurusan dengan para demokrat pemberontak yang tidak bisa diramalkan itu. Sikap mendua Washington terhadap hasil pemilu parlementer di Aljazair tahun 1991 dan terhadap kelompok oposisi di Mesir menimbulkan banyak pertanyaan mengenai komitmen Amerika pada demokratisasi di kawasan Muslim Timur Tengah.

Di sinilah, ketika itu, terdapat kemiripan antara perilaku AS dan Soviet terhadap Dunia Ketiga. Di masa kejayaan nasionalisme Arab pada era 1950an dan 1960an, Amerika berupaya keras untuk meyakinkan Nasser dan para pemimpin nasionalis Arab lainnya untuk mengalihkan perhatian mereka dari urusan luar negeri ke dalam negeri saja. Para pembuat kebijakan AS menjanjikan bantuan ekonomi dan teknis pada Nasser bila ia mau mengarahkan fokusnya ke dalam. Pemerintahan Eisenhower, Kennedy, dan Johnson lebih prihatin dengan keterlibatan Nasser dalam politik regional dan dunia dibandingkan dengan perilaku otoriternya di dalam negeri.⁵⁶

Menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri, pada tahun 1950an dan 1960an Amerika Serikat lebih bersedia untuk menerima, paling tidak secara teoretis, keselarasan antara Islam dan demokrasi dibandingkan dengan masa sekarang. Negara-negara Timur Tengah saat itu relatif memiliki sistem-sistem sosial yang terbuka, tidak terlibat dalam kekerasan besar-besaran terhadap rakyatnya, dan erat berteman dengan Amerika Serikat.⁵⁷ Para pengambil keputusan Amerika ketika itu berharap pemerintahan dan kelompok-kelompok Muslim menerapkan institusi kolonial

dan akan selalu terkait erat dengan Barat. Tapi yang mereka petik adalah kekecewaan. Situasi mulai berubah dengan makin tertutupnya sistem-sistem sosial dalam masyarakat-masyarakat Muslim di tahun 1970an. Dari sinilah muasal ambivalensi Washington dewasa ini tentang prospek demokrasi di Timur Tengah.⁵⁸ Karenanya, pemerintahan Clinton menerima argumen kelompok gradual, yaitu bergerak makin lambat dan berhati-hati dalam menciptakan perubahan sosial dan politik di wilayah itu. Pejabat-pejabat Amerika mengkhawatiri kelangsungan Mesir dan Arab Saudi — “dua negara terpenting di daerah Arab Timur Tengah” — jika mereka ditekan untuk mempercepat langkah perubahan.⁵⁹

Budaya sebagai Faktor dalam Persepsi AS tentang Kelompok Islamis

Biarpun para pejabat Amerika secara pribadi mengakui peran penting budaya dalam mempengaruhi persepsi mereka tentang Islam politik, mereka cenderung menjauhi pembicaraan terbuka di manapun mengenai isu ini. Sebagai contoh, Lake melihat budaya membentuk politik dan ekonomi. Tapi ia buru-buru menambahkan bahwa gagasan kebebasan memang mempunyai daya tarik universal, dan juga berarti terbukanya pintu-pintu budaya dan peradaban, begitu juga halnya dengan proses demokratisasi. Dalam semangat ini, Lake memberi kesan seolah ada konsensus global dalam subjek ini, sehingga menganggap kehidupan Amerika yang khusus sebagai hal universal.⁶⁰

Penerus Lake, Samuel Berger, tampaknya menganut pandangan serupa. Sehabis kunjungan Clinton ke Afrika tahun 1998, Berger tampil di depan wakil-wakil organisasi pengungsi dan pembangunan. Sambil menceritakan bahwa ada setengah juta orang yang menyambut sang Presiden di Ghana, ia mengatakan: “Saya berharap rakyat Amerika bisa memandang kita seperti orang lain melihat diri kita. Kita adalah kilat, seberkas cahaya putih yang memberi kekuatan melalui idealisme-idealisme kita, budaya kita, cara hidup kita.”⁶¹ Pidato Berger mengenai Afrika ini masuk ke

dalam tesis pemerintahan Clinton yang melihat bahwa Amerika harus memanfaatkan dominasinya untuk menciptakan negara-negara demokrasi kapitalis baru yang mirip dengannya.

Tapi beberapa pejabat AS lebih lugas dari Lake. Seorang pejabat mengakui bahwa Amerika Serikat menggunakan contoh Barat saat membicarakan demokrasi di negara-negara berkembang karena konsep-konsep tertentu, seperti demokrasi, lahir di Barat, lalu berkembang menjadi universal dalam prosesnya.⁶² Walaupun diplomat-diplomat Amerika yang diwawancarai penulis buku ini menegaskan bahwa mereka tidak sepaham dengan hipotesis Huntington mengenai perang peradaban, mereka menekankan adanya pandangan-pandangan budaya negatif yang mewarnai pandangan resmi dan juga pandangan publik tentang Islam dan Muslim secara umum. Mereka juga melihat Huntington berpegang pada persepsi budaya yang negatif ini, dengan menulis bahwa “isu-isu berputar pada poros Islam dan Barat dan pada titik potensi konfrontasi antara kedua peradaban.”⁶³

Seorang analis Deplu AS juga mengatakan bahwa wanita Amerika merasa terganggu dengan perlakuan yang dialami sesamanya di masyarakat Muslim. Sehingga, lanjut analis ini, orang tidak bisa mengabaikan dampak dari perbedaan budaya yang memisahkan kedua peradaban: “Karena gagasan berdampak pada kebijakan. Berakhirnya Perang Dingin tidak mengubah hal ini. Kita masih menjadi tawanan sejarah.”⁶⁴ Seorang duta besar senior AS lebih lugas lagi: “Islam yang keras memang tampaknya buta — lihat saja kasus Syeikh ‘Umar ‘Abd al-Rahman, yang bersama sembilan Muslim lainnya dituduh bersekongkol untuk melakukan teror sehari di New York dan berniat menghancurkan nilai-nilai Amerika. Islam adalah sebuah agama penjajah yang mengancam cara hidup bangsa Amerika.”⁶⁵

Di balik persepsi negatif tentang Islam ini terdapat sebuah kesenjangan budaya antara dua sistem nilai yang saling bersaing. Sebagian pejabat AS sangat paham akan hal ini, dan akan kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pandangan-pandangan tak

bersahabat publik Amerika secara umum terhadap Islam dan Muslim. Pertanyaannya kemudian, sampai di mana para pembuat kebijakan Amerika dipengaruhi oleh praduga-praduga semacam ini? Dan bisakah mereka lepas dari jebakan budaya seperti itu ketika merumuskan kebijakan terhadap negara-negara yang kebudayaannya berbeda dengan mereka? Catatan yang ada menunjukkan data beraneka ragam. Karena biarpun pejabat-pejabat pemerintahan Clinton biasanya memperhitungkan juga peran budaya, namun mereka, seperti pendahulunya, mengaitkan ekstremisme Islam dengan alienasi dan eksklusifitas politik dan sosio-ekonomi, bukan hanya dengan faktor-faktor budaya atau sikap-sikap anti-Barat inheren yang lain.⁶⁶ Pandangan ini masih berlaku sampai sekarang.

Seperti dipaparkan Edward Djerejian dalam pernyataannya di Kongres pada Mei 1993: "Pengalaman memperlihatkan pada kita bahwa gerakan-gerakan Islam politik sampai tingkat tertentu berakar pada kondisi-kondisi sosial- ekonomi yang makin parah di masing-masing negara."⁶⁷ Satu setengah tahun kemudian, Clinton sendiri menghubungkan kebangkitan kekuatan ekstremis dengan kemiskinan, alienasi, dan pandangan sinis terhadap kehidupan manusia: "Jika kemiskinan selalu melahirkan keputusan dan membunuh harapan," tambah Clinton, "maka penyebar ketakutan akan menemukan lahan subur untuk mengobarkan api kekerasan."⁶⁸ Diagnosis ini, yang berakar pada ilmu ekonomi, membawa Pelletreau dan para pejabat AS lainnya berpendapat bahwa cara-cara jangka panjang yang paling mungkin untuk mengalahkan ekstremisme adalah dengan membidik kondisi-kondisi yang berada di baliknya dengan mendorong inisiatif ke arah pembangunan sosial dan ekonomi yang kuat. "Sasaran kita seharusnya menyebarkan kemakmuran dan keamanan bagi semua orang," simpul Clinton.⁶⁹ Pelletreau setuju bahwa Amerika Serikat harus juga mendukung pemerintahan di kawasan ini untuk membuka medan politik mereka dan meningkatkan kedaulatan hukum, desentralisasi, dan liberalisasi.

Konsensus di antara pemerintahan Bush dan Clinton ialah bahwa akar-akar Islam politik terletak pada tiadanya kesempatan ekonomi, pendidikan, dan politik bagi rakyat banyak. Jika ini benar, apakah tidak lebih bermanfaat secara konseptual untuk menggunakan konsep-konsep analitis lain yang bisa lebih baik dalam menjelaskan pergolakan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim dibanding memakai konsep Islam? Manfaat analitis dari konsep Islam tentunya masih jadi pertanyaan. Malah, bisa muncul argumen yang mengatakan bahwa penjelasan dengan konsep Islam bukannya menolong, tapi lebih menghambat pemahaman tentang apa yang menggerakkan orang atau negara dalam masyarakat Muslim.

Beberapa pejabat pemerintahan Clinton bereaksi terhadap kritik ini dengan menyatakan bahwa manifestasi-manifestasi tertentu dari kebangkitan Islam sangat anti-Barat dan bertujuan untuk mengikis pengaruh Barat dan pada saat yang sama menolak segala bentuk kerja sama dengan Barat, termasuk modernisasi bagi tanah air mereka.⁷⁰ Rakyat biasa pun bertanya-tanya apakah kaum Islamis didorong oleh kurangnya kesempatan ekonomi, pendidikan, dan politik di negara mereka atau didorong bias-bias anti-Barat, atau oleh keduanya. Pernyataan-pernyataan kebijakan Lake dan Pelletreau nyatanya bisa ditafsirkan dengan kerangka akomodasionis maupun konfrontasionis. Jelas sekali, pernyataan-pernyataan pemerintahan Clinton tentang Islam politik kepada publik ditujukan bagi pendengar yang berbeda-beda.

Dengan setiap saat mencoba menunjukkan pandangan AS tentang Islam politik, sang penasihat keamanan nasional dan asisten menteri luar negeri menggariskan dua strategi lanjutan: perdamaian dan pembendungan (*containment*).⁷¹ Pertama, Lake dan Pelletreau menganggap proses perdamaian Arab-Israel sebagai salah satu prioritas tertinggi kebijakan luar negeri pemerintahan ini. Mereka menguatkan komitmen Clinton untuk memacu proses perdamaian dan untuk menentang tindakan-tindakan terorisme, ekstremisme, dan politik penolakan (*politics of rejection*) yang

bertujuan untuk menghentikan proses tersebut. Hal yang pasti, pendirian pemerintahan Clinton terhadap proses perdamaian Arab-Israel berhadapan dengan mayoritas para Islamis politik yang menentang keras hal ini. Tidak mengejutkan, inilah salah satu isu yang telah mempengaruhi persepsi AS tentang Islamis, dan hal ini juga yang berpotensi memanaskan keadaan menjadi konfrontasi besar.

Kedua, Lake menegaskan niat kuat Clinton untuk melawan secara aktif negara-negara yang “kasar” dan “suka menyerang” itu — khususnya Iran, Irak, dan bahkan Sudan — serta organisasi-organisasi manapun yang mendukung dan menjalankan ekstremisme. Kedua strategi perdamaian dan pembendungan ini dimaksudkan untuk saling mendukung guna mengamankan kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah. Sejauh mana kebijakan-kebijakan pembendungan ini berhasil menjadikan perdamaian Arab-Israel makin dibutuhkan dan sukses menekan ekstremisme religius dan nasionalis? Seperti telah disebutkan, tantangan analisisnya bukan hanya untuk melihat konsistensi pandangan AS pada Islam politik tapi juga untuk mengukur efisiensi penerapannya pada pilihan-pilihan kebijakan yang konkret.

Analisis atas Wacana Pemerintahan Clinton

Seperti yang terjadi pada pendahulunya, pernyataan-pernyataan yang begitu berbeda-beda dari para pejabat pemerintahan Clinton memperlihatkan ketegangan dan situasi tarik-urat yang serius dalam cara pandang Amerika Serikat. Contohnya, perbedaan yang dilakukan pemerintahan ini atas Islamis baik dan jahat tidak banyak dasar penjelasannya. Ambiguitas dalam pernyataan-pernyataan kebijakan AS berakar dari kenyataan kaburnya garis-garis pemisah antara kelompok Islamis yang memakai kekerasan untuk menggulingkan *status quo* dengan kelompok Islamis yang dalam meraih kekuasaan bertindak mengikuti aturan permainan politik yang ada.⁷² Ketika pejabat-pejabat AS mengutuk kelompok pertama, mereka juga tidak melakukan atau mengupayakan satu

pun dialog terbuka dan bermakna dengan kelompok Islamis politik *mainstream*.

Meski Clinton dan para pembantunya rajin memuji-muji agama dan peradaban Islam, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kaum Islamis politik dan pertempuran berdarah mereka dengan penguasa yang sedang memerintah. Seperti para pendahulunya, pejabat-pejabat pemerintahan Clinton sangat menentang penggunaan kekerasan dan terorisme oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Tapi tetap saja mereka tidak berani menyalahkan beberapa sekutu Amerika di Timur Tengah, yang menerapkan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.⁷³ Di mata AS, kelompok Islamis baik tampaknya adalah mereka yang apolitis; Islam moderat dan liberal juga setara dengan rezim-rezim pro-Barat di Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, dan Malaysia. Ketidakmauan pemerintahan ini untuk melibatkan unsur-unsur Islamis moderat secara serius disebabkan karena kelompok tersebut sampai sekarang merupakan ancaman paling efektif bagi kestabilan kawasan Timur Tengah.

Pemerintahan Bush maupun Clinton menolak untuk membuka dan mempertahankan hubungan dengan kaum Islamis mayoritas. Walaupun pada awalnya pemerintahan Clinton mengawali suatu dialog rahasia dengan gerakan FIS-Aljazair dan Ikhwanul Muslimin Mesir, AS cepat-cepat mengakhiri hubungan ini setelah rezim-rezim Aljazair dan Mesir memprotes keras dan meminta dialog-dialog itu dihentikan. Pejabat-pejabat Amerika khawatir kontak mereka dengan kelompok oposisi Islamis akan membahayakan stabilitas kepemimpinan sekutu-sekutu Timur Tengah mereka.

Selanjutnya, para petinggi pemerintahan Bush dan Clinton takut kalau kelompok Islamis akan menggunakan pemilu untuk merebut kekuasaan politik. Sisi bagusnya, pendirian pemerintahan Clinton dalam hal pemilu masih ambigu, mencoba seimbang berada di tengah-tengah antara kebutuhan untuk menegaskan komitmen Amerika pada pluralisme dan nilai-nilai liberal di satu pihak, dan di pihak lain, kebutuhan untuk mengamankan ke-

pentingan material dan geostrategis AS maupun sekutu-sekutu tradisional Timur Tengahnya di kawasan ini.

Jelas bagi AS, Islam militan telah menggantikan posisi nasionalisme Arab radikal sebagai ancaman utama bagi kepentingan nasional Amerika di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Teluk Persia. Kelompok-kelompok Islamis mengguncangkan pemahaman Washington selama ini tentang sebuah perdamaian Arab-Israel yang diharapkan, juga akan kelangsungan pengaruhnya dalam urusan-urusan dalam negeri di negara-negara Teluk penghasil minyak.⁷⁴ Menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri, kebijakan pembendungan ganda pemerintahan Clinton terhadap Iran dan Irak — dan bisa ditambah dengan Sudan — harus dilihat dalam konteks ini.⁷⁵ Penerapan kebijakan pembendungan ganda ini menandai kemenangan pandangan kubu konfrontasionalis dalam pemerintahan ini.⁷⁶

Tapi pendirian pemerintahan Clinton dalam Islam politik lebih rumit dari itu. Keseluruhan pernyataan-pernyataannya tentang Islam memperlihatkan upaya sadar untuk menerima dan merangkul kaum Islamis moderat. Seperti dikatakan oleh seorang pejabat Deplu, “kebijakan kita adalah menjaga jalur-jalur komunikasi tetap terbuka dengan gerakan-gerakan Islam moderat.”⁷⁷

Paling tidak dalam pernyataan-pernyataannya di muka umum, pemerintahan Clinton telah bergerak lebih maju daripada pendahulunya dalam membangun hubungan dengan umat Muslim dan menghilangkan segala bentuk keraguan yang muncul tentang potensi dari suatu perang peradaban baru antara Barat dan dunia Muslim. Presiden dan pembantu-pembantu terdekatnya telah menolak ajakan kelompok konfrontasionalis untuk mengangkat senjata dan peringatan mereka mengenai ancaman “hijau” yang menggantikan yang lama, ancaman “merah”. Para pejabat Clinton telah menunjukkan kepekaan cukup besar dalam pernyataan-pernyataan mereka, berhati-hati untuk tidak menodai Islam dan Muslim dengan tuduhan ekstremisme. Secara pribadi, sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa pemerintahan ini tidak

menganut paham sama dengan anggapan publik dan Kongres bahwa Islam adalah ancaman atau monster baru: “Pemerintahan ini lebih maju,” ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri.⁷⁸

Walaupun, secara keseluruhan, pemerintahan Clinton telah menekankan perlunya koeksistensi dan penerimaan terhadap kaum Islamis, pandangan mereka dipenuhi dengan sikap tak bersahabat pada “ekstremisme Islam” dan “terorisme Islam”. Juga, menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional, pemerintahan ini memandang semangat revolusioner Islam sebagai sumber instabilitas dan sebuah ancaman bagi kepentingan AS.⁷⁹ Seorang pejabat lain sepakat bahwa beberapa petinggi pemerintahan Clinton mengusulkan suatu strategi penyerangan untuk melatutkan kelompok-kelompok Islamis yang paling kental; tetapi, masalahnya tidak ada satu pun kelompok atau faksi yang mengaku paling berhak memegang bendera revolusioner dalam dunia Muslim. Gerakan Islamis, tambah pejabat Deplu ini, terkotak-kotak, dan ini kabar baik bagi Amerika Serikat karena ini menunjukkan adanya semacam perimbangan kekuasaan antara kaum Islamis dan rezim-rezim yang berkuasa.⁸⁰ Dengan kata lain, baik elit-elit penguasa Timur Tengah maupun kelompok Islamis tetap tidak mampu mengacaukan dominasi AS di kawasan ini.

Sehingga, ketakutan terhadap Islam revolusioner telah mendorong pemerintahan Clinton untuk mengawasi ketat segala aktivitas kaum Islamis, khususnya di Teluk Persia, Mesir, dan kancah Arab-Israel, selain juga Turki dan Aljazair. Menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional, besarnya investasi AS di kawasan Teluk dengan sendirinya membuat Amerika khawatir akan kebangkitan fundamentalisme Islam di Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait; contohnya saja, Bahrain adalah pusat keuangan besar di Teluk Persia dan merupakan basis Angkatan Laut AS yang akan sangat mahal bagi Washington untuk memindahkannya kalau terjadi krisis.⁸¹ Kendati para pembuat kebijakan Amerika belum melihat adanya ancaman dalam waktu dekat bagi kelangsungan rezim-rezim dinastik di wilayah Teluk ini, Amerika tak ter-

lalu gembira dengan prospek jangka panjangnya.⁸²

Ketegangan-ketegangan yang ada di dalam wacana publik AS tentang Islam terlihat jelas dalam ketidaksenangan yang ditunjukkan oleh dua kubu pendekatan, akomodasionis dan konfrontasionalis, terhadap pemerintahan Clinton mengenai gerakan Islam.

Para akomodasionis, seperti John Esposito dan Yvonne Haddad, keduanya profesor agama di Universitas Georgetown, telah menyalahkan pemerintahan Clinton karena tidak secara jelas dan pasti menentukan elemen gerakan Islamis mana saja yang dianggap moderat atau ekstremis. Esposito mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak mendata kelompok-kelompok Islamis apa saja yang mereka anggap nonekstremis, dan ini artinya mereka gagal meredakan kekhawatiran terhadap Islamis.⁸³ Lebih lanjut, Haddad menyatakan bahwa bangsa Arab/Muslim “terus menerus menyediakan sasaran empuk untuk membuktikan kekuatan-kekuatan AS.”⁸⁴ Secara khusus ia menunjuk pidato Indyk pada Mei 1993 di depan *Washington Institute for Near East Policy*, menuduhnya menganut “pandangan Manichaeisme” terhadap dunia jika kaum Islamis makin berpengaruh dan berkuasa.⁸⁵

Untuk alasan-alasan yang berlawanan, kritik kubu konfrontasionalis malah lebih keras. Judith Miller, seorang koresponden *New York Times*, Martin Kramer, dan Daniel Pipes, seorang komentator, menuduh bahwa respon Bush dan Clinton mengabaikan ancaman dari Islam radikal. Mereka tidak membedakan antara kelompok Islamis baik dan jahat: bagi para konfrontasionalis, semua gerakan Islamis militan “akan selalu anti-Barat, anti-Amerika, dan anti-Israel.”⁸⁶

Kesalahan dengan membedakan kaum moderat dan kaum ekstremis, tegas Miller, menguntungkan pemerintahan Bush dan Clinton secara politis.⁸⁷ Mirip dengannya, Kramer secara tak langsung menuduh para pengambil keputusan Amerika hipokrit karena menarik garis perbedaan antara kelompok Islamis baik dan jahat, tapi tanpa secara jelas menunjukkan mana saja yang masuk kelompok moderat: Pemerintahan Clinton belum menemukan seo-

rang pun pemimpin Muslim yang bisa “dimahkotai” sebagai seorang moderat.⁸⁸

Kramer mengatakan, “para pembela kaum fundamentalis” di dunia akademis Amerika telah berhasil mempengaruhi pembuat kebijakan AS. Tidak heran, menurut dia, kalau Amerika Serikat tidak banyak tahu tentang fundamentalisme Islam dan melihatnya sebagai gerakan reformasi, padahal kelompok ini justru perlu direformasi. Kondisi berandai-andai seperti ini “dipastikan menjadi tindakan kebijakan paling berisiko dalam dekade selanjutnya di Timur Tengah dan Afrika Utara.”⁸⁹ Kebijakan damai Washington, tandas Kramer, akan melahirkan sebuah era Islamis baru.⁹⁰ Juga tidak berbeda, Patrick Clawson, seorang pengamat, mengkritik Lake, mantan Penasihat Keamanan Nasional, karena mengangkat nilai-nilai tradisional dunia Islam: pernyataan Lake dianggap membela kaum Muslim.⁹¹

Richard Haass, anggota Dewan Keamanan Nasional dalam pemerintahan Bush (senior), dan Mark Paris, seorang komentator, mempertanyakan pandangan pemerintahan Clinton yang melihat dibutuhkannya demokratisasi di semua tempat untuk melindungi kepentingan nasional AS.⁹² Sebuah pengambilalihan kekuasaan oleh FIS di Aljazair, menurut ramalan Paris, bisa berubah menjadi “bola salju Jihad pan-Islam yang menguasai seluruh Afrika Utara.”⁹³ Ia juga berpendapat bahwa demokratisasi lebih jauh di Mesir dan Yordania bisa menimbulkan risiko-risiko besar yang tidak bisa diterima bagi kepentingan keamanan Amerika: Penyelesaian bisa diraih dengan mendukung rezim-rezim berkuasa di Kairo dan Amman karena “para penguasa otoriter bisa lebih mudah berdamai dengan Israel dibandingkan negara-negara demokratis baru lahir yang telah membuka kesempatan partisipasi dalam politik, bahkan walaupun demokrasinya tidak didominasi oleh partai-partai Islamis.”⁹⁴

Kritik-kritik yang dicuatkan oleh kelompok akomodasionis dan konfrontasionis terhadap pemerintahan Clinton ini menunjukkan ambiguitas pernyataan-pernyataan publik dari pemerintahan

ini dan perimbangan relatif yang diupayakannya bagi kedua kubu. Walau Indyk diangkat sebagai asisten Menteri Luar Negeri, perimbangan kekuatan ini, yang masih condong ke arah akomodasionis, tidak banyak berubah pada masa kedua pemerintahan Clinton. Pendekatan AS terhadap aktivisme Islam dibentuk oleh pemerintahan Bush, dan terus diikuti oleh pemerintahan Clinton sejak 1993. Pendekatan yang bergradasi ini memenuhi berbagai kepentingan, termasuk lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Dengan bersikap “benar secara politis” — menekankan ikatan kesamaan antara Islam dan Barat Kristen — pendirian AS menampilkan Amerika dalam wajah baik tanpa harus terikat melakukan tindakan konkret apapun.

Pada akhirnya, apa yang perlu diperhatikan bukan hanya pernyataan-pernyataan publik AS tapi inisiatif-inisiatif kebijakan nyata Amerika terhadap Islamis; orang harus mengaitkan pernyataan-pernyataan resmi Amerika dengan isu-isu riil dan dengan negara-negara tertentu. Indyk bisa saja terus berhasil menekan negara-negara “kasar” — seperti Iran, Irak, Sudan, dan “ekstremis-ekstremis religius” lain yang ia lihat sebagai ancaman bagi AS dan sekutu-sekutunya di kawasan itu. Maka ada gunanya mengamati kebijakan-kebijakan masa kedua pemerintahan Clinton, walaupun tidak perlu semua, untuk melihat adanya perubahan dalam pendekatan AS. Ini bisa dilihat dalam bab-bab berikutnya, yang menganalisis kebijakan-kebijakan luar negeri AS yang nyata terhadap kaum Islamis di Iran, Aljazair, Mesir, dan Turki. Gunanya adalah untuk menggarisbawahi harmoni atau dikotomi yang ada antara wacana dan kebijakan pemerintahan Clinton serta mengukur bobot dan hubungan antara gagasan dan tindakan. ❀

Catatan

1. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” 26 Oktober 1994.
2. James A. Baker III bersama Thomas M. DeFrank, *The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace, 1989-1992* (New York: G. H.

Putman's Sons, 1995).

3. Editorial *New York Times*, 6 Oktober 1995.
4. *New York Times*, 8 Februari 1993.
5. Anthony Lake, "From Containment to Enlargement: Current Foreign Policy Debates in Perspective," ceramah di Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, di Washington, DC, September 1993. (Dalam ceramah lain, "Foreign Policy in a New Age" — tak dirujuk di sini — dia mengulangi komitmen pemerintahan Clinton untuk melanjutkan keterlibatan dalam politik dunia dan perluasan demokrasi pasar, serta penolakannya pada isolasionisme baru). Dalam pidato yang lebih baru di Freedom House, Presiden Clinton mengecam apa yang disebut "kemunduran isolasionis" di Amerika, mengingatkan bahwa diplomasi AS "hanya bisa berhasil kalau kita terus memimpin." Dia juga menolak imbauan untuk menempuh garis unilateralisme sebagai sejenis isolasionisme terselubung yang tak cocok untuk situasi dunia dewasa ini. Dikutip dalam *New York Times*, 7 Oktober 1995.
6. Lihat "America and Islam: A Wobbly Hand of Friendship," *Economist*, 26 Agustus 1995, h. 25.
7. Rujukan tentang kegiatan-kegiatan Departemen Luar Negeri Amerika dibuat oleh seorang bekas pejabat senior AS dalam pertemuan tertutup sekelompok pembuat kebijakan dan pakar di New York pada September 1997.
8. Anthony Lake, "Building a New Middle East: Challenges for U.S. Policy," pidato Penasihat Keamanan Nasional di Soref Symposium of the Washington Institute for Near East Policy, Washington, DC, 17 Mei 1994, *U.S. Department of State Dispatch*, Agustus 1994. Lihat pidato Pelletreau di "Symposium: Resurgent Islam." Semua rujukan pada Lake dan Pelletreau selanjutnya diambil dari transkrip-transkrip ini, kecuali disebut lain. Jauh sebelum Lake dan Pelletreau menyampaikan pidato mereka, sejumlah pejabat junior mengemukakan komentar-komentar kritis yang penting tentang kebangkitan Islam, yang melandasi pernyataan-pernyataan kebijakan Lake dan Pelletreau. Rujukan pada pelbagai pernyataan Edward Djerejian, yang sempat sebentar melanjutkan jabatannya sebagai Asisten Menteri Luar Negeri urusan Timur Dekat. Lihat juga Martin Indyk, "The Clinton Administration's Approach to the Middle East," pidato pembantu khusus Presiden di Soref Symposium, 18-19 Mei 1993, dalam Mirsky, Ahrens, dan Sultan, ed., *Challenges to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*; testimoni Laurence Pope, Dengar Pendapat di Komisi Hukum Senat, *Terrorism in America*

dan “Dengar Pendapat Komisi Hubungan Luar Negeri DPR,” *Reuter Transcript Report*, 21 April 1993; Mark R. Paris, “Update on the Crisis in Algeria,” pernyataan di Subkomisi untuk Afrika, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 22 Maret 1994, *U.S. Department of State Dispatch*, 4 April 1994.

9. Lihat juga Lake, *From Containment to Enlargement*, h. 17.
10. “Building a New Middle East,” h. 38. Pidato Lake menggemakan pernyataan-pernyataan Martin Indyk, yang disampaikan di forum yang sama setahun sebelumnya. Tampaknya Indyk, sebagai direktur senior untuk Urusan Timur Dekat dan Asia Selatan di NSC, ikut menulis pidato Lake. Lihat Indyk, “The Clinton Administration’s Approach to the Middle East,” h. 1.
11. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” 26 Oktober 1994.
12. Lake, “Building a New Middle East,” h. 37.
13. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” h. 3. Pernyataan Clinton merupakan pukulan terhadap, antara lain, Samuel Huntington, yang meramalkan benturan antara kebudayaan-kebudayaan, bukan hanya antara Islam dan Barat. Lihat “America and Islam: A Wobbly Hand of Friendship,” dalam *Economist*, h. 25.
14. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” h. 3.
15. “U.S. Policy on Recent Developments and Other Issues in the Middle East”, pernyataan di Subkomisi Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 27 Juli 1993, *U.S. Department of State Dispatch*, 9 Agustus 1993, h. 572.
16. “Current Issues in the Middle East,” ceramah di Harvard Law School: Islamic Legal Studies Program di Cambridge, 11 April 1994, h. 4.
17. Ibid; Djerejian, “U.S. Policy on Recent Developments and Other Issues in the Middle East,” h. 572; Pelletreau dalam “Symposium: Resurgent Islam,” h. 4.
18. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” h. 3. Ketika mengunjungi Islamic Center di Washington, DC, Wakil Presiden Al Gore juga memuji Islam karena banyak mendidik masyarakat tentang toleransi dan koeksistensi. Ia membandingkan ajaran-ajaran Islam dengan ajaran Kristen yang dianutnya: Islam mendorong masyarakat untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan mereka dengan serasi dengan pemahaman ini. “Pasrah pada Tuhan,” simpul Gore, “adalah bagian dari ajaran yang

ditanamkan pada diri saya dalam tradisi agama di sepanjang hidup saya.” Lihat “Remarks of Vice President Gore as He Meets with Arab and Muslim Ambassadors,” *Federal News Service*, 10 Juni 1994.

19. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” h. 4. Lihat juga “The President’s remarks at White House welcoming ceremony for King Hussein of Jordan and Prime Minister Yitzhak Rabin of Israel, Washington, DC, 25 July 1994,” dalam *U.S. Department of State Dispatch* 5, no. 7, Agustus 1994, h. 3; “Statement by the President on the occasion of the Islamic holy month Ramadan,” Gedung Putih: Kantor Sekretaris Pers (Boston, MA), 31 Januari 1995. Saat menyambut Raja Hassan dari Maroko di Gedung Putih, President Clinton memuji Raja karena berperan sebagai “kekuatan untuk toleransi dan kemajuan yang berakar pada nilai-nilai Islam.” Lihat “Remarks by President Clinton and King Hassan of Morocco upon Arrival at the White House,” *U.S. Newswire*, 15 Maret 1995, h. 1.
20. “Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament,” h. 4.
21. David Lauter, “Clinton Seeks to Build Bridge to Muslim World,” *Los Angeles Times*, 27 Oktober 1994.
22. Hal ini diungkapkan oleh seorang bekas pejabat senior Departemen Luar Negeri dalam pertemuan tertutup sekelompok pembuat kebijakan dan pakar di New York pada September 1997.
23. “Transcript of Remarks by President Clinton and King Hassan II of Morocco in Press Conference,” *U.S. Newswire*, 15 Maret 1995, h. 2.
24. “Joint Press Conference with President Bill Clinton and Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto,” *Federal News Service*, 11 April 1995, h. 1- 2.
25. *Ibid.*, h. 2.
26. Dikutip dalam Arthur L. Lowrie, “The Campaign Against Islam and American Foreign Policy,” *Middle East Policy*, h. 216. Clinton dan Wakil Presiden Al Gore juga bertemu dengan warga Arab dan Muslim Amerika, yang mempertanyakan masalah-masalah dalam dan luar negeri yang dihadapi komunitas mereka di Amerika Serikat. Al Gore mengakui buruknya perlakuan terhadap kaum Muslim Amerika menyusul pengeboman Oklahoma City, dan menjanjikan bahwa pemerintah AS tidak akan mengorbankan hak-hak warganegara dalam upaya pembasmian terhadap terorisme. Lihat *Washington Report on Middle East Affairs*, no. 6 (Januari 1996), h. 63. Sebagai contoh lain dari upaya pemerintahan Clinton untuk menjangkau komunitas Muslim Amerika, Ibu Negara Hillary Rodham Clinton menjamu sekelompok Muslim di Gedung Putih dalam acara Lebaran. Dimuat

- dalam siaran pers American Muslim Council, 18 Februari 1996.
27. Lake, "Building a New Middle East," h. 37-8.
 28. Pelletreau, "Current Issues in the Middle East," h. 6.
 29. *The Future of U.S. Anti-Terrorism Policy*, dengar pendapat di Subkomisi Keamanan Internasional, Organisasi Internasional, dan Hak-hak Azasi Manusia, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 13 Juli 1993, h. 85-6.
 30. Djerejian, "U.S. Policy on Recent Developments and other Issues in the Middle East," h. 573.
 31. Mantan Menteri Pertahanan William J. Perry mengungkapkan hal ini dalam ceramah di Council on Foreign Relations di New York City, 18 Mei 1995, h. 2.
 32. Pelletreau, "Current Issues in the Middle East," h. 5.
 33. Pidato Pelletreau di "Symposium: Resurgent Islam," h. 2-3. Lihat juga Lake, "From Containment to Enlargement," h. 17; Djerejian, "U.S. Policy on Recent Developments and Other Issues in the Middle East," h. 572.
 34. Lake, "Building a New Middle East," h. 37. Lihat juga Djerejian, "War and Peace: The Problems and Prospects of American Diplomacy in the Middle East," h. 875.
 35. Pelletreau dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 4.
 36. Ibid., h. 3. Lihat juga Djerejian, "War and Peace," h. 876.
 37. Indyk, "The Clinton Administration's Approach to the Middle East," h. 2-3.
 38. Ibid., h. 1, 3-4. Menurut seorang pejabat NSC dalam sebuah wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995, meski pandangan dominan dalam pemerintahan Clinton tidak mempercayai bahwa Islam politik itu monolitik, di Kongres dan kalangan publik AS ada sikap yang berbeda. Yang terakhir ini, menurut sang pejabat, menganut pandangan yang "simplistik" dan berprasangka tentang Islam dan kaum Muslim pada umumnya.
 39. Wawancara, Washington, DC, 31 Maret 1995.
 40. Wawancara, Washington, DC, 31 Maret 1995.
 41. Lake, "From Containment to Enlargement," h. 17.
 42. Ibid. Lake menekankan pendirian pemerintahan Clinton tentang Islam politik dalam artikel berjudul "The Middle East Moment; at the Heart of our Policy: Extremism Is the Enemy," *Washington Post*, 24 Juli 1994.

43. Pidato Pelletreau di "Symposium: Resurgent Islam," h. 21. Lihat juga "Pernyataan di Subkomisi Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 4 Oktober 1994," oleh Pelletreau dalam *U.S. Department of State Dispatch*, 10 Oktober 1994, h. 683, 685.
44. Wawancara dengan seorang pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
45. Pidato Pelletreau di "Symposium: Resurgent Islam," h. 2-3. Lihat juga pernyataan Djerejian di Dengar Pendapat di Subkomisi Afrika, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 12 Mei 1993 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1994), h. 91.
46. Djerejian, "War and Peace," h. 874, 876.
47. Lihat tulisan Daniel Pipes, "Interview with Martin Indyk on 13 November 1993 — Perspectives from the White House," *Middle East Quarterly* 1, no. 1 (Maret 1994), h. 61. Indyk juga mengemukakan pernyataan serupa dalam kapasitasnya sebagai direktur eksekutif Washington Institute dalam "Beyond the Balance of Power: America's Choice in the Middle East," *National Interest*, no. 26 (Winter 1991/92), h. 33, 42-3. Dia diangkat sebagai pembantu khusus Presiden dan direktur senior untuk Urusan Timur Dekat dan Asia Selatan di NSC setahun kemudian. Pada 1997 Presiden Clinton mempromosikan Indyk sebagai asisten menteri luar negeri.
48. Lake, "From Containment to Enlargement," h. 17.
49. Pidato Pelletreau di "Symposium: Resurgent Islam," h. 2-3. Lihat juga Pelletreau, "Current Issues in the Middle East," h. 5; Djerejian, "U.S. Policy on Recent Developments and Other Issues in the Middle East," h. 573.
50. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
51. Sebagai contoh, President Clinton menyatakan bahwa ideal-ideal demokrasi sejalan dengan "tradisi-tradisi Islam." Untuk menunjukkan hal ini, ia mengutip presiden pertama Pakistan, Muhammad Ali Jinnah: "Islam dan idealismenya telah mengajarkan kita tentang demokrasi. Ia mengajarkan kita tentang persamaan manusia, keadilan, dan sikap jujur pada setiap orang." Lihat "Joint Press Conference with President Bill Clinton and Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto," h. 1.
52. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
53. Wawancara dengan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.

54. Wawancara dengan seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
55. Wawancara dengan William Quandt, Washington, DC, 31 Maret 1995. Quandt menegaskan bahwa terjadi kemunduran dalam retorik AS mengenai dukungan bagi liberalisasi dan demokratisasi di dunia Arab. Sebaliknya, Amerika Serikat mendorong proses liberalisasi dan demokratisasi di Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Para pejabat Amerika tampak kurang yakin pada kemampuan orang Arab untuk membangun dan mempertahankan eksperimen-eksperimen konstitusional. Ketika ditanya apakah ia melihat ada titik terang bagi demokrasi di negara-negara Arab, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri menjawab dia tak melihatnya. Ditanya apakah Amerika Serikat punya niat untuk memajukan demokratisasi negara-negara Arab, kembali jawabannya negatif. Lihat Aydin Nurhan, "Turkey and Middle Eastern Stability," *Vital Speeches of the Day* 63, no. 5 (15 Desember 1996), h. 131.
56. Fawaz A. Gerges, *The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, 1955-1967* (Boulder, CO: Westview Press, 1994), khususnya bab 3, 5, 6, dan 8.
57. Wawancara dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Lake, "From Containment to Enlargement," h. 14.
61. Dikutip dalam Elaine Sciolino, "The Point Man: Berger Manages a Welter of Crises in the Post-Cold War White House," *New York Times*, 18 Mei 1998.
62. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
63. Ibid. Wawancara dengan seorang pejabat NSC, Washington, DC, 29 Maret 1995.
64. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
65. Wawancara, Princeton, NJ, 27 Mei 1995. Tapi Duta Besar ini menekankan bahwa mayoritas pembuat kebijakan AS tidak menganut pandangan radikal tentang Islam.
66. Lake, "The Middle East Moment." Lake, "Building a New Middle East," h. 37. Wawancara dengan pejabat NSC, Washington, DC, 29 Maret 1995. Pelletreau, "Symposium: Resurgent Islam," h. 3-4.

67. Djerejian, dalam *House Hearings Before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs*, h. 97.
68. "Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament," h. 3. Dalam konferensi pers bersama Raja Hassan dari Maroko, President Clinton mengatakan bahwa cara mengonsolidasikan stabilitas dan mengalahkan ekstremisme adalah "memperkuat secara ekonomi kekuatan-kekuatan yang menginginkan kemajuan dan toleransi." Lihat "Transcript of Remarks by President Clinton and King Hassan II of Morocco in Press Conference," h. 3.
69. "Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament."
70. Pelletreau dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 3.
71. Dalam pidato Mei 1993 di Washington Institute, Indyk menyebut "pembendungan ganda" terhadap Iran dan Irak dan promosi terhadap proses perdamaian Arab-Israel sebagai inti strategi regional pemerintahan Clinton. Lagi-lagi, pengaruh pandangan Indyk pada Lake tak terbantah. Lihat Indyk, "The Clinton Administration's Approach to the Middle East," h. 3-6; wawancara Pipes dengan Indyk, "Perspectives from the White House," h. 62.
72. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995, dan wawancara dengan pejabat NSC, Washington, 29 Maret 1995.
73. Tunisia adalah contoh kasusnya. Sebagai contoh, Pelletreau menyalahkan kelompok Islamis di Tunisia karena memicu konfrontasi dengan penguasa Tunisia pada awal 1990an. Lihat Pelletreau dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 16. Kendati kaum Islamis di Tunisia semula menolak berpartisipasi dalam proses politik, mereka tak terlibat dalam kampanye kekerasan terhadap rezim. Malah, sejumlah besar bukti menunjukkan fakta sebaliknya.
74. Wawancara dengan pejabat senior Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
75. Ibid.
76. Pembantu Khusus Presiden, Martin Indyk, penganut garis-keras di pemerintahan, adalah salah satu pencipta, bersama Lake, kebijakan pembendungan.
77. Wawancara dengan seorang duta besar, Princeton, NJ, 27 Mei 1995. Djerejian, arsitek kebijakan pendekatan terhadap Islam politik dalam pemerintahan Bush dan Clinton, sering menggemakan sentimen ini selama masa jabatannya dan sesudahnya. Lihat Djerejian, "War and Peace," h. 875, dan "United States Policy Toward Islam and the Arc of Crisis," *Baker Institute Study*, no. 1 (1995), h. 2.

78. Seorang pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995. Juga, wawancara dengan pejabat NSC, Washington, DC, 29 Maret 1995.
79. Wawancara, Washington, 29 Maret 1995.
80. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
81. Wawancara, Washington, 29 Maret 1995.
82. Ibid. Dalam dua tahun terakhir, serangkaian gangguan, protes, kegiatan-kegiatan sabotase, dan pengeboman-pengeboman berdarah di Arab Saudi dan Bahrain telah mengguncang ketenteraman semu di dua negara pro-Barat itu, membikin risau tetangga-tetangga Teluk mereka, yang keemiran atau kesyeikhannya bergantung pada proteksi Amerika Serikat terhadap musuh-musuh domestik dan regional. Dari artikel dan editorial di *Wall Street Journal*, 25 Oktober 1994 dan 12 Juni 1995; *New York Times*, 16 November 1995, dan 24 dan 28 Januari 1996; *Al-Hayat*, 19 Januari 1996.
83. John L. Esposito, dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 9.
84. Yvonne Yazbeck Haddad, "Islamist Perceptions of U.S. Policy in the Middle East," dalam David W. Lesch, ed., *The Middle East and the United States: A Historical and Political Reassessment* (Boulder, CO: Westview Press, 1996), h. 16.
85. Ibid.
86. Miller, "The Challenge of Radical Islam," *Foreign Affairs*, h. 45. Lihat juga Kramer, "Islam vs. Democracy," *Commentary*, h. 39; Daniel Pipes dalam "Symposium: Resurgent Islam," h. 5-6.
87. Miller, "The Challenge of Radical Islam," h. 46, 54-5.
88. Wawancara dengan Kramer, Washington, DC, 31 Maret 1995.
89. Ibid. Lihat juga "Islam vs. Democracy," h. 41.
90. Kramer, "Islam vs. Democracy," h. 42.
91. Patrick Clawson, "Liberty's the Thing, not Democracy: Ripostes," dalam *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994), h. 13.
92. Jonathan S. Paris, "When to Worry in the Middle East," *Orbis*, h. 553; Richard Haass, "Paradigm Lost," *Foreign Affairs*, Januari/Februari 1995), h. 44.
93. "When to Worry in the Middle East," h. 560.
94. Ibid., h. 563.

Republik Islam Iran



TIDAK banyak kebijakan luar negeri yang menimbulkan kemarahan dan emosi di Amerika Serikat seperti yang terjadi dalam hubungan AS dengan Iran. Walaupun hubungan AS-Iran memburuk sejak 1979, namun di masa pemerintahan Clinton-lah keburukan hubungan itu mencapai titik nadir. Tidak seperti beberapa pendahulunya, pemerintahan ini telah memutuskan untuk menantang langsung dan bukannya melunakkan Iran masa pascarevolusi. Sejak 1995, pemerintahan Clinton telah melancarkan perang ekonomi, politik, dan tertutup yang tidak dicanangkan terhadap rezim Iran yang didominasi oleh ulama.

Berlawanan dengan pernyataan-pernyataan umumnya tentang Islam politik yang berwarna akomodasionis, wacana pemerintahan Clinton mengenai Iran sangatlah tidak bersahabat, seperti juga tindakannya terhadap negeri ini. Dalam konteks Iran, pandangan AS berfungsi sebagai penakar kebijakan. Karenanya Iran merupakan studi kasus ideal jika orang ingin mengamati cara berpikir AS serta tindakannya terhadap Islam revolusioner, walaupun ada upaya para pembuat kebijakan AS yang mencoba tidak membesarkan faktor Islam di balik perilaku Iran.

Kebudayaan atau Keamanan?

Sejak awal kepresidenan Clinton, para pejabat pemerintahan telah memperlihatkan ketidaksukaan mendalam terhadap kebijakan-kebijakan Iran, menudingnya sebagai negara “bandit internasional”, “teroris”, dan “kasar”. Pejabat-pejabat AS tidak menutup-nutupi rencana mereka mengisolasi dan menekan Teheran untuk memaksanya mengubah perilakunya yang mengancam.¹ Kebijakan-kebijakan Iran, tegas Clinton, mencakup perlawanan aktifnya pada proses perdamaian Arab-Israel, dukungannya terhadap terorisme lokal dan internasional, dan usahanya memiliki persenjataan nuklir. Hasilnya adalah: Iran menjadi “sebuah ancaman bukan hanya bagi tetangga-tetangganya, tapi bagi seluruh kawasan itu dan seluruh dunia.”²

Menteri Luar Negeri Warren Christopher menggemakan kembali pernyataan Clinton: “Kami melihat tindakan Iran sebagai ancaman besar bagi kepentingan Amerika Serikat dan keamanan internasional, dan kami berniat untuk menghentikan mereka.”³ Bagi Christopher, “tangan setan” Iran bertanggung jawab dalam suatu “rentetan pembantaian.”⁴ Ketua Komisi Hubungan Internasional DPR AS, Gilman, bertindak lebih jauh lagi dengan membandingkan ancaman potensial Iran dan senjata nuklirnya dengan “Nazisme dan Hitlerisme.”⁵

Di permukaan, krisis AS-Iran merepresentasikan sebuah perang budaya dan ideologis antara dua sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Tapi pada tingkat yang lebih dalam, penggambaran Iran sebagai setan itu menunjukkan makin kerasnya pandangan para petinggi AS dan ketakutan mereka akan rezim yang didominasi ulama yang memakai sekaligus menyalahgunakan Islam untuk menyerang kepentingan-kepentingan vital Amerika serta sekutu-sekutunya. Dilihat dari pandangan ini, pentingnya Iran terletak pada kemampuannya menyatukan ideologi Islam berlawanan langsung dengan Barat yang sekular dan negara-negara kliennya di Timur Tengah.

Sejak 1979, Iran telah mempertaruhkan legitimasi kekuasaan di kawasan tersebut dengan memakai pedang kuat politik Islam. Karena itulah Islam telah membekali kepemimpinan Iran dengan sebuah mata uang yang bisa dipertukarkan untuk mendanai dan membentengi ambisi-ambisi regionalnya. Para pemimpin Iran itu, juga dunia luar, melihat Iran hari ini melalui kacamata mesianisme Islam. Adapun bagi elit kebijakan luar negeri AS, pengalaman revolusioner Islam di Iran secara luas telah membentuk pandangan mereka tentang keseluruhan fenomena kebangkitan Islam.

Pejabat-pejabat Amerika telah mencoba menarik garis perbedaan antara pemerintah Iran yang tidak mereka sepakati dan karakter Islamnya. Pada bulan April 1993, Laurence Pope, pejabat koordinator satuan tugas perlawanan terhadap terorisme di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa Amerika Serikat prihatin akan tindakan-tindakan Iran, bukan rezim Irannya itu sendiri, dan bukan juga karena negara ini merupakan Republik Islam.⁶ Tidak berbeda dari Pope, Martin Indyk yang saat itu pakar senior Timur Tengah bagi Gedung Putih, mengatakan dalam pidatonya di bulan Mei 1993 yang mengumumkan kebijakan “pembendungan ganda” (*dual containment*) terhadap Iran dan Irak, bahwa yang ditentang Washington bukanlah pemerintah Islam di Iran tapi aspek-aspek khusus dari perilaku rezim Iran.⁷ Sebagian pejabat AS mencatat bahwa pemerintahan Clinton menyadari dipakai dan disalahgunakannya Islam oleh Iran sebagai kabut tebal untuk menutupi ambisinya menjadi “hegemon tradisional” di Teluk Persia.⁸

Lepas dari pernyataan-pernyataan ini, seorang anggota Staf Perencanaan Kebijakan melihat aspek Islam dari revolusi Iran ini relevan karena rezim Iran menekankan dan menjelaskan wacana serta kebijakannya dalam kerangka Islam. Seorang pejabat AS lain sepakat: “Kami paham akan aspek Islam dalam revolusi Iran, dan seperti inilah sebagian besar pembuat kebijakan AS melihatnya.”⁹ Seorang pejabat senior Deplu AS menggambarkan ambiguitas AS pada Iran dengan menunjuk fakta bahwa para pengambil kepu-

tusan Amerika berpikir dalam kerangka negara-bangsa (*nation-state*), bukannya dalam kerangka sosioreligius, ketika mereka merumuskan kebijakan; sehingga mereka cenderung mengaitkan Islam dengan negara-bangsa itu (Iran), sama seperti mereka menghubungkan Komunisme dengan Uni Soviet. Pentingnya faktor Iran dalam pendirian pemerintahan Clinton tentang kaum Islamis terletak pada kenyataan bahwa Islam politik telah menjadi sinonim Iran.¹⁰

Dalam nada yang mirip, Richard Cottam, seorang pakar Iran, mengatakan bahwa ketika mendengar kata *Iran*, tiap orang mengerti yang dimaksudkan adalah kekuatan militansi politik Islam.¹¹ Graham Fuller, mantan pejabat intelijen di CIA, menyepakati hal ini. Ia menegaskan, ada lebih banyak hal yang terlibat dalam kebijakan AS terhadap Iran, bukan cuma berkisar pada kekuatan dominan di kawasan Teluk yang strategis itu: Sentralnya posisi Iran bagi Amerika Serikat terutama terletak pada mobilisasi Teheran pada “sumber-sumber seluruh kebudayaan (Islam) untuk menggalang kekuatan melawan bangsa setan Amerika” dan juga karena “seruannya mengangkat isu penderitaan Dunia Ketiga untuk melawan Barat.”¹² Tantangan budaya dan ideologis Iran bagi AS, tegas Fuller, diikuti dengan ancaman-ancaman lain, yang sifatnya juga global, termasuk pengembangan nuklir, terorisme, dan usaha memegang hegemoni regional, khususnya di daerah Teluk penghasil minyak — dan semua ini bertentangan dengan tujuan-tujuan strategis AS.

Perdebatan mengenai apakah ideologi atau keamanan yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Amerika terhadap Iran masih belum selesai. Hal yang menyulitkan adalah mengukur bobot relatif dari tiap variabel. Ketika faktor-faktor budaya dan ideologis secara tak langsung mempengaruhi pandangan-pandangan para pejabat Amerika terhadap rezim Iran, masalah keamanan dan strategis terkini secara langsung menyumbang dan menyulut kebijakan AS. Peran budaya dan agama adalah penting, karena keduanya memperkuat ketakutan para pejabat AS akan

ancaman Iran. Termasuk di dalamnya dukungan Iran bagi terorisme internasional untuk menyabot proses perdamaian Arab-Israel dan upayanya mengganggu stabilitas negara-negara Teluk penghasil minyak. Situasi ini ditambah lagi dengan usaha Teheran menjalankan program senjata nuklir dan penolakan mereka sampai saat ini untuk menghapuskan perintah menghukum mati penulis Salman Rushdie, yang dituduh menghina Islam melalui novelnya yang terbit tahun 1988, *The Satanic Verses*.

Dari sekian banyak kekecewaan AS terhadap Iran, para pejabat Amerika khususnya merasa terganggu dengan dukungan politis dan keuangan Teheran bagi elemen-elemen Islamis di wilayah Palestina dan Lebanon untuk menggoyahkan proses perdamaian Arab-Israel. Pemerintahan Clinton makin berang dengan kenyataan Iran sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang terang-terangan mengecam proses perdamaian tersebut. Bahkan, pemimpin-pemimpin Iran jelas menentang proses perdamaian Arab-Israel. Mantan Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Velayati menyatakan: "Kami menganggap penandatanganan perjanjian ini (antara Palestina-Israel) sebagai persekongkolan melawan Islam dan Palestina, dan kami tidak menyetujuinya."¹³ Sama dengan hal ini, setelah empat orang pengebom bunuh-diri menyebabkan jatuh korban 59 orang Israel di bulan Maret 1995, Hussein Syekhholeslam, seorang pejabat Departemen Luar Negeri Iran yang tugasnya termasuk menyebarluaskan kegiatan revolusioner, dengan gembira mengumumkan gagalnya proses perdamaian Arab-Israel. Sehabis bertemu dengan para pemimpin Hamas dan Jihad Islam Palestina, Syekhholeslam menyatakan bahwa "gerakan perlawanan Islam memasuki masa depan penuh kemenangan. Tidak ada penyelesaian damai. Orang-orang Israel harus kembali ke negara-negara asal mereka."¹⁴

Di sinilah terlihat alasan langsung dari pendekatan konfrontasionalis Clinton terhadap Iran. Dari awal, pendekatan ini terjalin dengan kebijakan Amerika dalam proses perdamaian Arab-Israel, yang merupakan inisiatif kebijakan luar negeri terpenting dari pe-

merintahan ini.¹⁵ Clinton telah menyatakan komitmen pemerintahannya untuk memberi dukungan keamanan jangka panjang bagi Israel dengan membantunya menormalkan hubungan dengan tetangga-tetangga Arabnya. Presiden dan para pembantu senior-nya sering menekankan peran besar yang dimainkan proses perdamaian tersebut dalam kebijakan luar negeri AS. Seperti dikatakan Clinton: “Memastikan perdamaian yang berlangsung lama dan di segala bidang harus menjadi prioritas kami yang paling utama.... Dan kami tidak akan berhenti bekerja sampai lingkaran perdamaian menjadi bulat sempurna.”¹⁶ Christopher, dan kemudian Menlu Madeleine Albright, menyuarakan kembali pesan penting sang Presiden: “Sejak awal, meningkatkan proses perdamaian Arab-Israel dan menjaga keamanan di kawasan Teluk ini termasuk prioritas kebijakan luar negeri terpenting dalam pemerintahan kami.”¹⁷

Lebih lanjut, para pejabat Amerika takut jika cap Islam revolusioner yang melekat pada Iran tidak ditinjau ulang, hal ini bisa mengganggu bagi rezim-rezim Arab pro-Barat, khususnya di wilayah Teluk. Pemerintahan Clinton khawatir akan dampak-dampak kumulatif dari kerusakan politis dalam negeri di negara-negara Teluk, selain juga dampak dari kekuatan militer serta pengaruh Iran yang makin besar, terhadap stabilitas Arab Saudi dan Bahrain. Kebijakan pembendungan ganda dirancang guna melemahkan kemampuan para mullah penguasa untuk mengancam kepentingan serta sekutu AS di Teluk dengan mereformasi rezim di Teheran.

Evolusi Kebijakan Amerika terhadap Iran

Ketika Clinton mulai menjabat presiden di tahun 1993, ia mewarisi berbagai macam rintangan eksekutif maupun legislatif yang dibangun Presiden Jimmy Carter, Ronald Reagan, dan George Bush terhadap Iran untuk menghalangi sebagian besar transaksi militer dan ekonomi antara kedua negara. Tujuh belas tahun setelah diplomat-diplomat AS ditawan di Teheran, Amerika Serikat

terus-menerus mempertahankan kondisi darurat nasional dengan Iran, memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran pada 1980, dan di tahun 1984, menempatkan negara ini dalam daftar pendukung terorisme.¹⁸

Tindakan-tindakan legal dan diplomatik yang membatasi ini sangat berlawanan dengan perdagangan dalam skala besar antara Iran dan Amerika Serikat. Ekspor Amerika, misalnya, meningkat dengan pasti selama awal tahun 1990an, dari angka nol di tahun 1989 mencapai US\$ 1 miliar pada 1993.¹⁹ Perusahaan-perusahaan minyak Amerika adalah pembeli minyak Iran yang terbesar, dengan membeli 30 persen dari ekspor minyak Iran, atau senilai lebih dari US\$ 4 miliar di pasar terbuka pada awal dekade 1990an. Isu Iran memunculkan dilema pelik bagi pemerintahan Clinton dengan mencuatkan dua pilar berlawanan dalam kebijakan Amerika: keinginan untuk membuka hubungan ekonomi AS ke seluruh dunia dan niat keras untuk menekan Iran agar mengubah kelakuannya.²⁰

Pada awalnya, Presiden Clinton — seperti juga para pendahulunya — menemui kesulitan merumuskan kebijakan yang konsisten terhadap Iran. Walaupun dalam bulan-bulan pertamanya di kursi kepresidenan Clinton telah meningkatkan perhatiannya pada Iran, pemerintahan ini tetap memakai kebijakan dasar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Perdagangan antara kedua negara relatif mengalir tanpa gangguan, menjadikan AS eksportir ke-8 terbesar bagi Iran pada pertengahan tahun 1993.²¹

Tapi dalam beberapa bulan saja, pendekatan pisau bermata ganda ini — sanksi diplomatik yang tampak dari luar dan perdagangan terbuka dan meningkat — tidak bisa dipertahankan lagi. Sebagian besar sebagai respon perlawanan Iran pada proses perdamaian Arab-Israel dan penambahan kekuatan militernya, makin besarlah tekanan di dalam negeri untuk mengambil tindakan yang lebih keras guna mengisolasi Teheran, dan selain itu Israel serta sebagian pemerintahan Arab mencoba meyakinkan Washington bahwa ekstremisme Islam yang disulut Iran merupakan ancaman

besar bagi stabilitas Timur Tengah dan kepentingan Barat.²² Kampanye anti-Iran disambut baik di lingkaran-lingkaran resmi AS, yang responnya berwujud dalam kebijakan pembendungan ganda terhadap Iran dan Irak di bulan Mei 1993.²³

Pembendungan ganda itu dirancang untuk menerapkan tekanan ekonomi dan politik bagi Iran, termasuk dijalankannya operasi-operasi tertutup CIA buat menangkal apa yang disebut pemerintahan ini sebagai “ambisi ekspansionis Iran”. Pada 1994, Presiden Clinton menandatangani penugasan intelijen yang di dalamnya dijabarkan manfaat dari tindakan tertutup di masa depan sebagai penekanan melalui kampanye propaganda anti-Iran yang agresif.²⁴

Tapi pembendungan ganda ini pun segera mencapai batasnya. Sejak 1993 pemerintahan ini telah mengajak sekutu-sekutu Eropanya untuk bergabung dalam kebijakan perlawanan keras dan tekanan ekonomi terhadap Iran. Mereka juga telah mencoba menghalangi penjadwalan ulang utang-utang luar negeri Iran dan membatasi begitu banyak transfer teknologi ke Iran.²⁵ Namun para pejabat Amerika gagal membujuk rekan-rekan Eropanya untuk memutuskan hubungan ekonomi mereka dengan Iran. Negara-negara Eropa lebih memilih “dialog kritis”, dan bukannya isolasi, sebagai cara melunakkan perilaku Iran; mereka juga menuduh Amerika bersikap inkonsisten, sambil menunjuk pembelian minyak Iran yang dilakukan AS.²⁶

Ketika Rusia menandatangani kontrak sebesar US\$ 1 miliar dolar pada Januari 1995 untuk membangun dua reaktor nuklir di Iran, pemimpin-pemimpin Kongres AS mengancam akan memangkas bantuan untuk Rusia, dengan alasan pentingnya isu Iran bagi Washington.²⁷ Clinton menyebut penjualan itu sangat mengganggu dan memperingatkan jika diteruskan, “Keamanan nasional Rusia akan dilemahkan dalam jangka panjang.”²⁸ Inilah sebabnya mengapa Amerika tidak ragu-ragu mengambil risiko berupa krisis hubungan dengan Rusia karena AS menempatkan isu reaktor Rusia-Iran di atas prioritasnya bagi pertemuan puncak AS-

Rusia di bulan Mei berikutnya.²⁹

Tekanan untuk melakukan perlawanan lebih aktif terhadap Iran mencapai puncaknya pada Maret 1995, ketika Teheran membuat perjanjian dengan sebuah perusahaan Amerika (Conoco) untuk bantuan eksplorasi minyak. Saat Amerika Serikat dituduh hipokrit oleh Eropa karena berdagang dengan Iran dan pada saat yang sama mengecam perdagangan Eropa, Kongres yang dikuasai Republikan dan kelompok-kelompok lobi pro-Israel mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran.³⁰ Rencana bisnis Conoco tersebut akhirnya batal setelah Clinton memerintahkan pembatasan dalam manajemen dan dana AS untuk pembangunan sumber daya minyak bumi Iran, tapi sikap para tokoh Republik tidak melunak dengan pembatalan itu. Senator Partai Republik dari New York, Alfonse D'Amato, misalnya, tetap mengajukan dua rancangan undang-undang di Senat untuk melarang perusahaan-perusahaan Amerika atau anak perusahaannya berbisnis dengan Iran, dan akan menerapkan sanksi bagi perusahaan-perusahaan asing yang melakukannya.³¹

Dari Penekanan sampai Perburuan tak Berampun

Dirongrong oleh kalangan Partai Republik, dan dibayangi risiko kehilangan dukungan dari salah satu lembaga dalam negeri terpenting, pemerintahan Clinton membuat kebijakan yang lebih keras lagi.³² Menlu Christopher, bersama Martin Indyk yang saat itu berfungsi sebagai ahli Timur Tengah senior di Gedung Putih, merekomendasikan tindakan-tindakan yang lebih tegas, termasuk menyarankan pelarangan perdagangan, untuk mengisolasi dan menghukum rezim Iran.³³ Langkah Christopher ini didorong bukan hanya oleh ketidakefisienan kebijakan AS terhadap Iran tapi juga oleh politik dalam negeri — jika pemerintah tidak menerapkan sanksi-sanksi yang komprehensif, dikhawatirkan Kongres-lah yang akan melakukannya.³⁴

Dari semua pembantu senior Clinton, Menlu Christopher me-

rupakan pemrakarsa tergigih dalam kasus Iran ini. Ia bergerak lebih jauh lagi dari kebijakan pembendungan ganda, dengan menerapkan cara yang lebih aktif — yakni menggencarkan suatu perburuan tak berampun. Menurut beberapa koleganya, Christopher melihat Iran “bukan sebagai suatu urusan diplomatik yang abstrak, tapi sebuah ancaman yang hidup, sebuah negara teroris yang jika dibiarkan saja maka dalam waktu tidak lama akan memiliki senjata-senjata nuklir dan menggunakannya untuk mengancam tetangga-tetangganya, menyerang Israel, dan menguasai jalur-jalur angkutan minyak yang vital bagi perdagangan global.”³⁵ Iran bagi menyuntik Christopher dengan energi yang bisa dibilang seperti “gairah.” Ia seolah dicekam mimpi buruk kalau sampai segala upayanya membantu Israel dan tetangga-tetangga Arabnya ke arah perdamaian diancam oleh terorisme yang didukung Iran.³⁶

Sikap Christopher terhadap Iran revolusioner terbentuk pada tahun 1980, ketika ia terlibat dalam negosiasi-negosiasi alot dalam rangka pembebasan orang-orang Amerika yang disandera di Teheran. Krisis tawanan ini telah berperan penting dalam menjatuhkan kepresidenan Carter, dan yang juga ikut jatuh adalah harapan Christopher menjadi menteri luar negeri kedua kalinya dalam masa pemerintahan kedua Carter.³⁷ Menurut seorang pejabat Deplu AS, Christopher telah banyak melewati pengalaman pahit dengan Iran; ia sangat terguncang dengan apa yang dilakukan rezim Islam terhadap Carter. Pandangan negatif Christopher terhadap Iran, menurut pejabat Deplu tadi, harus dilihat dalam konteks ini; ia benar-benar enggan berhubungan dengan orang-orang Iran yang revolusioner itu.³⁸

Para diplomat luar negeri juga mengamati bahwa ketika membicarakan Iran, perilaku santun Christopher segera lenyap dan matanya berkilat. Beberapa diplomat Eropa bahkan menuduh motivasinya sebagian terdorong oleh semangat balas dendam.³⁹ Para tokoh Eropa lainnya mengkritik Washington bereaksi berlebihan dan terobsesi dengan para mullah Iran setelah tujuh belas tahun

berlalu sejak peristiwa penyanderaan yang berdarah itu.⁴⁰ Memang benar, Gary Sick, yang ketika itu anggota tim Christopher yang bernegosiasi bagi penyelesaian krisis sandera tersebut selama tahun 1980-1981, menduga bahwa “kritik keras terhadap Iran adalah untuk memuaskan hasrat balas dendam terhadap sebuah rezim yang pernah mempermalukan Amerika Serikat dan ikut bertanggung jawab bagi kekalahan pemilu Presiden Carter.”⁴¹

Kasus Christopher ini menggambarkan bagaimana revolusi Islam di Iran berdampak pada pandangan-pandangan elit kebijakan luar negeri tentang Iran revolusioner dan politik Islam umumnya. Seperti dikatakan Graham E. Fuller, seorang mantan pejabat intelijen: “Iran merupakan sebuah kasus kebijakan luar negeri emosional yang dihadapi Amerika setelah Perang Vietnam.”⁴² Sehingga, tampaknya pandangan Washington terhadap Islam politik dibentuk oleh pengalaman AS dengan Iran.

Perilaku Iran masa pascarevolusi pun tidak banyak memperbaiki situasi, apalagi dengan upayanya menyebarkan revolusi ke luar negeri dan bantuannya bagi kelompok-kelompok radikal Islam di Lebanon, Sudan, Aljazair, serta Tepi Barat dan Gaza.⁴³ Rezim ulama tersebut juga tetap membenci Amerika dan bertekad untuk menyelesaikan proyek revolusionernya. Antipati Teheran terhadap Washington, tegas Shahram Chubin, berakar pada kedudukannya di dalam sistem regionalnya, dan pada ambisinya untuk menjadi pemegang mandat atas Islam.⁴⁴

Jadi, jauh sebelum Christopher mengusulkan pelarangan perdagangan dan investasi antara AS dan Iran, beberapa pejabat Amerika telah memencet tombol alarm. Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional saat itu mengatakan bahwa “keadaan di Iran sangat muram dan tampaknya tidak membaik sebagai akibat dari kebijakan *dual containment* kita.” Pemerintahan Clinton, tambah pejabat ini, dipaksa untuk menggunakan pendekatan yang lebih agresif: “Kepemimpinan Iran dikuasai oleh para bajingan, yang suka melakukan hal-hal terburuk; mereka secara pribadi terlibat membantu dan mendanai terorisme.”⁴⁵ Pembantu-pembantu se-

nior pemerintahan semakin yakin bahwa para petinggi Iran terlibat langsung dalam memerintahkan dan membiayai operasi-operasi teroris di luar negeri.⁴⁶ Saat Jenderal John Shalikashvili, mantan Panglima Angkatan Bersenjata AS, ditanya siapa yang dianggap sebagai ancaman keamanan terbesar bagi Amerika Serikat, ia segera menjawab, “kami tentu saja cemas akan kepentingan kita di Timur Tengah.” Iran, tambah Shalikashvili, “adalah ancaman bagi seluruh kawasan di sana. Jika kita mendengar pendapat apapun yang dikatakan Iran, sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa mereka sangat menentang segala hal yang dibela oleh kita dan teman-teman kita.”⁴⁷

Di bulan April 1995, Clinton mengumumkan pelarangan atas semua perdagangan AS dengan Iran serta investasi di sana.⁴⁸ Para perumus kebijakan senior AS menegaskan bahwa Iran harus menerima hukuman karena melanggar aturan yang dianut oleh negara-negara taat hukum. Dibandingkan dengan negara-negara keras lainnya, kata Clinton, Iran merupakan masalah khusus bagi proses perdamaian.⁴⁹ Christopher sepakat tentang hal ini: “Iran adalah pelindung terbesar bagi para teroris yang mencoba menyimpangkan proses perdamaian Arab-Israel. Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, Front Rakyat Ahmad Jibril — semua organisasi ini menerima dana, pelatihan, dan dukungan politik dari Iran.”⁵⁰

Clinton menuduh Iran berusaha mengacaukan kawasan Timur Tengah dan menghancurkan perdamaian dengan mendukung para teroris serta haus akan senjata nuklir. Ia menolak pendapat para penasihatnya yang mengatakan bahwa dialog, bukan konfrontasi, adalah jalan terbaik untuk mengubah perilaku Iran. Dalam pandangan Clinton, “Iran telah meluaskan perannya sebagai inspirasi sekaligus penggaji para teroris.” Presiden menyatakan perang terhadap terorisme di seluruh dunia, khususnya di beberapa “negara keras” di Timur Tengah, “yang mendukung kematian untuk membunuh perdamaian.”⁵¹

Tambahan pula, para pejabat pemerintahan Clinton melihat perbedaan-perbedaan antara AS dan Iran bukan hanya sebagai

suatu pertarungan guna membela kepentingan nasional, tapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai dan menguatkan kepemimpinan AS di luar negeri. Di depan Komite Aksi Politik Amerika-Israel (AIPAC) pada bulan Mei 1995, Clinton menyatakan bahwa Iran “berusaha mengikis Barat dan nilai-nilainya dengan mendukung serangan-serangan maut Jihad Islam dan Hizbullah serta kelompok-kelompok teroris lainnya.” Clinton menggambarkan konflik dengan Iran sebagai bagian dari sebuah perang yang lebih besar antara masyarakat terbuka (*open society*) dan musuh-musuhnya: “Makin terbuka dan makin fleksibel kita, makin rentan kita akan ancaman kekuatan-kekuatan jahat yang terorganisasi.”⁵² Beberapa hari setelahnya, dalam sebuah acara penghormatan bagi generasi yang telah memenangkan Perang Dunia II dan kembali berhasil dalam Perang Dingin, Clinton memperingatkan bahwa Amerika Serikat masih harus menghadapi “kekuatan jahat” dalam berbagai bentuknya di seluruh dunia. Bagaiakan pengiring bagi pernyataan ini, tindakan resmi Clinton terakhir sebelum ia memberikan pidato ini adalah menandatangani perintah eksekutif berupa penerapan embargo baru terhadap Iran.⁵³

Dengan memakai bahasa yang sama, Peter Tarnoff, menteri muda urusan politik Deplu, mengatakan bahwa Iran tetap berada di puncak agenda diplomatik pemerintahan Clinton karena kebijakan negara itu mengancam kepentingan-kepentingan utama dan juga “nilai-nilai kita”. Ketika menjelaskan kebijakan Amerika, Tarnoff menekankan perlawanan aktif Iran terhadap proses perdamaian Arab-Israel serta ancamannya bagi stabilitas dan keamanan Teluk Persia. Ia tidak sepakat dengan pandangan sekutu AS bahwa bukan konfrontasi tetapi perbaikan hubunganlah yang akan mengubah perilaku buruk Iran, mengingat adanya kesenjangan antara kebijakan Amerika dan kebijakan sebagian besar negara-negara industri. Clinton sendiri memahami perbedaan itu: “Saya tidak yakin apakah kita berada di jalur pemikiran yang sama” dengan negara-negara sekutu; ia menambahkan, “buktinya adalah hubungan konstruktif dengan bangsa Iran, paling tidak sampai saat ini, telah gagal membuahkan hasil positif.” Sang

Presiden tidak menyebutkan bahwa ia bahkan tidak berkonsultasi dengan sekutu-sekutu terdekatnya sebelum melakukan embargo ekonomi terhadap Iran.⁵⁴

Belum puas walaupun sudah ada pelarangan perdagangan dengan Iran, DPR AS mengajukan sebuah rancangan undang-undang sanksi untuk menghukum perusahaan-perusahaan luar negeri yang menginvestasikan dana paling sedikit US\$ 40 juta dalam bisnis minyak di Iran, yang kemudian disahkan oleh Clinton pada Agustus 1996. Undang-undang baru ini menyulut perselisihan tajam antara pemerintahan Clinton dan sekutu-sekutunya dalam urusan kebijakan terhadap Iran.⁵⁵ Sebagai jawaban bagi rancangan legislasi yang diajukan DPR AS ini, sekutu-sekutu Washington di Eropa yang perusahaan-perusahaan negaranya menanam investasi di Iran — seperti perusahaan Total dari Prancis, yang pada 1997 bersama Rusia dan Malaysia menandatangani kontrak senilai US\$ 2 miliar dengan Iran untuk pengembangan ladang minyak — telah mengancam akan membalas jika Presiden Clinton memperlakukan undang-undang tersebut. Perdana Menteri Prancis Lionel Jospin mengatakan bahwa AS tidak bisa menerapkan hukum tersebut kepada dunia; sebab hal itu berarti “akan mengubah situasi dunia, dan menjadikan kita bukan lagi negara merdeka seperti keadaan kita sekarang.”⁵⁶ Seorang pejabat Jerman menyebut inisiatif AS ini sebagai “kesalahan.”⁵⁷

Bahkan Inggris, yang biasanya tak suka menentang Amerika Serikat, menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap undang-undang AS ini. Tantangan terbesar bagi kebijakan Amerika muncul dari Turki, satu anggota NATO, yang menolak sanksi AS tersebut dengan menandatangani kontrak senilai US\$ 20 miliar dengan Iran untuk suplai gas alam. Kontrak US\$ 2 miliar antara perusahaan-perusahaan Prancis-Rusia-Malaysia dengan Iran itu juga telah menempatkan AS dalam situasi konflik dengan sebagian kawan dan sekutunya. Hanya ada dua negara di dunia ini yang memandang strategi embargo tersebut sebagai gagasan bagus: Amerika Serikat dan Israel.⁵⁸ Sejak pertengahan 1996, pe-

merintahan Clinton mendapati dirinya terjepit dalam konfrontasi serius dengan rekan-rekannya di Eropa (juga dengan Kanada), yang tampak tak berniat untuk menuruti jejak Amerika dalam menjalankan pembendungan aktif terhadap Iran.⁵⁹

Untungnya, dalam hal peran subversif Iran dalam politik Islam dan regional itu tidak semua pejabat AS menganut pandangan cemas. Menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional, meski Iran menumbuhkan inspirasi moral dan memberikan dukungan material bagi berbagai kelompok Islamis di Timur Tengah dan Afrika Utara, koneksi Iran ini tampak paling jelas dalam kasus Sudan: "Tapi Sudan adalah sebuah negara pinggir; kita menaruh perhatian pada Sudan karena negara ini merupakan tempat istirahat para teroris."⁶⁰ Di Lebanon, beberapa diplomat Amerika mengamati bahwa keberhasilan proses perdamaian akan merusak hubungan gerakan Hizbullah dengan Teheran.⁶¹ Seorang anggota Dewan Keamanan Nasional lainnya menambahkan, keliarulah jika menyalahkan Teheran atas gangguan kaum Islamis terhadap kestabilan wilayah ini. Pejabat ini juga mengatakan bahwa "kelewat besar obsesi terhadap Iran di dalam dan di luar pemerintahan AS."⁶² Anggota NSC lainnya sepakat bahwa atmosfir politik dalam negeri di Washington "sangat bergejolak" menentang Iran, dan ini mempengaruhi perilaku Washington terhadap Teheran.⁶³

Pandangan lugas para pejabat yang diwawancarai berlawanan dengan penggambaran yang dibuat oleh pemerintahan Clinton tentang Iran sebagai sarang terorisme internasional dan militansi Islamis. Pernyataan mereka juga memperlihatkan kubu-kubu serta perbedaan-perbedaan kecil yang ada dalam pemerintahan ini dan dampak politik dalam negeri pada kebijakan AS terhadap Teheran. Menurut William Quandt, beberapa pejabat yang bertugas mengurus masalah Iran dicopot dari penugasannya karena mereka menerapkan pendekatan fleksibel dan kurang garang terhadap para mullah Iran.⁶⁴

Sebagian orang penting dalam lapisan elit kebijakan AS juga mengkritik kebijakan pembendungan ganda Clinton yang diang-

gap tak efektif, secara strategis tidak bisa dijalankan, serta menimbulkan kerugian diplomatik dan finansial yang besar. Langkah besar kampanye AS ini, menurut pengamatan dua mantan penasihat keamanan nasional, Zbigniew Brzezinski dari Partai Demokrat dan Brent Scowcroft dari Republik, serta bekas asisten menlu Richard Murphy, telah mendorong Iran dan Rusia untuk bersatu serta menjauhkan Amerika Serikat dari sekutu-sekutu Eropanya. Tiga mantan pembuat kebijakan ini meminta pemerintahan Clinton untuk mengkaji ulang dan membenahi kebijakan terhadap Iran.⁶⁵

Walaupun pandangan mereka terhadap Iran berbeda-beda, para pejabat Amerika semuanya satu suara bahwa para mullah harus menghentikan penentangan mereka terhadap proses perdamaian Arab-Israel dan menerima keterlibatan Washington dalam menjaga keamanan wilayah Teluk penghasil minyak ini. Seperti dikatakan anggota staf NSC, “Amerika Serikat bisa menoleransi revolusi Islam di Iran jika tujuannya untuk membela diri. Tapi AS tidak akan membiarkan revolusi Iran bergerak ke luar perbatasan negara itu.”⁶⁶

Para pejabat Amerika juga setuju bahwa pembendungan terhadap Iran adalah pilihan paling aman yang tersedia bagi pemerintahan Clinton, karena popularitas strategi ini di Amerika Serikat. Bahkan, Gary Sick mencatat, strategi konfrontasional pemerintahan ini terhadap Iran telah “secara luas diterima dengan baik oleh Kongres dan publik Amerika, pada saat kesan tentang Iran sangat erat berkaitan dengan terorisme dan krisis sandera di era 1980an.”⁶⁷

Setelah Clinton mengumumkan keputusannya untuk menerapkan embargo unilateral atas Iran, senator-senator Republik yang sering mengkritik kebijakan Clinton terhadap Iran memuji langkah beraninya ini. “Saya salut pada Presiden,” ujar Senator John McCain, Republikan Arizona yang dengan sangat giat memantau program-program senjata Iran selama bertahun-tahun. “Presiden telah melakukan hal yang tepat dan saya akan men-

dukungnya dengan segala cara. Rancangan legislasi D'Amato memang harus ditunda.”⁶⁸ Bahkan Senator D'Amato sendiri merasa perlu untuk menyanjung keputusan Presiden tersebut sebagai “langkah awal yang baik.”⁶⁹ Dengan memberi perhatian khusus pada percaturan dalam negeri, Clinton mendapatkan keuntungan politis dari tindakannya menyerang para mullah di Teheran.

Perang Washington terhadap Islam Revolusioner

Selama tujuh tahun masa kepemimpinannya, pemerintahan Clinton telah meningkatkan konfrontasi dengan Iran sebagai upaya mengisolasi dan merombak rezimnya yang berisi para ulama. Walaupun para pejabat Amerika menegaskan bahwa mereka telah menerima revolusi Islam di Iran, sebagian dari pernyataan dan tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya berharap bisa menggoyahkan rezim mullah itu. Dalam wawancara dengan *Washington Times* di bulan Januari 1995, Menlu Christopher menyerukan penggulingan pemerintahan Iran dan Irak: “Kita harus mengisolasi Irak dan Iran sampai ada perubahan dalam pemerintahan mereka, suatu perubahan dalam kepemimpinan mereka.”⁷⁰ Lebih lanjut, Presiden Clinton, mengalah pada tekanan yang dilancarkan kubu Republik di Kongres, memerintahkan CIA untuk menjalankan operasi rahasia “untuk mengubah tabiat pemerintah Iran.”⁷¹

Walau pemerintahan ini menolak pandangan konfrontasionalis tentang adanya jaringan Islamis yang terkoordinasi, mereka tetap mencurigai Iran memberi semangat dan bantuan kepada “ekstremis-ekstremis religius” di Timur Tengah, Afrika Utara, dan banyak tempat lain. Amerika melihat Iran sebagai kekuatan penggerak di belakang banyak militansi Islamis di dunia. Keterpakuan mereka pada Iran beserta kaum ulamanya ini berakar bukan hanya dari ketakutan mereka akan ideologi Islam revolusionernya Iran. Alasan pertama, bahasa revolusioner Iran berbahaya karena menyerang langsung pada pemahaman yang secara umum sudah diterima mengenai peran pasif agama dalam politik. Kedua, *modus*

operandi rahasia revolusi Iran menyerang langsung jantung Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutunya.⁷²

Inilah sebabnya perbedaan teoretis yang dilakukan para pejabat AS antara Islamis “moderat” dan “militan” tidak bisa diterapkan pada kasus Iran karena para mullah di Teheran, seperti disinggung Clinton dalam pidatonya di depan parlemen Yordania, merupakan “pasukan teror dan ekstremisme.”⁷³ Islam revolusioner seperti yang dipraktikkan Iran dipandang sangat anti-Barat dan jelas-jelas mengganggu kepentingan Amerika, dan pemerintahan Clinton tampaknya bertekad untuk memerangi satu varian Islam politik ini.

Kasus Iran ini memperlihatkan cara Amerika Serikat mendekati kelompok Islamis di tempat lain. Baik ambiguitas pandangan AS terhadap kebangkitan Islam maupun kecurigaan mereka terhadap kelompok Islamis tidak bisa dimengerti tanpa memahami adanya ketakutan yang ditimbulkan Iran di lapisan elit kebijakan luar negeri AS. Washington tampaknya memakai revolusi Iran sebagai patokan untuk mengukur gerakan-gerakan Islamis yang sedang bangkit di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam konteks ini, kebijakan AS terhadap Iran berdampak lebih luas bagi hubungan Amerika dengan kaum Islamis di negara lain.

Ancaman Iran: Mitos dan Kenyataan

Pemerintahan Clinton boleh terkejut dengan kebijakan rezim ulama tersebut terhadap para pembangkang Iran. Para mullah di sana juga menunjukkan kebencian terhadap Amerika serta sekutu-sekutunya, dan para pemimpin Iran tercatat menentang proses perdamaian Arab-Israel. Para pejabat pemerintahan Clinton yakin bahwa Teheran mengganggu kepentingan AS dengan memberi dukungan material bagi kelompok-kelompok Islamis radikal di Lebanon, Sudan, Aljazair serta juga Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Tetapi, diagnosis AS tentang ancaman Iran tidak memperhitungkan kelemahan revolusi Islam itu di dalam maupun luar

negeri. Revolusi Iran sama sekali bukan sebuah contoh yang bisa ditiru. Seperti dikatakan seorang analis Iran, “Revolusi ini hanya sebuah kulit kosong yang tidak memberi inspirasi dan juga tak mampu menggerakkan para pendukungnya.”⁷⁴ Iran tidak lagi merupakan ancaman ideologis ataupun budaya bagi AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah.

Hal yang bisa jadi contoh klasik adalah kegagalan Ayatullah Khomeini dalam mendorong sesama kaum Syiah di Irak untuk bangkit melawan rezim Saddam Hussein selama perang Iran-Irak pada dasawarsa 1980an. Pandangan revolusioner Republik Islam ini memang mendapat simpati dari sebagian kaum Syiah Lebanon. Tetapi, kebangkitan Hizbullah menjadi kuat berkaitan dengan termarjinalisasinya komunitas Syiah di Lebanon secara sosioekonomis dan politis, bukan karena rekayasa sosial Teheran.

Adanya ketakutan bahwa monarki-monarki Teluk yang pro-Barat dan konservatif akan terganggu oleh khotbah-khotbah keras Khomeini ternyata berlebihan. Iran telah gagal mengubah ideologi Islam revolusionernya menjadi suatu pengaruh politis yang nyata. Kerusuhan-kerusuhan di Bahrain tahun 1994 dan 1995 juga tidak masuk hitungan. Seperti diungkapkan seorang anggota Dewan Keamanan Nasional, “Kerusuhan-kerusuhan di Bahrain itu disebabkan masalah lokal.”⁷⁵

Mirip dengan itu, guncangan politik di Mesir dan Aljazair — seperti disampaikan beberapa pejabat AS — penyebabnya ada di dalam negara-negara itu sendiri. Dengan kondisi sosial-ekonomi dan politik yang parah di negara-negara ini, ajakan kaum Islamis jadi sangat menarik, dengan ataupun tanpa hasutan Iran. Analogi yang sama juga bisa dikenakan pada Sudan. Orang-orang Sudan lebih tertarik mendapatkan minyak Iran, uang, dan bahan makanan guna menyelamatkan ekonominya yang sedang terpuruk daripada mengimpor dogma teologis. Hassan Turabi, pemimpin Ikhwanul Muslimin yang juga merupakan kekuatan di balik rezim militer pro-Islamis di Sudan, telah mengambil jarak dengan Iran, mengkritik agenda sosial-politik Republik Islam tersebut “terlalu

abstrak” dan “sering keliru”.⁷⁶

Seperti para pendahulu mereka yang nasionalis dari era 1950an dan 1960an, sekali kaum Islamis dari berbagai negara bangkit berkuasa, mereka akan menghabiskan energi revolusionernya untuk mengurus lawan-lawan ideologis dan politis di dalam negeri. Celah antara kaum Sunni dan Syiah dalam Islam, ditambah dengan perbenturan ego antara para pemimpin patriarkisnya, akan menghambat kebangkitan serta konsolidasi sebuah gerakan Islamis internasional yang homogen.

Ketidakmampuan Republik Islam ini mengekspor revolusinya terkait langsung dengan kegagalan politik dalam negerinya yang begitu jelas serta kinerja ekonominya yang menyedihkan. Tanda-tanda kehancuran terlihat dari semakin seringnya para mullah yang berkuasa menggunakan tindakan represif. Inflasi yang tinggi dan tingkat pengangguran yang melambung, diikuti pertumbuhan penduduk yang cepat — dengan rata-rata kenaikan 2,77 persen per tahun — semua ini menimbulkan kerusakan standar hidup yang parah. Para mullah tersebut, dengan kegagalan manajemen ekonomi, korupsi, kondisi sosial dan politik yang hancur, serta proyek-proyek militer di luar negeri yang mahal, telah mengalienasi kelompok-kelompok besar di masyarakat. Lebih lanjut, walaupun ada selapis tipis demokratisasi yang dijalankan para ulama, Iran dikuasai oleh rezim totaliter yang makin sering mengandalkan tindakan represif untuk melumpuhkan pemberontak dan mempertahankan kontrol.

Ada ketidakpuasan yang terungkap jelas di bulan Mei 1997 ketika bangsa Iran menampik ajakan para mullahnya dan dalam jumlah mencengangkan memilih Mohammad Khatami sebagai presiden dan meninggalkan calon yang diajukan kubu pemerintah. Karena Khatami sangat dikenal dengan pandangan-pandangan reformisnya, pemilihan dirinya memperlihatkan penolakan terhadap kekuatan-kekuatan konservatif yang menguasai Iran sejak tahun 1979. Kemenangan Khatami juga menunjukkan bahwa kaum konservatif religius tidak mampu menenangkan masyarakat

sipil. Masyarakat sipil tersebut lebih kompleks dan tahan banting daripada yang diperkirakan sebagian pejabat dan pengamat Amerika. Walau banyak tekanan dari para mullah konservatif, Khatami telah menunjukkan sikap rujuk kepada AS. Dalam konferensi persnya yang pertama, ia mengatakan berharap untuk mencoba membuka lagi dialog dengan bangsa Amerika sejak tertutupnya hubungan di tahun 1979. Ia menyatakan “respek yang besar” bagi “bangsa besar Amerika Serikat” dan mengkritik pemerintah AS karena menghalangi kemungkinan rekonsiliasi. Untuk menunjukkan kesungguhannya, Khatami berkata bahwa “sumber kesedihan” baginya adalah ketika AS dan Iran tidak banyak melakukan apa-apa untuk berdamai: “Daripada berbicara dengan lidah tajam, lebih baik kita melakukan dialog yang rasional.”⁷⁷

Sejak naik ke kursi kepresidenan di bulan Agustus 1997, Khatami telah berhasil menyambung celah-celah perbedaan dengan Uni Eropa yang pernah menyebabkan ditariknya duta-duta besar Eropa. Iran juga telah bekerja keras menyambung tali hubungan dengan tetangga-tetangga Arabnya seperti Arab Saudi dan Mesir. Pada Desember 1997, Teheran menjadi tuan rumah bagi sebuah konferensi Islam yang dihadiri perwakilan dari 54 negara. Pelan tapi pasti, Khatami telah menormalkan kebijakan luar negeri Iran. Ini bukanlah prestasi kecil, mengingat adanya gerakan-gerakan perlawanan intens di dalam negeri yang seringkali berlangsung dengan keras.

Presiden Clinton menyebut pemilihan Khatami sebagai “penuh harapan”, dan ia berharap hubungan buruk antara Amerika dan Iran “bisa dijembatani.” Tapi Clinton cepat-cepat menambahkan bahwa pemerintahan Teheran harus melangkah lebih dulu untuk mengubah kebijakan-kebijakannya. Termasuk menyangkut dukungan Iran terhadap terorisme melawan Israel, usahanya membuat persenjataan nuklir dan kimia, serta upayanya menggoyahkan proses perdamaian Arab-Israel. Respon Departemen Luar Negeri terhadap pesan Khatami yang spesifik dan bersahabat bagi

AS adalah “masih terlalu pagi untuk melihat apakah hal itu menunjukkan sebuah penawaran atau bukan.”⁷⁸

Meski tanggapan-tanggapan Clinton memperlihatkan perubahan warna dan disambut oleh rezim Iran, kalimat-kalimatnya itu tidak menunjukkan perubahan fundamental dalam pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat. Dengan perkecualian pernyataan-pernyataan Clinton dan indikasi positif dari pejabat-pejabat AS lainnya, Amerika tidak juga melunakkan kebijakan pembendungan gandanya. Peninjauan kembali yang lama ditunggu atas kebijakan era kedua Clinton terhadap Iran tidak mengarah ke perubahan besar. Walau ada beberapa prediksi positif, tampaknya hubungan Amerika-Iran akan tetap diwarnai permusuhan, paling tidak selama masa pemerintahan kedua Clinton.⁷⁹

Lebih jauh lagi, di awal perjanjian perusahaan minyak Prancis, Total, dengan Iran, pemerintahan Clinton tergelincir ke dalam dilema. Jika Clinton menerapkan sanksi, hal ini bisa makin menjauhkan dirinya dari sekutu-sekutu Eropa dan malah mungkin memicu perang dagang yang bisa berakibat lebih buruk bagi negara-negara Barat dibandingkan bagi Iran. Walau misalnya pemerintah AS memutuskan untuk menjatuhkan sanksi, yang memang akhirnya dilakukan, kebijakan pembendungan ganda Clinton — selain memakan biaya bagi Amerika Serikat — telah menimbulkan gesekan dengan sekutu-sekutu Eropanya, perselisihan dengan Rusia dan Cina, serta sorotan keras dari sebagian negara Teluk, dan semua ini gagal mengisolasi Iran.⁸⁰

Hal yang juga dilebih-lebihkan adalah ambisi kekuasaan pemerintah Iran di balik upaya menambah kekuatan militernya. Iran mengeluarkan jauh lebih sedikit anggaran militernya per tahun — US\$ 3 miliar — dibanding Irak dan Arab Saudi, yang membelanjakan hampir US\$ 80 miliar untuk persenjataan selama periode 1982-1992. Iran hanya memiliki kemampuan militer yang sederhana dibanding kedua tetangganya itu. Para analis sepakat bahwa Iran hanya merupakan “gangguan” dalam hal militer bagi kawan-kawan Amerika.⁸¹

Tentangan pemerintah AS terhadap keinginan Iran untuk memperoleh senjata-senjata nuklir juga bermasalah. Amerika tidak punya banyak bukti untuk mendukung tuduhannya ini.⁸² Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Hans Blix, secara tak langsung mengkritik tuduhan Washington tentang peredaran bahan nuklir di Iran. Ia menekankan bahwa para inspektur IAEA, dalam kunjungan berkala mereka ke Iran, tidak pernah melihat adanya pergerakan material untuk tujuan militer, dan tidak pernah mendapat kesulitan dalam menerapkan perjanjian pengamanan.⁸³

Meski beberapa ulama ingin mengadakan riset dalam urusan nuklir, namun dalam lingkaran kepemimpinan Iran tidak terjadi kesepakatan ataupun perdebatan mengenai senjata nuklir. Seorang pakar kebijakan keamanan Iran yang terkemuka menegaskan bahwa Iran belum sampai pada keputusan akhir mengenai senjata nuklir dan, karenanya, “keputusan” Teheran untuk masuk dalam kancah nuklir bisa dibelokkan. Semakin terisolasi para pemimpin Iran, semakin mereka cenderung memilih untuk menggunakan senjata nuklir.⁸⁴ Kerangka berpikir konspiratif para pemimpin Iran, digabung dengan perasaan menjadi korban, tampaknya menjadi pendorong upaya mereka mendapatkan senjata nuklir. Sejak ia menjadi presiden, Khatami telah mencoba mengurangi kesan birokrasi nuklir tersebut dengan mengganti seorang kepalanya yang setia dengan salah satu pendukungnya. Khatami tampak bermaksud untuk menetralkan isu nuklir yang telah meracuni hubungan AS dan Iran.

Memperlakukan Iran sebagai negara “bandit internasional” yang “kasar” akan mendorong ketakutan kolektif elit penguasanya. Untuk mencegah Iran memiliki nuklir, Washington harus mencoba melibatkan Republik Islam tersebut ke dalam komunitas internasional, dan bukannya memperlakukannya sebagai orang luar. Program nuklir Iran harus dilihat secara politis, bukan sebagai isu keamanan atau strategis. Ironisnya, perlakuan Washington pada potensi nuklir Korea Utara berbeda dengan yang diterapkan-

nya pada Iran.

Pemerintahan Clinton menunjukkan keprihatinan yang sah terhadap bantuan Iran bagi beberapa elemen revolusioner yang terlibat dalam terorisme. Tapi tuduhan “Iran adalah sponsor utama terorisme di dunia” terlalu berlebihan. Seperti ditulis majalah *Economist*: “Para mullah tersebut mungkin memang tidak enak dijadikan teman, dan harus dikontrol. Tapi, di luar Iran, tidak cukup bukti yang menunjukkan mereka mengontrol kelompok-kelompok militan — selain gerilyawan Hizbullah di Lebanon.”⁸⁵ Bahkan Hizbullah pun sesekali menyesali makin berkurangnya bantuan yang diberikan Iran. Walaupun Hamas menerima dana dari beberapa ulama Iran, bantuan besar bagi mereka datang dari Palestina dan warga dari negara-negara Arab di Teluk. Hamas tidak menerima perintah dari Teheran. Mereka punya agenda sendiri.

Memang, tidak bisa dimungkiri bahwa Iran menentang proses perdamaian di Timur Tengah dan mendukung terorisme, khususnya untuk melawan musuh-musuh politik dan para pembangkang di dalam negeri. Tapi di awal tahun 1996, mantan presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani mencoba meredam penentangan negerinya terhadap proses perdamaian tersebut dengan menyatakan bahwa Teheran menghargai segala bentuk perjanjian damai antara Israel dan Suriah. Ia juga menegaskan bahwa Iran “menentang terorisme, siapapun pelakunya, bahkan Hamas sekalipun.”⁸⁶ Pemilu parlemen tahun 1996, dan juga referendum presidensial tahun 1997 di Iran, telah menguatkan posisinya sebagai kubu teknokrat yang reformis.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan adanya pengalaman berdarah dengan Republik Islam tersebut sejak tahun 1979, Amerika Serikat tidak bisa disalahkan jika mencurigai niat-niat Teheran. Tapi ada alasan untuk meragukan bahwa sikap permusuhan akan mendorong perubahan politik di Iran. Tekanan AS yang terus menerus selama dua puluh

tahun terbukti tidak menghasilkan banyak perubahan. Pendekatan konfrontasional Clinton tidak bisa berjalan lancar karena kelangkaan dukungan dari sekutu-sekutu Amerika. Memang benar, walau tidak mengubah Iran, bentuk pendekatan tersebut berdampak pada ulama-ulama garis-keras yang sangat menentang perbaikan hubungan dengan Washington dan yang menyebut Amerika sebagai “Setan Besar”. Kebijakan Clinton juga melemahkan kekuatan-kekuatan reformis yang tersisa dalam rezim para mullah, khususnya posisi rawan Khatami, sang presiden baru saat itu. Khatami telah mendapat tentangan keras dari kekuatan konservatif karena memasukkan “orang-orang moderat” ke dalam kabinetnya, khususnya Menteri Luar Negeri Kamal Kharazi, yang melakukan dialog dengan Amerika Serikat.⁸⁷

Pendekatan yang lebih dinamis dan selektif dari pihak Amerika, disertai dengan pemberian bantuan dan ancaman (*carrots and sticks*), akan lebih efektif untuk mendorong Iran menenangkan perilakunya. Walaupun upaya-upaya AS sebelumnya untuk membuka dialog dengan Teheran ditolak para mullah, situasinya tampak berubah. Di saat para pemimpin Iran masih terpecah dalam masalah dialog dengan Washington, mereka tampak lebih reseptif untuk membuka diri. Misalnya saja, Iran secara terang-terangan memilih perusahaan minyak AS (Conoco) dan mengabaikan sebuah perusahaan Eropa, sambil menekankan keinginannya untuk berbisnis dengan Amerika. Fakta ini ditegaskan mantan presiden Rafsanjani: “Kami mengundang sebuah perusahaan Amerika dan menandatangani perjanjian senilai US\$ 1 miliar. Ini merupakan pesan bagi Amerika Serikat, yang tidak dipahami dengan baik.”⁸⁸ Menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Iran juga menanyakan niat Washington untuk melakukan dialog.⁸⁹

Meski sejauh itu Khatami telah memusatkan perhatian pada politik dalam negeri, pemerintahannya telah memberi isyarat kepada negara-negara Barat bahwa Iran menginginkan hubungan yang lebih baik dengan para tetangganya dan dunia secara luas.

Dalam pidato pengukuhannya, Khatami berjanji pemerintahannya akan menghindari tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan hubungan buruk dengan dunia luar. Lebih jauh lagi, dalam sebuah pidato di Teheran, ia menentang hipotesis perang peradaban dan menyerukan sebuah dialog antara Islam dan Barat: “Revolusi Islam di Iran siap untuk membuka dialog di segala tingkat dengan peradaban Barat dan dunia Kristen untuk mencapai perdamaian abadi.”⁹⁰ Menlu Iran Kharazi mengatakan bahwa membentuk hubungan “normal” dengan Amerika Serikat “tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi Islam.”⁹¹

Tidak seperti bangsa Amerika, orang-orang Eropa menganggap “dialog kritis” dengan Iran lebih efektif dalam meredakan perilakunya. Mereka menegaskan bahwa pendekatan konfrontasional Washington terhadap Teheran menimbulkan akibat yang berlawanan — malah memperkuat garis keras dalam rezim para mullah dan mendorong peningkatan bantuan Iran kepada kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah dan Afrika Utara. Prancis dan Jerman melihat kondisi-kondisi ekonomi Iran yang memburuk membuat negara ini makin terbuka untuk bekerja sama dengan pihak Barat yang industrialis: Ikatan-ikatan ekonomilah, dan bukannya penekanan atau isolasi, yang akan membawa perubahan yang diinginkan dalam sikap Iran. Meski belum terbukti, pendekatan Eropa ini bukannya tanpa hasil. Ada tanda-tanda yang menunjukkan para pemimpin Iran lebih peka pada kekhawatiran keamanan Eropa dengan mengurangi bantuannya bagi Hizbullah, meredakan penentangan negerinya terhadap proses perdamaian Arab-Israel, dan menyatakan perlawanannya terhadap terorisme.⁹²

Walau para pejabat Amerika merasa frustrasi dan getir, pikiran mereka hendaknya tetap terbuka bagi segala tindakan serius yang dilakukan Teheran. Memelopori dialog dengan Teheran akan memberi peluang bagi elemen-elemen reformis dalam kepemimpinan Iran untuk memenuhi janji mereka: bersikap netral dalam proses perdamaian (Arab-Israel), menentang terorisme, dan ber-

henti mengusik tetangga-tetangganya yang lebih kecil di kawasan Teluk. Melalui perundingan dengan Iran, Amerika Serikat bisa menemukan sisi-sisi kesamaan, atau paling tidak kepentingan yang paralel. Kepentingan-kepentingan ini termasuk menghindari benturan di Teluk Persia, menjauh dari perselisihan tentang masa depan Irak pasca-Saddam Hussein, bekerja sama mengakhiri perang berdarah Afghanistan, dan menyepakati perjanjian-perjanjian implisit mengenai isu-isu keamanan, seperti pengembangan nuklir dan kerja sama kemanusiaan serta politik-ekonomi di Bosnia, wilayah Kaukasia, dan Asia Tengah.⁹³ ❀

Catatan

1. Elaine Sciolino, "Christopher Signals a Tougher U.S. Line Toward Iran," *New York Times*, 31 Maret 1993; "Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress," *Federal News Service* (30 April 1995), h. 4; "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran," h. 1, 3; Robert H. Pelletreau di "Hearing with Defense Department Personnel," h. 1-2.
2. "Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress," h. 2-3. Dalam pidatonya, Clinton tidak menekankan catatan buruk hak-hak azasi manusia di Iran. Meski pemerintahan ini, seperti pendahulu-pendahulunya, terutama tertarik pada kebijakan luar negeri Iran, bukan pada kinerja HAM-nya, ada nuansa kecil yang membedakan perilaku Clinton. Ketika pengarang Inggris Salman Rushdie berkunjung ke Amerika Serikat pada Maret 1992, para pembantu Bush bukan hanya tak mau menemuinya, tapi juga berusaha mencegah pertemuan Rushdie dengan para tokoh Kongres. Juru bicara Gedung Putih, Martin Fitzwater, kemudian membenarkan keengganan ini dengan menyatakan: "Tidak ada alasan untuk menjalin hubungan istimewa dengan Rushdie. Maksud saya, dia itu pengarang, dia sedang berada di sini, dia melakukan wawancara dan perjalanan-perjalanan untuk bukunya dan hal-hal serupa yang biasa dilakukan seorang pengarang. Tapi tak ada alasan bagi kami untuk memiliki kepentingan tertentu terhadap dia." Dikutip dalam *Washington Post*, 26 Maret 1992. Sebaliknya, Clinton mengundang Rushdie untuk bertemu di Ruang Oval pada 1993, meski Presiden kemudian memindahkan tempat pertemuan ke ruang yang lebih kecil (kantor Lake). Lihat "America and Islam: A Wobbly Hand of Friendship," h. 26.

3. "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran," h. 2.
4. Dikutip dalam Thomas W. Lippman, "No More Mr. Nice Guy: On the Subject of Iran, Warren Christopher Is the Hardest of the Hard-Liners," *Washington Post*, 15-21 Mei 1995, *National Weekly Edition*, h. 18.
5. "Hearing with Defense Department Personnel; U.S. Sanctions on Iran," h. 4.
6. "Hearing of the Senate Judiciary Committee", h. 48.
7. "The Clinton Administration's Approach to the Middle East," dalam *Challenges to U.S. Interests*, h. 5.
8. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995; wawancara dengan seorang pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
9. Wawancara dengan pejabat NSC, Washington, DC, 29 Maret 1995.
10. Wawancara dengan seorang duta besar, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
11. "U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy," dalam *Neither East nor West*, h. 281, 285.
12. "The Appeal of Iran," *National Interest*, h. 93.
13. Naskah pernyataan Velayati di Sidang ke-48 Majelis Umum PBB, 4 Oktober 1993. Lihat juga James A. Bill, "The United States and Iran: Mutual Mythologies," *Middle East Policy* 2, no. 3 (1993), h. 99.
14. Dikutip dalam John Kifner, "Alms and Arms: Tactics in a Holy War," *New York Times*, 15 Maret 1995.
15. Gary Sick, "The United States and Iran: Truths and Consequences," *Contention* 5, no. 2 (Winter 1996), h. 71.
16. "Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress", h. 4.
17. "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran," h. 1.
18. Bill, "The United States and Iran," h. 105; Geoffrey Kemp, *Forever Enemies: American Policy and the Islamic Republic of Iran* (Washington, DC: The Carnegie Endowment for International Peace, 1994), h. 6; Esposito dan Piscatori, "The Global Impact of the Iranian Revolution: A Policy Perspective," dalam *The Iranian Revolution: Its Global Impact*, h. 326.
19. Kemp, *Forever Enemies*, h. 326.

20. Elaine Sciolino, "Christopher Proposes Tighter Curbs on Trade with Iran," *New York Times*, 31 Maret 1995.
21. Kemp, *Forever Enemies*, h. 9.
22. Clyde Habennan, "Israel Focuses on the Threat Beyond the Arabs — in Iran," *New York Times*, Minggu, 8 November 1992; David Hoffman, "Israel Seeking to Convince U.S. That West Is Threatened by Iran," *Washington Post*, 13 Maret 1993; Douglas Jehl, "Iran-Backed Terrorists Are Growing More Aggressive, U.S. Warns," *New York Times*, 18 Maret 1993; Steven A. Holmes, "U.S. Says Terrorist Attacks Dropped Sharply in 1992," *New York Times*, 1 Mei 1993; Rowland Evans dan Robert Novak, "Ripe for Retaliation," *Washington Post*, 1 Agustus 1996. Sekembali dari kunjungan pertamanya ke Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Christopher menyatakan di depan panel operasi internasional Komisi Apropriasi bahwa banyak pemimpin di Timur Tengah yang mengemukakan kepadanya bahwa mereka sangat mencemasi Iran karena dukungannya pada kelompok-kelompok teroris. Dikutip oleh Sciolino, "Christopher Signals a Tougher U.S. Line Toward Iran"; Israel Shahak, "With Iraq Neutralized, Israelis Seek Catalyst for War with Iran," *Washington Report on Middle East Affairs*, (April/Mei 1993), h. 15; Sick, "The United States and Iran," h. 62-5; Bill, "The United States and Iran," h. 98.
23. Lihat pidato Indyk di Soref Symposium, di mana dia mengungkapkan garis besar kebijakan pembendungan ganda ini, "The Clinton Administration's Approach to the Middle East," h. 5-6. Sudah sejak Maret 1993 para pejabat AS mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap meluasnya kegiatan kelompok-kelompok teroris dukungan Iran yang menentang proses perdamaian Timur Tengah. Seperti dinyatakan blak-blakan oleh Christopher, "Iran adalah salah satu sumber utama dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris di seluruh dunia." Lihat Sciolino, "Christopher Signals a Tougher Line Toward Iran." Departemen Luar Negeri juga mengutuk Iran sebagai "negara sponsor terorisme paling berbahaya" di dunia. Lihat Jehl, "Iran-Backed Terrorists Are Growing More Aggressive, U.S. Warns."
24. Elaine Sciolino, "C.I.A. Asks Congress for \$19 Million to Undermine Iraq's Rulers and Rein in Iran," *New York Times*, 12 April 1995. Edward Shirley, mantan spesialis Iran di CIA, menegaskan bahwa kerisauan terhadap Saddam Hussein bukanlah pencetus utama lahirnya kebijakan baru ini; pembendungan ganda yang menyerukan aksi ekonomi kolektif terhadap Republik Islam Iran itu dimaksudkan guna memaksa Iran mengubah perilakunya yang tak dapat diterima. Shirley mengemukakan lebih jauh bahwa pembendungan ganda merupakan upaya Amerika yang paling koheren untuk menetapkan

sebuah pedoman guna menghadapi militansi Islam Iran: Ia bahkan mungkin “menjadi landasan doktrin baru Amerika bagi Timur Tengah Islam yang mengalami radikalisasi.” Lihat “The Iran Policy Trap,” *Foreign Policy*, no. 96 (Fall 1994), h. 75-6. (Shirley adalah nama samaran spesialis CIA itu.) Bagai menggaungkan suara Shirley, para pejabat senior Iran menuduh Amerika Serikat menghukum Iran karena pemerintahan Islamnya. Lihat Agis Salpukas, “Conoco Signs Contract with Iran to Develop Persian Gulf Oilfield,” *New York Times*, 7 Maret 1995.

25. Peter W. Rodman, “Mullah Moola” [“The Islamic Threat,” pt. 2], *National Review*, 7 November 1994, h. 66; Shahram Chubin, *Iran’s National Security Policy: Capabilities, Intentions and Impact* (Washington, DC: The Carnegie Endowment for International Peace, 1994), h. 5-6.
26. Sciolino, “Christopher Proposes Tighter Curbs on Trade with Iran”; Shirley, “The Iran Policy Trap,” h. 78-81.
27. Eric Schmitt, “Republicans Warn Russia that Its Deal with Iran Threatens Aid,” *New York Times*, 8 Mei 1995; Sciolino, “Calling Iran an ‘Outlaw State,’ Christopher Backs U.S. Trade Ban,” *New York Times*, 2 Mei 1995.
28. Schmitt, “Republicans Warn Russia That Its Deal with Iran Threatens Aid.” Menteri Luar Negeri Christopher sudah memperingatkan Rusia bahwa negeri itu “akan menyesali hari ketika ia bekerja sama dengan negara teroris Iran jika Iran membangun persenjataan nuklir dengan para ahli Rusia dan peralatan Rusia.” Dikutip dalam Steven Greenhouse, “U.S. Gives Russia Secret Data on Iran to Fight Atom Deal,” *New York Times*, 3-4 April 1995.
29. Gary Sick, “A Sensible Policy Toward Iran: Consistency in American Policy Should Be a Top Priority,” *Middle East Insight* (Juli/Agustus 1995), h. 21.
30. Sick, “The United States and Iran,” h. 69-70; Salpukas, “Conoco Signs Contract with Iran”; Sciolino, “U.S. Pressure Put on Iran and Iraq,” *New York Times*, 5 April 1995.
31. Sciolino, “U.S. Pressure Put on Iran and Iraq”; Sick, “The United States and Iran,” h. 70. A. M. Rosenthal mengkritik kebijakan Iran Clinton karena tak bersikap tegas terhadap kekuasaan para diktator. Dalam kasus Iran, tandas Rosenthal, keterlibatan ekonomi “yang mendukung terorisme, jihad, persenjataan dan fasilitas nuklir membuat Iran berbahaya.” Lihat “How to Trade with Iran,” *New York Times*, 24 Maret 1995.
32. Sick, “The United States and Iran,” h. 70.

33. Sciolino, "Christopher Proposes Tighter Curbs on Trade with Iran"; Chris Hedges, "Iran May Be Able to Build an Atomic Bomb in 5 Years, U.S. and Israeli Officials Fear," *New York Times*, 5 Januari 1995.
34. Sciolino, "Christopher Proposes Tighter Curbs on Trade with Iran."
35. Dikutip dalam Thomas W. Lippman, "No More Mr. Nice Guy: On the Subject of Iran, Warren Christopher Is the Hardest of the HardLiners," *Washington Post*, 15-21 Mei, 1995, edisi *National Weekly*.
36. Ibid.
37. Ibid.
38. Wawancara, Princeton, NJ, 27 Mei 1995. Dalam hal ini sikap Christopher lebih merupakan kelaziman ketimbang perkecualian. Menurut Graham Fuller, mantan pejabat intelijen, "Para pembuat kebijakan di Washington takut untuk sekadar menyentuh isu Iran yang beracun itu sebab khawatir ia pun akan membuat mereka terinfeksi. Rupanya kita memang dilahirkan untuk saling membenci — setidaknya pada babak sejarah ini." See "The Appeal of Iran," *National Interest* (Fall 1994), h. 92.
39. Sick, "The United States and Iran," h. 68; Lippman, "No More Mr. Nice Guy," h. 18.
40. Steve Coll, "The U.S. Case Against Iranian Nukes," *Washington Post*, 15-21 Mei, 1995, edisi *National Weekly*, h. 23.
41. Sick, "The United States and Iran," h. 71.
42. Fuller, "The Appeal of Iran," h. 92.
43. Bill, "The United States and Iran," h. 101.
44. Chubin, *Iran's National Security Policy*, h. 1, 5.
45. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
46. Elaine Sciolino, "In World of Flux, a Constant: U.S. and Iran Still Foes," *New York Times*, Sunday, 29 Desember 1996.
47. Lihat wawancara Claudia Dreifus dengan Jenderal Shalikashvili, "Who's the Enemy Now," *New York Times*, Minggu, 21 Mei 1995, seksi majalah, h. 37.
48. Sejumlah pengamat mempertanyakan waktu dan tempat yang dipilih Presiden untuk mengumumkan keputusannya guna menerapkan embargo penuh terhadap Iran. Ia mengumumkannya dalam sebuah acara makan malam di Kongres Yahudi Dunia, sambil memakai peci Yahudi (*yarmulke*), dengan dihadiri Menteri Luar Negeri Israel Peres yang duduk di seberang meja. Thomas Friedman dari *New York*

Times adalah salah satu yang mengkritik Clinton: "Ini menimbulkan kesan pada orang Iran, dunia Muslim dan para sekutu Amerika bahwa embargo AS itu bukan merupakan kepentingan global dan fundamental Amerika, tapi hanya untuk melayani satu kelompok kepentingan AS dan karenanya tak perlu dianggap serius." Lihat "Too Much of a Good Thing," *New York Times*, 18 Juni 1995. Wartawan lain *New York Times*, Todd S. Purdum, lebih gamblang: "Pengumuman baru Clinton ini membawa kebijakan Amerika Serikat tentang Iran makin sejalan dengan kebijakan Israel." Lihat "Clinton to Order a Trade Embargo Against Teheran," *New York Times*, 1 Mei 1995. Elaine Sciolino menegaskan lebih jauh bahwa keputusan Clinton sepenuhnya didorong oleh politik domestik: untuk menangkalkan kubu Republik dari kemungkinan menggunakan DPR dan Senat untuk meloloskan legislasi yang menghukum Iran dan perusahaan-perusahaan asing yang berbisnis dengan Teheran. Lihat "Calling Iran an 'Outlaw State,' Christopher Backs U.S. Trade Ban."

49. "Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress," h. 2-3. Lihat juga "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran," h. 2; Pelletreau dalam "Hearing with Defense Department Personnel; U.S. Sanctions on Iran," h. 2.
50. "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran," h. 1. Dalam sebuah editorial, *Economist* mengungkapkan bahwa tuduhan pemerintah ini berlebihan, sebab di luar Iran para mullah sekarang tidak mengontrol kelompok-kelompok militan selain Hizbullah. Lihat "Punishing Iran," 6 Mei 1995, h. 14.
51. "Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress," h. 2-4.
52. Dikutip dalam Todd S. Purdum, "Clinton Pays Homage to an Extraordinary Generation," *New York Times*, 9 Mei 1995.
53. Ibid.
54. Tarnoff, "Containing Iran," *U.S. Department of State Dispatch*, 13 November 1995, h. 832, 834, dan "Sanctions on Iran," *U.S. Department of State Dispatch*, 23 Oktober 1995, h. 768-70. Demikian pula, Christopher dan asistennya untuk urusan Timur Dekat menyebut keputusan President untuk melarang semua bisnis dan investasi AS dengan Iran sebagai cara untuk memproyeksikan kepemimpinan Amerika ke luar negeri: "(Larangan) ini merupakan pesan yang sangat jelas kepada kawan maupun lawan," tandas Christopher dan Pelletreau. Lihat "Statement by Secretary of State Warren

- Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran,” h. 2, 4; Pelletreau dalam “Hearing with Defense Department Personnel - U.S. Sanctions on Iran,” h. 1.
55. Eric Pianin, “Clinton Approves Sanctions for Investors in Iran, Libya,” *Washington Post*, 6 August 1996; Paul Blustein, “House Passes Measure Against Foreign Firms Investing in Iranian, Libyan Oil,” *Washington Post*, 24 Juli 1996.
 56. Dikutip oleh David E. Singer, “Two-Edged Sword: Anti-Terrorism Law Risks American Relations with Allies,” *New York Times*, 30 September 1997.
 57. Alan Cowell, “U.S. Fails to Enlist European Allies in Iranian Trade Embargo,” *New York Times*, 3 Mei 1995.
 58. Saeed Barzin, “Iran Rides High,” *Middle East International*, 16 Agustus 1996, h. 4-5; Sick, “A Sensible Policy Toward Iran,” h. 21.
 59. Upaya Presiden Clinton untuk menerapkan embargo ini dalam sidang kelompok G-7 di Halifax, Nova Scotia, pada Juni 1995. gagal. Dalam pembicaraan pribadi, delegasi Eropa dan Jepang menuduh Amerika Serikat mendistorsi ancaman Iran demi alasan-alasan politik domestik. Lihat Sciolino, “U.S. Asserts Iranians Plotted to Disrupt Rally in Germany,” *New York Times*, 25 Juni 1995.
 60. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
 61. Ibid., dan wawancara dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Princeton, NJ, 27 Mei 1995.
 62. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
 63. Wawancara, Washington, DC, 30 Maret 1995.
 64. Wawancara dengan William Quandt, Washington, DC, 28 Maret 1995.
 65. Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft, dan Richard Murphy, “Differentiated Containment,” *Foreign Affairs* 76, no. 3 (Mei/Juni 1997), h. 20-30
 66. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
 67. Sick, “The United States and Iran,” h. 71.
 68. Sciolino, “Calling Iran an ‘Outlaw State’ Christopher Backs U.S. Trade Ban.”
 69. Ibid. Kubu konfrontasionalis juga melantunkan pujian serupa bagi Clinton. Peter Rodman, misalnya, menyebut bahwa berbeda dari ketiga pendahulunya, pemerintahan Clinton patut dipuji untuk pendirian tegasnya terhadap Iran dan untuk penyajian wawasan

strategisnya yang istimewa. Secara khusus, Rodman memuji Martin Indyk sebagai arsitek utama dalam pemerintahan yang menggariskan kebijakan garis-keras terhadap Iran, meski ia mengkritik Departemen Luar Negeri lantaran pandangan lunaknya terhadap ancaman Iran. Lihat "Mullah Moola," h. 66-7, 84.

70. Dikutip Trude B. Feldman, "Christopher: Mideast Gains Will Hold," *Washington Times*, 18 Januari 1995.
71. Tim Weiner, "U.S. Plan to Change Iran Leaders Is an Open Secret Before It Begins," *New York Times*, 26 Januari 1996.
72. Shirley, "The Iran Policy Trap," h. 81.
73. Lihat bab 5 untuk pernyataan-pernyataan Clinton tentang Iran.
74. Chubin, *Iran's National Security Policy*, h. 76.
75. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
76. Judith Miller, "Faces of Fundamentalism," *Foreign Affairs*.
77. Dikutip dalam Douglas Jehl, "Iranian President Calls for Opening Dialogue with U.S.," *New York Times*, 15 Desember 1997.
78. Ibid. Lihat juga Alison Mitchell, "Clinton Sees Hope in the Election of Moderate as President of Iran," *New York Times*, 30 Mei 1997; Barbara Crossette, "Democracies Love Peace, Don't They?" *New York Times*, Minggu, 1 Juni 1997.
79. Sciolino, "In World of Flux"; Mitchell, "Clinton Sees Hope in the Election of Moderate as President of Iran"; Crossette, "Democracies Love Peace, Don't They?"
80. Donald Neff, "U.S. and Iran: Policy Under Fire," *Middle East International*, 2 Mei 1997, h. 5-6, dan "Agony in Washington," *Middle East International*, 10 Oktober 1997.
81. Richard F. Grimmett, *Conventional Arms Transfers to the Third World* (Washington DC: Congressional Research Service, 1993), h. 9; Bill, "The United States and Iran," h. 103; Chubin, *Iran's National Security Policy*, h. 70.
82. Steve Coll, "The U.S. Case Against Iranian Nukes," *Washington Post*, 15-21 Mei 1995.
83. Dilaporkan dalam *Jordan Times*, 4 Juli 1995.
84. Shahram Chubin, "Does Iran Want Nuclear Weapons," h. 101.
85. "Punishing Iran," 16 Mei 1995, h. 14.
86. "Rafsanjani: We Support the Palestinian Struggle but We Reject Any Terrorist Act," *Al-Hayat*, 12 Maret 1996; "Iran Eases Stand on Peace

- Process,” *Jordan Times*, 4 Juli 1995.
87. “Makeup of Iran’s Cabinet Defies the Hard-liners,” *New York Times*, 13 Agustus 1997.
 88. Elaine Sciolino, “Iranian Leader Says U.S. Move on Oil Deal Wrecked Chance to Improve Ties,” *New York Times*, 16 Mei 1995.
 89. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan tertutup sekelompok pakar, New York, April 1996.
 90. Khatami, “The Dialogue of Civilizations and Its Difficulties,” *Al-Hayat*, 11 Juli 1997. Lihat juga Ghassan Bin Jido, “Khatami Promises to Adhere to His Program: We Will Avoid Discord with the World,” *Al-Hayat*, 5 Agustus 1997.
 91. Ghassan Bin Jido, “Kharazi: Relations with America Does Not Conflict with the Revolution’s Principles,” *Al-Hayat*, 16 September 1997.
 92. “Rafsanjani: We Support the Palestinian Struggle”; “Iran Eases Stand on Peace Process”; Barzin, “Iran Rides High,” h. 4-5: In April 1997, hubungan Eropa-Iran mengalami kemunduran serius ketika sebuah pengadilan Jerman, setelah rangkaian sidang selama tiga tahun, menyimpulkan bahwa tingkat tertinggi “kepemimpinan politik (Iran) pada September 1992 memerintahkan pembunuhan para pembangkang-di-pengasingan Kurdi di Berlin.” Meski Jerman dan pemerintah-pemerintah lain Eropa membatalkan kebijakan “dialog kritis” dengan Teheran, mereka tidak menutup dialog sama sekali, menegaskan bahwa kebijakan (untuk tetap berdialog) ini dimaksudkan guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran HAM oleh Iran. Lihat Alan Cowell, “Berlin Court Says Top Iran Leaders Ordered Killings,” *New York Times*, 11 April 1997, dan “Mixed Responses from Europe on Ruling Linking Iran to Killings,” *New York Times*, 30 April 1997.
 93. Pertukaran tahanan antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada Juli 1996 merupakan contoh kasusnya. Contoh lain tentang kerja sama AS-Iran menyangkut pembangunan dan pengiriman minyak di Teluk Persia dan Laut Kaspia. Lihat Steven Lee Myers, “White House Says Iran Pipeline Won’t Violate Sanctions Act,” *New York Times*, 28 Juli 1997; Barbara Crossette, “U.S. and Iran Cooperating on Ways to End Afghan War,” *New York Times*, 15 Desember 1997.
 94. Ghassan Bin Jado, “Khamenei Stresses the Need to Preserve Fundamentalism and Warns Against the Threat of Cultural Invasion,” *Al-Hayat*, 11 Desember 1996.

Aljazair



WALAUPUN memiliki peran kepemimpinan di gerakan nonblok, Aljazair sejak dulu tidak pernah menjadi perhatian besar bagi Amerika Serikat. Tapi tetap saja krisis Aljazair menyentuh banyak masalah peka yang terkait dengan kepentingan serta sekutu-sekutu Amerika di Afrika Utara dan sekitarnya. Isu peka itu meliputi keprihatinan serius tentang keamanan Eropa (membanjirnya pengungsi Aljazair, makin radikalnya masyarakat Muslim Eropa, dan hambatan-hambatan dalam perdagangan); hubungan Amerika-Prancis yang lebih memuaskan; gerakan Islam yang makin berani di Mesir, Tunisia, Maroko, dan Libya; serta potensi meningkatnya ketegangan antara dunia Islam dan Barat.

Tapi yang paling penting, reaksi AS terhadap peristiwa-peristiwa berdarah di Aljazair bisa menjadi kasus ujicoba yang menunjukkan cara-pandang para pembuat kebijakan Amerika dalam melihat Islam politik dan kedekatan antara Islam dan demokrasi. Juga, bagi banyak Muslim, Aljazair dipandang sebagai contoh bagaimana Barat berpotensi untuk berbaikan dengan Islam dan bagaimana Amerika Serikat bisa toleran dan berdampingan dengan sebuah pemerintahan Islam yang dipilih rakyat. Sebagian pemimpin Islam telah memperingatkan bahwa dukungan Barat terhadap penghentian proses demokrasi di Aljazair bisa menjauhkan kaum Muslim dari nilai-nilai Barat, sehingga makin meng-

asingkan mereka dari demokrasi.¹

Apakah sikap pemerintahan Clinton terhadap krisis Aljazair secara substantif berbeda dari pemerintahan Bush? Sebaliknya, dari sudut Bush, apakah Clinton menerapkan strategi akomodasionis terhadap kubu oposisi Islamis di Aljazair, yaitu Front Penyelamatan Islam (FIS)? Jika benar begitu, apakah pendirian pemerintahan Clinton pada Aljazair merupakan sebuah perluasan dari pendekatan Amerika yang lebih berbeda dan liberal terhadap kaum Islamis secara umum? Ataukah reaksi pemerintahan AS terhadap kaum Islamis Aljazair merupakan perkecualian dan bukan-nya prinsip yang utama?

Pendirian Awal Clinton terhadap Aljazair: “Kewaspadaan yang Prihatin”

Berbeda dari pemerintahan Bush, yang pada awalnya mengikuti Prancis dalam dukungannya bagi pemerintahan militer serta berusaha tidak mengikutsertakan “kelompok fundamentalis radikal”, pemerintahan Clinton sejak awal membangun sikap apresiatif yang “peka dan berbeda” terhadap FIS serta realitas-realitas situasi politik di Aljazair. Pemerintahannya mencoba bersikap seimbang di antara kelompok Islamis — yang direpresentasikan oleh FIS — dan rezim Aljazair, berusaha membujuk kedua pihak untuk berkompromi secara patut. Meski pemerintahan Clinton menghindari keberpihakan dalam perang saudara Aljazair, pemerintahan ini diam-diam menekan pemerintahan Aljazair untuk melanjutkan pemilu yang telah dibatalkan, membersihkan catatan pelanggaran HAM-nya yang mengerikan, memperbaiki sistem ekonomi sosialisnya, dan memulai negosiasi-negosiasi serius dengan kelompok Islamis oposisi arus utama.²

Selanjutnya, antara 1993 dan 1994, pemerintahan Clinton mengambil jarak dari rezim Aljazair dengan menutup hubungan-hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan pemerintahan Zeroual dan mengkritik pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan

oleh militernya. Tidak ada satu pun pejabat senior AS yang mengunjungi Aljazair sampai pemilihan presiden negeri itu tahun 1995. Para diplomat Amerika khawatir bahwa hubungan-hubungan tingkat tinggi dengan rezim Aljazair akan dilihat sebagai cek kosong untuk dukungan bagi para “penumpang” — mereka yang menginginkan perang besar-besaran terhadap kaum Islamis — di tubuh militer.³

Di akhir 1993, pemerintahan AS juga melakukan pembicaraan tertutup dengan wakil FIS, Anwar Haddam, yang diberi izin untuk tinggal di Amerika Serikat. Beberapa pengamat berpendapat bahwa hubungan pemerintahan Clinton dengan FIS sepantasnya dilihat sebagai kebijakan “asuransi” untuk menghindari penjulukan Amerika sebagai “Setan Besar” oleh rakyat Aljazair, seperti yang dilakukan para mullah Iran, jika sewaktu-waktu FIS mengambil alih kepemimpinan.⁴

Sebagian pembantu Clinton menyatakan bahwa pendekatan baru mereka terhadap Aljazair bisa dijelaskan oleh kebutuhan untuk menempatkan segala hal dalam waktu yang tepat: “Waktu adalah faktor terpenting dalam analisis kebijakan, karena waktu menciptakan ketidakpastian dan realitas-realitas baru.”⁵ Ketika Clinton baru memegang jabatan di bulan Januari 1993, situasi keamanan di Aljazair sedang memburuk. Saat itu timbul keyakinan di kalangan para pejabat AS dan pemerintahan Barat bahwa rezim militer mulai kalah dari kaum Islamis, yang akan segera mengambil alih kekuasaan. Seperti dikatakan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika: “Kita menghadapi kondisi buntu di Aljazair. Makin lama keadaan ini berlangsung, situasinya makin berbahaya. Akhirnya kubu-kubu Islam moderat akan terpinggirkan. Ini menjadikan pemerintahan Clinton mengambil langkah kompromistis yang timbul dari pragmatisme, bukan dari pemikiran filosofis yang dalam.”⁶

Ketergesaan ini menunjukkan niat Washington untuk menjaga elemen-elemen moderat di dalam kelompok oposisi Aljazair. Bukan untuk mengguncang pemerintahan Aljazair, upaya-upaya

AS itu justru dirancang untuk menjaganya dari kejatuhan, dan untuk mencegah bangkitnya kekuatan Islamis, dengan menyerukan perjanjian pembagian kekuasaan antara kedua pihak yang sedang bertikai.⁷ Kenyataannya, kebijakan yang cenderung berpihak pada FIS itu disusun oleh dua pejabat muda Departemen Luar Negeri. Kebijakan ini berakhir tahun 1995, ketika Pelletreau menggeser kedua pejabat junior itu.⁸

Antara tahun 1993 dan 1995, pejabat-pejabat senior Clinton membentuk pandangan AS terhadap Aljazair melalui rangkaian pernyataan yang dikeluarkan di hadapan Subkomisi Afrika, Komisi Hubungan Internasional DPR. Pada Mei 1993, Djerejian, mantan Asisten Menlu untuk urusan Timur Dekat, mengatakan bahwa situasi yang terjadi saat itu di Aljazair bersumber dari frustrasi rakyatnya yang merasa aspirasi politik serta ekonominya tidak terpenuhi. Djerejian berulang kali mengecam rezim Aljazair karena kegagalannya menerapkan perbaikan ekonomi dan politik yang nyata: “Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada jurang lebar antara tujuan yang dinyatakan secara resmi dan tindakan nyata.”⁹

Djerejian lebih lanjut mengkritik pemerintahan Aljazair karena hanya mencapai kemajuan kecil dalam merestorasi proses demokrasi dan memperbaiki catatan HAM mereka yang “mengganggu”. Menurut dia, masalah-masalah Aljazair tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara keamanan, sementara masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosialnya tidak ditangani.¹⁰ Pernyataan Djerejian ini merupakan tuduhan eksplisit kepada junta militer — suatu perubahan sikap yang tandas dan substansial dari pihak pemerintahan Bush.

Hampir setahun kemudian, perang saudara memuncak secara mengerikan, memangsa korban lebih dari 40.000 jiwa.¹¹ Di saat peperangan makin berdarah, bayangan unsur-unsur militan seperti Kelompok Islam Bersenjata (*The Armed Islamic Group*, GIA) menutupi keberadaan kelompok-kelompok Islamis arus utama seperti FIS. Terpinggirkannya FIS disikapi dengan serius oleh rezim Aljazair, juga oleh pemerintahan Clinton. Untuk menguatkan le-

gitimasinya, junta militer menunjuk Menteri Pertahanan Liamine Zeroual sebagai presiden pada Januari 1994.

Mark Paris, pejabat sementara pembantu Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Dekat, membenarkan adanya tantangan serius yang dihadapi pemerintahan Aljazair dan terancamnya negeri itu oleh perpecahan. Dengan dikhawatirkannya “kelompok ekstremis” makin menyingkirkan “kaum moderat” di dalam gerakan Islamis Aljazair, Mark Paris menekankan bahwa rezim Aljazair sangat diharapkan untuk memperluas keterlibatan politiknya dan untuk mengikutsertakan para pemimpin Islamisnya yang tidak sepakat dengan terorisme. Kritik Paris sangat lantang terhadap pemerintah Aljazair dan ketidakinginan rezim itu untuk menjalankan reformasi politik dan ekonomi yang nyata. Dalam testimonia, ia dengan lugas memperingatkan pemerintah Aljazair akan bahaya dari kebijakan represif yang mereka anut: “Saat tidak ada perubahan politik yang serius, kekerasan sangat mungkin untuk terus meningkat dan mengancam stabilitas Aljazair.”¹²

Testimoni Paris ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan yang gamblang pada rezim militer di Aljir: FIS tidak dapat dan memang seharusnya tidak boleh dihancurkan oleh kekerasan karena kelompok ini telah menjadi sebuah bagian penting dari politik Aljazair. Paris juga menekankan perbedaan penting antara Islamis “moderat” seperti yang direpresentasikan FIS, dengan unsur-unsur Islamis radikal bersenjata lainnya. Tampak jelas, pemerintahan Clinton melihat FIS dalam pandangan positif dan menginginkan kerja sama dengannya, dan bukan meminggirkannya. Pandangan ini menunjukkan pendekatan pemerintahan Clinton yang bernuansa terhadap kaum Islamis Aljazair, dan juga memperlihatkan evolusi progresif kebijakan Amerika.

Walau sudah merepotkan diri dengan situasi keamanan di Aljazair, para bawahan Clinton menekankan pentingnya kembali memperhatikan lagi proses demokrasi dan penghormatan pada hak-hak azasi manusia. Dalam kasus Aljazair ini, pemerintahan Clinton memegang erat prinsip-prinsipnya dengan menekan rezim

militer di sana untuk menerapkan sistem politik yang terbuka. Tetapi, dengan tidak adanya program-program bantuan bilateral antara AS dan pemerintah Aljazair, Djerejian dan Paris memahami keterbatasan pengaruh Washington dan menyatakan keraguan mereka dalam mengambil langkah nyata guna membantu krisis yang memanas itu.¹³

Robert Pelletreau menambahkan nuansa baru pada interpretasi AS pada perebutan kekuasaan yang terjadi di Aljazair itu. Kebangkitan Islam politik, menurut dia, bisa dikaitkan dengan ketimpangan sosial-ekonomi dan “pencarian identitas baru yang berakar pada tradisi.”¹⁴ Seperti rekan-rekannya di Departemen Luar Negeri, Pelletreau secara tak langsung memperingatkan pemerintah Aljazair agar tidak bergantung pada langkah-langkah keamanan dalam upayanya menyelesaikan krisis tersebut. Ia juga dengan lugas menyatakan bahwa rezim Aljazair harus segera menangani isu-isu sosial dan ekonomi serta memperluas partisipasi politik di negeri itu: Solusi bagi krisis Aljazair “bukan terletak pada strategi represi, tapi pada strategi inklusi dan rekonsiliasi.”¹⁵

Pelletreau lebih lanjut mengungkapkan, pemerintahan Clinton berusaha menunjukkan pada rezim militer Aljazair bahwa dibutuhkan dialog dengan unsur-unsur oposisi sekular maupun Islamis yang berkemauan untuk bekerja sama mencapai solusi tanpa kekerasan. Berbeda dari Paris yang tidak melihat adanya akibat sampingan dari krisis Aljazair itu, Pelletreau mengatakan bahwa semakin banyaknya “keuntungan kelompok Islamis radikal” di Aljazair bisa menguatkan kelompok-kelompok ekstremis di Mesir, Tunisia, dan Maroko — sekutu-sekutu penting AS di wilayah itu. Ketidakstabilan di Aljazair juga bisa memicu lubernya pengungsi ke Prancis dan negara-negara lain di Eropa Barat. Lebih jauh lagi, Pelletreau memperingatkan agar orang jangan sembarangan membuat generalisasi tentang kebangkitan Islam di Afrika Utara. Kebangkitan ini, tandasnya, terlalu cair dan beragam untuk bisa disebut sebagai sebuah gerakan.¹⁶

Pada Oktober 1995, senada dengan keprihatinan Pelletreau

itu, Bruce Riedel, Deputy Asisten Menteri Pertahanan untuk urusan Timur Dekat dan Asia Selatan, mengatakan bahwa tampilnya pemerintahan Islamis yang garang di Aljazair menimbulkan akibat-akibat yang sangat berbahaya bagi kebijakan pertahanan dan strategis Amerika Serikat di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Ini termasuk gangguan terhadap operasi-operasi militer Washington di seluruh dunia dan dapat menimbulkan kekaucuan di negara-negara tetangga. Menurut Riedel, Amerika Serikat harus berusaha menangkal bangkitnya Islamis radikal di Aljazair ini dengan membantu dan memperkuat tetangga-tetangganya.¹⁷

Dari semua pernyataan kebijakan yang diungkapkan para pejabat pemerintahan Clinton mengenai Aljazair, suara Riedel inilah yang paling bernada perang. Fakta ini seharusnya tidak mengejutkan karena fokus tradisional dari Departemen Pertahanan memang isu-isu keamanan. Pernyataan Riedel mencerminkan kegelisahan yang memuncak di kalangan elit pertahanan, lebih besar daripada perubahan nyata dalam pendekatan AS pada Aljazair. Di Dewan Keamanan Nasional, Riedel dan seorang pejabat lain mendorong agar dukungan bagi Zeroual ditingkatkan dan agar peran Amerika di Aljazair lebih agresif untuk membantu rezim Aljazair yang kalah.¹⁸

Dalam bulan yang sama, Deputy Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Timur Dekat, David Welch, mengulangi lagi sikap utama AS dalam pendekatannya pada Aljazair, yaitu: (1) mengutuk terorisme; (2) mendukung reformasi ekonomi; dan (3) meminta perluasan proses politik. Tapi, seperti Pelletreau dan Riedel, Welch juga menekankan kecemasan pemerintahan Clinton terhadap akibat-akibat dari krisis Aljazair itu bagi sekutu-sekutu kunci Amerika. Ia menyatakan, kemenangan yang diraih kaum Islamis yang paling radikal bisa menguatkan kelompok ekstremis di negara-negara tetangga di kawasan Afrika Utara. Akibat seperti itu juga bisa meningkatkan jumlah pengungsi ke Prancis dan negara-negara lain di Eropa Barat.¹⁹

Tapi Welch segera menambahkan bahwa cara-cara yang murni

militer tidak akan menyelesaikan krisis Aljazair itu; memulai dialog antara beragam segmen dalam masyarakat Aljazair dan membuka medan politik adalah cara-cara yang paling mungkin berhasil dibanding kekerasan yang berkelanjutan. Secara khusus, Welch meminta rezim Aljazair untuk menerima platform nasional yang diajukan oleh semua partai oposisi besar yang telah mengadakan pertemuan di Roma dengan dukungan St. Egidio Society pada 1995. Ia menegaskan bahwa Amerika mendukung semangat platform nasional tersebut sebagai dasar untuk mengakhiri krisis Aljazair.²⁰

Beberapa tema muncul dari berbagai pernyataan kebijakan yang diucapkan para pejabat Amerika itu. Pertama, pemerintahan Clinton mengakui bahwa krisis Aljazair muncul dari dalam negeri, berasal dari rasa frustrasi yang meruyak dari penyingkiran politik serta ketimpangan ekonomi. Karena itulah, pemerintahan ini meyakini bahwa langkah-langkah keamanan saja tidak cukup untuk menyelesaikan krisis. Pilihannya adalah penerapan reformasi ekonomi dan politik, di antaranya berupa liberalisasi ekonomi dan pelanjutan proses pemilu yang sempat terhenti. Kedua, pemerintahan Clinton membedakan antara kaum Islamis moderat (FIS) dan ekstremis (GIA). Para pejabat AS mendukung pengisolasian terhadap GIA, dan di saat yang sama mereka menyerukan kelompok FIS untuk berintegrasi ke dalam pemerintahan. Akhirnya, para diplomat Amerika mengakui bahwa krisis Aljazair ini bisa berdampak terhadap negara-negara di sekitarnya, juga terhadap Eropa.

Mengukur Pendekatan Awal Pemerintahan Clinton

Meski prihatin, para pejabat AS tidak menyertakan pernyataan-pernyataan publik mereka tentang Aljazair dengan insentif-insentif yang nyata. Sebuah jurang lebar terbuka di antara pandangan resmi dan kebijakan. Dalam masa tiga tahun pertamanya, pemerintahan Clinton hanya sedikit menanamkan modal ekonomi dan politiknya di Aljazair. Pemerintahan ini lebih memilih mengin-

vestasikannya pada sekutu-sekutu Eropanya. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak terlibat secara politik ataupun memberikan dukungan ekonomi untuk membantu penyelesaian krisis Aljazair. Orang bisa merasakan bahwa pejabat-pejabat Amerika menganggap Aljazair seperti sebuah sakit kepala bagi Eropa, bahwa AS memandang masalah Aljazair tidak cukup kuat mempengaruhi kepentingan Amerika sampai mereka perlu melakukan investasi besar di negara itu.²¹ Gamblangnya, pemerintahan Clinton tidak punya kebijakan terhadap Aljazair; mereka hanya punya “gaya”. Andrew Pierre dan William Quandt dengan tepat menyebut sikap pemerintahan ini sebagai “*concerned watchfulness*”, suatu “kewaspadaan yang prihatin”.²²

Sikap ini menunjukkan keyakinan para pejabat Amerika bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan AS untuk menciptakan perubahan damai di Aljazair: yang pertama, karena Washington hanya punya sedikit pengaruh terhadap rezim Aljazair; dan yang kedua, karena Aljazair — serta Afrika Utara pada umumnya — menempati peringkat rendah dalam agenda kebijakan luar negeri AS. “Sebagian pejabat AS mengakui kenyataan ini,” ungkap seorang pejabat Departemen Luar Negeri.²³

Menurut dua pejabat Amerika yang diwawancarai penulis, dan mereka cukup paham akan masalah ini, pentingnya posisi Afrika Utara secara strategis berhubungan erat dengan Perang Dingin. Departemen Pertahanan melihat kawasan ini sebagai medan alternatif bagi operasi-operasi militer untuk mengimbangi kubu Soviet jika sewaktu-waktu pecah pertempuran. Akhir dari Perang Dingin, bersama dengan perlawanan politik dan kekacauan di Afrika Utara selama Perang Teluk 1991, mematahkan teori ini. Departemen Pertahanan sudah tidak lagi tertarik dengan daerah tersebut: “Peristiwa-peristiwa di Afrika Utara, termasuk Aljazair, tidak lagi punya dampak besar pada kebijakan luar negeri Amerika.”²⁴ Seorang pejabat NSC (Dewan Keamanan Nasional) menjabarkannya dengan lebih jelas: “Tidak ada orang yang peduli pada Aljazair karena kepentingan vital kita tidak terkait dengannya.”²⁵

Berbeda dengan Iran, Aljazair tidak menimbulkan sentimen yang terlalu kuat pada para pembuat kebijakan AS. Negara ini bukan termasuk isu yang diperdebatkan dengan hangat di dalam pemerintahan Clinton. Seperti dikemukakan seorang duta besar Amerika, “Walaupun kami takut setengah mati pada kelompok Islamis militan di Aljazair, kami mengambil sikap pragmatis terhadap mereka. Kami mengambil jarak.”²⁶ Namun berlawanan dengan itu, ketika Amerika Serikat merasa lebih mudah merancang kebijakan yang rasional terhadap Aljazair, di saat yang sama AS bersikap ambivalen pada nilai politik serta strategis negara itu terhadap kepentingan utama AS; di sinilah perbedaan besar antara pernyataan resmi Washington yang memikat dengan tindakan nyatanya.

Menurut beberapa pengamat, sikap pemerintahan Clinton yang seakan-akan “netral” itu menutupi sebuah agenda tersembunyi. Para pengkritik ini menuduh Washington “menjilat” kaum Islamis, dan gembira karena tidak ada satu pun pekerja minyak berkebangsaan Amerika di antara ratusan orang asing yang terbunuh oleh para pemberontak. Martin Kramer menegaskan bahwa dengan membuka dialog dengan FIS, pemerintahan Clinton telah membeli jaminan keamanan bagi para diplomat Amerika dan mencoba untuk menghindari kondisi seperti pada kasus Iran: “Jelas terlihat bahwa warganegara AS tidak diganggu di Aljazair.”²⁷ Mirip dengan pernyataannya, beberapa pejabat Aljazair marah karena melihat pengamanan semacam itu terkait dengan dialog yang terus dilakukan dengan anggota-anggota FIS di Washington dan juga berkenaan dengan kenyataan banyaknya pemimpin FIS yang dilatih di Afghanistan, di basis-basis militer yang dulu dipakai CIA untuk mendukung pejuang Islam melawan tentara Soviet.²⁸

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri menanggapi pernyataan-pernyataan Kramer itu dalam sebuah wawancara *off-the-record*: “Kami telah sangat realistis dan berusaha seimbang dalam tindakan kami serta dalam memperkirakan sumber-sumber instabilitas di Aljazair. Rezim dan kelompok oposisi di sana kami perla-

kukan sama. Rezim Aljazair bukannya tidak bersalah. Pendirian AS terhadap Aljazair terletak pada premis bahwa pemerintah Aljazair punya andil dalam peningkatan kekerasan di sana.”²⁹

Beberapa pejabat Departemen Luar Negeri juga mengabaikan analogi kasus Aljazair ini dengan Iran. Mereka melihat bahwa posisi Clinton di Aljazair tidak lagi ditentukan oleh kondisi dua kubu seperti era 1980an ataupun ketakutan pada Republik Islam Iran: Aljazair adalah kasus yang berbeda dari Iran; kaum Islamis Aljazair tidak seideal kawan-kawan Iran mereka.³⁰ Menurut para diplomat ini, ideologi kelompok Islamis Aljazair ini kurang diangkat, dan yang lebih diperhatikan adalah isu-isu sosial-ekonomi yang lebih masuk akal dengan kenyataan begitu populernya FIS dalam jajak-jajak pendapat.³¹

Selanjutnya, sebagian pejabat pemerintahan Clinton mengkritik para komentator yang meminta Washington mendukung aktif rezim Aljazair yang limbung itu. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mempertanyakan, “Bagaimana bisa pemerintah AS membantu rezim Aljazair — dengan senjata, uang, dan latihan militer?” Washington, tambah pejabat ini, tidak punya banyak pilihan di Aljazair: “Kebijakan kami ditekankan pada penilaian realistis terhadap kepentingan, pengaruh, kekuatan, serta keuntungan terbatas kami.”³²

Dalam analisis akhirnya, posisi AS terhadap Aljazair adalah ditentukan oleh kepentingan geopolitik dan strategis. Walaupun Aljazair memiliki banyak minyak dan gas alam, negeri ini punya hubungan yang lebih dekat dengan Eropa dibanding dengan Amerika. AS selama ini mengambil jarak dengan Aljazair. Makin jauh sebuah negara dari kepentingan geostrategis AS, kebijakan Amerika terhadap negara itu cenderung makin mudah berubah. Kesimpulan ini konsisten dengan salah satu premis konseptual yang dikemukakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika: Ketika kepentingan AS yang utama tidak sedang diperlakukan di sebuah negara yang jauh secara budaya dan strategis, Amerika cenderung kurang bergantung pada kekuatan militer

ataupun upaya habis-habisan untuk bernegosiasi menyelesaikan konflik-konflik besar di negara tersebut.³³ Tidak seperti rekan-rekan Prancisnya, pemerintahan Clinton bisa saja bersikap pasif, atau mengambil risiko di Aljazair dengan melibatkan kaum Islamis, karena jauhnya negara itu secara geografis. Tapi tidak demikian halnya dengan kebijakan Amerika terhadap golongan Islamis di Mesir, Arab Saudi, Iran dan panggung medan Arab-Israel.

Pertikaian AS-Prancis dalam Masalah Aljazair

Sejak awal, pendekatan Clinton pada kelompok Islamis Aljazair lebih liberal dibanding yang dilakukan sekutu Eropanya, Prancis. Tak seperti Washington, Paris tidak membedakan kelompok-kelompok Islamis yang ada, semua dianggap sebagai ekstremis belaka. Orang-orang Prancis juga tidak menyiapkan prasyarat apapun untuk bantuan ekonomi mereka yang terus menerus bagi pemerintah Aljazair. Prancis telah memberi bantuan langsung untuk Aljazair, mencapai sekitar satu miliar dolar tiap tahunnya.³⁴ Dalam pertemuan-pertemuan yang dingin dengan rekan-rekan Prancisnya, para pejabat AS menyatakan keberatan mereka pada penjatuhan kelompok Islamis oleh militer Aljazair dan menyampaikan saran mereka untuk penyelesaian masalah melalui negosiasi.³⁵

Hampir sepanjang tahun 1993 dan 1994, Prancis menyerang niat-niat Amerika untuk bertemu dengan kelompok Islamis, mencurigai pemerintah AS memihak pada FIS dan bukan pada rezim Aljazair. Pada satu waktu di tahun 1994, perbedaan-perbedaan AS-Prancis dalam isu Aljazair ini memenuhi halaman utama media ketika Menteri Dalam Negeri Prancis Charles Pasqua menuduh Washington menampung “teroris-teroris fundamentalis” Aljazair. Seorang pejabat Prancis lainnya mengatakan bahwa Washington “tidak logis” karena menuduh Iran mensponsori terorisme internasional, padahal mereka sendiri berkompromi dengan jaringannya di Aljazair. Diberitakan juga bahwa Presiden Clinton dan mendingkan presiden Prancis François Mitterand berbenturan dalam ma-

salah ini ketika mereka bertemu pada bulan Juni 1995.³⁶

Pandangan-pandangan yang berlawanan mengenai Aljazair di Washington dan Paris ini terbentuk oleh masalah-masalah historis, geopolitik, serta dalam negeri. Prancis marah karena melihat keterlibatan Amerika yang tidak diharapkan dalam krisis Aljazair mereka di akhir tahun 1950an terulang kembali. Para penulis Prancis mengecam Amerika Serikat karena, di satu sisi, membiarkan Shah Iran jatuh, tapi kini di sisi lain, ingin “memainkan kartu FIS-nya” untuk mengamankan pamor mereka di dunia Arab. Selanjutnya, karena populasi Muslim di Prancis tiga juta orang banyaknya, sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika Utara, maka krisis itu menyentuh satu titik domestik yang sensitif bagi Paris. Prancis jadi mudah curiga dengan upaya-upaya Islamis Aljazair untuk masuk ke dalam masyarakat Muslim mereka dan kemungkinan besar membanjiri Prancis dengan pengungsi.³⁷

Sebenarnya perbedaan pandangan antara AS dan Prancis tak terlalu besar. Baik Paris maupun Washington tidak akan suka dengan kemenangan kaum Islamis. Seperti dinyatakan sebelumnya, elit kebijakan luar negeri AS sangat ambivalen terhadap Islam politik, khususnya di Teluk Persia dan daerah Timur Arab. Perbedaan-perbedaan antara Amerika dan Prancis bermula dari keterlibatan mereka masing-masing secara historis dengan Aljazair. Tidak seperti Prancis, para pejabat Amerika kurang merasakan ikatan batin yang kuat dengan Aljazair. Di sisi sejarah, AS telah memiliki ikatan erat dengan Maroko dan Tunisia, tapi tidak dengan Aljazair. Aljazair masih berada di luar kepentingan Amerika. Berbeda dari Prancis, AS mungkin saja untuk terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan FIS — sebuah strategi berisiko rendah dan berbiaya murah.

Selain tindakan simbolis itu, Washington tidak pernah menawarkan konsesi-konsesi nyata bagi kaum Islamis. Lebih jauh lagi, hubungan AS dengan Haddam, perwakilan FIS di Washington, dihentikan tahun 1995. Lalu pada bulan Desember 1996, Dinas Imigrasi dan Naturalisasi (INS) menangkap Haddam karena me-

langgar status penduduknya. Tetapi ia kemudian menuduh pemerintah AS memenjarakan dirinya karena aliran politiknya.³⁸ Memang benar, ketika Haddam dipenjarakan pada 1996, pemerintahan Clinton tampak tak kuat lagi berurusan dengan FIS dan menimpakan beban politik masalah ini sepenuhnya pada pemerintahan Zeroual. Seperti diberitakan *New York Times*, saat dihadapkan pada pilihan antara pemerintah yang didukung militer dengan gelombang kekerasan Islam politik, Clinton dan stafnya cenderung untuk berpihak pada tentara berikut tindakan-tindakan represifnya — dalam sebuah perang saudara yang telah menewaskan 80.000 orang sejak tahun 1992.³⁹

Maka, bertolak belakang dari anggapan populer di Aljazair dan Prancis, para perumus kebijakan Amerika tidak ingin melihat kemenangan kelompok Islamis di Aljazair. Amerika Serikat, bersama Prancis, telah membantu rezim Aljazair tetap bertahan dengan cara menolong orang-orang Aljazair mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga donor internasional. Tahun 1994, IMF memberikan pinjaman cadangan untuk Aljazair sebesar US\$1 miliar untuk penjadwalan utangnya, dan di tahun 1995 mengucurkan US\$1,8 miliar lagi untuk mendukung reformasi pasar bebasnya yang dijalankan dengan hati-hati.⁴⁰ Bank Ekspor Impor meminjamkan US\$2 miliar untuk membiayai proyek-proyek Amerika di Aljazair, dan pemerintah AS menambahkan US\$550 juta lagi untuk kredit pertanian bagi Aljazair.⁴¹ Sejak 1995, perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa telah menandatangani kontrak-kontrak minyak dan gas senilai miliaran dolar dengan Aljir.

Di awal 1995, perselisihan antara AS dan Prancis mengenai Aljazair mulai mereda. Pandangan Prancis makin dekat dengan sudut-pandang Washington dalam mengevaluasi krisis Aljazair. Prancis bergabung dengan Washington dalam mendukung pertemuan-pertemuan antara FIS dan partai-partai oposisi sekular, dengan menyatakan harapan Prancis bahwa dialog politik akan meringankan krisis. Washington dan Paris juga memberi dukungan verbal bagi platform nasional St. Egidio dan berharap platform

ini menuju ke arah yang lebih baik. Sayangnya, platform nasional ini tidak menghasilkan apa-apa, dan koalisi yang menandatangani tidak bekerja sama dengan baik. Dalam perkembangan selanjutnya yang penuh dengan simbolisme, bantuan Prancis untuk Aljazair dikurangi sampai setengahnya. Prancis juga menganggap perlunya mengurangi keterlibatan sekutu-sekutu Baratnya di Aljazair untuk membantu tercapainya perdamaian. Kendati pada 1997 para pejabat senior Prancis mengkritik kekerasan yang dilakukan baik oleh kaum Islamis maupun negara, mereka masih menolak mengaitkan bantuan ekonomi Paris dan tercapainya demokratisasi yang nyata di Aljazair.⁴²

Sebuah Kebijakan Baru: “Pensyaratan Positif”

Di akhir 1995, sebuah pendekatan baru Amerika pada Aljazair tampaknya makin mengkristal. Pemerintahan Clinton memandang hasil pemilu presidensial di bulan November 1995 — yang memenangkan Zeroual dengan mayoritas besar — sebagai sebuah kesempatan untuk menyelesaikan krisis Aljazair. Tapi para pejabat Amerika khawatir kalau sampai para “penumpas” di dalam militer Aljazair menginterpretasikan hasil pemilu itu sebagai mandat bagi mereka untuk meningkatkan tekanan mereka terhadap kelompok Islamis. Untuk mengganjal kemungkinan itu, pemerintahan Clinton mengirim sinyal pada Zeroual bahwa AS ingin kembali lebih aktif terlibat di Aljazair dengan syarat ia memenuhi janji-janji reformasinya. Pada 1995 dan 1996, Clinton menulis dua surat kepada Zeroual, mendorongnya untuk lebih bersikap inklusif — agar Zeroual berusaha sekuat daya untuk mengulurkan tangan lebih jauh pada jajaran oposisi yang tidak menganut kekerasan untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan reformasi ekonomi. Clinton pun menyampaikan pada Zeroual bahwa pemerintah AS akan mendukungnya saat ia mengambil langkah-langkah untuk memperluas dan mempercepat proses tersebut.⁴³

Bulan Maret 1996, Pelletreau mengunjungi Aljazair — dialah pejabat senior pertama AS yang berkunjung ke negara itu sejak

1992. Dalam konferensi pers di ibukotanya, Aljir, Pelletreau mengatakan bahwa pemerintahan Clinton sudah siap untuk memperkuat dukungannya bagi upaya Presiden Zeroual mengakhiri bentrokan sipil dengan para fundamentalis Islam. Asisten menteri ini memuji Zeroual atas niatnya untuk berdialog dengan kelompok oposisi serta upayanya membuka proses politik. Pelletreau juga memuji Aljazair untuk partisipasi mereka dalam “Pertemuan Puncak Para Pejuang Perdamaian” (*Summit of Peacemakers*) di Syarm al Syeikhs, Mesir, berkaitan dengan proses perdamaian Arab-Israel dan perang global terhadap “terorisme”.⁴⁴ Kunjungan ini, tegas Pelletreau, memberinya pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah Aljazair serta kebijakan-kebijakannya.⁴⁵

Dalam testimoninya di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat sebulan setelahnya, Pelletreau lebih jauh mengembangkan lagi pandangan baru pemerintah terhadap Aljazair. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah AS menilai pemilu presidensial tahun 1995 di Aljazair sebagai penguat legitimasi pemerintahan Zeroual. Tetapi ia mengemukakan “optimisme yang berhati-hati”, dengan mengingatkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meliberalisasi ekonomi dan mengonsolidasi kemajuan ke arah keterbukaan politik. Proses kembar liberalisasi ekonomi dan politik ini, tambah Pelletreau, merupakan kunci dalam menstabilkan situasi. Tapi ia menekankan bahwa proses ini, “haruslah nyata. Kata-kata, bagaimanapun bagusnya, tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah tindakan.”⁴⁶

Maka, kebijakan AS terus memberi tekanan pada kebutuhan akan rekonsiliasi nasional dan pluralisme politik di Aljazair. Sejak awal, pemerintahan Clinton selalu konsisten dengan pendirian ini. Pemilu presidensial tahun 1995 di Aljazair memunculkan dua implikasi besar bagi kebijakan Amerika. Pertama, hasil pemilu melegitimasi Zeroual di mata AS, membuatnya jadi seorang narasumber kredibel untuk membicarakan kemungkinan mencari solusi bagi masalah parah Aljazair ini. Dalam kunjungannya ke Aljir,

Pelletreau mengatakan pada Zeroual bahwa Washington akan mencari jalan untuk menolongnya di saat Zeroual terus meng-upayakan reformasi ekonomi dan politik: “Kami menyebutnya sebagai sebuah pensyaratan positif.”⁴⁷ Pelletreau menambahkan kata “positif” agar tidak terdengar sebagai ancaman atau intervensi. (Orang-orang Aljazair cenderung sangat peka dengan sedikit saja kemungkinan intervensi asing, karena pernah mengalami penjajahan yang berdarah.)

Pemerintahan Clinton memutuskan untuk memakai “pensyaratan” ekonomi sebagai alat politik. Mereka memberi bantuan dengan syarat pemerintah Aljazair setia pada komitmennya bagi reformasi politik yang nyata. Menurut Pelletreau, langkah-langkah politik saja tidaklah cukup, “tapi harus dipadukan dengan usaha kuat melaksanakan kebijakan politik inklusif, bersamaan dengan reformasi ekonomi.”⁴⁸ Bagi Amerika, Aljazair harus lebih meliberalkan dan menswastakan perusahaan-perusahaan serta industri milik negaranya. Negara Aljazair memainkan peran pengambil keputusan dalam mengatur ekonomi. Perkembangan ini memperlihatkan keyakinan baru yang dirasakan oleh pemerintah AS tentang Aljazair, serta kemauan baru untuk mengambil risiko: Risiko bagi kepentingan Barat telah makin dikurangi. Dengan kian redupnya kekuatan politik kelompok Islamis, para pejabat Amerika tidak lagi mengkhawatiri terjadinya kemenangan Islamis di Aljazair.⁴⁹

Meski begitu, antara 1993 dan 1996 pemerintahan Clinton selalu konsisten untuk mencoba mendorong pemerintah Aljazair ke arah keterbukaan politik: menjalankan lagi proses elektoral yang normal dan melibatkan unsur-unsur Islamis pragmatis dalam pemerintahan. Dalam kasus Aljazair ini tampaknya pemerintahan Clinton berharap untuk lebih mempromosikan isu pluralisme, dengan menekan pemerintah Aljazair agar menerapkan reformasi politik yang inklusif, bukan eksklusif.

Selanjutnya, di akhir 1995, para pejabat AS tampak tertarik untuk meninggalkan sikap *low profile* mereka dan memainkan

peran diplomatik yang lebih aktif dalam krisis Aljazair. Hal yang termasuk dalam strategi ini adalah mendorong pemerintahan Zeroual untuk bernegosiasi dengan kelompok oposisi nonkekerasan dengan menawarkan insentif ekonomi dan dukungan politik. Sebuah peralihan taktis terjadi dalam pernyataan-pernyataan Amerika tentang Aljazair. Dalam berbagai testimoni dan wawancara, Pelletreau membanjiri Zeroual dengan pujian karena telah berjanji untuk melanjutkan proses liberalisasi. Ia juga menekankan peran kepemimpinan Aljazair di Afrika Utara, Timur Tengah, dan wilayah Mediterania yang lebih luas. Menurut Pelletreau, pentingnya posisi Aljazair terletak pada dukungannya bagi proses perdamaian Timur Tengah, stabilitas regional, serta investasi-investasi besar AS, baik swasta maupun negara, dalam sektor hidrokarbon negara itu.⁵⁰

Kalimat-kalimat Pelletreau ini merepresentasikan beralihnya pernyataan-pernyataan lama Amerika mengenai Aljazair, yang tidak mengangkat isu investasi politik maupun material Washington di negeri itu. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan Pelletreau yang belakangan menggarisbawahi kepentingan geopolitik serta ekonomi di negeri tersebut, meningkatkan kemungkinan keterlibatan Amerika yang lebih dalam. Tentu saja, pemerintahan Clinton melihat kesempatan baik bagi perubahan konstruktif di Aljazair dan berharap untuk “memainkan peran positif” dalam mendorong kompromi di antara pihak-pihak yang bertikai.⁵¹

Setelah pemilu 1995, perusahaan-perusahaan Inggris, Prancis, dan Amerika menghasilkan beberapa kontrak besar di bidang energi bernilai miliaran dolar dengan pemerintah Aljazair untuk pembangunan tambang-tambang minyak dan gasnya. Kontrak-kontrak ini tentu saja terkait erat dengan kemenangan Zeroual dalam pemilu pluralistik pertama negara tersebut sejak 1991, menandakan kesiapan dunia bisnis untuk berinvestasi di Aljazair. Seperti diungkap seorang pengamat industri minyak: “Anda tentu tidak akan mau menanam sekitar US\$330 juta dolar setahun untuk tujuh tahun ke depan di sebuah negara yang Anda duga pe-

merintahannya bakal ambruk.”⁵² Dunia bisnis maupun para pemimpin Barat tampak makin bisa mempercayai Aljazair. Dalam pandangan mereka, walaupun pembantaian brutal penduduk sipil meningkat, kubu-kubu Islam dari aliran paling keras telah kehilangan dukungan masyarakat dan telah dilemahkan oleh tekanan militer dan oleh perselisihan internal mereka sendiri.⁵³

Tahun 1996, ARCO menginvestasikan lebih dari US\$1,5 miliar di Aljazair, dan Anadarko Petroleum Corporation menanamkan US\$100 juta untuk tahun itu saja. Puluhan pengusaha Amerika yang bekerja di sektor minyak dan gas Aljazair telah membantu pemerintahan Zeroual yang kekurangan uang dengan memberi keuntungan miliaran dolar.⁵⁴ Kucuran dana dari Barat telah membantu rezim Aljazair memerangi dua musuhnya — kelompok Islamis dan stagnasi ekonomi. Dukungan ini secara dramatis mengalirkan kekuasaan ke tangan elit penguasa Aljazair.

Pelembagaan Kekerasan dan Kekalahan dalam Kebijakan AS

Selama krisis Aljazair berlangsung, pemerintahan Clinton bergerak secara hati-hati, berharap Zeroual akan menepati janjinya untuk memperluas basis sosiopolitik pemerintahannya dan meliberalisasi ekonominya. Tetapi, Zeroual tampaknya kurang bergairah untuk mengikutsertakan FIS ke dalam pemerintahan atau bahkan melibatkan mereka dalam dialog nasional yang sedang berjalan, dialog yang ia pelopori setelah pemilu, atau untuk membiarkan kelompok oposisi utama ini untuk memainkan peran berarti dalam pemerintahan. Beberapa kali Zeroual dan pejabat senior Aljazair lainnya menyatakan bahwa mereka telah memenangkan perang, dan mereka menggambarkan FIS sebagai satu babak sejarah Aljazair yang telah berakhir.⁵⁵ Tapi harapan para pejabat Amerika agar pemilu legislatif dan pemilu lokal tahun 1996 dan 1997 berjalan dengan adil dan mewakili peta politik yang kompleks tetap ditekankan dengan jelas.

Bagai tak peduli pada dampak jangka-panjang, pemerintah Aljazair mengatakan bahwa sebuah undang-undang baru yang melarang partai-partai politik Islam telah disahkan dalam suatu referendum yang dilaksanakan pada November 1996. Walaupun membolehkan pembentukan partai-partai politik, undang-undang ini memangkas kekuatan wakil-wakilnya yang terpilih di parlemen dan memberi kekuasaan terlalu besar ke tangan presiden. Presiden dibolehkan menghalangi atau menolak peraturan yang disahkan oleh parlemen. Kemudian, partai-partai oposisi, bersama para wartawan Aljazair dan Barat, mempersoalkan penghitungan suara yang menurut mereka merupakan “penipuan besar-besaran”.⁵⁶

Partai-partai oposisi dan para pengamat independen juga mempertanyakan hitungan suara yang dilakukan pemerintah baik di pemilu parlementer maupun di tingkat departemen pada Juni 1997 dan November 1997.⁵⁷ Sebuah editorial di *New York Times* menulis bahwa “pemilu tipuan Aljazair bukanlah sebuah latihan serius bagi pemerintahan yang demokratis,” dan tulisan itu juga menyerukan Amerika Serikat dan Prancis untuk menekan rezim Aljazair agar melakukan dialog.⁵⁸ Tapi secara resmi Amerika Serikat tetap tidak bersuara sampai setelah hasil pemilu diumumkan. Bukan hanya tidak mempersoalkan hasil pemilu, tapi Amerika pun menyatakan bahwa pemilu tersebut berperan bagi pertumbuhan demokrasi Aljazair. Prancis melangkah lebih jauh dari AS dengan menyatakan hasil pemilu tersebut menunjukkan bahwa “bangsa Aljazair menginginkan perdamaian dan solusi politik atas krisis ini.”⁵⁹

Sikap resmi AS terhadap Aljazair telah berubah secara dramatis sejak 1992. Sampai awal 1996 saja, Amerika secara terbuka meminta pemerintah Aljazair untuk melibatkan elemen-elemen moderat yang antikekerasan di dalam FIS untuk berdialog dan untuk bekerja sama dengan mereka di kancah politik. Tapi sikap seperti ini tidak lagi bisa dipegang. AS tak lagi menganut pandangan ini dan juga tidak lagi melihat adanya hubungan antara krisis

Aljazair dengan integrasi FIS ke dalam proses politik; kelihatannya Amerika sudah lepas tangan dari FIS setelah organisasi ini dipinggirkan oleh kelompok-kelompok Islamis yang lebih keras dan juga oleh militer Aljazair.

AS malah menganggap partai-partai Islam yang legal, seperti Gerakan Masyarakat Damai dan Gerakan Nahdah (Kebangkitan) yang mengikuti pemilu dan memenangkan 103 kursi di dalam Parlemen baru, sebagai representasi aliran Islamis yang sebenarnya. Pemerintahan Clinton berharap agar pemilu-pemilu lokal maupun legislatif akan memungkinkan rakyat Aljazair bebas memilih wakil-wakil mereka. Harapan ini keliru. Begitu kekuatan negara yang didominasi militer mendapat angin melawan pemberontakan, kekuatan ini akan mencoba mengonsolidasikan kekuasaannya dengan menciptakan kedok legitimasi, termasuk mengontrol ketat mekanisme formal demokrasi. Pemerintah Aljazair menoleransi partisipasi kelompok oposisi moderat kecil asalkan kelompok itu tidak mengancam monopoli kekuasaannya. Zeroual dan jenderal-jenderal lainnya tak berminat untuk berbagi kekuasaan dengan oposisi, baik yang Islam maupun sekular. Pemilu yang baru saja dilaksanakan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat otoritas dan pengukuh legitimasi. Dalam konteks ini, pemilu parlementer dan lokal tidak dimaksudkan untuk memperkuat oposisi, tapi lebih untuk menjinakkannya melalui kerja sama yang dibatasi.

Yang pasti, suatu pembukaan yang sejati ke proses politik sangat mungkin mengarah menjadi sebuah kudeta internal istana. Pemerintahan oligarki dukungan militer yang memimpin Aljazair saat itu sama sekali tidak kohesif dan menyatu, melainkan terbelah-belah dalam pandangannya mengenai masa depan Aljazair. Ada dua faksi yang bersaing dalam merebut pengaruh terkuat. Pertama, mereka yang disebut “penumpas” (*“eradicateurs”*) atau para penganut garis keras, yang gigih berusaha menghancurkan kelompok Islamis dengan kekuatan senjata dan mengonsolidasi monopoli politik mereka; kedua, para “pendialog” (*“dialoguistes”*) yang tak bosan-bosannya memperjuangkan negosiasi serta pelibatan

semua pihak dan menolak penyingkiran. Pada 1998 atau sekitar itu, ketegangan dan perpecahan antara kedua faksi tampaknya makin runcing. Kedua tangan Zeroual terikat oleh perebutan kekuasaan di dalam lapisan oligarki militer penguasa ini.

Para “penumpas” itu khususnya telah berhasil mengabaikan dan bahkan menyabot setiap upaya serius untuk kompromi dengan kelompok oposisi Islamis. Dalam tahun-tahun terakhir, banyak pengamat Barat maupun lokal yang melihat memanasnya kondisi kekerasan di Aljazair itu sebagian disebabkan oleh perebutan kekuasaan di dalam hirarki penguasa Aljazair. Sebagai contoh, pada Juli 1997, pemerintah Aljazair membebaskan Abbassi Madani, pemimpin FIS, sebagai hasil dari pembicaraan rahasia antara pemerintah dan Tentara Pembebasan Islam (AIS), sayap militer FIS. Dua bulan setelahnya, AIS mendeklarasikan perdamaian sepihak dan terbuka dengan mengajak seluruh pengikutnya meletakkan senjata. Tapi bukannya mengurangi kekerasan, tindakan ini malah memicu pembantaian besar-besaran.

Intensitas dan kebrutalan dari kekerasan yang terjadi setelah pembebasan Madani serta gencatan senjata unilateral itu mendorong para pengamat kasus Aljazair mencurigai kelompok garis keras di dalam tubuh militer dan Kelompok Islam Bersenjata (GIA) karena keduanya sama-sama menjalankan kampanye untuk menjatuhkan mereka yang berniat untuk melakukan negosiasi. Dua wajah dalam lingkaran pemerintahan sangat jelas terlihat setelah Madani diberi status tahanan rumah dua bulan sesudah pembebasannya. Seperti dipaparkan seorang diplomat Barat, “Dengan membebaskannya (Madani) lalu menahannya lagi, mereka menunjukkan ketidakselarasan dan mungkin juga ketegangan di dalam tubuh pemerintah.”⁶⁰ Kemudian pula, Amnesty International secara langsung menuduh pemerintah Aljazair bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi di pinggiran Aljir itu.⁶¹

Seluruh medan politik Aljazair retak dan terbelah-belah. Baik aparat keamanan negara ataupun oposisi Islamis tidak punya kuasa absolut atas tindakan-tindakan berbagai elemen pengikut-

nya. Kondisi yang cair ini mengakibatkan sulitnya mengontrol lingkaran kekerasan.⁶² Bahkan, orang jadi mudah menganggap bahwa di Aljazair kekerasan telah melembaga. Di satu sisi, terorisme masih menjadi satu-satunya alat di tangan kelompok Islamis militan. Di lain sisi, peperangan yang tak terlalu intens malah bisa menjadi pelindung kepentingan pemerintah Aljazair karena memungkinkan mereka menjalankan monopoli politik hampir secara total, tapi tanpa sekaligus mengancam kekuasaan mereka. Dengan mengatasnamakan “keamanan nasional”, segala proyek demokrasi bisa saja ditunda.

Disebabkan semua alasan itu, Aljazair bisa saja mengalami perjuangan yang berlarut-larut di masa depan. Walaupun rezim Aljazair telah menjalankan perang yang semakin efektif terhadap Front Islam, sebagian elemen yang lebih militan dan telah memisahkan diri dari Front itu masih punya sumberdaya untuk meneror rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh pertumpahan darah yang baru terjadi itu. Legitimasi pemerintah Aljazair makin goyah di mata rakyatnya ketika muncul kecurigaan adanya manipulasi hasil pemilu legislatif dan lokal tahun 1996 dan 1997. Walau Aljazair sedang berada dalam situasi darurat, partai-partai oposisi menggerakkan ribuan pendukungnya ke jalan-jalan untuk memprotes “pemalsuan” pemilu tersebut.⁶³

Tragisnya, segala kekacauan dan pembantaian itu terjadi secara begitu acak dan brutalnya sehingga sangat sulit bagi orang luar untuk melihat siapa yang bertanggung jawab. Seperti dikatakan seorang pemimpin partai oposisi: “Kami hidup di antara dua bentuk teror: satu dari kelompok bersenjata dan satunya reaksi kejam dari pemerintah.”⁶⁴ Terobsesinya pemerintahan Zeroual pada kerahasiaan dan penolakannya yang membatu pada upaya mediasi luar bagi pihak-pihak yang sedang bertikai (regional ataupun internasional) makin memperparah situasi. Ketika di akhir 1997 Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyampaikan bahwa PBB menawarkan untuk membantu memecahkan kebuntuan yang mematikan itu, pemerintah Aljazair menyebut semua

tawaran itu sebagai “intervensi” terhadap urusan dalam negerinya atau sebagai upaya “menginternasionalisasi” krisis tersebut.⁶⁵

Zeroual dan para jenderalanya tidak perlu khawatir. Amerika Serikat ataupun negara kuat lainnya tidak ingin terlibat dalam pertikaian Aljazair ini, karena aliran minyak dan gas dari negeri itu tidak terpengaruh oleh perang. Dan memang tampaknya pemerintah AS tidak punya rencana sama sekali untuk memainkan peran aktif di Aljazair. Ketika sebagian pemimpin oposisi Aljazair meminta Presiden Clinton menunjuk seorang penengah, Departemen Luar Negeri menjawab bahwa pemerintah AS tidak bisa melakukan apa-apa tanpa permintaan resmi dari pemerintah Aljazair, dan permintaan yang dimaksud memang tidak ada.⁶⁶ Walaupun perusahaan-perusahaan swasta Amerika telah meningkatkan investasinya dalam sektor-sektor minyak dan gas Aljazair, para pembuat kebijakan AS tetap mengambil jarak dan menerapkan pendekatan yang tak terlalu kentara — mereka juga menunjukkan kengeriannya pada kekejaman yang terus meningkat dan memberi dukungan mereka pada usaha pemerintah Aljazair untuk mengakhiri “pembantaian gila-gilaan” itu.⁶⁷ Tahun 1997, duta besar Amerika yang baru saja meninggalkan posnya, Ronald Newmann, menegaskan pada pemerintah Zeroual bahwa AS mendukung “tindakan-tindakan militer, yang mengikuti aturan hukum, dalam melindungi warga.” Para pejabat Amerika mengatakan bahwa pernyataan ini mengarah pada upaya pemerintah Clinton untuk “memberi dorongan halus pada tentara untuk melakukan tugasnya.”⁶⁸

Baru-baru ini, Amerika Serikat juga telah berhenti menggunakan “prasyarat” ekonomi sebagai alat politik. Walaupun Departemen Luar Negeri sedang dalam proses menganalisis kebijakan AS terhadap Aljazair, tidak ada langkah besar yang akan dilakukan. AS tampaknya mendukung Zeroual karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik. Zeroual telah mempertahankan arus minyak dan gas Aljazair mengalir lancar dan paling tidak telah mengupayakan untuk membuka semacam celah demokratis. Pandangan umum

dari pusat-pusat pemerintahan Barat, termasuk Washington, adalah jika Zeroual diganti, akibatnya bisa lebih buruk lagi.⁶⁹ Masih harus dilihat bagaimana reaksi Barat pada keputusan Zeroual untuk turun nantinya. Bagi Aljazair, digantinya Zeroual tidak berarti mengubah rumusan politik dalam negeri.

Rekomendasi Kebijakan

Belum bisa dipastikan apakah Amerika berniat untuk menginvestasikan modal politik dan ekonomi yang cukup besar di Aljazair, ataukah hanya ingin menyerahkan tanggung jawab pada rekan-rekannya dari Eropa. Beberapa pejabat Amerika yang diwawancarai untuk buku ini memperingatkan bahwa wajah luar pemerintahan Clinton yang tampak konsisten bisa menyesatkan, karena pemerintahan tersebut belum pernah berhadapan dengan kondisi genting untuk membuat keputusan-keputusan yang kritis dan mahal tentang Aljazair. Seperti dikatakan seorang pejabat NSC, “dengan memberikan janji-janji atau kembang bibir bagi kaum Islamis oposisi serta mempengaruhi bahwa reformasi itu dibutuhkan, pemerintahan Clinton telah mempertahankan sebuah konsistensi di tingkat wacana tanpa mengambil langkah apapun.”⁷⁰

Pejabat-pejabat yang sama juga tampaknya mengabaikan akibat eksternal dari krisis Aljazair ini. Walau ada pernyataan-pernyataan dari diplomat Amerika, Aljazair masih menempati posisi pinggiran dalam pikiran Amerika, dan negara itu tidak dipandang sebagai negara penting atau “*pivotal*” dalam sistem internasional. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tidak mengejutkan kalau “kebijakan Amerika terhadap Aljazair seringkali reaktif.”⁷¹

Tidak responsifnya Zeroual serta lingkaran kekerasan yang terjadi seharusnya tidak merintang AS dalam mendorong perluasan sistem politik Aljazair. Solusi yang dianggap paling baik bagi krisis Aljazair terletak pada kemampuan partai-partai yang berse-

berangan untuk duduk bersama, bernegosiasi, dan menghasilkan sebuah pakta politik — sebuah perjanjian kompromi — yang melindungi kelangsungan hidup serta kepentingan-kepentingan minimal mereka. Bentuk dan sifat perjanjian final itu bergantung pada rakyat Aljazair sendiri, tapi Amerika dan rekan-rekan Eropanya bisa menjalankan peran konstruktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Seharusnya mereka meningkatkan upaya menjadi penengah antara rezim Aljazair dan oposisi dengan cara meyakinkan Zeroual dan militer akan dukungan Barat bila mereka mau mengambil beberapa risiko yang sudah diperhitungkan.

Maka dukungan Amerika seharusnya diberikan jika prasyarat tersebut dipenuhi, seperti yang dilakukan pemerintahan Clinton tahun 1996, yaitu kemauan pemerintah Aljazair untuk membuka gelanggang politik dan bersikap inklusif. Sebagai imbalan, AS dan sekutu-sekutu Eropanya bisa menawari pemerintah Aljazair penjadwalan ulang utang yang menguntungkan, peningkatan dan pembaruan investasi luar negeri, serta dukungan politik. Amerika bisa menerjemahkan dukungannya dalam bentuk komunikasi terus menerus dengan Zeroual dan presiden yang akan dipilih melalui kontak teratur dengan pejabat-pejabat senior Amerika. Kunjungan Pelletreau tahun 1996 ke Aljir adalah contohnya.

Pada saat yang sama, AS mesti mempengaruhi kelompok oposisi Islamis untuk meninggalkan kekerasan, mengutuk cara-cara teroris GIA, dan memegang tekad untuk secara tegas memperjuangkan proses politik yang pluralistik. Pejabat-pejabat Amerika harus menjelaskan pada para pemimpin oposisi Islam dan sekular bahwa dukungan Barat untuk aspirasi politik mereka sangat tergantung pada fleksibilitas, toleransi, dan penerimaan mereka atas tata cara politik demokrasi.

Upaya Amerika sebagai mediator harusnya dilakukan bersamaan dengan insentif-insentif dan pendorong. Ini termasuk peningkatan hubungan diplomatik, pemberian bantuan dana yang sewajarnya, kerja sama politik dan ekonomi dengan rekan-rekan Eropa, khususnya Prancis, serta bantuan sumberdaya intelektual

dan pendidikan untuk membantu transisi Aljazair ke arah demokrasi dan membangun kembali jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat madani. Jika ada satu rekomendasi khusus yang bisa disampaikan tulisan ini, hal itu adalah: pejabat AS harus lebih terlibat secara diplomatik di Aljazair. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaganya serta prestisenya yang baik untuk menjadi penengah di antara pihak-pihak yang berperang, Amerika bisa memberi sumbangan besar untuk meredam krisis yang bergolak ini. Tapi yang paling penting, para pejabat Amerika harus terus bicara ke semua pihak bahwa HAM harus dihormati dan mendorong dibukanya pintu-pintu demokrasi nyata dengan mengintegrasikan kelas-kelas sosial yang sedang bangkit ke dalam proses politik.

Biaya material dari keterlibatan aktif AS semacam itu akan minimal saja. Pejabat-pejabat Amerika sepakat bahwa Aljazair belum dianggap sangat penting bagi AS. Walau begitu, pejabat-pejabat itu memahami bahwa Aljazair merupakan sebuah simbol yang menyentuh dinamika AS-Eropa serta hubungan Amerika dengan dunia Muslim. Aljazair adalah sebuah kasus tempat diujinya sebuah kebijakan Amerika yang benar-benar segar dalam memajukan demokrasi dan koeksistensi antara masyarakat Barat dan Muslim.

Pendekatan AS pada krisis Aljazair diawasi seksama oleh kaum Muslim di seluruh dunia, juga oleh pemerintah-pemerintah yang menghadapi gejolak yang mirip, walau tidak sekeras itu. Pelajaran dari kasus Aljazair tidak diabaikan oleh rezim-rezim Arab, yang makin khawatir terhadap liberalisasi politik karena krisis Aljazair ini. François Burgat, seorang pakar terkemuka Prancis, mengamati bahwa sebagian besar rezim ini bertahun-tahun yang lalu menyimpulkan bahwa pemilu parlementer tidak akan melindungi mereka dari serangan lawan-lawan Islamisnya. Karena itulah mereka “memperketat larangan bagi kaum Islamis untuk mendekati sistem institusional dan meningkatkan represi yang ‘sangat preventif’ terhadap kelompok Islamis ini.”⁷²

Kaum Islamis telah menarik pelajaran yang sebanding. Bagi mereka, sukses di aspek kotak suara jelas bukan jaminan untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam pandangan mereka, pembatalan pemilu tahun 1991 telah mendiskreditkan seluruh wacana demokrasi — yang dianut oleh rezim Aljazair dan para pendukungnya dari negara-negara lain — sehingga memberi pengaruh lebih besar bagi pengusung radikalisasi di dalam gerakan-gerakan Islam.⁷³

Berkaitan dengan hal itu, suatu upaya mediasi AS yang berhasil di Aljazair bisa berperan positif dalam menghentikan pengkaratan politik yang dialami sebagian besar negara Timur Tengah dan memperbaiki bentuk serta struktur pemerintahan di kawasan itu. Manfaat potensial yang didapat dari “investasi” AS semacam itu di Aljazair sangat tinggi bagi Aljazair, bagi para tetangganya, juga untuk Amerika sendiri.❧

Catatan

1. Rashid Ghannoushi, “Islamic Civilization Need Not Clash with Western Civilization,” dalam *Islam: Opposing Viewpoints*, h. 50-1; R. Scott Appleby, “Democratization in the Middle East Does Not Threaten the West,” *ibid*, h. 229; Robin Wright, “Islam, Democracy, and the West,” *Foreign Affairs*, h. 137.
2. Stephen S. Rosenfeld, “Through the Minefield of Political Islam,” *Washington Post*, 31 Maret 1995; Christopher Dickey, “Islam Is Not the Issue,” *Newsweek*, 30 Mei 1994.
3. Andrew J. Pierre dan William B. Quandt, “Algeria’s War on Itself,” *Foreign Policy*, h. 147, *The Algerian Crisis: Policy Options for the West* (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1996), h. 55; Charles Lane, “Rock the Casbah,” *New Republic*, 27 Februari 1995, h. 13.
4. Daniel Williams, melaporkan di *Washington Post*, 1 April 1995; Dickey, “Islam Is Not the Issue”; Haq Farhan, “Algeria-U.S.: Washington Reaches out to Muslim Moderates,” *Inter Press Service*, 6 Maret 1995; James Phillips, “The Rising Threat of Revolutionary Islam in Algeria,” *The Heritage Foundation: Backgrounder*, 9 November 1995, h. 11.
5. Wawancara dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 28 Maret 1995. Hal yang sama dikemukakan oleh

- seorang pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, wawancara, Washington, DC, 27 Maret 1995.
6. Wawancara, Washington, DC, 28 Maret 1995. Seorang pejabat NSC dalam sebuah wawancara keesokan harinya mengungkapkan lebih gamblang: "Pemerintahan Clinton mengidap perasaan bahwa ia tak akan sanggup bersikap tegas karena hal itu tak bijaksana."
 7. Bruce Riedel, yang waktu itu bertanggung jawab atas peramalan jangka-panjang di Dewan Intelijen Nasional dan bekas direktur urusan Timur Dekat dan Asia Selatan di Dewan Keamanan Nasional, menyatakan bahwa penyelesaian politik merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi malapetaka di Aljazair. Sebab tanpa solusi damai, Riedel mengingatkan, krisis Aljazair membahayakan stabilitas ekonomi dan keamanan di seluruh kawasan Maghrib dan dapat memperparah ketegangan-ketegangan regional, membahayakan pasok energi untuk Eropa Selatan. Lihat Riedel, Quandt, Richard Falk dan Thomas Mattair dalam "The Middle East: What Is our Long-Term Vision," diskusi oleh Dewan Kebijakan Timur Tengah, dalam *Middle East Policy* 3, no. 3 (1994), h. 2.
 8. Korespondensi pribadi dengan William Quandt, 7 Oktober 1996.
 9. Testimoni di "Hearings and Recommendations for U.S. Foreign Assistance to Africa Before the Subcommittee on Africa of the House Committee on Foreign Relations," dimuat dalam *Foreign Assistance Legislation for Fiscal Year 1994*, pt. 7, 12 Mei 1993.
 10. Ibid.
 11. *New York Times*, 6 Maret 1995.
 12. "Update on the Crisis in Algeria," pernyataan di depan Subkomisi Afrika, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 22 Maret 1994, h. 196-7.
 13. Ibid., h. 197, dan testimoni Djerejian di "Hearings and Recommendations for U.S. Foreign Assistance to Africa," h. 92-3.
 14. "U.S. Policy Toward North Africa; Statement Before the Subcommittee on Africa of the House Foreign Affairs Committee, 28 September 1994," *U.S. Department of State Dispatch*, 3 Oktober 1994, h. 659.
 15. Ibid., h. 660.
 16. Ibid., h. 659-60. Lihat juga Pelletreau, "Hearing of the House International Relations Committee; U.S. Assistance to the Palestinians," *Federal News Service*, 6 April 1995, h. 11.
 17. Menurut testimoni di depan Subkomisi Afrika DPR, 11 Oktober 1995.
 18. Korespondensi pribadi dengan William Quandt, 7 Oktober 1996.
 19. David C. Welch, "Terrorism in Algeria," *U.S. Department of State*

Dispatch, 30 Oktober 1995, h. 805.

20. Ibid.
21. Morton I. Abramowitz, "Forward," dalam Pierre dan Quandt, *The Algerian Crisis*, h. ix.
22. Pierre dan Quandt, *The Algerian Crisis*, h. 1, dan "Algeria's War on Itself," h. 146.
23. Wawancara, Washington, DC, 27 Maret 1995.
24. Ibid.
25. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995. Menurut sumber ini, para pejabat junior ditugaskan untuk memantau peristiwa-peristiwa di Aljazair. Dalam sebuah artikel baru-baru ini di *Foreign Affairs*, Paul Kennedy memasukkan Aljazair dalam daftar sejumlah kecil "negara penting" yang masa depannya akan sangat mempengaruhi wilayah-wilayah sekitarnya dan juga keamanan internasional. Kehadiran sebuah rezim Islam radikal di Aljazair, menurut Kennedy, akan mengurangi keamanan ekonomi dan politik di seluruh Mediterranean Barat dan mengancam kelangsungan hidup para tetangga terdekatnya, Maroko, Tunisia, dan bahkan Mesir. Maka, Kennedy menyimpulkan, adalah kepentingan AS untuk memberi bantuan pencegahan kepada pemerintah Aljazair untuk mengurangi kemungkinan keruntuhannya. Lihat Robert S. Chase, Emily B. Hill, dan Paul Kennedy, "Pivotal States and U.S. Strategy," *Foreign Affairs* 75, no. 1 (Januari/Februari, 1995), h. 34-5, 37, 46-7. Sayangnya, para pejabat Amerika yang diwawancarai untuk buku ini tak sepakat dengan penilaian Kennedy tentang arti penting Aljazair bagi kepentingan AS.
26. Wawancara dengan seorang duta besar senior AS, Princeton, NJ, 27 Mei 1995. Tak mengejutkan, kata pejabat Departemen Luar Negeri lainnya yang diwawancarai di Washington pada 28 Maret 1995, bahwa sikap pemerintahan Clinton yang cenderung campur-tangan di Aljazair disesali Prancis.
27. Wawancara, Washington, DC, 31 Maret 1995. Lihat juga Lane, "Rock the Casbah," h. 13. Pierre dan Quandt tak sepakat dengan "kecurigaan salah-alamat" ini. Malah mereka menegaskan bahwa kelompok-kelompok Islam di Aljazair tak melihat manfaat dari membidik warga dan kepentingan Amerika. Lihat *The Algerian Crisis*, h. 26. Graham Fuller menegaskan bahwa FIS dan kelompok-kelompok Islamis lainnya sengaja menghindari pembunuhan atas warga Amerika sebagai pesan kepada Washington. Lihat *Algeria: The Next Fundamentalist State?* (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1996), monograf yang disiapkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, h. 89.

28. Roger Cohen, "In Algeria, Oil and Islam Make a Volatile Mixture," *New York Times*, 28 Desember 1996.
29. Washington, DC, 28 Maret 1995.
30. Baik pemerintah Aljazair maupun oposisi Islamis berusaha memanfaatkan isu Iran untuk menarik Amerika Serikat ke pihak mereka. Rezim Aljazair, misalnya, menempatkan seorang duta besar yang tak suka Prancis di Washington, yang rajin mengadakan ceramah keliling dan mengungkapkan kelakuan buruk para Islamis Aljazair serta hubungan mereka dengan Iran. Dalam kampanyenya untuk mempengaruhi kebijakan AS dengan memanfaatkan kekhawatiran terhadap Iran, duta besar Aljazair itu, Osmane Bencherif, menuduh Iran sebagai biang keladi di Aljazair dan di mana-mana, dan menggambarkan Iran sebagai *Comintern* dunia Muslim. Dia juga menampik pandangan Departemen Luar Negeri bahwa FIS merupakan kelompok yang bisa berkompromi: "Kelirulah kebijakan yang membedakan antara fundamentalis moderat dan fundamentalis ekstremis. Tujuan mereka semua sama saja: membangun sebuah negara Islam sejati, yang akan menjadi sebuah teokrasi dan totalitarian." Dikutip oleh Daniel Williams dalam *Washington Post*, 1 April 1995. Demikian pula, wakil FIS di Washington waktu itu, Anwar Haddam, juga memanfaatkan kekhawatiran AS terhadap Iran untuk mempengaruhi kebijakan Washington terhadap Aljazair. Haddam memperingatkan bahwa dukungan Washington pada pemerintah Aljazair akan meradikalisasi perlawanan dan membuat Amerika Serikat tak populer, akan menjadikannya semacam "Setan Besar II." Ibid.
31. Wawancara dengan pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995; dengan pejabat Departemen Luar Negeri, 28 Maret 1995; dengan duta besar senior AS, Princeton, NJ, 27 Mei 1995. Jesse Helmes, ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, mengkritik pemerintahan Clinton karena mencari golongan moderat di kalangan Islamis di Aljazair: "Baik Anda terbunuh oleh fundamentalis 'moderat' atau oleh yang 'radikal,' Anda toh mati juga. Sekarang ini sudah terlambat untuk mencari kelompok moderat di Aljazair." Dikutip dalam Daniel Pipes, "Interview with Jesse Helms," *Middle East Quarterly* (Maret 1995), h. 21.
32. Wawancara, Washington, DC, 28 Maret 1995.
33. Richard J. Payne, *The Clash with Distant Cultures*, h. xvi.
34. Pierre dan Quandt, *The Algerian Crisis*, h. 41-2; Mathew Connelly, "Deja Vu All Over Again: Algeria, France, and U.S.," *National Interest*, no. 42 (Winter 1995-96), h. 35. Baru-baru ini Prancis mengurangi

separuh bantuannya kepada Aljazair (US\$600 juta), menurut Jean-Pierre Tuquoi dalam *Le Monde*, 20-27 Juni 1996.

35. Lane, "Rock the Casbah," h. 13.
36. Pierre dan Quandt, "Algeria's War on Itself," h. 145; Andrew Borowiec, "French-U.S. Clash over Algeria Policy Escalates," *Washington Times*, 5 Agustus 1994.
37. Borowiec, "French-U.S. Clash over Algeria Policy Escalates"; Lane, "Rock the Casbah," h. 13.
38. Pierre dan Quandt, *The Algerian Crisis*, h. 52; "Anwar Haddam Is on Food Strike: Grant Me Political Asylum or Hand Me in to Algeria," *Al-Hayat*, 16 Mei 1997.
39. Dikutip oleh Roger Cohen, "In Algeria, Oil and Islam Make a Volatile Mixture," 28 Desember 1996, dan "25 Killed at Faked Roadblocks in Algeria," 30 November 1997.
40. Pernyataan Pelletreau di Subkomisi Afrika DPR, "U.S. Policy Toward North Africa," h. 660; Phillips, "The Rising Threat of Revolutionary Islam in Algeria," h. 13; Lane, "Rock the Casbah," h. 13.
41. Jason F. Isaacson, "On the Threat of Islamic Extremism in Africa," testimoni di Subkomisi Afrika, Komisi Hubungan Internasional DPR, *Federal News Service*, 6 April 1995, h. 3.
42. Jean-Pierre Tuquoi dalam *Le Monde*; Heba Saleh, "The FIS Calls a CeaseFire," *Middle East International*, 10 Oktober 1997, h. 14. "Jospin Criticizes the Violence of the Government and the Islamists in Algeria," *Al-Hayat*, 1 Oktober 1997; Randa Taqi al-Din, "France's Algeria Policy Is in Crisis," *Al-Hayat*, 1 Februari 1997; Roger Cohen, "A Chance to Try to End an Agony," *New York Times*, 2 Februari, 1997; Farhan, "Algeria U.S.," h. 6; Pierre dan Quandt, "Algeria's War on Itself," h. 145, dan *The Algerian Crisis*, h. 30.
43. Cohen, "In Algeria, Oil and Islam Make a Volatile Mixture."
44. Selain menggunakan isu Iran, pemerintah Aljazair berusaha memanipulasi keprihatinan AS atas stabilitas regional, misalnya menyangkut perang terhadap terorisme, imigrasi ilegal, dan proliferasi persenjataan penghancur massal, untuk meraih dukungan Washington dalam memukul oposisi Islamis. Pemerintah Aljazair mencoba masuk ke dalam proses perdamaian Arab-Israel sebagai bagian dari upaya *public relations* yang lebih luas guna meraih dukungan Barat yang dibutuhkan di bidang politik, ekonomi, dan militer. Lihat John Entelis, "Islamic Activism in North Africa: The View from Within - Algeria and Tunisia," makalah tak diterbitkan yang disampaikan di Lembaga Studi Strategi Nasional, Universitas Pertahanan Nasional,

- Departemen Pertahanan, Washington, DC, 29 Maret 1996, h. 31-2. Upaya-upaya Aljazair rupanya membuahkan hasil. Pelletreau dan para pejabat lain AS memuji partisipasi Aljazair dalam proses perdamaian dan memerangi terorisme.
45. "U.S. Voices Support for Algeria Bid to End Civil Strife," *Reuters*, 12 April 1996. Pers Aljazair menafsirkan kunjungan dan pernyataan-pernyataan Pelletreau sebagai indikasi kuat dukungan AS bagi Zeroual. Pelletreau mengatakan ia tak terkejut melihat tanggapan media Aljazair terhadap kunjungannya karena besarnya polarisasi di Aljazair.
 46. Testimoni tentang situasi di Aljazair; Komisi Hubungan Luar Negeri Senat; Subkomisi Urusan Timur Dekat dan Asia Selatan (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 16 April 1996).
 47. Robert H. Pelletreau, "Dealing with the Muslim Politics of the Middle East: Algeria, Hamas, Iran," ceramah di Dewan Hubungan Luar Negeri, New York, 8 Mei 1996, *Muslim Politics Report*, no. 7 (Mei/Juni 1996), h. 6.
 48. Ibid.
 49. William Quandt menekankan bahwa Pelletreau ingin mendapat dukungan demi menciptakan kondisi yang positif, dengan dukungan dari Duta Besar Ronald Newmann. Tapi para perumus senior kebijakan AS kurang mempedulikan kebijakan baru ini; mereka ingin menunggu dulu sejauh mana reformasi konstitusional dan reformasi hukum pemilu dilakukan, dan kemudian bagaimana hasil-hasil pemilu lokal, sebelum merumuskan kebijakan. Menurut Quandt, para pejabat Amerika tak terlalu antusias terhadap Zeroual pada Oktober 1996, tapi mereka tidak melihat alternatif pemimpin Aljazair yang punya visi atau mau mengatasi krisis Aljazair. Korespondensi pribadi dengan Quandt, 7 Oktober 1996.
 50. Pelletreau, "Dealing with the Muslim Politics of the Middle East," h. 6. Lihat juga wawancara Pelletreau dengan *Al-Hayat*, 4 Februari 1996.
 51. Pelletreau, "Dealing with the Muslim Politics of the Middle East," h. 6.
 52. Youssef M. Ibrahim, "Algeria Gains a Vote of Confidence with Foreign Oil Contracts," *New York Times*, 12 Desember 1995; "ARCO to Produce Oil with Algerians," *New York Times*, 16 Februari 1996.
 53. Ibrahim, "Algeria Gains a Vote of Confidence."
 54. Cohen, "In Algeria, Oil and Islam Make a Volatile Mixture."
 55. Roger Cohen, "Islamic Front in Algeria Calls for Truce and Peace

Talks,” *New York Times*, 28 September 1997. Dalam kunjungannya ke Aljir, Pelletreau menekan Zeroual untuk bersikap fleksibel terhadap unsur-unsur moderat FIS, tapi tak berhasil. Pelletreau mengemukakan hal ini dalam pertemuan tertutup sekelompok pakar, New York, April 1996.

56. Roger Cohen, “Algeria Says Charter Passes, But Critics Charge Vote Fraud,” *New York Times*, 30 November 1996; “Algerians Seem Poised to Embrace Authority,” *New York Times*, 29 November 1996; “With Leading Party Banned, Algeria Elects a New Parliament,” *New York Times*, 6 Juni 1997.
57. Roger Cohen, “Military Tightens Grip in Algeria Election,” *New York Times*, 7 Juni 1997. Lihat juga “Monitors Question Algeria’s Vote,” *New York Times*, 10 Juni 1997; “Algerian Elections Were Not ProblemFree,” *New York Times*, 18 Juni 1997; Heba Saleh, “‘Rigged’ Elections,” *Middle East International*, 7 November 1997, h. 14.
58. “Algeria’s Sham Election,” *New York Times*, 7 Juni 1997.
59. Cohen, “Military Tightens Grip in Algeria Election.”
60. Roger Cohen, “Divisions Deepen Among Algeria’s Military Rulers,” *New York Times*, 11 September 1997. Lihat juga Cohen, “Algeria’s Main Rebel Faction Takes Risks and Calls Truce,” *New York Times*, 25 September 1997; “85 Slain in New Attack Near Algiers, Setting Off Panic,” *New York Times*, 24 September 1997; Saleh, “The FIS Calls a Cease Fire.” Rashid Kashana, “Algerian Massacres and the Reconciliation Project,” *Al-Hayat*, 25 September 1997.
61. “Amnesty International Requests ‘International Investigation’ of Massacres in Algeria,” *Al-Hayat*, 19 November 1997.
62. William A. Lewis, “Algeria at 35: The Politics of Violence,” *Washington Quarterly* (Summer 1996), h. 3-18.
63. Heba Saleh, “‘Rigged’ Elections,” h. 14.
64. Dikutip oleh Youssef M. Ibrahim, “Algeria Votes, Recalling Fateful Election of 1992,” *New York Times*, 24 Oktober 1997.
65. Rhagida Dergham, “Annan Reserves Right to Call for Dialogue in Algeria,” *Al-Hayat*, 12 September 1997; Heba Saleh, “The FIS Calls a Cease-Fire,” h. 13-14; Salim Nassar, “Zeroual Attempts to Clean the Reputation of the Military Institution,” *Al-Hayat*, 18 Oktober 1997. Lihat juga “Algeria Calls On France Not to Interfere in Its Affairs,” *Al-Hayat*, 2 Januari 1997; “Ben Bellah: Nobody Knows Who Kills in Algeria,” *Al-Hayat*, 19 November 1997. Pada 1998, Zeroual dan para jenderal itu akhirnya menyetujui kunjungan sebuah tim PBB sepanjang tim ini tidak bertemu dengan satu pun anggota FIS yang ter-

larang.

66. Roger Cohen, "Algerian Links Rebels to 'Foreign Interests,'" *New York Times*, 25 Januari 1997, and "85 Slain in New Attack Near Algiers, Setting Off Panic."
67. "The Clinton Administration Condemned the Outrageous Massacres in Algeria," *Al-Hayat*, 4 September 1997.
68. Cohen, "85 Slain in New Attack Near Algiers, Setting Off Panic."
69. "America Reviews Its Policy in Algeria: No Fundamental Shift Is Expected," *Al-Hayat*, 19 October 1997; Cohen, "Divisions Deepen Among Algeria's Military Rulers." Lihat juga "Washington Supports the Algerian Government in Its Military Efforts," *Al-Hayat*, 11 September 1997.
70. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
71. Wawancara, Washington, DC, 27 Maret 1995.
72. Francois Burgat and William Dowell, *The Islamic Movement in North Africa* (Austin: Center for Middle Eastern Studies at the University of Texas at Austin, 1993), h. 306.
73. Ibid.

Mesir



DI SAAT perhatian dunia terfokus pada konfrontasi yang berlarut-larut antara kelompok Islamis dan rezim Aljazair, para pengamat mengabaikan sebuah pertarungan yang lebih kuat momentumnya, yaitu antara pemerintah Mesir dan oposisi Islamis. Sejak awal era 90an, Mesir menyaksikan suatu perang skala kecil, pergesekan antara rezim dan kaum Islamis, yang memangsa lebih dari seribu nyawa dan menimbulkan kerugian miliaran dolar di sektor pariwisata. Pada awal dekade 1990an, para pejabat Amerika khawatir akan situasi keamanan Mesir yang makin rusak serta perbedaan kubu antara pemerintah dan masyarakat. Menurut sebuah laporan yang tidak dikonfirmasi, dimuat dalam harian *Sunday Times* London pada awal 1993, *National Intelligence Estimate* — yang merepresentasikan masukan kolektif dari semua dinas (*agencies*) Amerika Serikat — meramalkan bahwa “teroris-teroris fundamentalis Islam akan terus mengambil keuntungan di seluruh Mesir, dan mengarah ke penjatuhan pemerintahan Mubarak.”¹

Walaupun beberapa pejabat AS menampik penilaian itu, faktanya Amerika sangat khawatir akan perkembangan peristiwa di Kairo.² Hanya di sedikit negara Timur Tengah keterlibatan kepentingan Amerika sama seperti di Mesir. Mesir merupakan gerbang masuk ke dunia Arab dan jangkar bagi kebijakan Amerika mengenai Timur Tengah karena kaitan eratnya dengan daerah

Teluk penghasil minyak serta keterlibatan aktifnya dalam proses perdamaian Arab-Israel. Amerika telah menanam investasi besar-besaran di Mesir, memberinya bantuan ekonomi dan militer sebesar lebih dari US\$ 2 miliar per tahun. Sejak 1979 Kairo telah menjadi sekutu dekat Washington — memulai proses perdamaian, memfasilitasi negosiasi-negosiasi antara Arab dan Israel, meneguhkan koalisi pimpinan AS melawan Irak.³ Karena semua alasan ini, para petinggi Amerika berharap Mesir tetap merupakan obor stabilitas di kawasan yang rawan itu.

Pendirian Amerika terhadap kaum Islamis Mesir harus dilihat dalam konteks ini. Tidak seperti sikapnya pada Aljazair, AS tidak bisa tetap mengambil jarak atau melepaskan diri dari tantangan berat yang dihadapi pemerintah Mesir, seorang sahabat karib. Sejak awal, para pejabat Amerika telah melihat beratnya krisis Mesir dan keharusan untuk terlibat agar tidak sampai gagap jika kaum Islamis memegang kekuasaan. Washington tidak punya gambaran jelas untuk memperkirakan ke arah mana perebutan kekuasaan di Mesir menuju. Dengan demikian, dalam pengamatan terhadap kebijakan Amerika terhadap Islam politik ini, situasi di Mesir berfungsi sebagai pengimbang bagi kasus Aljazair.

Perebutan Kekuasaan Internal

Rezim Mubarak telah berhasil menahan ancaman yang timbul dari unsur-unsur Islamis seperti Al-Jamaah al Islamiyah dan Gerakan Jihad. Pemerintahan ini telah berkali-kali sukses menekan kampanye kekerasan yang dilancarkan oleh Al-Jamaah dan Jihad yang sudah berlangsung selama tujuh tahun.⁴ Tapi rezim Mubarak gagal merebut hati dan pikiran dari lapisan menengah rakyat Mesir yang dikucilkan dari pemerintahan. Keberhasilan Al-Jamaah dan Jihad disebabkan oleh kelemahan sistem politik, sekaligus mengungkapkan ketidakmampuan dan ketidakterampilan pemerintah dalam mengurus ekonomi, ketergantungannya pada bantuan luar negeri dan sifat menghambanya pada Amerika Serikat, serta (akibatnya) tidak adanya legitimasi.

Pertikaian berdarah antara Islamis militan dan rezim Mesir ini dimanfaatkan oleh kelompok oposisi Islamis arus-utama, khususnya Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini mencoba menangguk untung dari situasi keamanan yang tak pasti itu dengan menekan Mubarak untuk membuka gelanggang politik dan berbagi kekuasaan. Gabungan dari tekanan politik dan keamanan inilah yang makin meningkatkan kondisi darurat pemerintah Mesir. Mubarak bereaksi dengan menghunus pisau bermata dua.

Ke dalam, rezim Mubarak menjauh dari politik dan budaya sekular dengan mengislamisasi kancah sosial-politik. Wacana resmi yang berkembang pun jadi lebih Islami, dengan diangkatnya nilai-nilai agama oleh pemerintah.⁵ Hal ini sangat jelas terlihat pada bidang pendidikan dan komunikasi, khususnya televisi, sarana penting untuk membentuk opini publik.⁶ Pengislaman dari dalam ini perlahan tapi pasti mengubah karakter Mesir. Di tingkat yang lebih superfisial, seorang tamu di Kairo dengan mudah bisa menemukan simbol-simbol agama di seluruh pelosok kota, mulai dari banyaknya pria berjanggut hingga mencoloknya jumlah wanita berjilbab. Lalu karena tidak sanggup menangani masalah-masalah sosial-ekonomi, Mubarak juga memperlambat program liberalisasi, yang dimulai pada dasawarsa 1980an, serta memperluas tekanannya terhadap para aktivis Islam.⁷

Selanjutnya, pemerintah Mesir tidak lagi membedakan mana Islamis yang menyetujui kekerasan dan mayoritas lainnya yang tidak setuju. Mubarak menurunkan pasukan keamanan untuk menumpas kelompok moderat maupun militan.⁸ Ia menuduh Ikhwanul Muslimin bersekongkol dengan Al-Jamaah dalam menjalankan “kegiatan teroris”. Ketika ditanya mengapa ia tidak melakukan dialog dengan kelompok Islamis moderat, Mubarak menukas: “Siapa para moderat itu? Tidak ada seorang pun yang berhasil menjelaskannya pada saya.”⁹ Setelah meledaknya serangan teroris di Luxor pada November 1997, yang menewaskan 68 turis asing dan warga sipil Mesir, Mubarak menolak kemungkinan untuk membuka dialog dengan kelompok Islamis militan: “Dialog

dengan siapa? Itu bakal jadi dialog dengan orang tuli. Kami telah berdialog dengan mereka selama empat belas tahun, dan tiap kali kita berkomunikasi, mereka jadi makin kuat.... Dialog itu kuno. Orang-orang yang meminta dialog itu tidak mengenal (kelompok Islamis). Kami lebih mengenal mereka.”¹⁰

Pada Agustus 1995 penguasa Mesir menangkap dan menyeret ratusan tokoh penting Ikhwanul Muslimin ke pengadilan militer khusus yang sebelumnya dimaksudkan untuk para tersangka teroris.¹¹ Pengadilan Mesir juga memerintahkan untuk membubarkan sejumlah kelompok profesional yang dikelola oleh Ikhwan, untuk membatasi kegiatan politik mereka.¹² Rezim Mubarak bertindak lebih jauh lagi dengan membatasi kegiatan organisasi-organisasi hak azasi manusia dan lembaga-lembaga nonpemerintah.¹³

Ke luar, Mubarak menuduh Iran, Sudan, dan para veteran perang Afghanistan mensponsori terorisme dan menyulut kekerasan Islam di Mesir dan negeri-negeri lain di kawasan itu. Ia berusaha menggambarkan perebutan kekuasaan internal di Mesir sebagai bagian dari kampanye internasional yang didalangi dan didanai oleh negara-negara Islam Iran dan Sudan: “Kami sedang menghadapi persekongkolan dan upaya intervensi asing.”¹⁴ Mubarak yakin bahwa upayanya mengaitkan Iran dan Sudan dalam kekerasan internal di Mesir itu akan direspon dengan baik oleh Amerika, yang telah lebih dulu mengecap kedua negara itu sebagai negara “kasar” dan “teroris”.

Tapi kesulitan yang dihadapi Mubarak terbukti lebih rumit daripada sekadar mencoba melempar kesalahan pada beberapa tetangga. Contohnya, setelah serangan hebat Al-Jamaah di Luxor, Mubarak menumpahkan kemarahan pada Inggris dan negara-negara Eropa lainnya karena memberi suaka politik bagi “para teroris” Mesir dengan berkedok HAM: “Saya yakin kalau dunia bekerja sama melawan terorisme, peristiwa Luxor tidak akan terjadi. Para teroris mendapatkan perlindungan di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, padahal mereka melakukan perbuatan kriminal, menarik uang, dan membuat rencana bersama elemen-elemen

Afghan yang semuanya pembunuh.”¹⁵ Mubarak sebelumnya sudah memperingatkan negara-negara Eropa yang memberikan suaka bagi kaum Islamis militan, dengan mengatakan bahwa negara-negara itu “suatu hari akan membayar harga yang sangat mahal.”¹⁶

Strategi Mubarak dirancang untuk mengalihkan perhatian dunia dari masalah-masalah internal Mesir yang sedang bergolak serta krisis legitimasi politiknya. Ia juga berharap bisa mendapat bantuan Amerika dalam perang melawan aktivis-aktivis Islam di dalam dan di luar Mesir. Walau merasa terkepung dan frustrasi dalam ikhtiarnya mendapatkan bantuan penuh Washington, Mubarak mengkritik pemerintahan Clinton atas kegagalannya berperan lebih aktif dalam perang melawan terorisme internasional. Ia juga menuduh pemerintahan Amerika punya hubungan-hubungan rahasia dengan “teroris-teroris” Ikhwanul Muslimin: “Kalian kira kalian bisa memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan di Iran, padahal kalian tidak pernah berhubungan dengan Ayatullah Khomeini dan kelompok-kelompok fanatiknya sebelum mereka berkuasa. Tapi, saya bisa memastikan, kelompok-kelompok ini tidak akan pernah menguasai negeri ini, dan mereka tidak akan pernah bisa berhubungan baik dengan Amerika.”¹⁷

Mubarak menyalahkan Amerika karena menciptakan basis bagi jaringan Islam internasional dengan mendukung kaum mujahidin Afghan melawan serbuan Soviet: Amerika Serikat harus memainkan “peran kuat” untuk memasukkan kembali jin Islam itu ke dalam botol.¹⁸ Setelah ledakan gedung World Trade Center New York pada 1993, Mubarak menyatakan bahwa serangan itu bisa dihindari kalau saja para pejabat Amerika mendengarkan peringatan negaranya tentang adanya jaringan “fundamentalis Islam” di Amerika.¹⁹ Mubarak meminta pada Amerika untuk memegang tekad melawan terorisme internasional, khususnya kelompok-kelompok fundamentalis Islam dan negara-negara penyanggah dananya — Iran, Sudan, dan kaum mujahidin di Afghanistan.²⁰

Mubarak berniat mempengaruhi kebijakan Amerika terhadap Islam politik serta juga mengecilkan pentingnya oposisi Islamis bagi rezimnya yang terdesak. Ia juga risau melihat penerimaan Amerika terhadap FIS Aljazair serta dampak bagi kebijakan Amerika pada kaum Islamis di seluruh wilayah itu.

Pendekatan Pertama Pemerintahan Clinton dengan para Islamis

Seperti sudah disebut, pada paruh pertama dekade 1990an, sebagian pejabat Amerika khawatir akan kondisi tak pasti dari rezim Mubarak. Pada saat pemerintah Mesir memerangi Al-Jamaah, Jihad, serta kelompok-kelompok lepas lainnya, kelompok Ikhwanul Muslimin memposisikan diri mereka sebagai kekuatan politik alternatif dan suara moderat. Memang, Ikhwan merupakan pihak yang diuntungkan dengan adanya pertikaian berdarah antara pemerintah dan Al-Jamaah. Namun langkah penumpasan keras yang dilakukan pemerintahan Mubarak terhadap Ikhwanul Muslimin telah gagal menghancurkan popularitas kelompok ini.²¹

Ikhwan ini secara politis tetap merupakan kekuatan oposisi paling efektif di Mesir. Seperti diamati sejak lima tahun lalu oleh seorang penulis Mesir yang memahami masalah ini, Ikhwanul Muslimin “makin menjadi sokoguru bagi kelompok alternatif Islamis yang radikal tapi antikekerasan di Mesir. Jika pemilu yang bebas dilaksanakan sekarang, sebuah pengulangan episode Al-jazair sangat mungkin terjadi.”²² Makin besar upaya pemerintah Mesir menekan Ikhwan, makin terseret pemerintah ke dalam irama permainan kelompok ini. Penyingkiran dan penindasan telah gagal menjinakkan atau melemahkan oposisi Islamis arus-utama.

Kendati para pejabat Amerika sensitif pada kesulitan yang dihadapi Mubarak, mereka tidak begitu saja menerima pernyataannya bahwa serangan-serangan Al-Jamaah adalah bagian dari rencana luar negeri atau persekongkolan yang dirancang dengan Ikhwanul Muslimin. Maka, di awal 1990an para diplomat Amerika

yang bertugas di Mesir menjalin hubungan tertutup dengan sebagian pemimpin Ikhwan agar bisa mendapatkan informasi dan menjaga kelancaran saluran-saluran diplomatik dengan para Islamis moderat.²³ Mubarak salah-baca terhadap hubungan antara Washington dan Ikhwanul Muslimin ini. Baik pemerintahan Bush maupun Clinton tidak menyerah pada rezim Mesir itu; sebaliknya, Amerika malah ingin lebih siap jika ada percikan api dari gempa politik yang tiba-tiba meletus di Mesir.

Seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional (NSC) mengungkapkan kekesalannya akan kesalahpahaman Mesir terhadap tindakan Washington pada kaum Islamis: "Mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Islam itu sangat berbeda dengan kebijakan. Rezim-rezim yang sedang berkuasa bukanlah satu-satunya aktor yang dengannya pemerintah Amerika harus menjaga hubungan. Aktor-aktor oposisi juga punya peran. Kaum Islamis adalah pemain-pemain penting di Timur Tengah dan Afrika Utara."²⁴ Pejabat NSC ini tidak menjelaskan kontradiksi apapun antara melakukan diskusi bersama sebagian Islamis yang menggunakan kekerasan, dan pernyataan-pernyataan kebijakan Amerika, yang menekankan perbedaan tegas antara Islam moderat dan Islam ekstremis: "Mengumpulkan informasi adalah kegiatan diplomasi yang sudah lazim. Inilah yang terjadi pada hubungan kami dengan organisasi-organisasi non-Islam lainnya. Amerika Serikat tidak mencari perlindungan ataupun ikatan dengan kaum Islamis. Ini cuma pengumpulan informasi biasa."²⁵

Seorang pejabat NSC lain menyampaikan sebuah pembenaran yang lebih perseptif mengenai hubungan-hubungan AS dengan kelompok Islamis Mesir tertentu. Rezim-rezim Timur Tengah yang ada, menurut pejabat ini, punya kemungkinan untuk lenyap di masa depan karena perubahan tidak bisa dicegah; salah satu sasaran kebijakan utama Washington adalah untuk mengelola peralihan ke arah orde politik Timur Tengah yang baru dengan biaya yang kecil. Amerika Serikat melihat Islamis sebagai pemain-pemain integral di antara kekuatan-kekuatan sosial besar yang

bergiat di kawasan ini.

Maka, untuk bisa bertahan, elit-elit penguasa yang dominan harus memperluas basis sosial mereka dengan mengintegrasikan kaum Islamis ke dalam arena politik. Kenyataan ini menjelaskan alasan keputusan awal pemerintahan Clinton periode pertama untuk memulai dialog tertutup dengan kaum Islamis Aljazair dan Mesir. Tantangan yang dihadapi Washington, menurut pejabat Dewan Keamanan Nasional ini, adalah mempertahankan hubungan dengan kelompok Islamis tanpa menimbulkan tentangan dari sekutu-sekutunya: “Ini masalah peka. Tapi kami perlu berhubungan dengan oposisi.”²⁶

Bagi Amerika, penyelesaian krisis Mesir tergantung pada kemampuan Kairo untuk menangani dengan efektif masalah-masalah sosial-ekonomi dan politiknya yang sudah genting. Saat menanggapi pertanyaan tentang peningkatan konfrontasi antara rezim Mubarak dan Al-Jamaah di awal 1990an, Clinton mengatakan bahwa masalah Mesir, sebagaimana masalah di negara-negara lain, tidak bisa dilihat hanya dalam kerangka politik tapi dalam konteks tantangan “pembangunan yang bersinambung, dengan menyeimbangkan pertumbuhan penduduk yang cepat serta berbagai tekanan dan masalah yang muncul dengan kebutuhan untuk memberi mereka makan dan tempat tinggal serta pendidikan dan setumpuk kesempatan.”²⁷

Dalam konteks yang sama, Wakil Presiden Al Gore menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi Mesir di Timur Tengah baru itu adalah mengangkat dan memimpin wilayah itu dari sisi ekonomi sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya di sisi politik.²⁸ Untuk menunjukkan komitmennya, pemerintahan pertama Clinton membentuk tiga tim guna menangani pertumbuhan dan pembangunan, diketuai oleh Al Gore dan Mubarak, yang dimaksudkan untuk memperkuat sektor swasta.²⁹ Kerja sama ini mencerminkan pandangan pemerintah Amerika bahwa privatisasi dan kapitalisme liberal akan membantu menyembuhkan penyakit-penyakit sosial-ekonomi dan politik Mesir.

Para diplomat AS dikabarkan melakukan beberapa pendekatan pribadi di awal 1990an, dan Clinton sendiri meminta Mubarak untuk menangani penyebab dari militansi Islamis: pemerintahan yang tidak representatif, tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan sosial, populasi yang membengkak, korupsi, dan menurunnya kondisi kehidupan masyarakat. Mubarak berhasil menampik saran-saran halus dari para pejabat Amerika ini. Karena melihat contoh krisis Aljazair, ia mengkhawatirkan dampak-dampak destabilisasi yang mengiringi proses liberalisasi politik di Mesir. Menurut seorang penulis Mesir, kemenangan besar para Islamis dalam pemilu di Aljazair pada tahun 1991 merupakan lonceng kematian bagi demokrasi di Mesir: mantan Menteri Dalam Negeri Mesir, Jenderal Musa, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan terjadinya kemenangan Islamis di bilik pemilu.³⁰

“Alergi Aljazair” ini bukan hanya menyulut rasa terancam rezim Kairo terhadap semua kelompok sosial yang mempunyai warna Islamis, tapi juga meningkatkan rasa takut para pemimpin yang sekular terhadap ekstremis-ekstremis Islamis. Pemimpin-pemimpin sekular telah menjadi sangat tergantung pada rezim Mubarak untuk mendapat perlindungan keamanan terhadap kaum fanatik agama. Karena itu, pemerintah mengambil untung dari dukungan yang diberikan oleh kelompok kanan maupun kiri untuk mematahkan kekuatan Islamis dengan berbagai aliran itu — juga dari kelompok oposisi sekular. Hasilnya, masyarakat madani dan demokratisasi amat tertekan.³¹

Membalikkan Kebijakan Amerika: Dukungan Penuh bagi Mubarak

Mubarak sangat yakin bahwa para pembuat kebijakan Amerika tidak akan menerapkan tekanan apapun pada Mesir kecuali jika negeri itu terlibat dalam perang saudara besar-besaran dengan kaum Islamis. Dan itulah yang terjadi. Walau pada mulanya ragu-ragu, di tahun 1994 pemerintahan Clinton tampaknya

berpihak pada Mubarak dengan menyetujui dukungan Washington pada pemerintahannya. Dalam konteks ini, sudah sejak 1993 para pejabat Amerika menuduh pemerintahan Sudan membantu “para ekstremis Mesir dengan pelatihan militer dan peledakan-peledakan.”³² Yang terjadi kemudian, Presiden Clinton mengumumkan dukungannya pada perang Mubarak melawan “kaum religius ekstremis” dan terorisme, dengan menyatakan bahwa kedua negara “sungguh-sungguh berniat menumpas kekejaman pengecut dari para teroris.”³³

Karena nilai politis dan strategis Kairo teramat penting bagi Amerika, tidak mungkin pemerintahan Clinton akan mengatakan atau melakukan hal yang bisa mengganggu keamanan dalam negeri Mesir ataupun hubungan erat Washington dengan Kairo. Departemen Luar Negeri AS tampaknya ragu-ragu untuk mengkritik secara terbuka segala penangkapan ataupun membuka kepada umum pengadilan atas banyak pemimpin Ikhwanul Muslimin sejak tahun 1995 serta kondisi HAM yang makin kelam di Mesir. Para pejabat Amerika tetap gamang menyaksikan kian gemarnya rezim Mesir menggunakan cara-cara represif.³⁴

Di tahun 1994 sebagian penasihat pemerintahan Clinton menunjukkan rasa puas mereka karena pemerintah Mesir akhirnya mencapai sukses-sukses penting dalam perangnya melawan “terorisme”, sambil buru-buru menambahkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM merupakan korbanannya.³⁵ Pernyataan-pernyataan seperti ini menunjukkan kegelisahan Washington akan perkembangan politik di Kairo, sekaligus memperlihatkan harapannya bahwa pemerintah Mesir akan meredakan dan bahkan mengurangi ancaman yang ditunjukkan oleh kelompok radikal Islamis.

Tak mengherankan kalau organisasi-organisasi HAM tidak menganggap serius pernyataan-pernyataan prihatin dari para pejabat Amerika tentang pelanggaran HAM oleh pemerintah Mesir. Sebagian dari mereka mengkritik pemerintah Amerika karena bersikap santun terhadap Mubarak dan meremehkan pelang-

garan-pelanggaran berat yang dilakukan oleh rezimnya. Termasuk penangkapan tanpa tuduhan yang jelas atau tanpa peradilan, penyiksaan, pembunuhan saksi dalam proses interogasi, serta tindakan-tindakan berdarah lainnya, menurut laporan *Middle East Watch* dan *Amnesty International*. Organisasi HAM Mesir mengatakan bahwa mereka telah mendokumentasikan penangkapan terhadap lebih dari tujuh belas ribu orang yang dituduh berkaitan dengan kekerasan militan dan kelompok oposisi politik yang terjadi antara tahun 1989 dan 1997. Kelompok-kelompok HAM menekankan bahwa situasi hak asasi manusia di Mesir makin buruk setiap tahunnya.³⁶

Organisasi-organisasi HAM juga mengkritik para pembuat kebijakan Amerika karena menganggap periode pemerintahan Mubarak yang ketiga sebagai hasil pemilu murni, bukan sebagai hasil rekayasa.³⁷ Sebagai contoh, Komisi Pengacara HAM menyatakan bahwa laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Mesir “seringkali ambigu dan berwajah ganda, seakan berat untuk mengakui bahwa pemerintah Mesir bertanggung jawab terhadap janji-janji HAMnya.”³⁸

Ada sejumlah hal yang menjadi alasan keputusan pemerintahan Clinton untuk mengakhiri hubungan dengan kelompok-kelompok Islamis dan kemudian berpihak sepenuhnya pada Mubarak. Meski lemah dan tidak populer, rezim Mubarak telah menunjukkan niat kuatnya dengan menghancurkan kekuatan militer kelompok Al-Jamaah dan Jihad serta membunuh sebagian besar pemimpin mereka yang berpengaruh. Para pengamat pergolakan Mesir ini sepakat menilai bahwa pemerintah telah cukup berhasil dalam melucuti kekuatan kelompok-kelompok pinggiran yang paling keras, dan berhasil memukul telak kelompok-kelompok bersenjata Al-Jamaah, Jihad, dan kelompok Islamis lainnya. Situasi keamanan tampak membaik, khususnya di Kairo, pusat syaraf politik dan ekonomi Mesir. Di tahun 1995 para pengambil keputusan Amerika tidak lagi gugup menyaksikan fenomena Islamis seperti yang mereka alami di tahun-tahun awal dekade 90an.

Tampak jelas bahwa para pejabat Amerika dan Mesir terlalu percaya-diri dalam mengukur kekuatan kelompok Islam radikal. Akibatnya, pemerintah Mesir tampak berlebihan dalam mengumumkan kemenangan dalam perangnya melawan kaum militan Islamis: Pada 1996 Hassan al-Alfi, waktu itu Menteri Dalam Negeri Mesir, menegaskan bahwa pasukan keamanan telah meraih kembali “kontrol penuh” atas situasi dalam negeri di tengah kampanye berdarah yang dimulai oleh kaum militan lebih dari lima tahun lalu untuk menyingkirkan rezim sekular Kairo dan menggantinya dengan negara Islam.³⁹

Para pejabat Mesir dan Amerika kurang memperhitungkan keretakan lebih lanjut di kalangan gerakan Islam yang memunculkan faksi-faksi yang lebih radikal. Keretakan ini membuat upaya-upaya pemerintahan Kairo untuk menggenggam “kontrol penuh” itu sangat goyah. Para pejabat Mesir baru menyadari kenyataan ini pada akhir 1997, ketika Al-Jamaah dan Jihad melancarkan serangkaian serangan teroris di Mesir Tengah, Luxor, dan Kairo sendiri, yang menewaskan lebih dari seratus warga sipil Barat dan Mesir.⁴⁰

Makna penting serangan-serangan baru ini bukan hanya terletak pada dipatahkannya klaim-klaim pemerintah Kairo yang menyatakan kemenangan, tapi juga dalam menunjukkan kokohnya kekuatan dan jauhnya jangkauan kelompok-kelompok Islamis. Dari 1992 sampai 1996, hampir semua kekerasan yang melibatkan baku tembak antara pasukan keamanan dan kaum militan berlangsung di Mesir tengah dan utara. Pemerintahan Mubarak berhasil mengisolasi kancak-kancak konfrontasi jauh dari Kairo dan kebanyakan tempat-tempat wisata. Tapi pada September dan November 1997, kaum militan berhasil dan secara brutal menyerang para wisatawan Barat di depan Museum Mesir di jantung kota Kairo dan di Luxor, menewaskan lebih dari seratus warga sipil.

Kedua serangan ini merupakan pengingat yang menyakitkan bahwa destruksi Al-Jamaah dan Jihad sebagai gerakan-gerakan

yang terorganisasi tidak berniat mengakhiri kekerasan yang didorong oleh motivasi politik di Mesir. Serangan-serangan ini juga menunjukkan bahwa pernyataan pemerintah tentang perpecahan besar di tubuh kalangan militan tidak dengan sendirinya menghapus terorisme, selama rezim Mubarak tidak menyentuh isu-isu yang lebih luas dalam reformasi sosial dan partisipasi politik. Agar berhasil, tindakan keamanan haruslah disertai dengan langkah-langkah politik guna memperluas basis sosial rezim ini dan memberi kelas-kelas sosial yang sedang tumbuh itu harapan baru di masa depan. Jika tidak, tentara dan kaum muda pengangguran — yang terpinggirkan dan terkucil — akan tergila oleh imbalan-imbalan surgawi dan revolusi, dan dengan demikian membuat Al-Jamaah dan Jihad tetap berperan.⁴¹

Awal dari Berakhirnya Al-Jamaah dan Jihad?

Namun kekuatan kaum militan tak perlu dibesar-besarkan. Mereka telah terpukul berat oleh gempuran militer. Salah satu kesulitan yang kini dihadapi oleh Al-Jamaah dan Jihad adalah ketidakmampuan mereka menjaga garis komunikasi di kalangan para tokohnya. Belum lama berselang, sejumlah perkembangan dan insiden telah mengungkapkan adanya pemilahan, ketegangan dan pertentangan-pertentangan serius di dalam kedua kelompok militan ini. Pada Juli 1997, mereka yang disebut sebagai para pemimpin historis Al-Jamaah dan Jihad, yang sedang dipenjara, menyatakan gencatan-senjata sepihak dan tanpa syarat serta mengimbau para tokoh di luar negeri beserta para pengikut mereka di Mesir untuk menghentikan aksi-aksi bersenjata. Kendati puluhan pemimpin Al-Jamaah dan Jihad setuju untuk mengikuti anjuran gencatan-senjata ini, rekan-rekan mereka di pengasingan tak mau menerima inisiatif ini. Mereka ini mendasarkan keputusan mereka dengan menggugat otoritas dan kehendak bebas para pemimpin yang ditahan itu semasa mereka dalam tahanan.⁴²

Debat yang tak terlalu kentara namun runcing yang dipicu oleh imbauan gencatan-senjata ini menyibakkan perpecahan di

kalangan tokoh dan pentolan kaum militan tersebut. Paradoksnya, pemerintahan Mubarak bergabung dengan kalangan garis-keras dalam barisan Al-Jamaah dan Jihad dengan menampik tawaran gencatan-senjata itu. Mantan Menteri Dalam Negeri Al-Alfi menyatakan pemerintah “menolak mengadakan dialog apapun dengan kelompok-kelompok ilegal.” Dia juga menandakan tekad Kairo untuk menempur dan menghancurkan kaum militan.⁴³ Boleh jadi penguasa memanfaatkan tawaran gencatan-senjata itu untuk semakin mengucilkan barisan garis-keras Islamis. Pemerintah bukan hanya tak bersedia melayani ajakan gencatan-senjata itu, tapi juga menafikan para pemimpin Al-Jamaah dan Jihad yang telah merenungkan ulang aksi terorisme. Dalam konteks ini, tanggapan pemerintah yang berpikir pendek itu telah memperkuat kalangan garis-keras dan agaknya berperan dalam memperpanjang konfrontasi.

Lebih lanjut, serangan di Luxor itu juga memperparah keretakan antara para tokoh Al-Jamaah yang dipenjara tersebut dan mereka yang berada di pengasingan. Dilaporkan bahwa pemimpin-pemimpin yang sedang ditahan itu “terguncang oleh insiden di Luxor” dan menilai serangan tersebut sebagai “pelanggaran yang berbahaya atas sumpah jaminan keamanan yang telah mereka nyatakan bagi para wisatawan yang menyertai imbauan mereka bagi gencatan-senjata itu.”⁴⁴ Sementara para tokoh yang sedang buron mempersoalkan manfaat dari cara-cara teroristis semacam itu dan memberikan perintah-perintah tegas agar tak menyerang para wisatawan. Sebuah pernyataan dari Al-Jamaah menyatakan kengeriannya atas kebrutalan pembantaian tersebut dan menyatakan bahwa ia “telah memutuskan untuk berhenti membidik sasaran industri pariwisata maupun wisatawan-wisatawan asing.”⁴⁵

Memang, tak ada peristiwa yang menggerakkan opini publik Mesir dan juga opini di dunia Arab/Muslim yang mengecam Al-Jamaah sebagaimana insiden pembantaian Luxor. Di Mesir, semua partai politik, para tokoh agama, dan organisasi-organisasi masyarakat madani mengutuk tindakan maut ini dan meminta pe-

merintah agar meningkatkan tindakan terhadap terorisme. Ikhwanul Muslimin menyebut para penyerang itu tidak punya “nurani atau agama.”⁴⁶ Pemerintahan dan kelompok-kelompok Islamis serempak bulat mengutuk serangan Al-Jamaah itu. Presiden Iran Mohammad Khatami menulis surat pada Mubarak dan mengecam serangan itu sebagai tindakan buas dan pengecut. Demikian pula Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir. Mohammad Fadallah, pemimpin spiritual Hizbullah, mengecam serangan “kriminal dan buas” yang tak akan pernah bisa dibenarkan dari perspektif Islam itu. Kelompok Hamas Palestina mengutuk serangan itu dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa keras. FIS Aljazair juga menegaskan kembali penentangannya terhadap segala bentuk kejahatan terhadap warga sipil.⁴⁷

Pembantaian Luxor itu, yang memuakkan dan bersimbah darah, bisa membuat pemerintah Mesir merebut inisiatif politik dari kaum Islamis dan memulihkan jembatan yang patah dengan masyarakat madani (*civil society*). Akankah Mubarak lebih menanggapi faktor-faktor sosial dan politik yang telah memunculkan frustrasi, alienasi dan terorisme, ketimbang berkonsentrasi pada aspek-aspek keamanan, sebagaimana disarankan kepadanya oleh kebanyakan pembuat opini serta para tokoh sipil dan politik di Mesir? Indikasi-indikasi awalnya tampak tak membesarkan hati. Mubarak menanggapi serangan Luxor tersebut dengan memecat Menteri Dalam Negeri Al-Alfi, dan mengambil alih urusan pengamanan yang dengan jelas menunjukkan harapannya untuk membantu menyelamatkan industri turisme. Untuk pertama kalinya tentara turut serta dalam mengawasi situs-situs bersejarah dan turisme, suatu tugas yang sebelumnya menjadi urusan polisi sepenuhnya.⁴⁸

Peningkatan langkah-langkah pengamanan itu tidak disertai dengan isyarat politik apapun bagi oposisi. Malah, Mubarak menolak dialog guna mengurangi konfrontasi dengan golongan militan.⁴⁹ Sumber-sumber oposisi juga tidak melihat serangan Luxor itu menyebabkan pergeseran kualitatif dalam pendekatan pemer-

intah terhadap arus-utama Islamis. Mereka mencemasi makin kuatnya intimidasi dan represi.⁵⁰ Dalam skala yang jauh lebih kecil dibanding di Aljazair, spiral kekerasan tampak terlembagakan di Mesir.

Menimbang Kebijakan AS terhadap Mesir dan Kaum Islamisnya

Meski dengan adanya masalah-masalah ini, baik rezim Aljazair maupun Mesir telah membuktikan diri jauh lebih dibanding apa yang semula dikhawatirkan. Namun, perbedaan pendekatan pemerintahan Clinton terhadap kedua negara ini amat mengejutkan. Pemerintah Amerika telah secara publik maupun privat menyarani rezim Aljazair tentang perlunya menerapkan pembaruan ekonomi dan politik serta memasukkan kalangan Islamis nonkekerasan ke dalam pemerintahan. Dalam kasus Mesir, pemerintahan Clinton pada umumnya menahan diri dari mengungkapkan pernyataan-pernyataan publik, apalagi menerapkan tekanan riil, yang bisa dipandang sebagai kritis terhadap rezim Mubarak. Pemerintah AS tak pernah menyinggung secara publik pembubaran Ikhwanul Muslimin oleh Mubarak ataupun soal serangannya terhadap asosiasi-asosiasi profesional. Ketika ditanya mengapa Washington bungkam belaka, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Amerika tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Mesir.⁵¹ Pejabat ini tampak tak peduli bahwa warga Mesir menafsirkan kepasifan Washington itu sebagai dukungan yang jelas bagi rezim Mubarak. Di mata Amerika, stabilitas negara Mesir jelas harus mengalahkan pertimbangan-pertimbangan lain.

Menurut William Quandt, para perumus kebijakan Amerika percaya bahwa “capaian-capaian di masa lalu akan hilang jika, misalnya, rezim di Mesir tiba-tiba berubah mendadak, (atau) jika gerakan-gerakan Islamis radikal memperoleh pijakan”.⁵² Sejarawan Paul Kennedy menegaskan lebih jauh bahwa pemerintahan Mubarak telah memberikan “benteng terhadap ancaman yang mungkin paling penting dalam jangka-panjang di kawasan itu — funda-

mentalisme radikal Islam.” Kennedy menambahkan bahwa ambruknya rezim Mubarak dapat merusak kepentingan-kepentingan Amerika lebih parah ketimbang oleh akibat revolusi Iran.⁵³

Para pejabat Amerika memilih untuk mengikuti tafsir Mubarak atas kaum Islamis, sebab mereka menilai bahwa jika kaum fundamentalis menang di Mesir, hal itu akan merupakan kekalahan domino yang terbesar, karena setelah itu semua dunia Arab selainnya sangat mungkin bakal ditelan oleh Islam revolusioner.⁵⁴ Mesir juga terus memainkan peran teramat penting dalam proses perdamaian Arab-Israel, suatu masalah yang sangat dipentingkan oleh Amerika. Untuk semua alasan inilah maka pakar-pakar seperti mantan Menteri Muda Pertahanan urusan Kebijakan Paul Wolfowitz menyarani Amerika dan para mitranya untuk mendukung pemerintahan Mesir di masa yang teramat gawat ini dengan menunjukkan sikap maklum atas tindakan-tindakan keras yang telah ditempuh oleh rezim Mesir guna memerangi “terorisme.”⁵⁵

Tapi tak semua pejabat Amerika menganut sentimen-sentimen ini. Sebagian dari mereka khawatir penggebukan oleh pemerintah Mesir terhadap gerakan Islam arus-utama bisa menjadi “pukulan balik”, yang malah mengancam kelangsungan hidup rezim Mubarak. Pandangan minoritas dalam pemerintahan Amerika ini ingin Mubarak memperlihatkan penghormatan yang lebih besar terhadap hak-hak azasi manusia dan memajukan reformasi politik.⁵⁶ Menurut seorang petinggi NSC, “kami telah mengisyaratkan pada sahabat-sahabat kami, termasuk Mesir, tentang perlunya untuk bersikap lebih inklusif, untuk memperluas basis politik mereka, dan memasukkan kekuatan-kekuatan utama oposisi, yang berwawasan reformasi, ke dalam proses politik.”⁵⁷

Dilema yang dihadapi oleh para perumus kebijakan Amerika di Mesir dewasa ini adalah bagaimana menyeimbangkan sebaik-baiknya antara perlindungan hak-hak azasi manusia dan pemuatan demokratisasi dengan kebutuhan untuk mempertimbangkan masalah-masalah stabilitas regional yang lebih luas serta kondisi yang baik bagi penanganan perdamaian komprehensif Arab-Israel.

Sebagai contoh, sebuah kajian yang dilakukan atas nama Komisi Hubungan Luar Negeri Senat pada 1993 memperingatkan pemerintah Amerika agar jangan tergesa-gesa mengambil langkah-langkah yang dapat menjaga stabilitas internal Mesir tapi bisa membahayakan kepentingan-kepentingan Amerika.⁵⁸ Lima tahun kemudian, ada suatu konsensus relatif di kalangan pemerhati situasi Mesir bahwa masalah-masalah hak azasi manusia tampak tak dianggap penting dalam hubungan AS-Mesir, meski terjadi pola pelanggaran-pelanggaran serius di sana.⁵⁹

Pemerintahan Clinton terlihat enggan mengkritik pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Mesir. Bahkan, walaupun kritik dilontarkan, ia sering ditambahi kesan maklum bahwa tindakan-tindakan pemerintahan Mubarak itu memang tak patut tapi perlu guna menanggapi kekerasan kaum “ekstremis”. Tapi para pengamat yang netral cemas bahwa dengan mengambil posisi tegas tanpa syarat terhadap para Islamis ataupun kaum ekstremis Islam, pemerintah Amerika tentu membuat Mubarak merasa direstui dalam menindas hak-hak azasi manusia kelompok opisisi Islamis, dan dengan demikian turut berperan dalam penggerogotan umum atas prinsip *rule of law*.⁶⁰

Rekomendasi Kebijakan

Kekerasan-kekeraan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok opisisi tidaklah membenarkan pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh penguasa Mesir. Sebagai salah satu negara-bangsa tertua di dunia, Mesir sangat membahayakan diri sendiri jika ia terus merusak aturan hukum (*rule of law*) dan berbuat seperti Al-Jamaah. Sayangnya, pemerintah Mesir justru bertindak persis seperti musuhnya dan berusaha menjustifikasi pelanggaran HAM yang dilakukannya dengan merujuk kekerasan yang diperbuat oleh unsur-unsur ekstremis Islamis. Perilaku dangkal ini kontraproduktif dan juga tak perlu. Tak seperti Aljazair, institusi-institusi hukum dan politik Mesir sudah sangat maju dan berperangkat lengkap guna menghadapi ancaman kaum

Islamis radikal. Telah berulang kali negara Mesir mampu selamat dari tantangan-tantangan paramiliter, membuktikan kekokohan kekuasaan dan kemapanannya. Mubarak tampak bermain di dalam genggamannya Al-Jamaah dan kelompok-kelompok pinggiran lainnya dengan mempersempit jalur protes dan partisipasi politik yang sah.⁶¹

Bahayanya: semakin pemerintah Mesir bertindak brutal, semakin ia mengalienasi kelas-kelas menengah, suatu lapisan yang sejak lama menopang legitimasinya. Aksi-aksi buas yang digencarkan oleh rezim Mubarak telah berperan dalam makin meningkatkan polarisasi dan radikalisasi dalam politik Mesir. Arus utama Ikhwanul Muslimin juga meraih banyak simpati dan pengaruh dengan menyerukan dialog nasional dan mengutuk aksi kekerasan Al-Jam'ah.⁶² Nada moderat Ikhwan yang terdengar di telinga publik telah membuatnya semakin tampak sebagai sebuah pemerintahan bayangan yang bertanggung jawab.

Pemerintahan Clinton hendaknya mengimbangi dukungannya pada Mubarak dengan kebutuhan untuk melindungi dan memajukan hak-hak azasi manusia, *rule of law*, dan pemerintahan yang lebih representatif. Sayang sekali, Amerika bertindak lebih berdasarkan perhitungan-perhitungan keamanan jangka-pendek ketimbang pada komitmennya terhadap nilai-nilai liberal dan demokrasi. Kendati *Country Reports* Departemen Luar Negeri tentang praktik-praktik HAM merekam dengan akurat pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pemerintah Mesir, laporan-laporan ini tidak dijadikan pedoman atau mempengaruhi kebijakan Amerika. Para pembuat kebijakan Amerika bukan hanya sama sekali tak mengecam aksi-kasi keras Mubarak, tapi juga secara implisit tampak merestuinnya. Para petinggi Mesir menganggap kebungkaman Washington sebagai pemberian cek kosong kepada Mubarak untuk menindas oposisi yang sah.

Pembedaan yang dilakukan oleh pemerintahan Clinton antara kelompok Islamis “moderat” dan “ekstremis” rupanya tak diterapkan pada kasus Mesir. Semula, para pejabat Amerika mengakui

peran dan pengaruh penting kelompok Islamis dan melibatkan mereka dalam semacam dialog. Namun tiba-tiba mereka menghentikan kontak-kontak ini, ketika Mubarak menuduh Amerika mengkhianatinya dan mau menghancurkan rezimnya. Dengan tunduk pada tekanan Mubarak, para petinggi pemerintahan Clinton, entah mereka setuju atau tidak, tampak ikut menganut keceemasan Mubarak bahwa kaum Islamis itu sudah jelas anti-Barat dan antidemokrasi. Hasilnya: semangat Mubarak makin menyala untuk meminggirkan dan membungkam semua bentuk oposisi.

Strategi konfrontasional Mubarak merupakan resep yang pas untuk mengobarkan konflik sosial. Sejumlah pejabat Amerika secara pribadi mengungkapkan kerisauan mereka bahwa Mubarak tampak sedang menggiring Mesir ke arah yang sama seperti dilakukan jenderal-jenderal garis-keras Aljazair. Mereka khawatir rezim Mesir menjadi kekuatan penindas dalam politik dan menentang segmen-segmen luas di kalangan penduduk Mesir. Peringatan-peringatan para pejabat ini rupanya tak dianggap serius atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan Clinton. Pemerintahan ini tak ingin melukai Mubarak dan mengancam kelangsungan hidup suatu sekutu yang sangat penting.

Namun, kebijakan Amerika terhadap Mesir dewasa ini bisa menimbulkan dampak-dampak yang berlawanan. Semakin Mubarak memusatkan kekuasaan di tangannya, semakin ia memperpanjang krisis legitimasi di Mesir. Tatanan politik Mesir tampak berada di ambang jalan buntu. Ia bisa memelihara *status quo* dan mematangkan situasi berbahaya atau bergerak maju, meliberalisasi, membuka pintu gelanggang politik, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Pilihan yang terakhir ini mengharuskan peremajaan institusi-institusi Kairo dan menambal robekan-robekan antara negara dan masyarakat madani. Masyarakat madani Mesir itu lentur dan dinamis. Ia dapat dengan mudah menahan setiap goncangan politik.

Kunci bagi stabilitas dan kemajuan di Mesir terletak pada struktur ekonomi dan sosial-politik yang lebih inklusif, bukan

yang eksklusif. Kalangan Islamis arus-utama, dan juga unsur-unsur oposisi lainnya, perlu dikooptasi, bukan ditindas, dan diberi peluang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perluasan ruang politik dan partisipasi akan mengurangi tekanan rakyat pada pemerintah, khususnya jika ia berusaha menerapkan program perbaikan ekonomi yang sungguh-sungguh. Reformasi politik, disertai dengan indikator-indikator ekonomi yang positif sebagaimana tercatat baru-baru ini, dapat membantu mengakhiri spiral kekerasan.⁶³

Problem Mesir terletak pada sistem partai-tunggalnya, yang menunjukkan ketakmauan berbagi kekuasaan. Kalangan Islamis militan bisa dengan mudah dikurangi makna pentingnya jika negara Mesir memobilisasi seluruh segmen sipil dan politik dalam masyarakat. Mubarak punya peluang emas untuk berbuat dan menyembuhkan luka-luka politik di negeri itu, terutama setelah pembantaian Luxor dan melimpahnya simpati dan dukungan yang diungkapkan oleh organisasi-organisasi masyarakat dan politik terhadap negara. Amerika perlu menyajikan kepada sekutu Mesirnya ongkos-ongkos jangka-panjang bila ia tak mau melakukan reformasi: Mesir bukan hanya akan gagal untuk “bergabung dalam ekonomi dunia”, tapi juga bakal tenggelam makin jauh ke dalam kekacauan dan kemiskinan yang lebih parah.❧

Catatan

1. James Adams, “Mubarak at Grave Risk of Being Overthrown by March of Islam,” 20 Februari 1994.
2. Wawancara dengan dua pejabat Dewan Keamanan Nasional, Washington, DC, 29 dan 30 Maret 1995.
3. Fawaz A. Gerges, “Egyptian-Israeli Relations Turn Sour,” *Foreign Affairs* 74, no. 3 (Mei/Juni 1995), h. 78.
4. Douglas Jehl, “Egypt Is Playing Down Sheik’s Jail Term in U.S.,” *New York Times*, 20 Januari 1996.
5. Mustapha K. Al-Sayyid, “A Civil Society in Egypt,” *Middle East Journal* 47, no. 2 (Spring 1993), h. 241-2; Sana Hasan, “My Lost Egypt,” *New York Times*, Minggu, 22 Oktober 1995, seksi majalah, h.

- 63; Fouad Ajami, "The Sorrows of Egypt," *Foreign Affairs* 74, no. 5 (September/ Oktober 1995), h. 77.
6. Sebuah jajak pendapat oleh sebuah lembaga riset di Mesir menunjukkan bahwa sangat banyak warga Mesir, 73 persen, yang mengan-
dalkan televisi untuk mendapat berita, selain juga untuk hiburan. Perlu dicatat bahwa tak ada stasiun televisi swasta di Mesir. Peme-
rintah mengontrol transportasi udara. Lihat "Sixty-Six Percent of
Egyptians Do Not Pay Attention to Politics," *Al-Hayat*, 19 April 1997.
7. Douglas Jehl, "Islamic Militants' War on Egypt: Going International,"
New York Times, 20 November 1995, dan "In the Face of Criticism,
Egypt Sentences 54 Muslim Leaders," *New York Times*, 24 November
1995.
8. "Where Islam Recruits," *Economist*, 12 November 1994, h. 14; Fahmi
Howaidi, "Political Thinking!" *Al-Ahram*, 2 Maret 1993; Ahmed
Abdallah, "Egypt's Islamists and the State," *Middle East Report*
(Juli/Agustus 1993), h. 29.
9. Mohammed Saleh, "Mubarak: 'The Brothers' Practice Terrorist
Activities," *Al-Hayat*, 27 September 1995.
10. Jihan al-Husseini dan Ishraf al-Fiqi, "Mubarak: The Terrorists in
Britain and No Dialogue with Them Because It Strengthens Them,"
Al-Hayat, 24 November 1997.
11. Mohammed Saleh, "Egypt: The Moment of Reckoning for the Muslim
Brothers," *Al-Wasat*, 7 Agustus 1995, h. 14-17.
12. *Al-Hayat*, 29 Januari 1996; Wahid Abd al-Majid, "A Fundamentalist
Threat?" *Al-Hayat*, 28 Juli 1997.
13. Mohammed Saleh, "Egypt: Confrontation Between the Government
and Human Rights Organizations," *Al-Hayat*, 10 Agustus 1995, h. 7;
Denis J. Sullivan, "State and Civil Society in Conflict in Egypt," *Jour-
nal of Middle East Affairs* 3, no. 12 (Winter/Spring 1997), h. 72-7.
14. "U.S.-Egyptian Search for Peace and Stability in the Middle East:
President Clinton and President Mubarak's News Conference," *U.S.
Department of State Dispatch*, vol. 4, no. 15, 12 April 1993, h. 227.
Lihat juga *Al-Hayat*, 11 Agustus 1995, h. 5, dan *Al-Hayat*, 28
Agustus 1995, h. 1.
15. "Mubarak: The Terrorists in Britain; no Dialogue with Them Because
It Strengthens Them."
16. "Egypt Is Upset by Britain's Noncooperation in Combatting
Terrorism," *Al-Hayat*, 30 November 1997; Jehl, "Islamic Militants'
War on Egypt."

17. Mary Anne Weaver, "The Battle for Cairo," *New Yorker*, 30 Januari 1995, h. 69. Lihat juga *New York Times*, 3 dan 5 April 1993 dan 20 November 1995.
18. Elaine Sciolino, "Egypt Warned U.S. of Terror, Mubarak Says," *New York Times*, 5 April 1993. Pejabat lainnya menggemakan tuduhan Mubarak dengan menyalahkan dinas rahasia AS untuk penciptaan fenomena "Afghani Arab". Lihat Hussam Kamal, "Egyptian Official Blames America for the 'Arab Afghani' Phenomenon," *Al-Hayat*, 26 Mei 1997.
19. Ketika ditanya komentarnya tentang pernyataan Mubarak, Laurence Pope, pejabat koordinator tim kontra-terorisme di Departemen Luar Negeri, menyangkal penjelasan Mubarak. Pope mengatakan bahwa Mesir tak memberikan "informasi mengenai aksi-aksi teroris yang mungkin dilakukan di Amerika Serikat." Lihat *Hearing of the Senate Judiciary Committee, Terrorism and America: A Comprehensive Review of the Threat, Policy, and Law*, 21 April 1993, h. 32.
20. *New York Times*, 5 April 1993.
21. Penguasa Mesir menegaskan bahwa Al-Jamaah dan Ikhwanul Muslimin adalah dua sisi dari satu koin. Pemerintah lebih jauh menyatakan kedua organisasi ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka untuk memaksimalkan penggerogotan politiknya. Lihat Mohammed Saleh, "Mubarak: The Brothers' Practice Terrorist Activities." Beberapa penulis Mesir menuduh Ikhwan mempercayai penggunaan kekerasan sebagai alat yang sah dalam perjuangan politik mereka. Lihat, misalnya, Hala Mustapha, "The Brothers and the Egyptian State: New Confrontation," *Al-Wasat*, 7 Agustus 1995, h. 1819. Lihat juga bukunya dalam bahasa Arab, *Negara dan Gerakan Oposisi Islam: Antara Damai dan Konfrontasi pada Masa Pemerintahan Sadat dan Mubarak* (Cairo: Markaz Al-Mahrousa Lilnasahr, 1995); Joseph Kechichian dan Jeanne Nazimek, "Challenges to the Military in Egypt," *Middle East Policy* 5, no. 3 (September 1997), h. 133.
22. Abdallah, "Egypt's Islamists and the State," h. 30.
23. Sejumlah pejabat AS mengakui menjalin kontak-kontak semacam ini dengan beberapa tokoh Islamis Mesir.
24. Wawancara, Washington, DC, 30 Maret 1995.
25. Ibid.
26. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
27. "Transcript of Remarks by President Clinton and King Hassan II of Morocco in Press Conference," *U.S. Newswire*, 15 Maret 1995. h. 4.

28. *Al-Hayat*, 16 Januari 1996.
29. "U.S.-Egypt Partnership for Economic Growth and Development," naskah komunike bersama pada pertemuan pertama Subkomisi AS-Mesir tentang Kebijakan Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Keuangan Eksternal, Washington, DC, 2 Juni 1995, *U.S. Department of State Dispatch*, vol. 6, no. 24, 12 Juni 1995, h. 501.
30. Hasan, "My Lost Egypt," h. 61.
31. Mona Makram-Ebeid, "Democratization in Egypt: The 'Algeria Complex,'" *Middle East Policy* 3, no. 3 (1994), h. 119, 121, 124; Abdallah, "Egypt's Islamists and the State," h. 29.
32. Lihat testimoni Laurence Pope dalam *Hearing of the Senate Judiciary Committee; Terrorism and America*, h. 31.
33. "U.S.-Egyptian Search for Peace and Stability in the Middle East," h. 227; "An Arab-International Consensus on Condemning the Luxor Attack," *Al-Hayat*, 19 November 1997.
34. Lihat *The Lawyers Committee for Human Rights' annual Critique: Review of the U.S. Department of State's Country Reports on Human Rights Practices* (Washington, DC: Lawyers Committee for Human Rights, Juli 1996).
35. Robert H. Pelletreau, "Recent Events in the Middle East," pernyataan di Subkomisi Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 14 Juni 1994, *U.S. Department of State Dispatch*, vol. 5, no. 25, 20 Juni 1994, h. 411.
36. Lihat *The Reports by Middle East Watch, Egypt: Hostage-taking and Intimidation by Security Forces* (New York: Human Rights Watch, Januari 1995); *Egypt: Trials of Civilians in Military Courts Violate International Law* (New York: Human Rights Watch, Juli 1993); *Behind Closed Doors: Torture and Detention in Egypt* (New York: Human Rights Watch, 1992). Lihat juga *The 1995 Critique by the Lawyers Committee for Human Rights*, h. 70; Douglas Jehl, "Killings Erode Cairo's Claim to 'Control' Militants," *New York Times*, 15 Maret 1997.
37. Lihat, misalnya, *The 1996 Critique by the Lawyers Committee for Human Rights*, h. 61-2, dan *The 1993 Critique*, h. 88-9.
38. *Ibid.*, for 1995, h. 67, 71.
39. Jehl, "Killings Erode Cairo's Claim to 'Control' Militants."
40. *Ibid.* Lihat juga Steve Negus, "Copts Massacred," *Middle East International*, 7 Maret 1997, h. 11, dan "Tourists Slain in Cairo," *Middle East International*, 26 September 1997, h. 11.
41. Wahid Abd al-Majid, "Reform to Confront Terrorism," *Al-Hayat*, 23, 7

- November 1997; Negus, "Tourists Slain in Cairo," h. 11.
42. Mohammed Saleh, "Egypt: Leaders of the 'al-Jama'a al-Islamiyya' Decide to Cease Hostilities," *Al-Hayat*, 6 Juli 1997. Saleh, "Egypt: Two Leaders of Jihad Join the Declaration of Cease-Fire," *Al-Hayat*, 10 Juli 1997. Saleh, "Egypt: Leaders of 'al-Jama'a' and 'Jihad' Join the Cease-Fire," *Al-Hayat*, 13 Juli 1997. Saleh, "Members in 'al-Jama'a and 'Jihad' Join the Cease-Fire," *Al-Hayat*, 25 Juli 1997. Saleh and Hussam Kamal, "Leaders of 'al-Jama'a' and Jihad' Overseas Reject the Cease-Fire," *Al-Hayat*, 12 Juli 1997. Saleh, "Egypt: Failure of Attempts to Convince Leaders of 'al-Jama'a' and 'Jihad' Overseas to Support the Cease-Fire," *Al-Hayat*, 4 Agustus 1997. Saleh, "The Case of Big Assassination' in Egypt: The Accused Support the Cease-Fire," *Al-Hayat*, 25 September 1997.
 43. Hussam Kamal dan Mohammed Saleh, "Al-Alfi: No Dialogue with al-Jama'a al-Islamiyya in Egypt," *Al-Hayat*, 7 September 1997.
 44. Mohammed Saleh, "Egypt: Imprisoned Leaders of 'al-Jama'a' Considered the Luxor Operation a Violation of the Safety Vow," *Al-Hayat*, 23 November 1997.
 45. Mohammed Saleh, "Egypt: 'al-Jama'a al-Islamiyya' Decides to Stop Operations Against Tourism," *Al-Hayat*, 8 Desember 1997. Saleh, "Investigations Inside the 'al-Jama'a al-Islamiyya' Looks at Irregularities in the Luxor Operation," *Al-Hayat*, 29 November 1997. Lihat juga "Rebel Group Forswears Tourist Attacks in Egypt," *New York Times*, 9 Desember 1997. Orang boleh saja curiga pada motif yang diungkapkannya di balik keputusannya untuk menghentikan penyerangan terhadap wisatawan dan industri turisme. Namun satu hal jelas. Banjir darah di Luxor itu telah menelanjangi dan mengekspos Al-Jamaah di mata opini lokal, regional, dan dunia. Ia menggali liang kuburnya sendiri.
 46. "An Arab-International Consensus on Condemning the Luxor Attack."
 47. Daoud Hasan, "Iranian President to Mubarak: Foreign Powers Conspire Against Egypt," *Al-Hayat*, 20 November 1997. "Condemnation of the Luxor Massacre Continues and Consensus Regarding Its Harm to Islam," *ibid.*; "Fadlallah Accuses Israel and America in the Luxor Operation," *Al-Hayat*, 21 November 1997.
 48. Mohammed Saleh, Hussam Kamal, dan Hazem Mohammed, "Egypt: The Army Participates for the First Time in the Protection of Tourist Areas," *Al-Hayat*, 23 November 1997. Douglas Jehl, "Shake-Up in Cairo Follows Tourists' Killings," *New York Times*, 20 November 1997.
 49. Al-Husseim dan Al-Fiqi, "Mubarak: The Terrorists in Britain; No Dialogue with Them Because It Strengthens Them."

50. Hazem Mohammed, "Changes in the Egyptian Security Apparatus Highlights the Role of 'Political Security,'" *Al-Hayat*, 21 November 1997.
51. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan tertutup sekelompok pakar dan pejabat, New York, April 1996.
52. William B. Quandt, *Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), h. 418.
53. Chase, Hill, dan Kennedy, "Pivotal States and U.S. Strategy," *Foreign Affairs*, h. 40.
54. Zachary Karabell, "The Wrong Threat: The United States and Islamic Fundamentalism," *World Policy Journal* (Summer 1995), h. 44-5.
55. Paul Wolfowitz, "Challenges to U.S. Interests in the Middle East," dalam Mirsky, Ahrens, dan Sultan, ed., *Challenges to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*, h. 19.
56. *The Battle Looms: Islam and Politics in the Middle East: Study Commissioned by the Senate Committee on Foreign Relations*, h. 19.
57. Wawancara, Washington, DC, 29 Maret 1995.
58. *The Battle Looms*, h. 19.
59. Lihat misalnya, "Human Rights in the Middle East," testimoni Neil Hicks di depan Subkomisi Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, 15 September 1992; sejumlah edisi kritik The Lawyers Committee for Human Rights, khususnya 1996 dan 1997; Cassandra, "The Impending Crisis in Egypt," *Middle East Journal* 49, no. 1 (Winter 1995), h. 25-6.
60. *Lawyers Committee for Human Rights, Critique*, 1992, 1995, 1996, 1997.
61. Cassandra, "The Impending Crisis in Egypt," h. 10, 15, 17-8.
62. Lihat wawancara-wawancara dengan seorang tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin, Seif Al Islam Bana dalam *Al-Hayat*, 14 November 1995, h. 5; *Al-Wasat*, 7 Agustus 1995, h. 16-17. *Al-Hayat*, 20 November 1995, h. 5; *Al-Hayat*, 21 November 1995, h. 1, 6.
63. Ekonomi Mesir meraih perolehan-perolehan yang mengesankan. Utang luar negeri Mesir berkurang dari US\$50 miliar menjadi sekitar US\$34 miliar. Reformasi perdagangan menghapus hambatan-hambatan impor. Tingkat bunga kini bebas ditentukan oleh bank-bank dan tetap di atas angka inflasi selama tiga tahun terakhir. Cadangan devisa pada 1995 berjumlah US\$16 miliar, memberi pemerintah peluang selama satu sampai dua tahun untuk berdagang valuta as-

ing guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan impor. Inflasi dipangkas dari di atas 20 persen pada 1989 menjadi 8,4 persen pada 1995. Defisit anggaran juga turun dari 18 persen menjadi di bawah 3 persen dari GDP. Lihat Sullivan, "State and Civil Society in Conflict in Egypt," h. 80, 86. Penting pula bahwa suasana psikologis terhadap perekonomian di dalam dan di luar Mesir Egypt adalah positif, sehingga menjanjikan kemajuan lebih besar lagi.

Turki



UNTUK pertama kalinya dalam sejarah modern Turki, golongan Islamis, sebagaimana diwakili oleh Partai Refah (Kesejahteraan), meraih kemenangan besar politik ketika mereka menanggung lebih dari 21 persen suara rakyat dan 158 kursi dari 550 kursi di Majelis Nasional pada pemilu parlemen, Desember 1995. Semula, kedua partai sekular kanan-tengah terbesar, Tanah Air dan Jalan Sejati, karena ditekan oleh militer yang kuat, tak mau memberi Refah buah kemenangannya dengan membentuk sebuah pemerintahan koalisi minoritas. Tapi setelah tiga bulan terjadi kelompok politik, kawin paksa antara kedua pemimpin Tanah Air dan Jalan Sejati, masing-masing Mesut Yilmaz dan Tansu Ciller, ambruk pada Juni 1996, membukakan jalan bagi Refah guna membentuk pemerintahan gabungan bersama Jalan Sejati. Pemimpin Refah Necmettin Erbakan akhirnya bisa menduduki kursi perdana menteri.¹

Hal yang mustahil pun terjadi: Negara paling sekular di Timur Tengah dilanda oleh gelombang Islamis. Cita-cita Mustafa Kemal Atatürk tentang sebuah negara modern dan sekular berpola Barat dibayangi keruntuhan. Menengok ke belakang, seperti semua visioner, Atatürk gagal dalam ikhtiarnya menciptakan seorang manusia baru yang tak dibayangi oleh warisan sejarah kekaisaran Ottoman yang berusia lima ratus tahun. Rakyat Turki, meski ter-

lambat, ternyata akhirnya bergabung juga dengan kerabat Arab dan Persia mereka yang religius dalam upaya memadukan modernitas, agama dan keotentikan budaya. Tapi tak seperti para tetangga Muslim mereka, rakyat Turki melakukannya melalui institusi dan perangkat konstitusional yang dibangun oleh negara Kemal. Yang membedakan Turki dalam hal ini adalah pluralismenya, yang membuat terpinggirnnya kelompok-kelompok keras Islam di Turki, dibanding dengan oposisi Islamis bersenjata di Mesir dan Aljazair.²

Berbeda dari Iran, Aljazair, dan Mesir, Turki mewakili sebuah kasus unik dalam upaya sebuah negara Muslim sekular untuk merujukkan agama dan sekularisme dalam konteks demokrasi. Golongan Islamis dan elit penguasa sekular yang dominan berusaha, kendati sangat singkat, untuk hidup berdampingan secara politik dan juga berbagi kekuasaan. Dampak-dampaknya bagi Turki dan negeri-negeri Muslim lainnya di tingkat pragmatis maupun teoretis sungguh penting: membangun keseimbangan antara agama dan sekularisme; menetapkan hubungan yang layak antara kekuatan-kekuatan sipil dan militer dalam masyarakat demokratis; menguji kecocokan antara Islam dan demokrasi; dan menyeimbangkan ideologi dalam hubungan domestik dan internasional.³

Lebih jauh lagi, tampilnya sebuah partai Islam memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang hubungan Turki dengan kekuatan-kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Bagaimanakah para elit kebijakan luar negeri AS melihat fenomena Islamis di Turki? Apa reaksi Amerika Serikat terhadap pemerintahan berbasis Islamis di Ankara? Seberapa besar respon Washington terhadap Islamis di Turki berbeda dari tanggapannya atas Islamis di Aljazair dan Mesir? Apakah para pejabat dan spesialis kebijakan Amerika menarik garis-garis persamaan antara kasus Turki dan gerakan-gerakan Islamis? Akankah kasus Turki, yang ternyata kini dikuasai oleh seorang pemimpin Islam reformis, akan mengubah radikal pandangan AS terhadap kebangkitan

Islam? Dengan kata lain, reaksi AS terhadap pemerintahan pimpinan Islamis di Turki memunculkan aspek baru yang penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Islam politik. Kasus Turki juga akan menunjukkan sejauh mana Amerika Serikat mau berurusan dengan suatu pemerintahan Islamis yang terpilih secara konstitusional di sebuah negara yang sangat strategis.

Makna penting Turki terletak pada fakta bahwa para pejabat AS sering merujuknya sebagai sebuah model bagi koeksistensi antara dunia Islam dan Barat. Dalam ungkapan Deputy Menteri Luar Negeri Strobe Talbott, Turki — sebagai sebuah negara Barat sekaligus negeri Muslim — mengelak dari ramalan suram tentang benturan global peradaban dan dengan jelas menunjukkan “betapa produktif dan langgengnya kerja sama di antara ‘umat kitab’ dapat berlangsung.”⁴ Presiden Clinton menyuarakan tema serupa: “Hubungan kita dengan Turki membuktikan bahwa masyarakat-masyarakat yang berbeda — Timur dan Barat, Muslim, Kristen, Yahudi — dapat bekerja sama erat guna mencapai tujuan-tujuan yang sama.”⁵

Hubungan AS-Turki setelah Akhir Perang Dingin

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Turki berperan penting dalam kebijakan Amerika di Timur Tengah, kawasan Balkan, dan Eropa. Sebagai anggota NATO, Turki berperan sebagai salah satu dari garis pertama pertahanan terhadap Uni Soviet. Makna strategis Ankara tak perlu diragukan. Turki juga berperan sebagai gerbang ke dunia Muslim.⁶

Rivolusi Islam di Iran pada 1979, beserta invasi Soviet atas Afghanistan, meningkatkan arti penting Turki sebagai “aset strategis” bagi Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, kemenangan Ronald Reagan pada 1980 dan kemenangan partai sosialis pimpinan Papandreou di Yunani pada 1981 menaikkan nilai Turki di mata Washington. Menteri Luar Negeri Alexander Haig melihat Turki sebagai “mutlak tak tergantikan” dan patut didukung dengan harga

berapapun. Dukungan Amerika bagi Turki terlihat jelas dalam pinjaman-pinjaman yang sudah dijanjikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Antara 1980 dan 1987, Turki menerima US\$13 miliar dan menikmati tingkat pertumbuhan hampir 5 persen pada tahun-tahun itu.⁷

Berakhirnya Perang Dingin semakin memperkuat nilai strategis Turki di mata Amerika. Seperti diungkapkan oleh mantan Asisten Menteri Luar Negeri Richard Holbrooke, “Turki pasca Perang Dingin sebanding nilainya dengan Jerman selama Perang Dingin — sebuah negara vital, tempat bersinggungannya pelbagai kepentingan strategis.”⁸ Para pejabat AS memandang Turki sebagai negara garis-depan dalam pertarungan global antara kekuatan-kekuatan reformis, modernis, dan sekularisme dan negara-negara terbelakang, intoleran, dan anti-Barat; antara kekaburan religius dan modernisme peradaban.⁹ Dalam arti geostrategis, para pemimpin dan tokoh kebijakan AS menganggap Turki, dengan sistem politik sekularnya, sebagai model bagi negeri-negeri Muslim dan sebagai benteng terhadap penyebaran Islam revolusioner.¹⁰

Petinggi-petinggi Amerika berharap negeri-negeri Asia Tengah dan Balkan akan mencontoh Turki ketimbang versi radikalisme Islam Iran. Presiden Bush dan Clinton menekankan peran stabilisator Turki yang mutlak dalam sebuah wilayah yang teramat sensitif seperti Timur Tengah dan di republik-republik Muslim Kaukasus dan Asia Tengah. Secara khusus, Bush dan Clinton menyebut Turki sebagai “sebuah model demokrasi sekular” yang bisa mempengaruhi republik-republik bekas Soviet yang bermayoritas penduduk Muslim. Laporan Strategi Keamanan Nasional 1997 menekankan bahwa kepentingan-kepentingan strategis AS dipenuhi dengan baik oleh “Turki yang demokratis, sekular, stabil dan berorientasi Barat.... Kelanjutan ikatannya dengan Barat serta dukungannya bagi tujuan-tujuan strategis kita di salah satu wilayah paling rawan di dunia itu amat penting.”¹¹ Clinton menambahkan pula bahwa “Sekularisme Turki perlu untuk memben-
dang gelombang-pasang fundamentalisme.”¹² Tujuan Washington

adalah membawa republik-republik Muslim Asia Tengah “ke dalam komunitas nilai-nilai, bangsa-bangsa dan institusi-institusi kita yang lebih luas.”¹³

Lebih lanjut, makna penting Turki pasca Perang Dingin juga bersumber dari kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam ekonomi dunia yang didominasi Amerika. Para petinggi Amerika menyadari potensi ekonomi Ankara. Amerika Serikat kini merupakan mitra dagang terpenting kedua bagi Turki, dengan porsi sekitar 10 persen dari total impor Turki dan 9 persen dari eksportnya. Turki juga salah satu dari sedikit negara yang menikmati keseimbangan dagang yang menguntungkan dengan Amerika Serikat. Departemen Perdagangan AS menempatkan Turki sebagai salah satu dari 10 pasar besar dunia yang pertumbuhannya paling subur.¹⁴

Turki menyediakan pasar besar bagi barang-barang Amerika dan merupakan “saluran investasi” serta gerbang utama ke pasar-pasar di negara-negara merdeka bekas Uni Soviet dan juga Timur Tengah.¹⁵ Peran stabilitas dan kepemimpinan langgeng Turki juga mencerminkan kaitan strategis yang vital bagi Washington dalam mempromosikan stabilitas regional yang lebih luas. Mendiang mantan Menteri Perdagangan Ron Brown menyatakan bahwa “Amerika Serikat tak pernah lengah dari makna penting Turki, baik dari sudut strategis maupun ekonomis. Turki adalah mitra penting NATO, dan masa depannya sebagai negeri Muslim yang demokratis dan sekular di sebuah kawasan yang rawan amat sangat penting.”¹⁶ Dengan semua alasan ini, Turki bisa berdampak menentukan atas kepentingan-kepentingan Amerika di sebuah dunia besar yang goyah.¹⁷

Perang Teluk 1991: Memperkokoh Hubungan AS-Turki

Berakhirnya Perang Dingin menghadapkan Turki dengan tantangan paling serius sejak usainya Perang Dunia II. Penguasa politik Turki mengkhawatiri dampak-dampak keruntuhan Uni Soviet atas persepsi Barat terhadap peran geostrategis Turki, termasuk

mengecilnya peluangnya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa. Aliansi NATO sejak lama merupakan penghubung penting institusional dan psikologis Turki dengan Barat.¹⁸ Prinsip Perang Dingin, yaitu antikomunisme dan ketakutan terhadap Soviet, yang telah menentukan kehidupan politik elit penguasa Turki, telah banyak menguap. Namun demikian, berakhirnya Perang Dingin sama sekali tak menghapus peran Turki, malah memperbanyak pilihan-pilihan kebijakan luar negerinya.¹⁹

Krisis Teluk 1990 memberi Presiden Ozal peluang, kendati muncul keberatan di kalangan sejumlah kelompok militer dan sipil, untuk mempererat hubungan Turki dengan Amerika Serikat melawan Irak.²⁰ Ozal ingin membuat Amerika Serikat berutang budi pada Turki, suatu sasaran yang dalam pandangannya sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan teknologi Ankara, dan juga bagi modernisasi angkatan bersenjata Turki. Bush pun sepakat bahwa Ankara harus memainkan peran penting dalam proses perdamaian Arab-Israel dan dalam proposal Washington bagi kesepakatan keamanan baru di kawasan itu. Di mata Ozal, partisipasi dalam Perang Teluk bisa memberi Turki kesempatan untuk mengelakkan marjinalisasi serta memulihkan perannya sebagai kekuatan regional.²¹

Turki di masa Ozal mendukung sanksi-sanksi PBB terhadap Irak, menyumbat pipa yang mengalirkan 1,5 juta barel minyak per hari, mengizinkan pesawat-pesawat tempur pasukan koalisi untuk menjalankan misi-misi penyerangan dari pangkalan-pangkalan di Turki, kemudian memobilisasi tentara ke perbatasan utara Irak, dan mengizinkan kehadiran serdadu-serdadu asing di tanah Turki. "Setelah krisis ini berakhir," tandas Ozal, "peta Timur Tengah akan berubah total. Kalau ada tempat yang lebih baik bagi kita di dunia ini, kita harus mengambilnya."²² Sikap aktif ini dilanjutkan oleh para pengganti Ozal.²³

Bertekad untuk membendung dan menangkal setiap ancaman terhadap kepentingan-kepentingan utamanya di Teluk dan guna memperkuat kontrolnya, pemerintahan Bush membutuhkan satu

sekutu regional yang tepercaya untuk menjadi sebuah landasan bagi koalisi anti-Iraknya. Turkinya Ozal merupakan mitra ideal. Bush, yang pernah melukiskan Turki sebagai “sekutu terkokoh” Amerika, menyanjung Turki dan memuji sikap Ozal yang berani melawan Irak. Pemerintah AS menjanjikan bantuan baru ekonomi, konsesi-konsesi dagang, dan peningkatan besar-besaran bantuan militer. Antara 1991 dan 1993, Turki, yang memanfaatkan sepenuhnya program perluasan NATO, menerima perlengkapan militer senilai hampir US\$8 miliar dari Amerika dan Jerman. Turki, penerima bantuan AS terbesar ketiga setelah Israel dan Mesir, juga merupakan klien terbesar kelima Washington, dengan belanja senjata setinggi US\$7,8 miliar pada periode 1984-1994. Washington kini menyediakan 85 persen dari impor senjata Turki dan 90 persen dari bantuan militernya.²⁴

Dalam hal ini, Perang Teluk telah mempererat dan mengonsolidasikan hubungan Amerika-Turki. Turki menjadi mitra Amerika Serikat dalam kebijakan-kebijakan regionalnya. Seperti dikatakan oleh mantan Asisten Menteri Luar Negeri Holbrooke, Turki berdiri “di persimpangan hampir semua isu penting bagi AS di benua Eurasia itu.”²⁵ Deputy Menteri Luar Negeri Talbott menegaskan sentimen ini: “Turki kembali berada di garis depan dalam pertarungan terpenting di dunia ini sebagaimana posisinya selama Perang Dingin.”²⁶

Para pemimpin Turki bermaksud memperkuat koordinasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategis pasca Perang Dingin dengan Amerika Serikat.²⁷ Proses perdamaian Arab-Israel, disertai perubahan-perubahan lainnya dalam politik Timur Tengah, membuka peluang kebijakan luar negeri baru bagi Ankara. Khawatir ditinggalkan, Ankara buru-buru memperkuat hubungannya dengan Tel Aviv.²⁸ Sejumlah perjanjian militer ditandatangani antara Tel Aviv dan Ankara, yang mengatur koordinasi antara pasukan udara dan laut kedua negara. Angkatan Laut AS ikut ambil bagian dalam latihan-latihan gabungan pasukan laut Turki-Israel.²⁹ Jenderal-jenderal Turki ingin berguna bagi Amerika

Serikat, dan kartu Israel tampak sebagai jalan yang paling aman untuk memikat para aparat kebijakan luar negeri AS.³⁰

Amerika Serikat telah memberkati perkawinan Turki-Israel dan meminjamkan kekuatan politik dan militernya untuk memperkuatnya. Para petinggi AS tampak merancang Turki dan Israel sebagai “Polisi Regional” baru di Timur Tengah, yang menggantikan kedudukan Iran.³¹ Aliansi Turki-Israel turut berperan dalam upaya Amerika untuk membendung apa yang disebut “negara-negara kasar” (*rogue states*) seperti Irak, Iran, dan mungkin juga Suriah, dan mendukung rezim-rezim pro-Barat di kawasan itu; ia juga meningkatkan dominasi Israel terhadap wilayah timur Mediterania.³²

Sebagai imbalan, Amerika Serikat dengan gigih melobi Masyarakat Eropa untuk menerima Turki ke dalam kelompok eksklusif ini; mendukung keras kampanye berdarah Turki terhadap Partai Buruh Kurdistan (PKK); mengesampingkan pelanggaran-pelanggaran HAM Turki; memasok Ankara dengan senjata, dan memperlihatkan pengertian yang lapang-dada atas pendudukan 22 tahun tentara Turki terhadap Cyprus utara. Pelbagai pemerintahan AS juga tak bergeming oleh imbauan-imbauan para anggota Kongres untuk mengutuk Turki karena meningkatkan perangnya terhadap etnis Kurdi.³³

Memikirkan yang Mustahil: Refah dalam Kekuasaan dan Reaksi AS

Dalam konteks inilah respon AS atas naiknya kelompok Islamis ke kekuasaan di Turki harus dilihat. Kemenangan elektoral Islamis pada 1995 memunculkan keprihatinan besar di Amerika Serikat, sementara revolusi Islam di Iran masih segar dalam benak para perumus kebijakan. Para petinggi AS bimbang bagaimana mereaksi gelombang Islamis di Turki. Semula, ketakpastian, kegelisahan dan keraguan yang amat tinggi mewarnai pandangan AS terhadap Refah. Ambivalensi dan ketegangan ini untuk seba-

gian menjelaskan mengapa para petinggi itu sangat hati-hati dalam respon mereka terhadap kemenangan elektoral Partai Refah dan terhadap terbentuknya pemerintahan berbasis Islamis setahun kemudian. Sebagian pejabat di dalam pemerintahan Clinton diam-diam berharap pemerintahan pimpinan Islamis itu gagal, sehingga memojokkan kaum fundamentalis dan memungkinkan Ciller memunguti serpihan-serpihannya. Tapi para pejabat lainnya juga mengakui bahwa perolehan Refah dari kepergiannya bisa memperkuat partai ini dan membahayakan stabilitas jangka panjang Turki.³⁴

Tak seperti reaksi mereka terhadap situasi di Iran, Aljazair, dan Mesir, para pembuat kebijakan AS tidak panik. Washington bersikap menunggu dan menempuh pendekatan pragmatis terhadap kehadiran Refah di pentas kekuasaan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Nicholas Burns mengatakan bahwa Washington akan “mendengarkan retorik dan juga menyaksikan tindakan-tindakan” pemerintahan baru ini.³⁵

Mengabaikan saran sebagian pejabat pelaksana di Departemen Luar Negeri, pemerintahan Clinton menugaskan Peter Tarnoff, waktu itu Menteri Muda Luar Negeri, untuk menemui perdana menteri yang baru terpilih, Erbakan, dan dengan demikian jelas memberi dia restu Amerika beberapa saat sebelum parlemen Turki sendiri memberinya mandat. Tarnoff mengatakan kepada Erbakan bahwa Amerika Serikat ingin bekerja sama dengannya sepanjang dia menghormati kepentingan-kepentingan keamanan Amerika di kawasan itu. Secara khusus, Tarnoff mengungkapkan harapan AS bagi pembaruan mandat untuk *Operation Provide Comfort* — suatu hal yang sangat penting dalam strategi AS terhadap Irak.³⁶ Tak lama setelah pemungutan suara untuk penguatan Erbakan, juru bicara Departemen Luar Negeri Burns berkata, “Saya kira kita tak pernah mengatakan bahwa sekularisme merupakan hal yang kita pandang perlu bagi kita untuk tetap mempunyai hubungan dengan Turki.”³⁷

Meski Madeleine Albright, waktu itu duta besar untuk PBB,

kemudian menolaknya, pernyataan Burns itu punya makna penting karena ia mengungkapkan kebimbangan sikap Washington terhadap pemerintahan berbasis Islamis itu; ia juga menunjukkan seberapa jauh Amerika Serikat bersedia menoleransi dan hidup berdampingan dengan golongan Islamis sepanjang orientasi kebijakan luar negeri yang terakhir ini tak membahayakan kepentingan-kepentingan keamanan AS. Sebagian kalangan kebijakan di Washington bahkan melihat pemerintahan pimpinan Islamis itu sebagai peluang unik untuk melibatkan kaum Islamis yang telah berkuasa dengan cara-cara demokratis. Jalur komunikasi dengan Erbakan tetap dibuka. Pertemuan-pertemuan Tarnoff dan Albright dengan Erbakan dimaknai luas oleh rakyat Turki sebagai dukungan yang jelas dan pengakuan atas legitimasi pemerintahannya.”³⁸

Berbeda dari tanggapan gamang terhadap kaum Islamis di tempat-tempat lain di Timur Tengah, para petinggi AS paham bahwa golongan Islamis mewarisi batasan-batasan di Turki. Kemenangan elektoral Refah yang kecil (21 persen suara) tak memungkinkan kaum Islamis untuk membentuk sebuah pemerintahan sendirian. Koalisi Refah dengan Partai Jalan Sejati menjadi pengimbang bagi ambisi-ambisi partai Islam itu. Yang lebih penting di mata AS adalah fakta bahwa kekuatan-kekuatan mapan Kemalis, terutama angkatan darat, tampak bertekad untuk mencegah kaum Islamis dari kendali real kekuasaan, dengan adanya para jenderal yang merupakan barisan besar pembendung setiap upaya untuk menjadikan Turki sebagai sebuah negara Islam. Dalam kunjungannya ke Ankara pada Juni 1997, Deputy Menteri Luar Negeri Talbott makan siang dengan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata yang kuat, Jenderal Cevik Bir.³⁹ Keakraban ini tak mungkin diabaikan, baik oleh militer maupun pemerintahan berbasis Islamis itu.

Sejak akhir 1940an, Amerika Serikat menanamkan pengaruh besar di Ankara, dan para petinggi AS perlu diingatkan bahwa setiap tindakan dan pernyataan publik mereka dianggap sangat serius oleh kebanyakan warga Turki. Maka penguasa politik Turki

memandang reaksi-reaksi awal AS terhadap pemerintahan Erbakan dengan hati-hati. Ketika para pejabat AS bertemu dengan Erbakan sebelum pemungutan suara di parlemen untuk mengukuhkannya pada pertengahan 1996, pertemuan itu ditafsirkan sebagai pemberian restu Amerika kepada koalisi yang didominasi Refah. Demikian pula, pada Februari 1997, Departemen Luar Negeri dilihat memberikan dukungan lebih jauh kepada pemerintahan koalisi itu ketika ia mengatakan, "Kami yakin bahwa politik Turki stabil. Kami yakin bahwa demokrasi sekularnya akan berlanjut."⁴⁰

Sejak awal, militer Turki mengawasi cermat pemerintahan baru itu, menanti saat yang tepat untuk melancarkan tekanan politik, bahkan kalau perlu kekuatan fisik, untuk menumbangkannya. Setelah sukses menindas kekuatan-kekuatan kiri pada 1980an, para jenderal tak sudi menoleransi keberadaan sebuah ideologi saingan yang bisa mengancam negara Kemalis. Dalam menempur kaum Islamis, jenderal-jenderal Turki tahu bahwa ada cara yang efektif untuk membangkitkan kekhawatiran laten Washington terhadap kaum Islamis. Sebagai contoh, militer mendaftar terorisme Kurdi dan fundamentalisme Islam sebagai "Ancaman No. 1" bagi Turki, menyebut Iran dan Suriah sebagai negara-negara yang punya "hubungan" dengan kelompok-kelompok lokal yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu.⁴¹

Barisan militer paham dengan tepat bahwa kekuatan-kekuatan Barat akan dengan sendirinya mendukung langkah mereka. Beberapa anggota Uni Eropa menyiratkan akan menjauhi Turki karena perdana menteri yang "Islamis". Menurut pelbagai laporan, para perumus kebijakan Uni Eropa berkomentar secara pribadi bahwa penolakan atas keanggotaan Turki dalam UE terkait dengan bangkitnya sentimen-sentimen Muslim di negeri itu dan problem-problem yang dihadapkannya bagi Eropa.⁴² Kendati pejabat-pejabat AS tak mengambil langkah konkret apapun untuk menunjukkan kerisauan mereka terhadap perubahan-perubahan di Ankara, para jenderal Turki tahu bahwa Amerika Serikat bakal mendukung taktik-taktik tekanan militer sepanjang mereka tidak

sampai melancarkan kudeta. Jenderal-jenderal ini sangat paham akan sentimen-sentimen anti-Islamis di pelbagai lingkaran kebijakan di Barat dan ibukota-ibukota Timur Tengah.

Kampanye Menentang Islamis

Kampanye terhadap Islamis di Turki dimulai dengan gencar pada akhir 1980an, dipimpin oleh tiga kubu. Kubu pertama meliputi kaum sekularis “radikal” di Turki yang mewakili sebuah bagian integral dalam kekuasaan politik. Kubu kedua mencakup sekutu-sekutu Timur Tengah pro-Amerika, seperti Israel dan Mesir, yang mencemasi dampak-dampak Islamisme di Turki atas kelompok-kelompok Islamis di negeri-negeri mereka sendiri, dan atas pengaitan dengan kebijakan luar negeri Ankara. Kubu terakhir terdiri dari para pengamat Barat yang tak mempercayai Refah dan menyerukan pengucilannya.

Jauh sebelum kemenangan Refah dalam pemilu 1995, barisan politisi sekular telah membunyikan tanda bahaya tentang “tantangan terhadap sekularisme.” Mantan presiden Kenan Evren memperingatkan publik bahwa bahaya-bahaya yang dihadapi Turki adalah “komunisme, fasisme dan reaksi religius.”⁴³ Kaum sekularis radikal menganggap pertarungan antara sekularisme dan Islam adalah pertarungan hidup-mati, dan menolak gagasan rekonsiliasi antara keduanya. Jauh sebelum golongan Islamis memenangi pemilu, seorang wartawan Turki meletakkan konfrontasi antara Islamis dan sekularis dalam kerangka apokaliptik: Kalau Turki harus dihabisi oleh Syariah, oleh kaum radikal Islam, itu akan merupakan akhir pertarungan di dunia antara kaum sekularis radikal dan kelompok religius radikal.⁴⁴

Seperti rekan-rekan mereka di Israel dan Mesir, elit sekular Turki berupaya memanipulasi ketakutan AS terhadap militansi Islam dengan menggambarkan negeri itu sebagai kantong stabilitas di sebuah lingkungan yang rawan. Mereka terus menjustifikasi makna penting Ankara bagi Amerika Serikat dan Eropa dalam po-

sisi sebagai “pengaruh yang kokoh” atas kawasan itu yang dapat dikerahkan untuk memukul radikalisme religius. Tak ada yang lebih lihai dalam permainan ini daripada bekas perdana menteri Ciller sebelum ia bergabung dalam koalisi dengan Erbakan. Sebelum pemilu 1995, Ciller berkeliling Eropa dan Amerika Serikat, meminta dukungan luar negeri atas dasar bahwa dia merupakan satu-satunya politisi yang mampu menangkal kaum fundamentalis dari “menyeret negara kembali ke masa kegelapan.”⁴⁵ Seperti dicatat oleh sebuah editorial *New York Times*, “Para politisi Turki kini sengaja menonjol-nonjolkan ancaman Islam untuk membungkam kritik Barat. Ini akan memberi mereka keleluasaan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan represif yang akan diterapkan terhadap kekuatan-kekuatan Islam dan antidemokrasi di negerinya.”⁴⁶

Dari segi regional, sekutu-sekutu Timur Tengah pro-Amerika, yang terus diserang oleh kekuatan-kekuatan oposisi Islamis, khawatir bahwa Erbakan, dengan membuktikan bahwa Islamisme tak perlu diidentikkan dengan militansi, akan memberi gerakan-gerakan Islam penghormatan baru di kalangan kelas-menengah mereka dan di Barat. Secara khusus, Israel dan kawan-kawan Amerikanya mengkhawatiri bahwa Erbakan, mengingat pernyataan-pernyataan dia sebelumnya yang anti-Israel, akan berbalik mengakhiri kerja sama keamanan yang erat antara Tel Aviv dan Ankara yang sudah dimulai sejak awal 1990an. Presiden Mubarak juga khawatir bahwa hubungan erat Refah dengan Ikhwanul Muslimin Mesir akan memperkuat oposisi Islamis di Kairo.⁴⁷ Para sekutu Timur Tengah AS mengungkapkan pandangan-pandangan yang gamblang kepada rekan-rekan mereka di Amerika untuk memberi kesan pada Washington tentang perlunya menentang Islamis Erbakan.

Demikian pula, sebagian pembuat kebijakan Barat dari kubu konfrontasionalis mendorong militer Turki dalam pertarungannya melawan kaum Islamis. Para komentator merasa bahwa respon resmi Washington yang tampak kalem itu amat mengganggu se-

bab, menurut mereka, sebuah pemerintahan yang berbasis Islamis “akan membahayakan hubungan Turki dengan Barat.”⁴⁸ Kaum konfrontasionalis ini mendesak para tokoh sekular Turki beserta sekutu-sekutu Barat mereka, terutama Amerika Serikat, untuk menjaga kelompok Islamis tetap di “pantai” dan memberikan dukungan mutlak pada sekularisme; mereka juga meminta pemerintah AS “untuk menyingkirkan gagasan yang sedang digandrungi di sebagian kalangan (di Washington) bahwa Amerika mampu menjinakkan kaum radikal Islamis.”⁴⁹

Jim Hoagland, seorang komentator Washington yang berpengaruh dan punya kontak erat dengan para pejabat senior AS, menyarankan suatu peran AS yang “lebih aktif dan penuh pertimbangan” dalam menyingkirkan pemerintahan pimpinan Islamis itu; dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tak perlu hanya menunggu Erbakan jatuh, dan lebih baik sigap menanggapi tekanan-tekanan regional yang sedang membangun dan menarik “garis merah” di seputar perilaku Turki. Garis merah itu, tambah Hoagland, memerlukan penerapan ancaman berupa penundaan bantuan ekonomi dan militer oleh Amerika guna menghasilkan perubahan yang diinginkan di Turki.⁵⁰

Sebagian diplomat Barat khawatir Turki dapat menjadi ancaman dan mungkin suatu hari akan berubah menjadi seperti Iran atau Aljazair. Seorang diplomat yang mengungkapkan keprihatinan serius terhadap kebangkitan Islam di Turki, memperingatkan bahwa hal ini tidak boleh dianggap remeh. Seorang bekas pejabat tinggi Amerika bahkan bersikap lebih jauh, dengan mengatakan, “Kita sedang menyaksikan kehancuran sistem politik Turki.”⁵¹

Media bergabung dalam paduan suara tanda bahaya di Amerika Serikat dengan menggambarkan kemenangan Refah sebagai penguatan ekstremis Islam dan sebagai tampilnya oposisi yang kuat terhadap Barat, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa. Koran-koran besar Amerika melukiskan Erbakan sebagai “anti-Barat, pro-Islam” dan memperingatkan bahwa Refah sangat mungkin akan membuang ideologi negara yang pro-Barat dan

menggantinya dengan orde Islam anti-Barat, seperti yang diterapkan di Iran dan Sudan.⁵²

Gabungan pandangan dan kepentingan di ketiga kubu sekularis Ataturkis, sebagian rezim Timur Tengah, dan kaum konfrontasionalis Barat itu mewakili sebuah koalisi kuat yang melobi Amerika Serikat untuk menjaga jarak dari dan menerapkan tekanan terhadap pemerintahan Erbakan. Koalisi ini berperan penting dalam memperkuat dan merangsang semangat militer Turki untuk menyingkirkan Erbakan dari kekuasaan.

Catatan Refah dan Peran Amerika

Pada akhir Februari 1997, para jenderal Turki, dengan menggunakan Dewan Keamanan Nasional (NSC) — lembaga sipil-militer yang bertugas menangani masalah-masalah keamanan yang sensitif sebagai instrumen militer — melancarkan ofensi penuh terhadap pemerintahan Erbakan. Mereka khususnya menuntut pembubaran seluruh aspek pendidikan Islam. Tujuan militer bukanlah sekadar memermalukan dan memojokkan Erbakan, tapi juga untuk memaksanya mengundurkan diri. Semula, Erbakan berusaha menggunakan kekuasaan konstitusionalnya dan bertahan dari gempuran militer. Tapi ia kemudian berbalik arah dan berusaha mengakomodasi tuntutan-tuntutan militer.⁵³

Di luar retorik Islamnya selama kampanye pemilihan umum, Erbakan terbukti merupakan tokoh yang sangat nasionalistis dan pragmatis, sebuah suara “moderasi,” dan “sangat lembut,” seperti diakui oleh Stephen Kinzer dari *New York Times*.⁵⁴ Ke dalam, Erbakan tunduk pada kemauan-kemauan NSC dengan menerima pemecatan beratus-ratus perwira militer, meningkatkan gaji tentara, dan menghentikan pernyataan-pernyataan anti-Semitnya. Erbakan dan sekutu-sekutu di dewan pimpinan pusat partai memecat delapan dari 70 komisi wilayah, yang mereka tuduh terlalu radikal. Dia menegaskan dukungannya pada pluralisme dan demokrasi politik, dan berjanji untuk “memerangi ancaman fun-

damentalisme agama.” Erbakan juga mengupayakan pembentukan kebijakan-kebijakan ekonomi pasar-bebas, melupakan janji-janji kampanyenya untuk menghapus sistem bunga bank dan menyajikan mata uang pan-Muslim. Pemerintahannya berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk meminta dukungan bagi program-program stabilisasi dan reformasi ekonomi. Erbakan juga menetapkan sebuah zona keamanan baru di utara Irak.⁵⁵

Ke luar, Erbakan menekankan bahwa ia tak menentang Perjanjian Pabean dengan Uni Eropa, yang sebelumnya ditenangkannya, mendukung kampanye pasukan keamanan dalam memerangi terorisme, dan menaati perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan Turki, termasuk persetujuan militer dengan Israel.⁵⁶ Meski Erbakan berusaha mewujudkan gagasan untuk membentuk organisasi Islam baru yang disebut “Developing Eight”, terdiri dari Turki, Pakistan, Indonesia, Iran, Bangladesh, Mesir, Malaysia, dan Nigeria, orientasinya ke dunia Muslim lebih didorong oleh semangat untuk menjadikan Turki pemimpin sebuah blok ketimbang tetap menjadi kekuatan kelas dua dalam aliansi politik dan militer yang dipimpin Amerika. Erbakan ingin menunjukkan independensinya dari Amerika Serikat. Cita-citanya adalah memimpin, bukan dipimpin.⁵⁷

Menurut Abdullah Gul, menteri luar negeri, kebijakan luar negeri Erbakan yang multidimensional, perangkulannya terhadap Iran maupun ikatan strategisnya dengan Israel, menunjukkan bahwa “Kami ingin memelihara hubungan baik dengan Barat maupun Timur.”⁵⁸ Tapi sebagian pejabat dan kalangan kebijakan Barat memandang langkah perimbangan Refah dengan kaca mata negatif karena, menurut keyakinan mereka, hal itu membahayakan hubungan Turki-Barat. Semula Washington khawatir bahwa Erbakan, pelan tapi pasti, akan menggiring negeri yang sejak lama berkecenderungan sekular itu menjauh dari orientasi tradisional pro-Baratnya dan mengupayakan aliansi-aliansi baru yang anti-Amerika dengan negara-negara Muslim, terutama

Iran.⁵⁹ Persepsi ini memperlihatkan betapa kokohnya sosok Iran dalam benak Amerika. Disadari atau tidak, para petinggi AS menggunakan Iran sebagai tolok-pembanding dengan gerakan-gerakan Islamis lainnya, termasuk kaum Islamis mapan di Turki.

Kecemasan para pejabat Amerika terbukti tak berdasar. Sepanjang sejarahnya, Refah mendukung NATO selama Perang Dingin dan bersikap antikomunis dan juga anti-Soviet. Refah memandang dirinya sebagai mitra tepercaya Barat.⁶⁰ Setelah menduduki kekuasaan, Erbakan bersikap pragmatis terhadap Amerika Serikat dan menyatakan jaminan kepada pejabat-pejabat AS yang menemuinya bahwa ia ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Washington. Ia mengisyaratkan sejumlah pesan bersahabat kepada para pejabat Amerika, seperti mengukuhkan perjanjian militer dengan Israel dan mendukung perluasan *Operation Provide Comfort* untuk melindungi wilayah Kurdi di Irak. Ia menegaskan bahwa ia ingin membina hubungan yang bersahabat dengan Amerika Serikat, dengan mengatakan, “Turki dan Amerika selalu berteman dan mereka akan senantiasa tetap bersahabat.”⁶¹ Sudah tentu, Refah membutuhkan dukungan AS di banyak bidang, dan program sosialnya tak mungkin tercapai tanpa bantuan berlanjut dari IMF dan Bank Dunia yang didominasi Amerika.⁶² Ketergantungan Turki pada pasar dan keuangan Barat untuk membiayai pembangunannya menggeser secara dramatis hubungan luar negerinya. Jelas sekali bahwa tak ada pasar seperti Eropa dan Amerika Serikat yang menawarkan potensi semacam itu bagi Turki.⁶³

Seperti sudah disebut, tak lama setelah berkuasa, Erbakan menghentikan retorik anti-Barat dan anti-Israelnya; ia melanjutkan perjanjian militer dengan Israel; dan ia mendukung perluasan *Operation Provide Comfort* setelah Amerika Serikat menjanjikan imbalan bahwa ia tak akan merestui pembentukan sebuah negara merdeka Kurdi di Irak. Kendati Erbakan mendapat sejumlah kecil konsesi dari Amerika Serikat, dukungannya pada *Provide Comfort* menunjukkan bahwa, jika menyangkut masalah serius,

kaum elit Turki, baik yang sekular maupun yang religius, selalu siap melayani tawaran Washington. Meski sebagian komentator AS mengkritik taktik negosiasi Erbakan yang sinikal, seorang diplomat Barat memohon untuk membedakan: “Erbakan telah membuktikan diri sebagai seorang perunding Oriental yang mahir. Dia tahu... nilai dari apa yang sedang ia tawarkan — sebuah kehadiran militer dan pengaruh politik di Teluk yang tak akan ditolak oleh AS.”⁶⁴

Sesudah pertemuan pertamanya dengan Erbakan pada pertengahan 1996, Tarnoff berkata bahwa ia telah melihat bahwa sang perdana menteri berkomitmen untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam semua masalah yang penting bagi kepentingan AS selama beberapa puluh tahun terakhir: “Dalam semua pembicaraan, kami memperoleh suatu persetujuan untuk merespon semua kebutuhan kerja sama keamanan kami.”⁶⁵ Erbakan memegang janjinya. Ketika Amerika Serikat menyerang Irak pada September 1996 setelah Irak menantang syarat-syarat gencatan-senjata yang diterapkan oleh PBB pada 1991, Erbakan menolak untuk mengecam tindakan AS dan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam mengapalkan dan kemudian menerbangkan ribuan pembangkang Irak di utara Irak melewati perbatasan Turki. Dengan berbuat begitu, Erbakan membiarkan dirinya terbuka bagi hamburan kritik dari para pendukung Islamis di dalam negeri, yang tak setuju pada Islam “lunak” Refah. Sebuah koran Istanbul memuat karikatur bergambar Erbakan sedang memakai peci Yahudi (*yarmulke*) dan membawa sebuah bintang Yahudi dan seutas tali yang disusun untuk menyerupai bendera Amerika.⁶⁶

Prioritas-prioritas kebijakan luar negeri Turki tetaplah banyak persamaannya dengan di masa sebelum Erbakan menduduki jabatan. Setelah berkuasa, ia segera menampakkan langkah di jalur tradisional pemerintahan Turki dalam hampir semua masalah penting dan jelas mengingkari semua janji kampanyenya. Seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Gul: “Tak gampang menempuh langkah radikal dalam hubungan internasional. Sebab realitas-

realitas terbentang menghadang Anda. Kebijakan luar negeri dan hubungan internasional menuntut realisme.”⁶⁷ Maka tuduhan tentang bergesernya kebijakan luar negeri Turki lebih berkenaan dengan gayanya ketimbang pada substansinya. Kunjungan Erbakan ke Iran dan Libya merupakan contoh kasusnya.

Pada Agustus 1996, Erbakan membikin kaget Washington dengan mengunjungi Iran, berlawanan dengan peringatan AS, hanya beberapa hari setelah Clinton menandatangani undang-undang “antiterorisme” guna mencegah perusahaan-perusahaan asing berinvestasi lebih dari US\$40 juta setahun dalam sektor minyak dan gas di Iran. Erbakan juga menandatangani transaksi gas senilai US\$23 miliar dengan Teheran. Namun, sama sekali tidak melakukan perubahan radikal dalam orientasi Ankara, kunjungan Erbakan ke Iran dan bertransaksi dengannya didukung oleh elit penguasa sekular yang sejak lama punya kepentingan komersial.⁶⁸

Demikian pula, kunjungannya pada Oktober ke Libya — yang membuahkan petaka dan nyaris membelah koalisi kekuasaannya — dan juga ke negara-negara Muslim lainnya harus dilihat sebagai diversifikasi kepentingan ekonomi, ketimbang sebagai kelahiran sebuah blok perdagangan Islam. Mengingat penerimaan pasca-pemilihannya terhadap hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan Israel, Erbakan merasa perlu memainkan kartu Muslim untuk menjaga kredibilitasnya di kalangan pengikutnya.⁶⁹

Amerika Serikat mengungkapkan “kerisauan yang sangat serius” terhadap kedekatan antara sekutu NATO-nya dengan Iran dan Libya. Departemen Luar Negeri memperingatkan Erbakan agar berhenti mengemukakan pernyataan-pernyataan yang “layak dikeluhkan” pada Amerika Serikat: “Kalau ada negara, khususnya sahabat-sahabat Amerika Serikat, seperti Turki, mempertimbangkan untuk menormalisasi atau memperlakukan atas dasar kesetaraan negara-negara seperti Libya, tentu saja kami merasa prihatin.... Terserah pada para sekutu untuk menjadi sekutu yang baik dan untuk mengerti bahwa Anda tidak bisa datang dan me-

milih tempat-tempat kunjungan di mana Anda akan mendukung kami atau tidak mendukung.”⁷⁰ Sejumlah pemimpin Kongres kemudian menekan Menteri Luar Negeri Warren Christopher untuk mencegah Turki dari menandatangani perjanjian dengan Iran atau menerapkan sanksi pada Ankara.⁷¹

Perlu diingat bahwa pada 1994, mantan perdana menteri Ciller mengunjungi Libya dengan hanya sedikit teriakan dari Amerika Serikat. Perjanjian gas Turki dengan Iran juga sudah dirundingkan dengan dukungan Ciller pada 1995, ketika ia masih menjabat perdana menteri. Dalam konteks ini, tanggapan AS atas kunjungan Erbakan ke Iran dan Libya merupakan indikasi tentang mendalamnya keraguan dan kecurigaan di kalangan pejabat AS tentang ke arah mana Turki akan digiring oleh Refah. Namun demikian, respon diplomatik Amerika Serikat yang tegang itu tidak disertai dengan tindakan keras terhadap pemerintahan berbasis Islamis tersebut. Departemen Luar Negeri bahkan mengungkapkan pengertian bahwa Turki memang membutuhkan gas alam Iran. Para petinggi Amerika juga menekankan bahwa penandatanganan Erbakan dalam perjanjian gas dengan Iran itu tidak akan merusak hubungan antara Washington dan Ankara.⁷²

Hubungan AS dengan pemerintahan pimpinan Islamis itu pun tetap mulus, meski sejumlah ketegangan — yang sesekali tecermin dalam pernyataan-pernyataan publik oleh Washington dan Ankara — tetap ada antara kedua mitra itu. Sumber-sumber gesekan ini antara lain masalah Cyprus (dan hubungan Yunani-Turki pada umumnya); terkait dengan Iran; isu Kurdi yang tampak tak terpecahkan; dan kritik Kongres terhadap catatan HAM.⁷³ Namun, kebanyakan dari pokok-pokok perselisihan ini sudah mencuat sebelum Refah berkuasa. Maka Amerika Serikat memilih untuk tidak menentang pemerintahan berbasis Islamis ini dan menghindari perang kata terbuka dengan Ankara. Para pejabat AS bahkan mengakui dan memuji upaya-upaya “positif” yang dilakukan oleh pemerintahan Erbakan untuk memperbaiki kondisi HAM di Turki.⁷⁴

Pendekatan Washington yang bernuansa juga terlihat jelas dalam pengumuman Departemen Luar Negeri bahwa ia akan mengupayakan suatu “dialog pribadi” dengan Erbakan.⁷⁵ Menurut seorang pejabat senior AS, duta besar Amerika untuk Turki diberi wewenang besar untuk mengupayakan dialog dengan Erbakan tentang rentang permasalahan yang luas. Diplomat AS ini menekankan bahwa pendekatan Amerika bersifat pragmatis dan menghindarkan kecaman-kecaman berlandaskan agama atau budaya terhadap Islamisme.⁷⁶ Semua pihak “harus saling menghormati peran, kapabilitas dan nilai-nilai masing-masing,” kata Asisten Menteri Alan Larson.⁷⁷

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan subtil dan kompleksnya pendekatan Washington terhadap pemerintahan berbasis Islamis di Ankara itu. Para pejabat Amerika lebih percaya pada institusi-institusi Turki ketimbang terhadap lembaga-lembaga Aljazair dan Mesir. Dalam situasi genting, elit kebijakan luar negeri AS bisa mengandalkan militer Turki untuk bertindak dan mematahkan perubahan-perubahan radikal yang diterapkan oleh Refah. Jenderal-jenderal Turki sangat menguasai seni intervensi dalam politik domestik, dan mereka sudah menunjukkan kepia-waian dalam menggunakan kekuatan untuk menjinakkan dan menghukum para penantang yang berbahaya. Dengan kata lain, Amerika Serikat bersandar pada militer Turki untuk menjaga tatanan dan kemapanan kebijakan luar negeri Ankara. Penting pula dicatat bahwa di mata Amerika, Erbakan terbukti jauh lebih kooperatif dan pragmatis segera setelah ia menduduki jabatannya. Sang perdana menteri memperlihatkan penghormatan terhadap kepentingan keamanan Washington, khususnya menyangkut Irak dan Israel. Meski para pejabat AS tak pernah sepenuhnya percaya pada pemerintahan pimpinan Islamis itu, mereka mampu menjalin hubungan yang lugas dengannya.

Serangan Final Militer dan Tersingkirnya Erbakan

Bagaimanapun, kaum militer Turki tak puas dengan realisme

baru Erbakan. Barisan militer memandang konfrontasi antara kekuatan-kekuatan sekular dan religius sebagai pertarungan “antara hidup dan mati” bagi Turki.⁷⁸ Tambahan pula, seiring memuncaknya pertarungan politik, nafsu militer pun melebar. Didorong oleh tentara, seorang jaksa senior melontarkan dakwaan pada pertengahan 1996 untuk membekukan Refah atas dasar bahwa partai ini membahayakan landasan pokok sekularisme dan merangsang “suasana perang saudara.”⁷⁹ Sebenarnya, keasyikan militer pada peran aktifnya dalam politik kali ini berbeda kualitasnya dari perilakunya di masa lalu. Walau sejak pembentukan Turki modern tentara telah melibatkan diri dalam politik, secara terbuka maupun rahasia, penampilannya tetap tak mencolok dan memainkan peran yang subtil dan kompleks. Pada awal 1990an, tentara mengungkapkan kejengkelannya secara terbuka dan berperan seperti semua partai lainnya, dan dengan demikian menyibakkan ambisi-ambisi politiknya serta kekuatan dan kelemahan-kelemahan inherennya. Antara 1960 dan 1980, militer menggulingkan tiga pemerintahan terpilih. Tapi sebuah kudeta terbuka tak lagi bisa dilakukan pada 1990an karena membesarnya kekuatan Islamis dan berubahnya lingkungan dunia.⁸⁰

Eropa dan Amerika Serikat pun menentang aksi kudeta. Amerika Serikat memberi isyarat pada jenderal-jenderal Turki tentang bahayanya memotong proses politik dengan kekerasan. Para pejabat Amerika mengeluarkan peringatan-peringatan rahasia dan secara pribadi memberitahu jenderal-jenderal Turki bahwa aliansi NATO akan sangat sulit menoleransi sebuah rezim yang dipimpin militer. Di tengah memuncaknya pertarungan antara militer dan pemerintahan berbasis Islamis itu, Menteri Luar Negeri Madeleine Albright menekankan bahwa “perubahan seperti apapun yang dipikirkan orang, mereka [harus mengupayakannya] dalam konteks demokrasi,” dan bahwa kekuasaan sipil Turki merupakan bagian penting dari demokrasi. Albright menyebut pula bahwa seluruh enam belas anggota NATO dipimpin oleh penguasa sipil — sebuah pesan yang jelas menentang kudeta militer. Pada saat sama, Albright mengimbangi pesannya kepada kelompok militer

dengan menyatakan bahwa sangat penting bagi Turki untuk tetap menjadi negara demokrasi sekular.⁸¹

Amerika Serikat berusaha keras menyeimbangkan pendiriannya dengan menapak di jalur yang pas antara kedua faksi yang berbenturan itu — kaum militer sekularis dan pemerintahan berbasis Islamis. Di satu sisi, Amerika Serikat ingin para jenderal itu menjaga Erbakan agar ia tetap di jalurnya guna mencegahnya menggeser kebijakan tradisional Turki dari garis pro-Barat. Di sisi lain, para pejabat Amerika mengkhawatiri dampak-dampak sebuah kudeta militer pada stabilitas politik jangka-panjang Turki. Pemerintah AS merasa bahwa ia telah mendapat banyak pelajaran berharga dari kasus Aljazair, dan ia enggan merestui atau memberi kesan mendukung aksi militer Ankara. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika akan memberi sanksi terhadap tindakan militer di Ankara, juru bicara Departemen Luar Negeri memberikan jawaban yang mengungkapkan dilema Washington: “Jelas, militer punya peran yang harus dimainkan dalam kehidupan politik di Turki, jika Anda lihat konstitusi Turki dan menengok sejarah Turki. Tapi kami percaya pada demokrasi sekular. Itulah landasan kebijakan kami. Kami sebenarnya percaya bahwa bangsa Turki punya kekuatan mental yang besar, sehingga institusi-institusi demokrasinya berhasil selamat dari krisis-krisis di masa lalu.”⁸²

Karena semua alasan ini, barisan militer harus melakonkan permainan politik itu dengan memakai semua alat penekan sejenis kudeta, termasuk ancaman implisit untuk menggunakan kekerasan. Barisan jenderal Turki bersama para sekutu sekular mereka “menggunakan perbandingan dengan Iran dan militansi Islam untuk memikat sekutu-sekutu Barat mereka tentang gentingnya situasi.”⁸³ Memasuki tahun 1997, jenderal-jenderal itu mempertahankan tekanan mereka dan merancang sebuah “kudeta sipil” yang akan membubarkan koalisi dalam pemerintahan.⁸⁴ Menanggapi tekanan militer ini, Ciller mengancam bahwa partainya akan mundur dari koalisi jika ia tak segera dijadikan perdana menteri. Pada Juni 1997 Erbakan menyerah pada tekanan militer tersebut

dan mengundurkan diri setelah hampir setahun berkuasa.⁸⁵

Barisan jenderal dan para sekutu sekular mereka puas karena telah menyelamatkan negara dari fundamentalisme dan memastikan bahwa Turki tidak akan lagi terancam menjadi “Iran baru” atau “Aljazair baru.” Tapi di beberapa sudut Turki dan Amerika Serikat, muncul pertanyaan-pertanyaan risau tentang apakah “kudeta lunak” yang dirancang oleh militer itu bijaksana. Bukanlah barisan tentara itu, dengan secara implisit memakai ancaman kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan pimpinan Islamis tersebut, menganut garis serupa dengan kebijakan mendiang Shah Iran dan, yang lebih mutakhir, militer Aljazair? Tidakkah dengan begitu militer sebenarnya mendorong arus-utama Islamis bergerak di bawah tanah, dan dengan demikian menyajikan landasan bagi kesulitan-kesulitan yang lebih serius di masa depan?⁸⁶

Seperti diduga, dan dalam membela kubu militer, Presiden Demirel meminta Mesut Yilmaz, seorang tokoh kanan-tengah, untuk membentuk pemerintahan baru. Setelah dibentuknya pada akhir Juni 1997, Yilmaz berkata bahwa ia akan mengakhiri tuntas eksperimen kekuasaan Islam selama setahun di Turki. Tindakan pertamanya adalah mengusulkan, dan sukses memperoleh persetujuan parlemen, undang-undang yang meningkatkan kewajiban pendidikan sekular dari lima menjadi delapan tahun, dengan akibat berupa ditutupnya seksi pengajaran pendidikan Islam di sekolah menengah. Barisan jenderal bersama sekutu-sekutu mereka juga mengencangkan upaya terpadu untuk melarang Refah dari keterlibatan dalam proses politik.⁸⁷ Pada November 1998 upaya mereka membuahkan hasil ketika mahkamah agung Turki menyerah pada tekanan militer dan melarang Refah dari semua bentuk partisipasi dalam proses politik.

Meski Departemen Luar Negeri menegaskan komitmennya pada demokrasi sekular di Turki, ia tak melontarkan sepatah kata pun dukungan pada pemerintahan yang terpilih secara konstitusional atau mengkritik taktik-taktik militer yang agresif. Para pejabat Amerikak boleh jadi gembira menyaksikan akhir pertarung-

an di Ankara. Sekali lagi militer membuktikan diri sebagai pengawal negara Kemalis beserta kebijakan luar negerinya yang pro-Barat. Golongan Islamis disingkirkan dari ikhtiar mereka untuk menyeimbangkan hubungan Ankara dengan kekuatan-kekuaran Barat dan negara-negara Muslim. Turki tetaplah terpatok kokoh dalam orbit Amerika. Kendati para perumus kebijakan Amerika tidak bersikap panik ataupun menempuh langkah keras guna memojokkan pemerintahan berbasis Islamis itu, mereka nyaris tak menyetujui atau merasa nyaman dengan eksperimen baru dan tak terduga ini.

Secara keseluruhan, kecurigaan dan kecemasan mewarnai persepsi dan pandangan Amerika terhadap ideologi dan kebijakan Refah, terutama ketika Erbakan tampak menantang kepentingan-kepentingan keamanan Amerika di Teluk Persia dan Timur Tengah. Kendati demikian, para pejabat AS tak membiarkan kecemasan ini sampai mengganggu dan merusak hubungan sekutu mereka di NATO ini. Patut pula dipuji bahwa mereka mau belajar bagaimana hidup berdampingan dengan pemerintahan pimpinan Refah dengan memprakarsai dialog tingkat tinggi dengan Ankara. Pendekatan AS terhadap Islamis Turki ditandai dengan akomodasi, bukan konfrontasi. Hasilnya, Amerika dan pemerintahan berbasis Islamis itu sama-sama menghindari perang kata dan juga mempertahankan hubungan yang tepat. Dalam arti ini, dan sebagai langkah pertama, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Refah mungkin bisa dijadikan model untuk diterapkan pada kasus-kasus lain di mana kaum Islamis berpartisipasi dalam proses politik.

Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?

Seberapa nyatakah dan apakah kaum Islamis memang merupakan ancaman di Turki? Akankah Islamis tumbuh cukup kuat untuk memulihkan sebuah negara Islam yang dijalankan menurut hukum Islam (*Syariah*)? Para ahli Turki sepakat bahwa ada banyak rintangan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Ankara.

Kita bisa mulai dari survei-survei publik yang menunjukkan bahwa meskipun rakyat Turki itu religius, mereka sama sekali tidak fanatik. Pada sebuah survei 1986, hanya 7 persen dari sampel nasional yang setuju dengan pernyataan bahwa Turki harus dijalankan dengan Syariah. Bagi mayoritas kelas-menengah perkotaan, agama juga merupakan urusan pribadi. Jajak pendapat lain di tahun 1995 mengungkapkan bahwa dua per tiga rakyat Turki mendukung hubungan erat dengan Barat. Dengan kata lain, tidak ada dukungan rakyat yang kuat bagi pembentukan negara Islam ataupun perubahan kualitatif kebijakan luar negeri Turki.⁸⁸

Golongan Islamis paham perasaan publik ini dan bersikap sejalan dengannya. Meski sebagian pemimpin Partai Refah mengatakan bahwa sebuah negara yang didasarkan pada Syariah “adalah dimungkinkan secara teoretis,” mereka menekankan harapan untuk menyusun sebuah masyarakat Muslim dan bukan sebuah negara Islam. Erbakan menegaskan bahwa Turki bukanlah Aljazair ataupun Iran, dan Refah akan selalu tunduk pada kemauan rakyat karena penghormatannya pada pluralisme. Kaum militan Islamis yang menentang negara demokrasi sekular hanyalah minoritas kecil di kalangan Islamis. Mayoritas Islamis cenderung mengupayakan cara-cara damai dalam meraih tujuan-tujuan mereka.⁸⁹

Selanjutnya, Islam di Turki itu beragam dan tak memusat. Jauh dari monolitik, golongan Islamis “terpilah di sepanjang garis-garis liberal, kiri, dan fundamentalis skriptural.”⁹⁰ Arus utama Islamis Turki jauh lebih terbuka terhadap tekanan politik ketimbang rekan-rekan mereka di negeri-negeri lain, karena watak pluralis politik Turki. Turki telah terbukti kebal terhadap militansi Islam dari luar, seperti varian-varian Arab dan Persia. Islamis di Turki merupakan produk dari kondisi material dan historis yang berbeda. Karena itu, sebuah jalan Islam bagi Turki mungkin hanya berupa pengakuan atas peran historis Turki dan penemuan kembali akar-akar Islam di Turki, dengan sekadar semangat pemulihan tradisi Islam yang telah diabaikan atau ditolak di masa silam.⁹¹

Lebih jauh lagi, Islam Turki mempertahankan inti pokok na-

sionalisme dan kenegaraan (*statism*) Turki. Islamis Turki tidak menganggap ada pertentangan antara menjadi Muslim dan memiliki keterikatan dengan negara sekular Kemalis, dan memandang keduanya sebagai bagian integral dari identitas nasional. Sekularisasi telah mewarnai identitas dan praktik-praktik kaum Islamis baru itu. Sebuah survei 1994 mengindikasikan bahwa hanya 7 persen pemilih Refah yang memilih partai itu terutama karena ia merupakan partai Islam. Seperti rekan-rekan mereka di dunia Arab dan Iran, kaum Islamis Turki menerima sains dan teknologi Barat seraya menampilkan nilai-nilai budayanya — dan juga model-model modern negara-bangsa yang sentralistis dan birokratis.⁹²

Tangan Erbakan pun terikat oleh dua realitas politik. Pertama, koalisinya dengan Ciller menimbulkan rintangan-rintangan pada pemerintahan gabungan mereka. Pada sejumlah kesempatan Ciller berhasil memoderasi politik Erbakan. Kedua, kubu militer merupakan pembendung utama bagi pembentukan sebuah negara Islam di Turki. Kaum Islamis sangat menyadari fakta ini dan bertindak sesuai dengannya. Sesungguhnya, golongan Islamis “secara berangsur mengubah sikapnya dari antirezim ke prorezim.”⁹³ Dalam hal ini pengalaman singkat Partai Refah duduk di tampuk kekuasaan sangat mencolok. Inklusi dan partisipasi dalam proses politik menbuahkan moderasi. Lihatlah, kaum Islamis membuktikan diri bersikap pragmatis dalam menghadapi realitas-realitas politik. Ketika berkuasa, Refah bekerja dalam kerangka politik pluralis.⁹⁴

Militansi Islamis dapat mengancam tatanan yang ada jika agama yang dipolitisasi menjadi sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan di kalangan kaum miskin, yang jumlahnya berlipat ganda sejak 1980an. Ancaman nyata terhadap negara Kemalis bukan berasal dari Islam politik, tapi dari perubahan pesat kondisi sosial-ekonomi dan perkotaan di Turki dan dari berlanjutnya perang terhadap pemberontakan suku Kurdi. Maka, semangat Islam untuk memasuki proses politik akan melemah seiring hapusnya kondisi-kondisi yang telah membangkitkannya — ketim-

pangan sosial, eksploitasi, dan penindasan politik. Gelora Islamis lebih didasarkan atas kejengkelan rakyat terhadap tatanan yang ada ketimbang pada tumbuhnya religiusitas ataupun ketidakpuasan total terhadap negara sekular itu.⁹⁵

Rekomendasi Kebijakan

Dalam konteks ini, Amerika Serikat bisa sangat efektif dalam mendorong elit sekular Turki untuk membidik penyebab-penyebab nyata di balik kemarahan dan protes-protes banyak warga Turki. Yang pertama dan utama, pemerintahan AS perlu mengingatkan para jenderal Turki tentang keharusan memecahkan masalah-masalah akut negara itu, khususnya isu Kurdi, dengan cara-cara yang sejalan dengan aturan konstitusi. Meski Amerika Serikat mengungkapkan dengan jelas pilihannya berupa solusi politik dalam krisis antara kubu militer dan pemerintahan berbasis Islamis tersebut, ia ternyata masih merestui peran tentara dalam proses politik. Amerika Serikat mengakui mandat militer dengan secara terbuka memuji posisinya yang mutlak dan pejabat AS yang berkunjung ke Ankara mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah jenderal Turki. Para petinggi Amerika tampak percaya membuta pada kemampuan militer dalam menjaga negara sekular Kemalis itu dan juga dalam mengawal kepentingan-kepentingan strategis AS. Fakta ini menjelaskan kenapa Washington enggan menekan tentara agar menghormati demokrasi.

Berbeda dari negara-negara Eropa yang menekankan perlunya memperkuat dan mengonsolidasi sebuah rezim yang liberal dan demokratis di Ankara, Amerika Serikat bersedia menoleransi kediktatoran keras di dunia Muslim demi kepentingan stabilitas. Para petinggi kebijakan Amerika memuji tiga kudeta — pada 1960, 1971, dan 1980 — dengan penuh pengertian dan bahkan kepuasan. Faktanya, hubungan AS-Turki mulus dan serasi belaka selama berlangsungnya intervensi-intervensi militer itu.⁹⁶

Dengan segelintir perkecualian, Amerika Serikat umumnya

mau mengorbankan prinsip-prinsip hak azasi manusia di Turki di depan altar pertimbangan-pertimbangan strategis.⁹⁷

Para pejabat Amerika dan pakar kebijakan tak cukup lantang dalam mengkritik catatan buruk HAM Turki. Kendati laporan-laporan tahunan HAM Departemen Luar Negeri mengecam keras pelanggaran-pelanggaran di Turki, pelbagai pemerintahan AS rupanya tetap berusaha merasionalisasi tindakan-tindakan Ankara yang bersimbah darah itu dengan mengalihkan perhatian ke aksi-aksi teror Partai Kurdi (PKK). Para diplomat Amerika mengatakan bahwa mereka tidak mau mengkritik Ankara secara terbuka karena cara terbaik untuk mencegah negeri itu dari merangkul fundamentalisme Islam adalah sesegera mungkin mengintegrasikannya ke dalam Uni Eropa.⁹⁸ Bahkan sekalipun Departemen Luar Negeri mengecam Turki atas pelanggaran-pelanggaran berat HAM, pelbagai kebijakan pemerintahan-pemerintahan AS jarang mengikuti temuan-temuan Departemen Luar Negeri ini; mereka juga bertahan dari imbauan-imbauan Kongres untuk menunda bantuan ekonomi sebelum Ankara memperbaiki catatan HAM-nya dengan alasan keamanan nasional. Di setiap negara, Washington menyingkirkan ketaksukaannya pada pelanggaran-pelanggaran HAM demi menjalin hubungan yang baik.⁹⁹

Ambivalensi dan sikap plinplan Washington dalam masalah HAM dan demokrasi telah sangat merusak reputasi dan prestise Amerika, dan juga menciderai konstitusionalisme di Turki; mereka juga telah mengirim sinyal-sinyal yang salah pada barisan tentara dan mengucilkan arus utama Islamis yang bermain dengan menaati aturan-aturan permainan politik. Kaum Islamis, bukan hanya di Turki, telah sering mengungkapkan pernyataan politik yang tepat di dalam negeri dengan mengecam Amerika Serikat untuk inkonsistensi dan standar gandanya ketika ia berurusan dengan dunia Muslim.

Diplomasi Amerika harus menunjukkan keprihatinan-keprihatinan yang sama terhadap pelanggaran HAM dan perilaku demokratis di masyarakat-masyarakat Muslim seperti dilakukan-

nya terhadap tempat-tempat lain. Karena institusi-institusinya yang sudah kokoh, Turki merupakan tempat ideal bagi para pejabat Amerika untuk mengamalkan apa yang mereka khotbahkan tentang demokratisasi. Amerika Serikat tidak boleh hanya mempedulikan hal-hal yang lebih “prinsipel” dan menyatakan bersikap konsisten tentang HAM, tapi juga harus menetapkan syarat bagi kelanjutan bantuan ekonomi dan militer bagi Turki berupa penghormatan rezim itu terhadap hak-hak azasi dan kebebasan warganegara. Kepentingan-kepentingan vital Amerika akan lebih terjamin dalam jangka panjang dengan pendirian yang tegas dan konsisten terhadap isu HAM dan liberalisasi.

Amerika Serikat juga bisa menyumbang pada stabilitas jangka-panjang di Turki dengan mengisyaratkan bantuannya bagi pembangunan ekonomi yang cepat, adil, dan seimbang. Terdapat kaitan yang kuat antara marjinalisasi ekonomi, alienasi, dan pertumbuhan Islamis yang terus membesar di seluruh dunia Muslim dalam dua puluh tahun terakhir. Kaum Islamis Turki telah berhasil dalam mengeksploitasi ketimpangan sosial-ekonomi yang makin parah dan membiarkannya korupsi politik di sebuah negara di mana 60 persen penduduknya berusia di bawah 20 tahun dan empat dari lima kaum mudanya sedang mencari pekerjaan. Sukses Refah dalam pemilu diraihnya bukan semata karena kecerdikannya memanipulasi agama, tapi juga karena pesannya ekonominya yang membesarkan hati.¹⁰⁰

Amerika Serikat perlu mendorong sekutu-sekutu sekularnya untuk peduli pada isu-isu genting yang telah lama diabaikan. Ini meliputi derita kaum miskin perkotaan, kekacauan sosial di kota-kota Turki yang besar dan padat, korupsi, dan hegemoni militeristik atas negara Kemalis itu. Pertarungan politik di Turki tak dapat dimenangkan kecuali dengan mendorong lebih jauh demokratisasi, sehingga rakyat merasa mereka bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Realitas ini mengharuskan dibukanya proses pembuatan keputusan politik maupun ekonomi. Dengan meminjamkan kekuatan politik dan bantuan luar negerinya bagi upaya-up-

aya semacam ini, para pembuat kebijakan Amerika akan memberikan sumbangan berharga bagi penguatan dan konsolidasi lebih lanjut demokrasi dan harmoni sosial di Turki.

Makin jauh dari terpecahkan, krisis politik Turki malah kian berlarut. Intimidasi dan eksklusi sedang meradikalisasi kalangan Islam politik Turki. Protes-protes politik oleh golongan Islamis telah berubah menjadi pertumpahan darah. Potensi untuk ledakan kekerasan akan terus ada selama negara Kemalis yang didominasi militer ini tetap bersikeras “mengharamkan Islam” dan menyingkirkan para politisi arus utama Islamis seperti Erbakan. Topangan konstitusional dan prosedur-prosedur demokratis agaknya akan semakin meningkatkan peran militer dalam politik Turki dan kian merumitkan ketegangan-ketegangan sosial-politik dan ekonomi.

Alih-alih berusaha membungkam Islam politik, Turki perlu mengakui bahwa Islam merupakan sebuah komponen penting dalam warisan budayanya yang memetik nilai-nilainya dari Timur dan Barat, ketimbang terus sangat bergantung pada Amerika Serikat. AS akan membantu dirinya sendiri serta para sekutunya dengan menjaga jarak tertentu dalam hubungannya; dengan mengingatkan elit sekular Turki untuk sungguh-sungguh menangani masalah-masalah politik dan sosial-ekonomi; dan dengan menghargai kebutuhan untuk menyajikan sebuah wajah Muslim di negeri pluralis yang berorientasi Barat itu.❧

Catatan

1. Jenny B. White, “Pragmatists or Ideologues? Turkey’s Welfare Party in Power,” *Current History* (Januari 1997), h. 27; Kelly Couturier, “Short Lived Coalition Out in Turkey,” *Washington Post*, 7 Juni 1996; Sami Kohen, “Turkey’s Shaky Coalition Keeps Islamic Party Out,” *Christian Science Monitor*, 4 Maret 1996.
2. Sami Zubaida, “Turkish Islam and National Identity,” *Middle East Report* (April/Juni 1996), h. 11-13.
3. “Focus-Islam and Turkey: The Regional Impact,” *Bulletin of Regional Cooperation in Middle East* 6, no. 2 (Summer 1997), h. 11.
4. “U.S.-Turkey Leadership in the Post-Cold War World,” ceramah di

- Universitas Bilkent, Ankara, Turki, 11 April 1995, *AS Department of State Dispatch*, 24 April 1995, h. 360.
5. "The United States and Turkey," sambutan pembukaan dalam sebuah konferensi pers oleh President Clinton dan Perdana Menteri Turki Ciller, Washington, DC, 15 Oktober 1995, *Department of State Dispatch*, 1 November 1993, h. 767.
6. Patricia Carley, *Turkey's Role in Middle East: A Conference Report* (Washington, DC: United States Institute of Peace, 1995), latar belakang. "Delicate Relations with Turkey," editorial, *New York Times*, 8 Maret 1997.
7. Feroz Ahmad, *The Making of Modern Turkey* (London: Routledge, 1993), h. 206-7. Simon V. Mayall, *Turkey: Thwarted Ambition*, Paper 56 (Washington, DC: National Defense University, Januari 1997), h. 92; William Safire, "Sending in Marines," *New York Times*, 14 Februari 1980.
8. Dikutip dalam Henry J. Barkey, ed., *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in Middle East* (Washington, DC: United Institute of Peace Press, 1996), h. vii.
9. Colonel W. Mountcastle, "Forward," dalam Stephen J. Blank, Stephen C. Pelletiere, dan William T. Johnson, *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs* (N.C.: Strategic Studies Institute, US Army War College, 1993), h. v; Talbott, "U.S.-Turkey Leadership in the Post-Cold War World," h. 362.
10. *A National Security Strategy for a New Century* (Washington, DC: White House, Mei 1997), h. 22; Talbott, "U.S.Turkey Leadership in the Post-Cold War World," h. 360; Graham E. Fuller dan Ian O. Lesser, *Central Asia: The New Geopolitics* (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1992. h. vi. John Pomfret, "Turkey's Identity Crisis," *Washington Post*, 17 April 1995. Para pejabat sekular Turki memanfaatkan kekuatiran terhadap kekacauan regional dan bangkitnya kekuatan regligius global baru guna meningkatkan status Ankara sebagai makelar. Lihat John Darnton, "Discontent Lihattthes in Once-Stable Turkey," *New York Times*, 2 Maret 1995.
11. *A National Security Strategy for a New Century*, h. 22.
12. "The President's News Conference with Prime Minister Tansu Ciller of Turkey, 15 October 1993," *Weekly Compilation of Presidential Documents*, US Government Printing Office, 18 Oktober 1993, h. 1750. Lihat juga Bruce Kuniholm, "Turkey and the West," *Foreign Affairs* (Spring 1991), h. 47.
13. "Enhanced US-Turkey Partnership," ringkasan briefing pers, Gedung

- Putih, 11 Februari 1992, *Department of State Dispatch*, 17 Februari 1992, h. 109; Talbott, "US-Turkey Leadership in the PostCold War World," h. 362.
14. "US-Turkey Leadership in the Post-Cold War World," h. 360; Morton I. Abramowitz, "Dateline Ankara: Turkey After Ozal," *Foreign Policy*, no. 91 (Summer 1993), h. 179-80; Duncan L. Clarke dan Daniel O'Connor, "U.S. Base Rights Payments After the Cold War," *Orbis* 37, no. 3 (Summer 1993), h. 451; "Turkey: The Emerging Market Bridging East and West," *Foreign Affairs* 75, no. 3 (Mei/Juni 1996); Philip Robins, "Between Sentiment and Self-Interest: Turkey's Policy Toward Azerbaijan and the Central Asian States," *Middle East Journal* 47, no. 4 (Autumn 1993), h. 595-6.
 15. "Building US-Turkey Economic Cooperation," ceramah Asisten Menteri Alan H. Larson di Dewan Bisnis AS-Turki, 20 Februari 1997, dimuat dalam *Turkey Times*, 1 Maret 1997; "U.S.-Turkey Leadership in the Post-Cold War World," h. 360; buletin *Turkey Confidential* (London, Maret 1992). "Turkey: The Emerging Market Bridging East and West."
 16. "Turkey: The Emerging Market Bridging East and West"; Carley, *Turkey's Role in Middle East*, bab 3; "Turkey, Star of Islam," *Economist*, 14 Desember 1991.
 17. "U.S.-Turkey Leadership in the Post-Cold War World," h. 362; Mountcastle, "Forward," dalam Blank, Pelletiere, dan Johnson, *Turkey's Strategic Position*, h. v.
 18. Ziya Onis, "Turkey in the Post-Cold War Era: In Search of Identity," *Middle East Journal* 49, no. 1 (Winter 1995), h. 49; Abramowitz, "Dateline Ankara," h. 166; Carley, *Turkey's Role in Middle East*, h. 12; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 223.
 19. Carley, *Turkey's Role in Middle East, Introduction*; Onis, "Turkey in the Post-Cold War Era," h. 48-9; Abramowitz, "Dateline Ankara," h. 165; Paul B. Henze, *Turkey: Toward the Twenty-First Century* (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1994), h. 31; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 226.
 20. Carley, *Turkey's Role in Middle East*, h. 25-6; Stephen C. Pelletiere, "Turkey and Amerika Serikat in Middle East: The Kurdish Connection," dalam Blank, Pelletiere, dan Johnson, *Turkey's Strategic Position*, h. 38-9; Malik Mufti, "Daring and Caution in Turkey Foreign Policy," makalah tak diterbitkan, disampaikan di Middle East Studies Association, Providence, RI, November 1996, h. 23; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 201.
 21. Chanan Naveh, "Foreign Policy of Regional Powers in the 1990s: The

- Cases of Israel and Turkey,” makalah tak diterbitkan, disampaikan dalam 35th Annual Convention of the International Studies Association, Washington, DC, 29-31 April-Mei 1994, h. 21; Abramowitz, “Dateline Ankara,” h. 166, 179; Mayall, *Turkey*, h. 78; Mufti, “Daring and Caution in Turkey Foreign Policy,” h. 21; Clarke dan O’Connor, “U.S. Base Rights Payments After the Cold War,” h. 453-4.
22. *Turkey Confidential*, buletin No. 16 (London, Februari 1991), h. 1; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 200.
23. Dilaporkan oleh *Reuters*, 18 November 1993 dan 13 Desember 1994.
24. Mayall, *Turkey*, h. 79-80. Abramowitz, “Dateline Ankara,” h. 179; “America Arms Turkey’s Repression,” editorial *New York Times*, 17 Oktober 1995; Eric Rouleau, “Turkey, Beyond Ataturk,” *Foreign Policy*, no. 91 (Summer 1993), h. 93-4; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 200, 226; Kurkcii, “The Crisis of the Turkey State,” *Middle East Report* (April/Juni 1996), h. 3; Naveh, “Foreign Policy of Regional Powers,” h. 21.
25. Dikutip dalam *US Department of State Dispatch*, 20 Mei 1995, h. 215. Lihat juga Darnton, “Discontent Seethes in Once-Stable Turkey.”
26. “U.S.-Turkey Leadership in the Post-Cold War World,” h. 360. Lihat juga Sabri, Sayari, “Turkey: The Changing European Security Environment and the Gulf Crisis,” *Middle East Journal* 46, no. 1 (Winter 1992), h. 13; *Turkey Confidential*, (London, Januari 1991), h. 1.
27. Naveh, “Foreign Policy of Regional Powers in the 1990s,” h. 9; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 225-6; Sami Kohen, “Regional Conflicts on AS-Turkey Agenda,” *Christian Science Monitor*, 18 Oktober 1993.
28. Naveh, “Foreign Policy of Regional Powers,” h. 12; Carley, *Turkey’s Role in Middle East*, h. 20; Eric Rouleau, “The Challenges to Turkey,” *Foreign Affairs* 72, no. 5 (November/Desember 1993), h. 114; Scott Peterson, “Mideast Balance of Power Shifts as an ‘Axis’ Is Born,” *Christian Science Monitor*, 29 Agustus 1996.
29. Mufti, “Daring and Caution in Turkey Foreign Policy,” h. 7; Sami Kohen, “Who Runs Turkey?” *Christian Science Monitor*, 9 Mei 1997.
30. Alan Makovsky, “Israeli-Turkey Relations: A Turkey ‘Periphery Strategy?’” dalam Barkey, ed., *Reluctant Neighbor*, h. 153-7, 170; Muhammad Muslih, “Syria and Turkey: Uneasy Relations,” dalam *ibid.*, h. 113-29; Murhaf Jouejati, “Water Politics as High Politics: The Case of Turkey and Syria,” dalam *ibid.*, h. 131-46; Kelly Couturier, “Turkey, Israel Launch a Military Partnership,” *Washington Post*, 16 April 1996; Peterson, “Mideast Balance of Power Shifts as an ‘Axis’ Is

- Born”; Hugh Pope, “Attempt on Demirel’s Life,” *Middle East International*, 24 Mei 1996, h. 13; Robert Olson, “The Turkey-Israel Agreement and the Kurdish Question,” *MEI*, 24 Mei 1996, h. 18; Olson, “An Israeli-Kurdish Conflict?” *MEI*, 5 Juli 1996, h. 17; Olson, “PKK the Target,” *MEI*, 21 Februari 1997, h. 14.
31. Naveh, “Foreign Policy of Regional Powers,” h. 12; Carley, *Turkey’s Role in Middle East*, bab 3; Robert Olson, “The Turkey-Israel Agreement and the Kurdish Question,” h. 18; Hugh Pope, “Turkey’s Generals Behind the Israel Axis,” *MEI* (16 Mei 1996), h. 3.
 32. Robert Olson, “Israel and Turkey — Consolidating Relations,” *Middle East International*, 4 April 1997, h. 16-17; “Amerika Serikat and Turkey,” sambutan pembukaan dalam konferensi pers oleh Presiden Clinton dan Perdana Menteri Turki Ciller, h. 767; Mayall, *Turkey*, h. 92; Rouleau, “Turkey Beyond Ataturk,” h. 84-5, dan “The Challenges to Turkey,” h. 116; Abramowitz, “Dateline Ankara,” h. 180; Darnton, “Discontent Seethes in Once-Stable Turkey.”
 33. Rouleau, “Turkey Beyond Ataturk,” h. 85; Steven Greenhouse, “U.S. Support for Turks’ Anti-Kurd Campaign Dims,” *New York Times*, 29 Maret 1995.
 34. Jim Hoagland, “Political Con Game in Turkey,” *Washington Post*, 11 Juli 1996; Rouleau, “Turkey Beyond Ataturk,” h. 97; Robert Marquand, “Religious Right Elbows Way onto World’s Political Stage,” *Christian Science Monitor*, 13 Juni 1996; D. Migdalovitz, “Turkey’s Unfolding Political Crisis,” dalam *Congressional Research Service Report for Congress* (Washington, DC: The Library of Congress, 11 April 1997), h. 1.
 35. *Turkey Daily News*, 10 Juli 1996; Mayall, *Turkey*, h. 11.
 36. Hoagland, “Political Con Game in Turkey”; Couturier, “Islamic Leader Wins Approval Vote in Turkey,” *Washington Post*, 9 Juli 1996; Lally Weymouth, “Saddam’s New Friend,” *Washington Post*, 30 Juli 1996.
 37. Weymouth, “Saddam’s New Friend.”
 38. Migdalovitz, “Turkey’s Unfolding Political Crisis,” h. 21.
 39. Zeynep Alemdar, “Turk Military on Anti-Islam Offense,” *Associated Press*, 10 Juni 1997.
 40. Zeyno Baram, “Too Little Stability in Turkey,” *Christian Science Monitor*, 18 Februari 1997; Lihat juga Migdalovitz, “Turkey’s Unfolding Political Crisis,” h. 21.
 41. Zeynep Alemdar, “Turkey to Combat Islam Influence,” *Associated Press*, 11 Juni 1997; Sami Kohen, “Who Runs Turkey?”

42. White, "Pragmatists or Ideologues?" h. 30; Rouleau, "Turkey Beyond Ataturk," h. 83; Celestine Bohlen, "European Parliament Admits Turkey to Its New Customs Union," *New York Times*, 14 Desember 1995; Shada Islam, "Cautious EU Response," *Middle East International*, 5 Juli 1996, h. 12, dan "Turkey and NATO," *Middle East International*, 21 Februari 1997, h. 15-16.
43. Ronnie Margulies dan Ergin Yildizoglu, "The Political Uses of Islam in Turkey," *Middle East Report* (Juli/Agustus 1988), h. 12-13. Ungkapan peringatan ini serupa benar dengan yang digunakan oleh sebagian pejabat pemerintahan Reagan. Wakil Presiden Dan Quayle membandingkan "kebangkitan Komunisme, kebangkitan Nazisme [dengan] kebangkitan fundamentalisme radikal Islam."
44. Mehmet Ali Birand dalam Carley, *Turkey's Role in Middle East*. Lihat juga Metin Heper, "Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation," *Middle East Journal* 51, no. 1 (Winter 1997), h. 42; Scott Peterson, "Turkey's Army Keeps the Faith at Bay," *Christian Science Monitor*, 9 April 1996; Hugh Pope, "The Erbakan Whirlwind Sweeps Through Turkey," *Middle East International*, 19 Juli 1996, h. 3; Henze, *Turkey*, h. 7.
45. "The United States and Turkey," sambutan pembukaan dalam konferensi pers oleh Presiden Clinton dan Perdana Menteri Turki Ciller, h. 768. Blank, Pelletiere, dan Johnson, *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs*, h. 2; Baram, "Too Little Stability in Turkey"; Couturier, "Conservative Islamic Prime Minister Named in Turkey," *Washington Post*, 29 Juni 1996; Stephen Kinzer, "Turkey Ex-Premier's Comeback Hits a Snag," *New York Times*, 2 Juli 1997, "The Islamis Who Runs Turkey, Delicately," *New York Times*, Minggu, 23 Februari 1997, seksi majalah, dan "Brussels Meeting Dims Turkey's Bid to Join European Union," *New York Times*, 11 Maret 1997; Weymouth, "Saddam's New Friend"; Sami Kohen, "Secular Turks Hope to Check Nation's First Islamis Leader," *Christian Science Monitor*, 1 Juli 1996; Darnton, "Discontent Seethes in Once-Stable Turkey"; Richard C. Hottelet, "Turkey, NATO's Eastern Hinge, Is Far from Breaking Loose," *Christian Science Monitor*, 19 November 1996.
46. "Washington and the Kurds," 4 April 1995.
47. Migdalovitz, "Turkey's Unfolding Political Crisis," h. 21; Kinzer, "The Islamis Who Runs Turkey, Delicately," h. 301.
48. Lally Weymouth, "Turkey: The Search for a Deal," *Washington Post*, 27 Februari 1997. Lihat juga Alan Makovsky, "Erbakan on the Ropes," *Policywatch*, no. 239 (diterbitkan oleh Washington Institute for Near East Policy, 12 Maret 1997), dan "Assessing the Intentions

- of Turkey's Refah Party," *Muslim Politics Report*, diterbitkan oleh Council on Foreign Relations, New York, November/Desember 1996, h. 5. Makovsky, "How to Deal with Erbakan," *Middle East Quarterly* 4, no. 1 (Maret 1997), h. 6-7.
49. Weymouth, "Saddam's New Friend." Lihat juga Weymouth, "Turkey: An Anti-Western Tilt?" *Washington Post*, 23 Januari 1996; Hoagland, "Political Con Game in Turkey"; Makovsky, "How to Deal with Erbakan," h. 7-8.
 50. Hoagland, "Political Con Game in Turkey."
 51. Weymouth, "Saddam's New Friend." Lihat juga Weymouth, "Turkey: The Search for a Deal"; Kelly Couturier, "Conservative Islamic Prime Minister Named in Turkey"; Sami Kohen, "Islamic Party Jumps Out Front," *Christian Science Monitor*, 29 November 1995.
 52. Sami Kohen, "Turkey's Islamis Gain Strength in Local Vote," *Christian Science Monitor*, 30 Maret 1994, dan "Islamic Party Win Worsens Turkey's East vs. West Woes," *Christian Science Monitor*, 27 Desember 1995; Kelly Couturier, "Pro-Islamic Party Leads in Turkey," *Washington Post*, 25 Desember 1995, dan "Turkey Parties Vow Coalition to Keep Islamis Out of Power," *Washington Post*, 26 Desember 1995; Celestine Bohlen, "Turkey Army in New Battle," *New York Times*, 30 Maret 1996.
 53. Kohen, "Turkey's Military Tries Political Moves to Squelch Premier's Islamic Ambition," *Christian Science Monitor*, 3 Juli 1997; Kinzer, "Turkey Generals Raise Pressure on Premier," *New York Times*, 13 Juni 1997, dan "Turkey's Prime Minister, About to Step Down, Defends Record," *New York Times*, 17 Juni 1997; Nicole Pope, "Turbulent Times," *Middle East International*, 7 Maret 1997, h. 19.
 54. "The Islamist Who Runs Turkey, Delicately," h. 28, dan "Islam and Liberty: Struggles in Two Lands," *New York Times*, 22 Juni 1997.
 55. Baram, "Too Little Stability in Turkey"; Stephen Kinzer, "Turks' Chief Surprisingly Silent on Iraq," *New York Times*, 14 September 1996, "Turks March in Campaign to Preserve Secularism," *New York Times*, 16 Februari 1997, "The Islamist Who Runs Turkey"; h. 31, dan "Turkey's Islamic Leaders Vow to Keep Secularism," *New York Times*, 14 Maret 1997; Hugh Hope, "The New Middle: Turks Add their Voices to Contest of Generals and Fundamentalists," *Wall Street Journal*, 14 Maret 1997; Kelly Couturier, "Islamic Leader Wins Approval Vote In Turkey"; Nicole Pope, "Turkey Goes Back into Iraq," *Middle East International*, 30 Mei 1997, h. 4; James M. Dorsey, "With Friends Like Qaddafi, Islamis Erbakan Doesn't Need Enemies," *Washington Report on Middle East Affairs* (November/Desember 1996), h. 37.

56. Zubaida, "Turkey Islam and National Identity," h. 10; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 43-4.
57. Kinzer, "The Islamist Who Runs Turkey, Delicately"; Yalman Onaran, "Muslim Leaders Pledge Cooperation," *Associated Press*, 15 Juni 1997. Onaran, "Muslim Nations Meet at Summit," *Associated Press*, 14 Juni 1997.
58. "Turkey Is a European Country," wawancara dengan Menteri Luar Negeri Abdullah Gul, *Turkey Times*, 1 Maret 1997. Lihat juga Kohen, "To US, Turk Leader's Tour Goes to all the Wrong Places," *Christian Science Monitor*, 3 Oktober 1996; Margulies dan Yildizoglu, "The Political Uses of Islam in Turkey," h. 14-15; Henry J. Barkey, "Turkey Politics after the Elections," makalah tak diterbitkan, disampaikan di Commission on Security and Cooperation in Europe, 25 Januari 1996, h. 2-3, 5; Kelly Couturier, "Conservative Islamic Prime Minister Named in Turkey."
59. "Delicate Relations with Turkey," *New York Times* editorial; Sami Kohen, "Pro-Islamic Premier Stays in Power, but the Future of Turkey Still Murky," *Christian Science Monitor*, 10 Oktober 1997; Scott Peterson, "Turkey Ties Trade Knot with Iran, Sparks Alarm," *Christian Science Monitor*, 24 Desember 1996.
60. Rouleau, "Turkey Beyond Atatürk," h. 79.
61. Sami Kohen, "In a First Test, Pro-Islamic Turkey Stays the Course on Western Ties," *Christian Science Monitor*, 26 Juli 1996; Stephen Kinzer, "Meeting U.S. Envoy, Turkey Premier Takes Pro-Arab Stance," *New York Times*, 3 Juli 1996; Kelly Couturier, "New Turkey Leader's Islamic vision Clouded by Political Reality," *Washington Post*, 25 Juli 1996.
62. Mayall, Turkey, h. 112.
63. Ibid., h. 110, 112; Mufti, "Daring and Caution in Turkey Foreign Policy," h. 17, 21-2; White, "Pragmatists or Ideologues?" h. 27-8.
64. Weymouth, "Saddam's New Friend." Lihat juga Kohen, "In a First Test, Pro-Islamic Turkey Stays the Course on Western Ties," and "To US, Turk Leader's Tour Goes to All the Wrong Places"; Hottelet, "Turkey, NATO's Eastern Hinge, Is Far from Breaking Loose"; Nicole Pope, "Long Live Provide Comfort," *Middle East International*, 10 Januari 1997, h. 12.
65. Dikutip dalam Kinzer, "Meeting US Envoy, Turkey Premier Takes Pro Arab Stance."
66. Ibid; Kinzer, "Turks' Chief Surprisingly Silent on Iraq"; Thomas W. Lippman, "U.S. Prepared to Airlift Dissidents," *Washington Post*, 12

- September 1996; Hugh Pope, "The Erbakan Whirlwind Sweeps Through Turkey," h. 4.
67. "Turkey Is a European Country." Lihat juga "Focus — Islam and Turkey," h. 11.
 68. James M. Dorsey, "Erbakan Striking Balance Between Islamic Neighbors and Secular Army," *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Oktober 1996), h. 28; Aydin Nurhan, "Turkey and Middle Eastern Stability, h. 131-2; Kelly Couturier, "Ignoring US, Turkey and Iran Sign Trade Accords," *Washington Post*, 22 Desember 1996; Kohen, "ProIslamic Premier Stays in Power, but the Future of Turkey Still Murky."
 69. "U.S. Criticizes Turkey Leader for Libya Trip and Trade Deal," *New York Times*, 8 Oktober 1996; Kohen, "Who Runs Turkey?" dan "Dollars vs. Diplomacy: Turks Differ with US," *Christian Science Monitor*, 25 Mei 1995, and "To US, Turk Leader's Tour Goes to All the Wrong Places"; Kelly Couturier, "Turk's Libya Trip Causes Political Crisis at Home," *Washington Post*, 8 Oktober 1996; Thomas W. Lippman, "Turkey Official Cautions US on Cyprus Pressure," *Washington Post*, 1 Maret 1997; Dorsey, "With Friends Like Qaddafi, Islamis Erbakan Doesn't Need Enemies," h. 37. Peterson, "Mideast Balance of Power Shifts"; "Fehim Adak: Erbakan Seeks Cooperation with America," wawancara, dalam *Middle East Quarterly* (Maret 1997), h. 66.
 70. Kinzer, "Turkey Sending Envoy to US to Clear up 'Misunderstanding,'" *New York Times*, 27 Desember 1996, dan "The Islamist Who Runs Turkey, Delicately," h. 31; Couturier, "Ignoring US, Turkey and Iran Sign Trade Accords"; Kohen, "To US, Turk Leader's Tour Goes to All the Wrong Places"; "U.S. Criticizes Turkey Leader for Libya Trip and Trade Deal."
 71. Shirl McArthur, "Turkey Defies Iran Sanctions," *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Oktober 1996), h. 21.
 72. Dorsey, "Erbakan Striking Balance Between Islamic Neighbors and Secular Army," h. 28; Migdalovitz, "Turkey's Unfolding Political Crisis," h. 21; Thomas W. Lippman, "Turkey Official Cautions US on Cyprus Pressure"; M. M. Ali, "Refah Foreign Affairs Expert: Turkey's Outreach to Muslim States 'Realistic,'" *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (April/Mei 1997), h. 15; Stephen Kinzer, "Turkey Sending Envoy to US to Clear up 'Misunderstanding'; Kohen, "ProIslamic Premier Stays in Power, but the Future of Turkey Still Murky"; Richard C. Hottel, "Turkey, NATO's Eastern Hinge, Is Far from Breaking Loose."
 73. Barkey, "Turkey Politics after the Elections," h. 5-6; Lippman,

“Turkey Official Cautions US on Cyprus Pressure.”

74. Jonathan Ewing, “Long Hunger Strike in Turkey Speeds Prison Reforms,” *Christian Science Monitor*, 30 Juli 1996.
75. *Reuters*, 9 Oktober 1996.
76. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan tertutup sekelompok pembuat kebijakan dan pakar di New York pada September 1997.
77. Larson, “Building US-Turkey Economic Cooperation.”
78. Yalman Onaran, “Turkey’s Military Boycotts Islam,” *Associated Press*, 7 Juni 1997; Stephen Kinzer, “Turkey Generals Raise Pressure on Premier.”
79. “Turkey Prosecutor Seeks to Outlaw Islamic Party,” *New York Times*, 22 Mei 1997; David Swanson, “Secular Turkey Teeters over Plan to Close Islamic Schools,” *Christian Science Monitor*, 12 Juni 1997. Nicole Pope, “Turkey Goes Back into Iraq,” h. 4.
80. Sami Kohen, “With Islam’s Crescent Rising over Turkey, the Army Howls,” *Christian Science Monitor*, 2 Juni 1997.
81. *US Department of State Daily Briefing*, Reuters, 4 Maret 1997. Lihat Barry Schwed, “Albright Backs Secular Turkey,” *Associated Press*, 13 Juni 1997; Kinzer, “Turkey Generals Raise Pressure on Premier”; Susan Frazer, “Turkey Islamic Leader Cedes Power,” *Associated Press*, 13 Juni 1997; Nicole Pope, “Turkey: Erbakan Versus the Generals,” *Middle East International*, 2 Mei 1997, h. 3.
82. Schwed, “Albright Backs Secular Turkey.” Dalam editorial, media utama AS memberi kesan pada para pejabat Amerika tentang perlunya mengambil tindakan tegas dan jelas terhadap aksi militer ini. Misalnya, *New York Times* mendesak Amerika Serikat memberi tahu dengan gamblang pada para jenderal Turki itu bahwa AS mendukung pemerintahan sipil dan akan berkewajiban untuk menjauhkan diri dari setiap rezim yang didominasi militer; ia memperingatkan para pejabat AS bahwa aksi militer itu malah bisa meradikalisasi Islamis Turki dan memberi kesan yang salah pada kawan maupun lawan; Amerika Serikat harus mendukung solusi demokratis atas masalah-masalah Turki, bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam editorial lain, *Times* menuduh kubu militer menyangar-menyangar dakwaan terhadap pemerintahan berbasis Islamis itu untuk “membungkam oposisi.” Lihat “Outlawing Islam,” *New York Times*, 19 Juni 1997. Lihat juga “Turkey’s Meddlesome Generals,” editorial, 25 Maret 1997, dan “Military Meddling in Turkey,” editorial, 14 Juni 1997. Demikian juga, *Washington Post* memperingatkan para perumus kebijakan di Washington yang bersimpati pada taktik-

taktik agresif kubu militer, sebab demokrasi jalan-pintas sekarang ini sangat mungkin hanya akan memperparah masalah. "What Turkey Needs," dimuat ulang dalam *International Herald Tribune*, 21-2 Juni 1997.

83. Alemdar, "Turkey to Combat Islam Influence"; Kinzer, "Turkey Generals Raise Pressure on Premier," dan "In Defense of Secularism, Turkey Army Warns Rulers," *New York Times*, 2 Maret 1997; Kohen, "With Islam's Crescent Rising over Turkey, the Army Howls"; Pomfret, "Turkey's Identity Crisis."
84. Kohen, "Turkey's Military Tries Political Moves to Squelch Premier's Islamic Ambition."
85. Suzan Frazer, "Turkey Islamic Leader Cedes Power"; Kohen, "Secular Turks Hope to Check Nation's First Islamic Leader."
86. Banyak orang Turki yang juga mengecam militer karena memakai mandatnya secara berlebihan dan bertindak seperti partai politik partisan, sehingga akan sangat merusak demokrasi konstitusional. Bahkan Asosiasi Pengusaha dan Industrialis Turki, sebuah benteng penguasa, mengeluarkan laporan yang mengimbau demokratisasi yang lebih cepat dan mendorong penguatan kontrol sipil terhadap militer dengan menghapus NSC. Lihat Stephen Kinzer, "Islam and Liberty: Struggles in Two Lands," dan "Pro-Islamic Premier Steps Down in Turkey Under Army Pressure," *New York Times*, 19 Juni 1997; Nicole Pope, "The Crisis Drags on," *Middle East International*, 13 Juni 1997, h. 10; James M. Dorsey, "Turkey Military 'Advice' Reins in Islamis Erbakan Government," *Washington Report on Middle East Affairs* (Juni/Juli 1997), h. 93.
87. Stephen Kinzer, "A Centrist in Turkey Gets Chance to Govern," *New York Times*, dimuat ulang dalam *International Herald Tribune*, 21-2 Juni 1997, dan "Turkey's Islamic Rule Ends as Secular Leader Takes Over," *New York Times*, 1 Juli 1997.
88. Ilter Turan, "Religion and Political Culture in Turkey," dalam Richard Tapper, ed., *Islam in Modern Turkey* (London: I. B. Tauris, 1991), h. 55; Jeremy Salt, "Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey," *Middle East Studies* 31, no. 1 (Januari 1995), h. 22; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 35, 43. Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 223; Henze, *Turkey*, h. 7.
89. Sayari, "Turkey's Islamist Challenge," *Middle East Quarterly* 3, no. 3 (September 1996), h. 37; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 38, 43; Henze, *Turkey*, h. v, 8; Barkey, "Turkey Politics After the Elections," h. 2-3; Rouleau, "Turkey Beyond Ataturk," h. 79.
90. Salt, "Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey," h.

- 21; Henze, *Turkey*, h. 7; Nilufer Gole, "Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites," *Middle East Journal* 51, no. 1 (Winter 1997), h. 53; Sencer Ayata, "Patronage, Party, and State: The Politicalization of Islam in Turkey," *Middle East Journal* 50, no. 1 (Januari 1995), h. 55; Margulies dan Yildizoglu, "The Political Uses of Islam in Turkey," h. 17; White, "Pragmatists or Ideologues?" h. 30; Sayari, "Turkey's Islamis Challenge," h. 39.
91. Graham E. Fuller, "Alternative Turkey Roles in the Future Middle East," dalam Barkey, ed., *Reluctant Neighbor*, h. 212-15; Margulies dan Yildizoglu, "The Political Uses of Islam in Turkey," h. 13; Zubaida, "Turkey Islam and National Identity," h. 15; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 35, 42; Carley, *Turkey's Role in Middle East*, h. 24; Kohen, "Islamic Party Jumps Out Front"; Kinzer, "Islam and Liberty."
92. Ergun Ozbudun, "Islam and Politics in Modern Turkey," dalam Barbara Freyer Stowasser, ed., *The Islamic Impulse* (Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1987), h. 144; James Brown, "Islamic Fundamentalism and Turkey," *Journal of Political and Military Sociology* 16 (Fall, 1988), h. 239; Ayata, "Patronage, Party, and State," h. 56; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 33, 45; Gole, "Secularism and Islamism in Turkey," h. 48; Feroz Ahmad, "Politics and Islam in Modern Turkey," *Middle Eastern Studies* 27, no. 1 (Januari 1991), h. 17; Richard Tapper dan Nancy Tapper, "Thank God We're Secular! Aspects of Fundamentalism in a Turkey Town," dalam Lionel Caplan, ed., *Studies in Religious Fundamentalism* (London: Macmillan, 1987), h. 51-78; Zubaida, "Turkey Islam and National Identity," h. 10, 14; Pomfret, "Turkey's Identity Crisis."
93. Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 33; Stephen Kinzer, "Once the Hope of Secular Turks, Ex-Leader Is Now Widely Reviled," *New York Times*, 6 April 1997; Kohen, "To US, Turk Leaders' Tour Goes to All the Wrong Places," dan "Pro-Islamic Premier Stays in Power, but the Future of Turkey Still Murky."
94. Ahmad, "Politics and Islam in Modern Turkey," h. 8-9. Zubaida, "Turkey Islam and National Identity," h. 10. Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 43-4; White, "Pragmatists or Ideologues?" h. 30; Kohen, "Islamic Party Jumps Out Front"; James M. Dorsey, "Troubled Turkey Getting Seventh Government in Two Years," *Washington Report on Middle East Affairs* (Juli 1996), h. 58.
95. Abramowitz, "Dateline Ankara," h. 177-8; Onis, "Turkey in the PostCold War Era," h. 65; Colin Barraclough, "Roll Over Ataturk," *Middle East Insight* 11, no. 2 (Januari/Februari 1995), h. 21; Richard

- Cohen, "If Turkey Went the Way of Iran," *Washington Post*, 29 Juni 1995; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 22 3.
96. Steven Greenhouse, "Turk Sees Foray in Iraq Ending in Few Weeks," *New York Times*, 7 April 1995; Kinzer, "Europeans Shut the Door on Turkey's Membership in Union," *New York Times*, 27 Maret 1997; Paul B. Henze, *Turkey Democracy and the American Alliance* (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1993), h. 2; Barkey, "Turkey Politics after the Elections," h. 5; Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, h. 226, 315; Greenhouse, "U.S. Support for Turks' Anti-Kurd Campaign Dims."
 97. Transkrip konferensi pers, Asisten Menteri Luar Negeri Richard Holbrooke, Ankara, Turki, 21 Februari. 1995; Makovsky, "How to Deal with Erbakan," h. 8; Kohen, "Dollars vs. Diplomacy," dan "As Turkey Takes Slice of Iraq, US Nods but Neighbors Fret," *Christian Science Monitor*, 13 September 1996; "Turkey Crosses a Line," *New York Times* editorial, 25 Maret 1995; Nicole Pope, "Turkey Goes Back into Iraq," h. 4; "Turkey Forces Cross Border into Iraq to Attack Kurdish Guerrillas," *New York Times*, 15 Mei 1997.
 98. *East or West? Turkey Checks Its Compass*, Minority Staff Report for the US Senate Foreign Relations Committee, September 1995, (Washington, DC: US Government Printing Office, 1996), h. 3, 6; Greenhouse, "Turk Sees Foray in Iraq Ending in Few Weeks," dan "U.S. Support for Turks' Anti-Kurd Campaign Dims."
 99. Thomas W. Lippman, "State Dept. Human Rights Report Chastises Several US Allies." Misalnya, Departemen Luar Negeri membenarkan bahwa perlengkapan militer dari AS digunakan untuk memerangi PKK, dan selama itu terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Namun, Departemen Luar Negeri meluruskan pernyataannya dengan menyebutkan bahwa tak ada bukti yang mengukuhkan laporan-laporan tentang penganiayaan ataupun "pembunuhan-pembunuhan misterius" yang memakai peralatan Amerika. Lihat "Human Rights Abuses by Turkey Military and the Situation in Cyprus," laporan Departemen Luar Negeri, *US Department of State Dispatch*, 12 Juni 1995, h. 502. Penegasan ini terbantah oleh banyaknya bukti yang dikemukakan oleh para pengamat independen.
 100. Mehmet Yasar Geyikdag, *Political Parties in Turkey: The Role of Islam* (New York: Praeger, 1984), h. 119; Heper, "Islam and Democracy in Turkey," h. 36; Barkey, "Turkey Politics after the Elections," h. 23; White, "Pragmatists or Ideologues?" h. 26; Ahmad, "Politics and Islam in Modern Turkey," h. 16; Ayata, "Patronage, Party, and State," h. 52, 54; Zubaida, "Turkey Islam and National Identity," h. 11.

10

Kesimpulan



MESKI sangat banyak muncul pernyataan para pejabat Amerika, Amerika Serikat tidak punya kebijakan yang komprehensif dan koheren tentang peran Islam dalam proses politik. Pemikiran orang Amerika tentang kaum Islamis tidak diterjemahkan menjadi pedoman kebijakan yang konkret. Maka pernyataan-pernyataan Washington yang umum dan abstrak harus dilihat sebagai tipe ideal, sebab tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk mengoperasikan sebuah kebijakan yang jelas tentang kebangkitan Islam.

Ada tiga faktor penyebab kelangkaan kebijakan Amerika terhadap aktivis Islam. Pertama, baik pemerintahan Bush Sr. maupun Clinton — tak seorang pun pendahulu mereka yang pernah mengeluarkan pernyataan elaboratif tentang Islam — yang memiliki visi kebijakan luar negeri yang berjangkauan jauh dan lengkap. Kedua pemerintahan ini memang sempat memunculkan ide mengenai pembentukan sebuah dunia baru menurut citra Amerika. Namun, ketika menghadapi ongkos-ongkos persyaratannya, Presiden Bush dan Presiden Clinton menyingkirkan upaya-upaya ambisius mereka guna mengutamakan kebijakan-kebijakan mikro, pragmatis, dan selektif.

Clinton, terutama, tampak jauh lebih peduli pada politik “rendah” atau domestik, dan ia pada dasarnya melimpahkan perumus-

an kebijakan luar negeri pada sekelompok pilihan tim pembantu. Adapun politik “tinggi” (*“high” politics*), termasuk menyangkut Timur Tengah dan dunia Muslim yang lebih luas, jelas bukan minat Clinton. Lebih dari presiden-presiden mutakhir lainnya, Clinton tampak sangat sensitif pada politik etnis internal, dan menjalankan kebijakan luar negeri atas dasar *ad hoc* dan jangka-pendek, yang sering dimaksudkan untuk memuaskan konstituen-konstituen domestik tertentu. Akibatnya adalah bahwa kebijakan Amerika menjadi sangat reaktif terhadap krisis-krisis saat mereka tampil di panggung dunia. Pendekatan AS terhadap kebangkitan Islam merupakan contohnya.

Hal kedua ialah bahwa bekas Menteri-menteri Luar Negeri James Baker, Warren Christopher, dan Madeleine Albright, yang tak membuat konseptualisasi, lebih suka menangani masalah-masalah kebijakan luar negeri yang gamblang dan konkret. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengutip ceramah Christopher, “Open Forum,” yang menyatakan kepada para personel Departemen bahwa ia suka menangani problem-problem secara terpisah — perundingan-perundingan tentang Terusan Panama, tribunal untuk Iran, dan perundingan perdamaian Arab-Israel, dan bukan mengenai isu-isu abstrak.¹

Gaya diplomatik Baker, Christopher, dan Albright menjelaskan keputusan-keputusan mereka dalam memperkuat pejabat lapis-tengah seperti Edward Djerejian, Robert Pelletreau, Martin Indyk, dan Mark Paris untuk menangani fenomena Islamis. Fakta ini menggambarkan pemikiran Washington yang inkremental dan sepotong-sepotong tentang Islamisme dan kelanjutan yang menandai pendekatan kebijakan pemerintahan-pemerintahan Bush dan Clinton tentang subjek ini. Kajian ini menunjukkan bahwa pidato Meridian House Djerejian telah dijadikan parameter besar kebijakan Amerika terhadap Islam politik.

Ketiga, para pejabat AS menyadari bahwa gerakan-gerakan Islam sama sekali tidak monolitik, sangat terbelah, dan bahwa agenda-agenda politik mereka terutama didorong oleh keadaan-

keadaan khusus dan unik di berbagai negara. Di sinilah letak ambivalensi pemerintahan Bush dan Clinton dalam menyusun suatu kebijakan universal tentang Islam politik. Mantan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat Pelletreau mengkritik para pengamat yang menganjurkan dirumuskannya kebijakan komprehensif AS yang meliputi seluruh dunia Muslim. Pelletreau menekankan bahwa Amerika Serikat tak memiliki kemewahan berupa perumusan sebuah kebijakan yang serba mencakup terhadap kaum Islamis, sebab “kita punya kepentingan-kepentingan yang harus kita tangani setiap hari dengan landasan real dan praktis.”² Para pejabat lainnya sepakat bahwa Amerika Serikat harus menangani Islamis atas dasar kasus per kasus, bukan pada tingkat abstrak; kebijakan ditetapkan dengan menganalisis retorik dan aksi kaum Islamis di setiap negara dan menimbang ancaman potensial mereka bagi kepentingan-kepentingan Amerika.³

Temuan Kajian Ini: Retorik

Sesungguhnya, pengkhususan — yakni menganalisis kebijakan-kebijakan aktual Washington terhadap negara dan gerakan-gerakan Islam — sangat penting guna memahami kebijakan Amerika terhadap Islam politik. Kajian ini, misalnya, menemukan inkonsistensi-inkonsistensi besar antara apa yang diucapkan para pejabat Amerika dan apa yang mereka lakukan mengenai peran Islam dalam proses politik. Salah satu temuan kajian ini ialah bahwa pernyataan-pernyataan AS tentang Islam politik, dengan sedikit perkecualian, berpijak kokoh di kubu akomodasionis. Secara khusus, wacana pemerintahan Bush dan Clinton mengarah pada upaya sadar untuk menjangkau kaum Muslim moderat. Keduanya mengajak kaum Muslim untuk “memperbarui penekanan pada nilai-nilai tradisional,” tak menyuarakan kekawatiran terhadap meningkatnya peran Islam dalam proses politik sepanjang ia tetap bersifat damai.

Kebijakan luar negeri Amerika, seperti ditekankan oleh para pejabat pemerintahan Bush dan Clinton, menunjukkan kemauan

untuk berdampingan dengan kaum Islamis yang menolak ekstremisme dan kekerasan dan bermain dengan aturan-aturan dalam negara-bangsa.

Meski beberapa pejabat AS merujuk pada pentingnya nilai-nilai dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Islamis, mereka terutama peduli pada orientasi kebijakan luar negeri Islamis, bukan dengan politik internal mereka. Dalam konteks ini, berakhirnya Perang Dingin tidak menimbulkan perubahan-perubahan substantif dalam kebijakan Timur Tengah Washington, yang masih sangat menekankan stabilitas dan keamanan serta hubungan ekonomi, ketimbang pada isu-isu demokrasi dan hak-hak azasi manusia.

Ini mengarah ke temuan lain kajian ini: Perhitungan-perhitungan keamanan kontemporer dan strategis-lah, bukan cuma kebudayaan, ideologi atau sejarah, yang tampak mempengaruhi pemikiran serta wacana pejabat dan publik AS tentang kebangkitan Islam. Meski beberapa pernyataan petinggi merujuk pada kebudayaan, mereka terutama menekankan ancaman-ancaman keamanan mutakhir yang terkait dengan bangkitnya Islam “ekstremis” bagi kepentingan-kepentingan vital Amerika. Karena, seperti dikatakan seorang pembuat kebijakan, baik Clinton maupun Bush pada dasarnya tak tertarik dengan Islam itu sendiri mereka lebih merisaukan potensi Islamis dalam merusak proses perdamaian Arab-Israel dan stabilitas rezim-rezim pro-Barat, gangguan terhadap akses minyak Barat pada minyak Teluk, pemilikan persenjataan nonkonvensional, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teroris. Pertimbangan-pertimbangan kultural boleh jadi mempengaruhi secara tak sadar pemikiran pribadi para petinggi Amerika tentang Islam politik, tapi hal ini hampir tak mencuat dalam pernyataan-pernyataan publik mereka.

Para perumus kebijakan Amerika telah menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sangat tak sepakat dengan penegasan-penegasan kubu konfrontasionalis bahwa aktivisme Islam telah menggantikan Komunisme Soviet sebagai ancaman baru bagi Barat.

Sambil sama sekali tak memandang kebangkitan Islam sebagai bagian dari sikap Jihad anti-Barat, para pejabat AS mengaitkan kebangkitan sentimen-sentimen Islam pada memburuknya kondisi-kondisi politik dan sosioekonomi. Mereka menolak tegas hipotesis benturan peradaban (*clash of civilizations*), dan sebaliknya malah menekankan peran unik Amerika Serikat sebagai jembatan antara pelbagai sistem spiritual. Pemerintahan Bush dan Clinton telah menjalankan kampanye *public-relations* yang amat baik untuk menghapus kekhawatiran-kekhawatiran umat Muslim terhadap mitos tentang konfrontasi yang telah menjadi populer di kalangan elit kebijakan luar negeri sejumlah negara tertentu.

Secara khusus, para pembantu senior Clinton, selain Presiden sendiri, Wakil Presiden, dan Ibu Negara, kerap memuji Islam dan menekankan hubungan keagamaan dan peradaban antara Islam dan dunia Barat. Secara keseluruhan, pernyataan-pernyataan Clinton menunjukkan kepekaan, realisme, dan kehati-hatian yang melegakan. Presiden Clinton melakukan sejumlah upaya untuk mendidik dan mensensitifkan dirinya tentang Islam. Pidatonya di Parlemen Yordania pada Oktober 1994 merupakan salah satu contohnya. Menurut seorang pejabat senior yang membantu menyusun pidato ini, Clinton ingin menyampaikan pesan yang tidak mendua guna meyakinkan kaum Muslim bahwa Amerika tidak menganut hipotesis benturan peradaban itu. Clinton dan pembantu-pembantu seniornya juga menyediakan waktu untuk menghapus keprihatinan dan kerisauan komunitas Muslim di Amerika Serikat dengan mengadakan pertemuan berkala dengan para wakilnya. Juga, lebih daripada semua presiden mutakhir lain, Clinton telah mengangkat seni politik etnis ke tataran baru. Hasilnya, komunitas Muslim-Amerika memetik manfaat, setidaknya di tingkat simbolis dan psikologis, dengan akhirnya menikmati sedikit perhatian dan pengakuan. Presiden Clinton patut mendapat penghargaan untuk hal ini.

Pernyataan-pernyataan pemerintahan Clinton tentang Islam politik jauh lebih maju, bernuansa, dan kompleks ketimbang pan-

dangan-pandangan sejumlah besar pembuat opini dan masyarakat luas pada umumnya. Secara keseluruhan, Bab 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa publik maupun elit kebijakan luar negeri memandang Islam politik sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu lokalnya dan mengimbau pembendungan atasnya. Dalam konteks ini, lembaga presiden beserta pelbagai lembaga eksekutifnya dapat memainkan peran penting dalam mendidik segenap warganegara Amerika tentang Islam dan umat Muslim. Sayangnya, hal yang sama tak dapat dikatakan menyangkut cabang legislatif (Kongres), yang pandangan sebagian anggotanya tentang Islamisme sejalan dengan publik dan elit kebijakan luar negeri. Sebaliknya, wacana tentang Islamisme yang disajikan oleh para petinggi dan mantan pejabat Amerika — dengan perkecualian sejumlah kecil pernyataan provokatif beberapa pembantu Presiden Reagan — dapatlah dengan baik digambarkan sebagai sensitif secara kultural dan tepat secara politik.

Temuan Kajian Ini: Kebijakan

Namun demikian, pentinglah untuk tetap menekankan lagi fakta bahwa pernyataan-pernyataan para petinggi AS tidak berperan sebagai sebuah pedoman untuk memahami kebijakan luar negeri Amerika terhadap aktivis Islam. Kebijakan-kebijakan aktual Amerika terhadap negara dan gerakan-gerakan Islam mengungkapkan suatu sisa ambivalensi, keraguan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Sebuah survei atas kasus per kasus, seperti yang dilakukan oleh kajian ini, menunjukkan bahwa Amerika Serikat merasa enggan untuk melibatkan kaum Islamis dalam suatu dialog yang bermakna. Pada beberapa kesempatan dan di sejumlah kecil tempat, Amerika Serikat mencoba menguji dengan menjalin kontak dengan kaum Islamis di Mesir dan Aljazair. Namun, Washington langsung menghentikan tegas kontak-kontak ini, karena tekanan sekutu-sekutu Timur Tengahnya. Amerika Serikat bukan hanya mendukung kawan-kawan tradisionalnya — dalam pertarungan mereka terhadap kaum Islamis — tapi juga kurang

berusaha meyakinkan mereka agar membuka gelanggang politik bagi kekuatan-kekuatan oposisi yang ada dan sah itu.

Dalam hal ini Mesir merupakan salah satu contoh. Setelah kontak-kontak singkat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir di awal 1990an, pemerintah AS segera menyetop hubungan rahasia dengan mereka ini pada pertengahan 1990an. Protes-protes Presiden Mubarak mendarat mulus di telinga Washington. Amerika Serikat tak ingin mengucilkan dan membahayakan rezim Mubarak, satu pemain terpenting dalam proses perdamaian Arab-Israel dan dalam stabilitas regional.

Amerika Serikat juga mengidap kecurigaan besar terhadap agenda revolusioner Ikhwanul Muslimin di dalam maupun di luar negeri. Di mata Amerika, Mubarak adalah penjudi yang jauh lebih aman dibanding kaum Islamis, yang dipandang sebagai asing dan tak terduga. Amerika Serikat tampak tidak mau mengambil risiko dengan suatu oposisi Islamis yang belum teruji. Hasilnya ialah bahwa Mubarak merasa punya kekuatan untuk mengebiri semua oposisi, Islamis maupun sekular, sehingga melanggengkan krisis legitimasi dan otoritas politik Mesir.

Orang Mesir memandang Amerika Serikat mendukung — dengan sengaja ataupun tidak — tindakan Mubarak dalam menggebu-gebu arus utama Ikhwanul Muslimin. Para petinggi Amerika menampik pendukungan terhadap cara-cara keras Mubarak; mereka juga menekankan bahwa mereka secara pribadi menyarani dia supaya memperluas ruang politik yang dapat mencakup kegiatan-kegiatan oposisi. Meski Amerika memberi Mesir bantuan luar negeri senilai lebih dari US\$ 30 miliar sejak 1975, diplomat-diplomat AS mengakui bahwa mereka hanya punya pengaruh kecil atas Mubarak dan, dengan demikian, hanya sedikit berpengaruh dalam mengubah perjalanan peristiwa di negeri itu. Punya pengaruh atau tidak, Amerika Serikat tidak dapat terus bungkam di depan publik di tengah pelanggaran berat rezim Mesir atas hak-hak azasi manusia, pembatasan partisipasi politik, dan penyempitan ruang politik.

Pada kasus Mesir, Amerika Serikat perlu menutup, atau setidaknya mempersempit, jurang antara retoriknya dan perilaku aktualnya. Mungkinkah pemerintah AS mempertimbangkan arus utama Ikhwanul Muslimin sebagai bagian dari oposisi yang sah? Dan jika demikian, tak perlukah Amerika Serikat memberi kesan pada rezim Mubarak, baik secara terbuka maupun pribadi, perlunya mengkooptasi Ikhwan ketimbang berusaha menindas mereka? Atau tidakkah pemerintah AS melihat manifestasi-manifestasi tertentu dari Islam yang berkuasa sebagai *ultimately inimical* bagi kepentingan-kepentingan vitalnya? Orang menduga bahwa Amerika Serikat memandang Ikhwan sebagai pengacau potensial yang bakal menggeser orientasi regional dan kebijakan-kebijakan luar negeri Mesir jika mereka meraih kekuasaan. Karena itu, tujuan strategis Washington adalah menolak legitimasi dan pengakuan atas Islamis dengan harapan negara Mesir akhirnya akan berhasil dalam menjinakkan dan membendung kebangkitan baru Islam sebagaimana telah ia lakukan di masa lalu.

Namun, penyempitan ruang politik yang sah mendorong sejumlah besar aktivis Islam bergerak di bawah tanah dan membuat pemerintah rentan terhadap kampanye teror kelompok-kelompok jihad. Penyertaan oposisi yang sah akan mengungkap kepaluan alasan keberadaan (*raison d'être*) kelompok-kelompok militan itu, dan dengan demikian akan membuat mereka terisolasi dan terdisintegrasi lebih jauh. Reputasi Al-Jamaah dan organisasi militer telah sangat melemah, akibat serangan-serangan brutalnya, yang telah mengalienasi opini publik di Mesir dan di dunia Muslim yang lebih luas, dan juga bagi keretakan pemerintah. Dengan membantu rezim Mubarak menuju pemulihan jembatan-jembatan yang patah ke oposisi yang sah, Amerika Serikat akan dapat meraih kepentingan-kepentingannya sendiri dan juga kepentingan sekutu strategisnya.

Tak seperti pendiriannya terhadap Mesir, pendekatan Washington terhadap krisis Aljazair jauh lebih kompleks dan penuh nuansa. Kendati pada mulanya pemerintahan Bush implisit men-

dukung penindasan militer terhadap kaum Islamis, ia kemudian mengambil sikap apresiatif yang peka dan berimbang dalam pertarungan kekuasaan internal di Aljazair. Pemerintah AS menjalin kontak-kontak rahasia dengan FIS dan menekan golongan garis-keras di tubuh militer untuk melanjutkan pemilu yang ditunda itu serta menerapkan pembaruan ekonomi dan politik yang nyata.

Pemerintah Clinton melangkah lebih jauh dengan membuat dukungannya pada rezim Aljazair bersyarat, yaitu sepanjang ada komitmen yang kuat pada rekonsiliasi dan pluralisme politik. Pernyataan-pernyataan kebijakan pemerintah tentang Aljazair juga penting, yaitu bahwa semuanya tak disertai dengan ukuran-ukuran konkret yang dapat meyakinkan pemerintah Aljazair tentang keseriusan Washington. Faktanya, seperti ditunjukkan dalam Bab 7, Amerika Serikat telah membantu rezim Aljazair tetap bertahan dengan membantunya menjadwalkan ulang utang-utangnya dan memberinya ratusan juta dolar dalam bentuk bantuan pertanian. Selain itu, Amerika Serikat bukan hanya menghentikan kontak-kontaknya dengan FIS pada 1995, tapi juga tampak meninggalkan FIS sama sekali dengan setidaknya menoleransi keputusan Zeroual untuk menutup pintu pembicaraan dengan FIS.⁴

Namun, supaya adil pada para perumus kebijakan Amerika, kita harus tekankan bahwa pengaruh AS di Aljazair sangatlah terbatas. Tidak seperti hubungannya dengan Mesir, Amerika Serikat nyaris tak punya program bantuan bilateral apapun dengan Aljir. Kelompok garis-keras militer pun jelas kurang menggubris tekanan yang dipancarkan dari Washington. Namun demikian, para pejabat AS telah bersikap konsisten dalam mengimbuai rezim Aljazair agar meliberalisasi dan mengintegrasikan oposisi non-kerasan ke dalam proses politik, termasuk sejumlah elemen FIS. Meski Amerika Serikat tak ingin melihat kelompok Islamis meraih kekuasaan di Aljir, AS mengungkapkan preferensinya — baik secara publik maupun pribadi — terhadap penyelesaian damai yang harus dipertimbangkan bagi kepentingan rezim Aljazair sendiri maupun kelompok utama oposisi.

Orang yang skeptis mungkin mengatakan bahwa Amerika Serikat dapat bersikap kritis dan kreatif di Aljazair, sebab yang terakhir ini bukan dilihat sebagai kepentingan vital yang strategis bagi AS sebagaimana Mesir. Tapi tetap saja bahwa pemerintahan Clinton tidak mendesak Prancis untuk membatasi dukungannya pada pemerintahan militer di Aljir, dan ia juga menempuh kebijakan independennya sendiri. Derajat perbedaan AS-Prancis mencuat sendiri sebagai benturan antara mendiang Presiden Prancis Francois Mitterand dan Presiden Clinton ketika mereka bertemu pada Juni 1995. Kendati pemerintahan Clinton telah menahan diri dari keterlibatan aktif dalam konflik Aljazair, ia toh sedikit mencoba mendorong rezim Zeroual agar mengupayakan perundingan. Dalam kasus Aljazair, Amerika Serikat telah menunjukkan kemauan untuk menerima partisipasi nonkekerasan kelompok Islamis dalam kekuasaan sepanjang mereka menerima aturan dan norma-norma masyarakat sipil dan internasional.

Tak seperti reaksi mereka terhadap situasi di Mesir dan Aljazair, para perumus kebijakan AS tidak panik ketika kelompok Islamis meraih kemenangan kecil dalam pemilu parlementer di Turki pada 1995. Semula Amerika Serikat cemas bahwa perdana menteri yang baru terpilih, Necmettin Erbakan, bakal mendorong negara yang secara tradisional sekular itu menjauh dari orientasi tradisional pro-Baratnya dan mengupayakan aliansi baru dan anti-Amerika dengan negeri-negeri Muslim radikal, khususnya Iran. Kerisauan para petinggi Amerika ini mengendur setelah Erbakan meyakinkan para pejabat AS yang mengunjunginya bahwa ia ingin menjalin hubungan yang lebih baik dan bersahabat dengan Amerika Serikat. Erbakan memegang kata-katanya. Segera setelah ia menduduki kekuasaan, ia mengurangi retorik anti-Barat dan anti-Israelnya; ia mempertahankan kesepakatan militer dengan Israel; dan ia mendukung perluasan *Operation Provide Comfort*.

Setelah diyakinkan oleh penghormatan Erbakan pada kepentingan-kepentingan strategisnya, Amerika Serikat mengimbalkannya dengan menempuh pendekatan yang pragmatis terhadap kehadiran

an Refah dalam kekuasaan. Mengabaikan saran sejumlah pejabat pelaksana di Departemen Luar Negeri, pemerintahan Clinton menjalin hubungan dengan Erbakan yang baru terpilih sebelum ia dilantik di depan Parlemen Turki. Jalur-jalur komunikasi dibiarkan terbuka dengan Erbakan sepanjang masa kekuasaannya yang singkat. Berbeda dari tanggapan risau mereka terhadap Islamis di tempat-tempat lain di Timur Tengah, para pejabat AS mengakui batas-batas inheren kelompok Islamis di Turki. Kemenangan elektoral kecil Refah tak memungkinkan kelompok Islamis ini membentuk pemerintahan sendirian. Koalisi Refah dengan Partai Jalan Sejati (TPP) berperan sebagai pengimbang bagi ambisi-ambisi kelompok pertama itu. Yang lebih penting di mata AS adalah fakta bahwa tentara tampak tegas dalam mencegah Islamis untuk menjalankan kekuasaan real.

Maka, hubungan AS dengan pemerintahan yang dipimpin golongan Islam itu lancar saja, meski tetap ada ketegangan antara Washington dan Ankara. Amerika Serikat memilih untuk tidak berlawanan atau menentang pemerintahan yang didominasi Islamis itu. Pendekatan Washington yang bernuansa terbukti dalam penentangannya terhadap kudeta oleh militer Turki. Para petinggi AS diam-diam mengeluarkan peringatan dan secara pribadi menyatakan kepada para jenderal Turki bahwa aliansi NATO akan sangat sulit untuk menoleransi sebuah rezim yang dipimpin militer. Amerika Serikat berusaha keras untuk menyeimbangkan pendiriannya dengan mencari jalur yang tepat di antara kedua faksi yang bertarung — militer dan pemerintahan pimpinan Islamis. Di satu pihak, Amerika Serikat ingin agar para jenderal membiarkan Erbakan berkuasa. Di sisi lain, para petinggi AS telah banyak belajar dari kasus Aljazair dan mengawatirkan dampak-dampak sebuah kudeta militer atas stabilitas politik jangka-panjang Turki.

Meski para pejabat AS tidak menempuh pendirian keras terhadap pemerintahan pimpinan Islamis, mereka nyaris tak menyetujui eksperimen baru dan tak bisa diduga ini. Secara keseluruhan, kecurigaan dan keraguan menandai persepsi-persepsi AS

terhadap ideologi dan kebijakan-kebijakan Refah, terutama ketika Erbakan tampak menantang kepentingan keamanan Amerika di Teluk dan Timur Tengah. Sebagai contoh, Departemen Luar Negeri tak menyatakan sepatah kata pun guna mendukung pemerintahan yang terpilih secara konstitusional itu ketika ia menghadapi taktik-taktik agresif militer. Jelas para pejabat Amerika merasa senang ketika militer berhasil memaksa Erbakan untuk mundur. Di mata AS, kelompok Islamis telah kalah dalam ikhtiar mereka untuk menyeimbangkan hubungan Ankara dengan kekuatan-kekuatan Barat dan negeri-negeri Muslim. Turki tetap tertanam kuat dalam orbit Amerika.

Bukannya bereaksi berlebihan terhadap naiknya Islamis ke kekuasaan, para pembuat kebijakan Amerika — dengan sikap yang tepat — belajar bagaimana hidup berdampingan dengan Erbakan dengan memulai suatu dialog tingkat tinggi dengannya. Akomodasi, bukan konfrontasi, menandai pendekatan AS. Pendirian AS yang berpandangan jauh ini berlanjut sampai setelah Erbakan dipaksa turun kursi. Amerika Serikat tercatat menentang upaya oleh penguasa militer-sekular Turki untuk melarang Refah secara permanen dari kancah politik atas dasar bahwa kegiatan partai itu dapat merusak landasan sekular negara Turki. Departemen Luar Negeri menyatakan dengan jelas bahwa pelarangan terhadap Refah dapat berdampak buruk pada demokrasi Turki dan akan “berujung pada rusaknya kepercayaan pada sistem demokrasi multi-partai Turki.”⁵ Penilaian ini membuat berang salah satu sekularis militan di Mahkamah Konstitusi, Gungor Ozden, yang menuduh bahwa Amerika Serikat melakukan campur tangan dan berusaha mempengaruhi keputusan Mahkamah: “Turki bukan satelit atau pelayan Amerika Serikat.”⁶

Kasus Turki menunjukkan dengan jelas bahwa Amerika Serikat mungkin bukan hanya belajar bagaimana hidup berdampingan dengan kaum Islamis yang sedang berkuasa, tapi juga bagaimana ia menjaga kepentingan-kepentingan vitalnya serta hubungan strategisnya dengan sekutu NATO-nya. Kuncinya

adalah komitmen timbal-balik terhadap dialog yang sungguh-sungguh, kompromi, dan pengakuan atas kepedulian bersama. Dalam konteks ini, sikap AS terhadap Refah dapat menjadi sebuah model yang efektif untuk diterapkan bagi kaum Islamis di negeri-negeri lain yang berpartisipasi dalam proses politik dan bermain menurut aturan-aturan konstitusional.

Kompleks Iran

Sementara sejumlah ambiguitas menandai pendekatan kebijakan AS terhadap gerakan-gerakan Islamis di Aljazair dan Mesir, retorik dan tindakan-tindakan Amerika yang konsisten memojokkan Iran — satu-satunya negara yang dikendalikan langsung oleh revolusioner Islam — merupakan perkecualian.⁷ Sejak 1979 Iran berperan sebagai pengibar panji Islam, menantang legitimasi tatanan regional yang ada yang didominasi Amerika. Islam revolusioner yang dipraktikkan oleh Iran dipandang sebagai sangat anti-Barat dan berlawanan dengan banyak kepentingan Amerika. Revolusi Islam beserta krisis sandera yang menyusulnya, dilengkapi dengan kampanye para mullah sebelumnya untuk menyusupi para tetangga Arab Teluknya dan mengekspor revolusi, telah sangat mewarnai persepsi para pejabat AS tentang kebangkitan Islam.

Bahkan, di benak kebanyakan orang Amerika, politik Islam dikacaukan dengan politik Iran. Meski para perumus kebijakan Amerika tak mau menarik kaitan langsung antara Islam politik dan Islam Iran, mereka tampak mengembangkan “kompleks Iran” — memandang gerakan dan negara-negara Islamis melalui lensa revolusi berdarah di Iran. Akibatnya, kompleks Iran ini telah berdampak negatif atas kebijakan Amerika terhadap para aktivis Islam di tempat-tempat lain.

Kendati dalam dua puluh tahun terakhir hubungan AS-Iran sempat mengalami periode singkat pelunakan diplomatik, namun pada masa pemerintahan Clinton hubungan ini mencapai titik terburuk. Presiden Clinton menyatakan perang ekonomi terhadap

rezim Iran yang didominasi ulama, dan ia memerintahkan CIA untuk menjalankan operasi rahasia guna memaksa Iran mereformasi dan mengubah perilakunya. Namun, para petinggi Amerika menekankan bahwa ketidaksepakatan dan oposisi mereka terhadap Iran tak ada hubungannya dengan posisinya sebagai negara Islam, melainkan pada kebijakan-kebijakan regional dan luar negerinya. Ini termasuk oposisi aktif Iran terhadap proses perdamaian Arab-Israel, dukungannya pada terorisme, dan hasratnya untuk memiliki persenjataan nuklir. Sekali lagi, pertimbangan-pertimbangan keamanan dan strategis menempati urutan teratas dalam keluhan Washington tentang Iran.

Toh upaya AS untuk mengecilkan faktor Islam di balik perilaku para mullah itu kurang berhasil. Ada dua penyebab kegagalan ini. Pertama, para mullah Iran bergiat gencar memaknai konflik mereka dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari benturan kebudayaan antara Islam dan Barat sekular. Entah murni atau tidak, para pemimpin Iran bersikeras mendefinisikan diri dalam kerangka Islam, kendati banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa mereka mengidap kecenderungan nasionalistik yang kuat. Kedua, dunia luar, sebagaimana sebagian elit kebijakan luar negeri AS, meyakini bahwa Amerika Serikat didorong oleh hasrat untuk melancarkan “balas dendam” atas penghinaan yang ia derita oleh tindakan para mullah selama krisis sandera itu.

Terlepas dari arti penting aspek Islam dalam kalkulasi-kalkulasi Amerika, kompleks Iran telah membuat para penyusun kebijakan AS bersikap mendua dan ragu-ragu untuk menerima kehadiran kaum Islamis di tampuk kekuasaan. Kompleks ini juga telah menimbulkan dampak buruk pada pandangan Islamis terhadap kebijakan luar negeri Amerika. Kaum Islamis sering mengutip kepungan terselubung AS terhadap Teheran sebagai contoh dari keengganan intrinsik Washington terhadap Islam dan umat Muslim. Maka revolusi Islam di Teheran terus menjadi peristiwa yang menentukan dalam hubungan antara kebangkitan Islam dan Amerika Serikat. Tanggapan-tanggapan Amerika terhadap revolusi

Iran dan peristiwa-peristiwa selanjutnya telah memberi amunisi kepada mereka yang berada di kedua kubu, yang percaya pada mitos konfrontasi antara blok Barat dan dunia Muslim. Pemulihan hubungan AS-Iran boleh jadi akan mengendurkan ketegangan-ketegangan antara Amerika Serikat dan gerakan-gerakan Islam yang telah meningkat sejak 1980an.

Apa yang harus Dilakukan?

Amerika Serikat sering mengungkapkan pernyataan-pernyataan kebijakan formal yang mengesankan tentang Islam politik. Nada dan substansi wacana ini menunjukkan penghormatan besar pada tradisi agama dan kebudayaan Islam. Pernyataan-pernyataan resmi Amerika ini tampaknya cukup menghapus keraguan yang bercokol di benak banyak orang tentang kemungkinan sebuah benturan peradaban. Tantangan yang masih dihadapi pemerintah Amerika adalah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang sejalan dan cocok dengan ide-ide lunak yang diungkapkan oleh para pejabatnya. Sebagai langkah pertama, Amerika Serikat perlu memperhatikan keprihatinan dan kecemasan-kecemasan yang melandasi dan memunculkan kegelisahan kaum Muslim. Ini mencakup aturan-aturan yang tidak adil bagi partisipasi politik yang sering mengarah ke eksklusif, berlarutnya deprivasi ekonomi, dan masalah-masalah kebijakan luar negeri seperti posisi AS dalam proses perdamaian Arab-Israel, dukungan Washington terhadap para pemimpin Muslim yang korup dan tak populer, dan sikap standar-ganda para petinggi Amerika dalam berhadapan dengan dunia Muslim.

Semakin lama rezim-rezim Timur Tengah pro-Barat itu menutup pintu kekuasaan politik dan ekonomi bagi kelas-kelas sosial baru ini, makin besar ancaman bagi diri mereka sendiri. Amerika Serikat harus memberi tahu para elit penguasa dan sekutu-sekutunya tentang perlunya memperluas basis sosial mereka dengan mengintegrasikan kelas-kelas sosial baru ini ke dalam arus utama politik: Politik eksklusif adalah resep untuk kehancuran, tapi poli-

tik inklusif merupakan kunci bagi keselamatan. Semua kelompok yang ingin berpartisipasi dalam politik demokratis perlu secara aktif berbuat demikian.

Para petinggi Amerika perlu terlibat dalam dialog yang intensif dengan gerakan-gerakan nonkekerasan Islamis untuk memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh komited terhadap proses konstitusional dan demokratis serta mendorong mereka lebih jauh ke arah itu. Amerika Serikat dapat mendukung pelbagai pemerintahan Timur Tengah dan oposisi Islamis mereka guna membangun struktur dan institusi-institusi demokrasi yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan dan kebudayaan masyarakat di sana.

Bersisian dengan situasi politik yang eksplosif di banyak negeri Muslim, terlihat jelas adanya deprivasi ekonomi yang berlarut di kalangan kelas-bawah. Pengangguran yang terus tumbuh serta ketimpangan sumber-sumber daya menciptakan gelombang-gelombang besar kaum muda yang marah, bingung, dan pahit yang menjadi landasan rekrutmen alami bagi kelompok-kelompok Islamis. Aktivisme Islam dihidupi oleh pengangguran, kemiskinan, dan keterkucilan. Para tokoh aktivis Islam di Mesir dan Aljazair — dan juga di Yordania dan Sudan, sekadar dua contoh lain yang mencolok — berasal dari kalangan muda kelas-bawah yang paling terpengaruh oleh kelangkaan dan eksklusi ekonomi. Amerika Serikat dapat memberikan dukungan terbaik pada pembangunan Timur Tengah dengan mempromosikan bukan hanya privatisasi dan liberalisasi, tapi juga langkah-langkah ekonomi tertentu yang bisa menghapus nestapa di lapisan miskin: Perlu ada prioritas yang tinggi bagi akselerasi penyesuaian struktural guna menciptakan lapangan kerja yang nyata. Lebih lanjut, realokasi bantuan militer dan pembelanjaan bagi sektor domestik akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

Walaupun bisa diperdebatkan apakah Amerika Serikat sanggup benar-benar mempengaruhi politik internal dan situasi ekonomi bahkan di negeri-negeri Muslim yang penguasanya bersahabat dengan Washington, tapi tidak demikian halnya dengan kebijakan

luar negeri. Para pejabat Amerika dapat berbuat lebih banyak lagi untuk memperbaiki citra Amerika Serikat di mata kaum Muslim, yang banyak mengkritik apa yang mereka pandang sebagai standar-ganda dalam perumusan kebijakan luar negeri AS, dan mereka mempertanyakan ketulusan Washington ketika ia bicara tentang isu-isu hak-hak azasi manusia, demokrasi, dan pencegahan perkembangbiakan senjata-senjata nonkonvensional bagi semua orang.

Demikian pula, Amerika Serikat perlu lebih konsisten danantang dalam kritiknya terhadap pelanggaran hak-hak azasi manusia. Washington perlu menetapkan syarat bagi bantuan luar negerinya berupa penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, hak-hak politik dan kultural. Sebagai contoh, negara-negara Eropa telah bersikap gamblang terhadap Turki bahwa dukungan finansial, militer dan politiknya tergantung pada penghormatan Ankara atas hak-hak azasi dan kultural minoritas Kurdi di Turki. Dalam kasus Turki, para pemimpin Eropa jauh lebih tegas dalam mewujudkan apa yang mereka khotbahkan dibanding rekan-rekan Amerika mereka. Tak mengherankan kalau penguasa Turki dengan cerdik berusaha mengkompensasi kekurangan dukungan Eropa dengan mempererat tali hubungannya dengan Washington.

Kepentingan jangka-panjang Washington adalah menjaga jarak yang sehat dari rezim-rezim korup dan tak populer di dunia Muslim. Menjaga jarak yang sehat seraya tetap terlibat dalam politik dan masyarakat-masyarakat Muslim tak perlu dipandang sebagai kontradiksi. Pada akhirnya, pilihan yang dihadapi Amerika Serikat dalam hubungannya dengan masyarakat-masyarakat Muslim tidak boleh dilihat dalam kerangka bersahabat dengan rezim-rezim yang garang terhadap kaum Islamis atau mendukung tanpa syarat pemerintah-pemerintah otoritarian yang menghabisi oposisi Islam. Tantangannya adalah memajukan pembaruan-pembaruan struktural dan berangsur-angsur membuka apa yang kini merupakan sistem politik tertutup. Jelas, transisi ke arah demokrasi parlementer yang penuh bisa memakan waktu beberapa

dasawarsa. Akan keliru pula kalau kita menganggap bahwa proses ini tanpa risiko. Tapi alternatifnya adalah instabilitas yang berlarut-larut dan institusionalisasi kekerasan — seperti ditunjukkan oleh kasus-kasus Aljazair dan Mesir.

Demikian pula, dalam upayanya menangkal para pemimpin nasional bengal yang berbahaya dan jelas mengancam di dunia Muslim, Amerika Serikat perlu menghindari menimpakan penghukuman kolektif yang tak perlu terhadap keseluruhan penduduk. Kebijakan “pembendungan ganda,” misalnya, telah menimbulkan kerusakan besar atas seluruh penduduk Iran dan Irak ketimbang pada rezim-rezim yang sedang berkuasa di Teheran dan Baghdad. Banyak kaum Muslim yang sulit menyerasikan pernyataan-pernyataan progresif AS tentang Islam dengan penerapan hukuman kolektif terhadap masyarakat dan bangsa-bangsa Muslim itu. Terutama khusus, sanksi-sanksi ekonomi terhadap Irak telah menimbulkan kerusakan parah atas masyarakat sipil negeri itu. Dalam hal ini, sanksi-sanksi Amerika telah meradikalisasi kelompok-kelompok oposisi Islam di bagian lain dunia Muslim, khususnya di Arab Saudi, negeri klien penting AS. Ada persepsi yang meluas di dunia Muslim terhadap Amerika Serikat sebagai hegemon kejam yang bernafsu menekan bangsa Arab/Muslim, seraya bersikap lunak terhadap budaya dan masyarakat-masyarakat bandel lainnya.

Lidah-bercabang dalam mempromosikan demokrasi juga harus diakhiri. Prestise dan reputasi Amerika tercela ketika pada awalnya pemerintahan Bush mendukung tindakan militer menghentikan proses demokrasi di Aljazair. Demokrasi menyiratkan peluang dan juga risiko-risiko. Merampas buah kemenangan pemilu yang dipetik kelompok Islamis berarti mengalienasi mereka — dan makin meradikalisasikan mereka. Aljazair, Mesir, dan kini Turki merupakan contoh-contoh kasusnya.

Selain itu, banyak umat Muslim — seraya terkesan oleh pernyataan-pernyataan Clinton yang penuh nuansa dan sensitif tentang Islam — bingung oleh kelangkaan kepekaannya terhadap ke-

prihatinan Arab/Muslim sehubungan dengan proses perdamaian Arab-Israel dan kesengsaraan bangsa Palestina. Para komentator Muslim sering menggambarkan Clinton sebagai “Presiden paling pro-Israel dalam sejarah Amerika.” Masyarakat Arab/Muslim menyesali fakta bahwa, di masa kekuasaan Clinton, terjadi pengidentikan pandangan yang nyaris sempurna antara Amerika Serikat dan Israel tentang sejumlah besar masalah regional, termasuk proses perdamaian, keamanan, dan terorisme. Mereka merasa bahwa Clinton telah melupakan kebijakan berimbang yang sebelumnya ditempuh Washington dan menggantinya dengan “komitmen total” terhadap Tel Aviv. Kendati ada ketegangan antara pemerintahan Clinton dan Perdana Menteri Israel Netanyahu, para petinggi Amerika kurang keras dalam mendorong rezim Israel untuk menerima kompromi yang masuk akal. Lebih jauh, pemerintahan Clinton telah mengakomodasi keinginan Netanyahu dengan mempertaruhkan tujuan perdamaian Arab-Israel yang lebih luas dan kepentingan jangka-panjang AS sendiri di kawasan itu. Keraguan pemerintahan Clinton untuk menentang Netanyahu memprihatinkan masyarakat Arab/Muslim dan memberi para kritikus Amerika Serikat sejumlah besar amunisi. Seperti diungkapkan oleh penyair dunia Arab yang paling luas dibaca, Nizar Qabbani:

Mengapakah Amerika bersikap durjana?

Mengapakah ia memakai patokan ganda, dan bicara dengan dua suara?

Mengapakah Amerika memakai dua topeng di Timur Tengah?⁸

Pada April 1996 opini publik Muslim meradang oleh kolusi Washington dalam aksi berdarah militer Israel di Lebanon yang menewaskan lebih dari seratus warga sipil. Mengungkapkan sentimen-sentimen banyak kaum Muslim, Qabbani meraung, “Apakah setiap pemimpin Amerika yang damba memenangkan kursi presiden harus membunuh kita — kita bangsa Arab?”⁹ Amerika Serikat tak boleh hanya melanjutkan perannya sebagai

“perantara yang jujur” dalam proses perdamaian Arab-Israel, tapi juga perlu sungguh-sungguh mendorong pihak Arab dan Israel menuju penyelesaian yang adil dan komprehensif. Dalam praktik, ia berarti pembentukan sebuah negara Palestina, yang dapat membuka peluang besar bagi rekonsiliasi bersejarah antara Arab dan Yahudi.

Namun, ada batas-batas bagi apa yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan berulang kali kaum Islamis membuktikan diri sebagai musuh Amerika yang terburuk. Dengan menentang lantang norma-norma demokrasi, hak-hak azasi manusia, hubungan damai dengan Barat, dan pemakaian teror untuk meraih tujuan-tujuan politik domestik, para pemimpin Islamis telah menyajikan banyak bahan kecaman bagi mereka di Barat, yang ingin menempatkan “ancaman Islam” sebagai musuh baru. Suara-suara humanis dan demokratis Islam harus menegaskan diri dan berupaya agar didengar. Mereka juga harus berpadu dengan para rekan Barat mereka guna mencegah pembajakan kebijakan luar negeri Amerika oleh orang-orang di kedua kubu yang sedang menabuh genderang perang peradaban dan kebudayaan. ❀

Catatan

1. Wawancara dengan seorang pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995.
2. Robert Pelletreau dalam “Symposium: Resurgent Islam in the Middle East,” h. 16.
3. Wawancara dengan seorang pejabat Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, Washington, DC, 27 Maret 1995, dan wawancara dengan pejabat NSC, Washington, DC, 30 Maret 1995.
4. Roger Cohen, “Algeria Says Charter Passes, But Critics Charge Vote Fraud.”
5. Stephen Kinzer, “Turkish Judge Scolds U.S. for Opposing a Ban on an Islamic Party,” *New York Times*, 28 November 1997.
6. Ibid.
7. Sudan adalah kasus lain di mana kaum Islamis revolusioner, yang diwakili oleh Front Islam Nasional, mengendalikan pemerintahan se-

cara tak langsung.

8. Dalam Fawaz A. Gerges, "Clinton and the Middle East: Lost Opportunities?". *Foreign Policy*, (Winter 1997).
9. Ibid.

Referensi



Dokumen Primer

Carter, Jimmy. *Weekly Compilation of Presidential Documents*. U.S. Government Printing Office, vol. 16, no. 4, 28 Januari 1980.

Christopher, Warren. "Statement by Secretary of State Warren Christopher Regarding U.S. Sanctions Against Iran." Briefing Departemen Luar Negeri. Dalam *Federal News Service*, 1 Mei 1995.

Clinton, Bill. "A Strategy for Foreign Policy." Pidato di Foreign Policy Association, New York, April 1992. *Vital Speeches* 58, no. 14, Mei 1992.

Commencement Address at the U.S. Naval Academy for the Class of 1990. Annapolis, MD, 30 Mei 1990, U.S. Naval Academy Archives, Nimitz Library.

"Remarks by President Bill Clinton to the Jordanian Parliament." *The White House: Office of the Press Secretary*, Amman, Jordan, 26 Oktober 1994.

"Remarks by President Clinton at a Dinner of the World Jewish Congress." *Federal News Service*, 30 April 1995.

"Statement by the President on the occasion of the Islamic Holy Month Ramadan." The White House: Office of the Press Secretary. Boston, MA, 31 Januari 1995.

"The President's Remarks at white House Welcoming Ceremony for King Hussein of Jordan and Prime Minister Yitzhak Rabin of Israel, Washington, DC, 25 Juli 1994." *U.S. Department of State Dispatch* 5, no. 7, Agustus 1994.

Clinton, Bill, dan Benazir Bhutto. "Joint Press Conference with President

Bill Clinton and Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto." *Federal News Service*, 11 April 1995.

Clinton, Bill, dan Hosni Mubarak. "U.S.-Egyptian Search for Peace and Stability in the Middle East: President Clinton and President Mubarak News Conference." *U.S. Department of State Dispatch* 4, no. 15, 12 April 1993.

Clinton, Bill, dan King Hassan II. "Remarks by President Clinton and King Hassan of Morocco upon Arrival at the White House." *U.S. Newswire*, 15 Maret 1995.

"Transcript of Remarks by President Clinton and King Hassan II of Morocco in Press Conference." *U. S. Newswire*, 15 Maret 1995.

Clinton, Bill, dan Tansu Ciller. "The President's News Conference with Prime Minister Tansu Ciller of Turkey, 15 October 1993." *Weekly Compilation of Presidential Documents*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 18 Oktober 1993.

"The United States and Turkey." Pidato pembukaan pada konferensi pers oleh Presiden Clinton dan Perdana Menteri Ciller, Washington, DC, 15 Oktober 1995. *U.S. Department of State Dispatch*, 1 November 1993.

Djerejian, Edward P. "Review- of U.S. Efforts to Achieve Near East Policy Goals." Pernyataan di depan Subkomisi untuk Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 24 Juni 1992. *U.S. Department of State Dispatch*, 29 Juni 1992.

"United States Policy Toward Islam and the Arc of Crisis." *Baker-Institute Study*, no. 1 (1995).

"U.S. Policy Goals in the Near East." Pidato di National Association of Arab Americans, Washington, DC, 11 September 1992. *U.S. Department of State Dispatch*, 14 September 1992.

"U.S. Policy on Recent Developments and Other Issues in the Middle East." Pernyataan di depan Subkomisi untuk Eropa dan Timur Tengah, Komisi Hubungan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 27 Juli 1993. *U.S. Department of State Dispatch*, 9 Agustus 1993.

"War and Peace: The Problems and Prospects of American Diplomacy in the Middle East." Pidato di Los Angeles World Affairs Council, 30 November 1993. *U.S. Department of State Dispatch*, 20 Desember 1993.

Foreign Relations of the United States, 1955-1957: Arab-Israeli Dispute, January 1- July 26, 1956. Vol. 15. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1989.

- Gore, Al. "Remarks of Vice President Gore As He Meets with Arab and Muslim Ambassadors." *Federal News Service*, 10 Juni 1994.
- Indyk, Martin. "Concluding Remarks: The Implications for U.S. Policy." Dalam "Islam and the U.S.: Challenges for the Nineties," Soref Symposium. Washington, DC: *The Washington Institute for Near-East Policy*, 27 April 1992.
- Isaacson, Jason F. "On the Threat of Islamic Extremism in Africa." Testimoni di Subkomisi untuk Afrika, Komisi Hubungan Internasional DPR. *Federal News Service*, 6 April 1995.
- Hicks, Neil. "Human Rights in the Aliddle East." Testimoni di Subkomisi untuk Eropa dan Timur Tengah, Komisi Urusan Luar Negeri, 15 September 1992.
- Lake, Anthony. "Building a New Middle East: Challenges for U.S. Policy." Pidato oleh Penasihat Keamanan Nasional di Washington Institute for Near East Policy. Washington, DC, 17 Mei 1994. *U.S. Department of State Dispatch*, Agustus 1994.
- "From Containment to Enlargement: Current Foreign Policy Debates in Perspective." Pidato di Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Washington, DC, September 1993.
- "The Need for Engagement." Pidato di Woodrow Wilson School, Princeton University, November 1994. *U.S. Department of State Dispatch*, 5 Desember 1994.
- Lawyers Committee for Human Rights. *Critique: Review of the U.S. Department of State's Country Reports on Human Rights Practices*. Washington, DC: Lawyers Committee for Human Rights, Juli 1990-6.
- Migdalovitch, D. "Turkey's Unfolding Political Crisis." Dalam *Congressional Research Service Report for Congress*. Washington, DC: The Library of Congress, 11 April 1997.
- Murphy, Richard. "The Middle East Peace: Facing Realities and Challenges." *US. Department of State Bulletin*, September 1988.
- National Security Council. *Discussion at the Meeting of the National Security Council (NSC), 25 July 1958 and NSC, U. S. Policy Toward the Near East (NSC 6011), 17 June 1960*. Dalam U.S. Archives. Center for Lebanese Studies, Oxford.
- Parris, Mark R. "Update on the Crisis in Algeria." Pernyataan di Subkomisi urusan Afrika Komisi Urusan Luar Negeri DPR, 22 Maret 1994. *U.S. Department of State Dispatch*, 4 April 1994.
- Pelletreau, Robert H. "Current Issues in the Middle East." Pidato di Harvard Law School, Islamic Legal Studies Program, di Cambridge,

11 April 1991.

“Dealing with the Muslim Politics of the Middle East: Algeria, Hamas, Iran.” Pidato di Council on Foreign Relations, New York, 8 Mei 1996. *Muslim Politics Report*, no. 7 (Mei/Juni 1996).

“Recent Events in the Middle East.” Pernyataan di Subkomisi urusan Eropa dan Timur Tengah Komisi Urusan Luar Negeri DPR, Washington, DC, 14 Juni 1994. *U.S. Department of State Dispatch*, vol. 5, no. 25, 20 Juni 1994.

“Statement before the Subcommittee on Europe and the Middle East of the House Foreign Affairs Committee, 4 October 1991.” *U.S. Department of State Dispatch*, 10 Oktober 1994.

“U.S. Policy Toward North Africa.” Pernyataan di Subkomisi urusan Afrika, Komisi Urusan Luar Negeri DPR, 28 September 1994. *U.S. Department of State Dispatch*, 3 Oktober 1994.

Perry, William J. “Address to the Council on Foreign Relations.” New York, 18 Mei 1995.

Quayle, Dan. “Commencement Address at the U.S. Naval Academy for the Class of 1990, Annapolis, Maryland, 30 Mei 1990.” Dalam U.S. Naval Academy Archives, Nimitz Library.

Reagan, Ronald. “Reagan Address on U.S. Air Strike Against Libya,” 14 April 1986. Dalam *Historic Documents of 1986*. Washington, DC. *Congressional Quarterly*, 1987.

Ros-Lehtinen, Ileana. “The Threat of Islamic Extremism in Africa.” Testimoni Ileana Ros-Lehtinen, Komisi Hubungan Internasional, DPR AS. *Federal News Service*, 6 April 1995.

Russell, Francis J. “U.S. Policies Toward Nasser.” Makalah disampaikan oleh Asisten Khusus Menteri Luar Negeri pada 4 Agustus 1956. Dalam *Foreign Relations Of the United States: Suez Crisis, 1956*. Vol. 16. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1989.

Shultz, George. “The Future of American Foreign Policy: New Realities and New Ways of Thinking.” Testimoni di Komisi Hubungan Luar Negeri Senat pada 31 Januari 1985. *U.S. Department of State Bulletin*, Mei 1985.

“Testimony Before the Joint House-Senate Iran-Contra Investigation Hearings, 23 Juli 1987.” Dalam *Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contras Affairs*, 13 November 1987. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1987.

Talbott, Strobe. “U.S.-Turkish Leadership in the Post-Cold War World.” Pidato di Universitas Bilkent, Ankara, Turki 11 April 1995. *US*.

Department of State Dispatch, 24 April 1995.

Tarnoff, Peter. "Containing Iran." US. Department of State Dispatch, 13 November 1995.

"Sanctions on Iran." *US. Department of State Dispatch*, 23 Oktober 1995.

U.S. Department of State. "Enhanced U.S.-Turkish Partnership." Ringkasan briefing pers, Gedung Putih, 11 Februari 1992. *U.S. Department of State Dispatch*, 17 Februari 1992.

"Human Rights Abuses By Turkish Military and the Situation in Cyprus." Laporan Departemen Luar Negeri AS. *Department of State Dispatch*, 12 Juni 1995.

"Memorandum of Conversation. Subject: U.S.-UAR Relations, 17 September 1965." Dalam *The Lyndon B. Johnson Motion Security Files, the Middle East: National Security Files, 1963-1969*. Frederick, MD: University Publications of America, 1989.

Patterns of Global Terrorism. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, April 1995.

"The U.S., Islam and the Middle East in a Changing World." Pidato di Meridian House International, Washington, DC, 2 Juni 1992. *US. Department of State Dispatch*, 2 Juni 1992.

"U.S.-Egyptian Partnership for Economic Growth and Development." Teks komunike bersama pada pertemuan pembukaan U.S.-Egyptian Sub-Committee on Economic Policy, Trade, Investment, and External Finance, Washington, DC, 2 Juni 1995. *U.S. Department of State Dispatch* 6, no. 24, 12 Juni 1995.

U.S. House of Representatives. "Hearing of the House Foreign Affairs Committee; Developments in the Middle East." *Federal News Service*, 17 Maret 1992.

"Hearing of the House International Relations Committee; U.S. Assistance to the Palestinians." *Federal News Service*, 6 April 1995.

"Hearing of the U.S. House Committee on Foreign Affairs; U.S. Foreign Policy." *Federal News Service*, 6 Februari 1992.

"Hearing with Defense Department Personnel; House International Relations Committee; International Economic and Trade Subcommittee U.S. Sanctions on Iran." *Federal News Service*, 2 Mei 1995.

"Hearings and Recommendations for U.S. Foreign Assistance to Africa Before the Subcommittee on Africa of the House Committee on Foreign Relations." Dimuat dalam *Foreign Assistance Legislation for Fiscal Year 1994*, pt. 7, 12 Mei 1993.

Hearings Before the Subcommittee on Africa of the Committee on Foreign Affairs, 12 May 1993. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1994.

“House Foreign Affairs Committee Hearing.” *Reuters Transcript Report*, 21 April 1993.

Jordan — The Center of Sunni Islamist Terrorism. Laporan 17 April 1991 pada Satuan Tugas tentang Terorisme dan Perang Konvensional Republikan DPR. Washington, DC: Juli 1998-Mei 1991.

Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contra Affair, 13 November 1987. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1987.

The Future of US. Anti-Terrorism Policy. Dengan pendapat di Subkomisi urusan Keamanan Internasional, Organisasi-organisasi Internasional, dan Hak-hak Azasi Manusia, Komisi urusan Luar Negeri, 13 Juli 1993. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1993.

The Times of the Crusades are Back. Laporan 19 Maret 1990 pada Satuan Tugas tentang Terorisme dan Perang Luar Biasa Republikan DPR. Washington, DC: Juli 1989-Mei 1991.

U.S. Senate. *East or West Turkey Checks Its Compass.* Laporan staf minoritas pada Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, September 1995. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1996.

Hearing of the Senate Judiciary Committee, Terrorism and America: A Comprehensive Review of the ‘Threat, Policy, and Law, 21 April 1993. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 199-1.

The Battle Looms: Islam and Politics in the Middle East. Kajian yang ditugaskan oleh Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1993.

Welch, David. C. “Terrorism in Algeria.” *U.S. Department of State Dispatch*, 30 Oktober 1995.

White House. *A National Security Strategy for a New Century.* Washington, DC: U.S. Government Printing Office, Mei 1997.

National Security Strategy of the United State. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, Januari 1993.

Woolsey, James R. “Testimony Before the Senate Committee on Government Affairs on the Proliferation Threats of the 1990s.” Washington, D.C., 24 Februari 1993. Dimuat kembali dalam *Journal of Palestine Studies* 22 (Summer 1993).

Buku

- Abramowitz, Morton I. "Foreword." Dalam Pierre, Andrew J., dan William B. Quandt. *The Algerian Crisis: Policy Options for the West*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1996.
- Abraham, Nabeel. "The Gulf Crisis and Anti-Arab Racism in America." Dalam *Collateral Damage: The New World Order at Home and Abroad*. Ed. Cynthia Peters. Boston, ALA: South End Press, 1992.
- Abu-Amr, Ziad. *Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
- Acheson, Dean. *Present at the Creation: My Years in the State Department*. New York: New American Library, 1969.
- Ahmad, Feroz. *The Making of Modern Turkey*. London: Routledge, 1993.
- Ahmed, Ahmed Youssef. *Al-dawr al-Misri fi al-Yaman, 1962-1967* [Peran Mesir di Yaman, 1962-1967]. Cairo: Al-Hai'a al-Misriya al-amma llk-itab, 1981.
- Akhtar, Shabbir. *A Faith for All Seasons: Islam and the Challenge of the Modern World*. Chicago: Ivan R. Dee, 1990.
- Allison, Robert J. *The Crescent Obscured: The United States and the Muslim World, 1776-1815*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Amirahmadi, H., ed. *The United States and the Middle East: A Search for New Perspectives*. Albany: State University of New York Press, 1993.
- Appleby, R. Scott. "Democratization in the Middle East Does Not Threaten the West." Dalam *Islam: Opposing Viewpoints*. N. ed., n.c. USA: Greenhaven Press, 1995.
- Arjomand, Said Amir. *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*. New York: Oxford University Press, 1988.
- Arkoun, Mohammed. *Rethinking Islam*. Terj. Robert D. Lee. Boulder, CO: Westview Press, 1994.
- Art, Robert J. "America's Foreign Policy." Dalam *Foreign Policy in World Politics*. Ed. Roy C. Macridis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985.
- Ayubi, Nazih N. *Political Plain: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge, 1991.
- Baker III, James A., bersama Thomas M. DeFrank. *The Politics of Diplomacy: Revolution, War and Peace, 1959-1992*. New York: G. P. Putman's Sons, 1995.

- Barkey, Henry J., ed. *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in the Middle East*. Washington, DC: United Institute of Peace Press, 1996.
- Bill, James A. *The Eagle and the Lion*. New Haven, CT: Yale University Press, 1988.
- Bin Sayeed, Khalid. *Western Dominance and Political Islam: Challenge and Response*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Bin Yousef, Ahmad, dan Ahmad Abul Jobain. *The Politics of Islamic Resurgence: Through Western Eyes*. North Springfield, VA: The United Association for Studies and Research, 1992.
- Blank, Stephen J., Stephen C. Pelletiere, dan William T. Johnson. *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs*. N.c.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1993.
- Bodansky, Yosseff. *Target America: Terrorism in the U.S. Today*. New York: S.P.I. Books, 1993.
- Brown, Severn. *The Face of Power: United States Foreign Policy from Truman to Clinton*. New York: Columbia University Press, 1994.
- Brzezinski, Zbigniew. *Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor, 1977-1981*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1983.
- Bulliet, Richard W. "Rhetoric, Discourse, and the Future of Hope." Dalam *Under Siege: Islam and Democracy*. Occasional Papers 1. Ed. Richard W. Bulliet. New York: The Middle East Institute of Columbia University, 1994.
- Burgat, Francois, dan William Dowell. *The Islamic Movement in North Africa*. Austin: Center for Middle Eastern Studies at the University of Texas at Austin, 1993.
- Caplan, Lionel, ed. *Studies in Religious Fundamentalism*. London: Macmillan, 1987.
- Carley, Patricia. *Turkey's Role in the Middle East: A Conference Report*. Washington, DC: United States Institute of Peace, 1995.
- Carter, Jimmy. *Keeping Faith: Memoirs of a President*. New York: Bantam Books, 1982.
- Castelli, J., dan G. Gallup Jr. *The People's Religion: American Faith in the '90s*. New York: Macmillan, 1989.
- Chomsky, Noam. *Deterring Democracy*. New York: Hill & Wang, 1992.
- Necessary Illusions*. Boston, ALA,: South End Press, 1989.
- Toward a New Cold War: Essays oil the Current Crisis and How We Got There*. New York: Pantheon, 1982.

- World Orders: Old and New*. New York: Columbia University Press, 1994.
- Christopher, Warren, ed. *Americans Hostages in Iran: The Conduct of a Crisis*. New Haven, CT: Yale University Press, a Council on Foreign Relations Book, 1985.
- Chubin, Shahram. *Iran's National Security Policy: Capabilities Intentions and Impact*. Washington, DC: The Carnegie Endowment for International Peace, 1994.
- Clawson, Patrick. "Alternative Foreign Policy Views Among the Iranian Policy Elite." Dalam *Iran: Strategic Intentions and Capabilities*. McNair Paper 29. Ed. Patrick Clawson. Washington, DC: Institute for National Strategic Studies and National Defense University, 1994.
- Cole, Juan R. I., dan Nikki R. Keddie, ed. *Shi'ism and Social Protest*. New Haven, CT: Yale University Press, 1986.
- Copeland, Miles. *The Game of Nations: The Amoral of Power Politics*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1969.
- Cottam, Richard W. "U.S. and Soviet Responses to Islamic Political Militancy." Dalam *Neither East nor West: Iran, the Soviet Union and the United States*. Nikki R. Keddie dan Mark J. Gasiorowski. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
- Daniel, Norman. *Islam and the West: The Making of an Image*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.
- The Arabs and Medieval Europe*. London: Longman, 1975.
- De Marenches, Count, dan David A. Adelman. *The Fourth World War: Diplomacy and Espionage in the Age of Terrorism*. New York: William Morris & Co., 1992.
- Djait, Hichin. *Europe and Islam: Cultures and Modernity*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985.
- Dolbeare, Kenneth M., dan Patricia Dolbeare. *American Ideologies*. Chicago: Markham, 1971.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito, ed. *Islam in Transition: Muslim Perspectives*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Dorman, William. "Media, Public Discourse, and U.S. Policy Toward the Middle East." Dalam *The United States and the Middle East: A Search for New Perspectives*. Ed. H. Amirahmadi. Albany: State University of New York Press, 1993.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.

Esposito, John L. *Political Islam: The Challenges of Change*. Annandale, VA: United Association for Studies and Research, 1995.

The Islamic Threat: Myth or Reality?, New York: Oxford University Press, 1992.

Esposito, John L., ed. *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.

Esposito, John L., dan James P. Piscatori. "The Global Impact of the Iranian Revolution: A Policy Perspective." Dalam *The Iranian Revolution: Its Global Impact*. Ed. John L. Esposito. Miami: Florida International University Press, 1990.

Fuller, Graham E. *Algeria: The Next Fundamentalist State?*, Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1996.

"Alternative Turkish Roles in the Future Middle East." Dalam *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in the Middle East*. Ed. Henry J. Barkey. Washington DC: United Institute of World Peace Press, 1996.

Fuller, Graham E., dan Ian O. Lesser. *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West*. Boulder, CO: Westview Press, 1995.

Central Asia: The New Geopolitics. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1992.

Islamic Fundamentalism in the Northern Tier Countries: An Integrative View. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1991.

Gaddis, John Lewis. *The United States and the End of the Cold War: Implications, Reconsiderations, Provocations*. New York: Oxford University Press, 1992.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.

Gerges, Fawaz A. *The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics 1955-1967*. Boulder, CO: Westview Press, 1994.

Geyikdag, Mehmet Yasar. *Political Parties in Turkey: The Role of Islam*. New York: Praeger, 1984.

Ghannoushi, Rashid. "Islamic Civilization Need Not Clash with Western Civilization." Dalam *Islam: Opposing Viewpoints*. N. ed., n.c. USA: Greenhaven Press, 1995.

Ghareeb, Edmund, ed. *Split Vision: The Portrayal of Arabs in the American Media*. Washington, DC: American-Arab Affairs Council 1983.

Goldberg, Jacob. "The Shi'i Minority in Saudi Arabia." Dalam *Shi'ism and Social Protest*. Ed. Juan R. I. Cole dan Nikkie R. Keddie. New Haven, CT: Yale University Press, 1986.

- Grimmett, Richard F. *Conventional Arms Transfers to the Third World*. Washington, DC: Congressional Research Service, 1993.
- Guvenc, Bozkurt. *Culture and Education in Turkey* [dalam bahasa Turki]. Ankara: Gundogan, 1995.
- Hadar, Leon T. "Political Islam is Not a Threat to the West." Dalam *Islam: Opposing Viewpoints*. No ed., n.c. USA: Greenhaven Press, 1995.
- Quagmire: America in the Middle East*. Washington, DC: Cato Institute, 1992.
- "The Media and Islam." Dalam *Under Seige: Islam and Democracy*. Occasional Papers 1. Ed. Richard W. Bulliet. New York: The Middle East Institute of Columbia University, 1994.
- Haddad, Yvonne Yazbeck. "Islamist Perceptions of the U.S. Policy in the Middle East." Dalam *The Middle East and the United States: A Historical Reassessment*. Ed. David W. Lesch. Boulder, CO: Westview Press, 1996.
- "The 'New Enemy'? Islam and Islamists after the Cold War." Dalam *Altered States: A Reader in the New World Order*. Ed. Michel Moushabeck dan Phyllis Bennice. New York: Olive Branch Press, 1993.
- Halliday, Fred. *Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East*. London: I. B. Tauris, 1995.
- Hamroush, Ahmed. *Qissa taura 23 Yulio: Karif Abdel-Nasser* [Kisah Revolusi 23 Juli: Musim Gugur Abdel Nasser]. Vol. 5. Cairo: Maktaba al-madbuli, 1984.
- Hartz, Louis. *The Liberal Tradition in America*. New York: Harcourt Brace & World, 1955.
- Hastedt, Glenn P., ed. *American Foreign Policy: Past, Present, Future*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1997.
- Haviland, William A. *Cultural Anthropology*. Fort Worth, TX: Holt, Reinhart & Winston, 1990.
- Hentsch, Thierry. *Imagining the Middle East*. Terj. Fred A. Reed. Montreal: Black Rose Books, 1992.
- Henze Paul B. *Turkey: Toward the Twenty-First Century*. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1994.
- Turkish Democracy and the American Alliance*. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1993.
- Hippler, Jochen. "The Islamist Threat and Western Foreign Policy." Dalam *The Netx Threat: Western Perceptions of Islam*. Ed. Jochen Hippler

- dan Andrea Lueg. Boulder, CO: Pluto Press, 1995.
- Hippler, Jochen, dan Andrea Lueg, ed. *The Next Threat: Western Perceptions of Islam*. Boulder, CO: Pluto Press, 1995.
- Hoffmann, Stanley. *Dead Ends: American Foreign Policy in the New Cold War*. Cambridge: Bollinger, 1983.
- Hourani, Albert. *Islam in European Thought*. New York: Cambridge University Press, 1991.
- Hunt, Michael H. *Ideology and U.S. Foreign Policy*. New Haven, CT: Yale University Press, 1987.
- Hunter, Shireen T. *Iran and the World*. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
- Turkey at the Crossroads: Islamic Past or European Future*. Brussels: Centre for European Policy Studies, 1995.
- Husain, Asaf. *Western Conflict with Islam: Survey of the Anti-Islamic Tradition*. Leicester: Volcano Books, 1990.
- Hybel Alex Roberto. *Power over Rationality: The Bush Administration and the Gulf Crisis*. Albany: State University of New York Press, 1993.
- Indyk, Martin. "The Clinton Administration's Approach to the Middle East." Pidato oleh Asisten Khusus Presiden pada Soref Symposium, 18-19 Mei 1993. Dalam *Challenges to US. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*. Ed. Y. Mirsky, Matt Ahrens, dan J. Sultan. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, Mei 1993.
- Islam and the U.S.: Challenges for the Nineties*. Soref Symposium. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, 27 April 1992.
- Islam: Opposing Viewpoints*. N. ed., n.c. USA: Greenhaven Press, 1995.
- Johnson, William T. "Turkey and Europe: Expectations and Complications." Dalam *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs*. Ed. Stephen J. Blank, Stephen C. Pelletiere, dan William T. Johnson. N.c.: Strategic Studies Institute, U.S. Army "or College, 1993.
- Jordan, Hamilton. *Crisis: The Last Year of the Carter Presidency*. New York: Bantam Books, 1982.
- Jouejati, Muhraf. "Water Politics as High Politics: The Case of Turkey and Syria." Dalam *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in the Middle East*. Ed. Henry J. Barkey. Washington, DC: United Institute of Peace Press, 1996.

- Juergensmeyer, Mark. *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1993.
- Kabbani, Rana. *Europe's Myths of the Orient*. London: Macmillan, 1986.
Letter to Christendom. London: Virago Press, 1989.
- Keddie, Nikki R., dan Mark J. Gasiorowski, ed. *Neither East nor West: Iran, the Soviet Union and the United States*. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.
- Kegley, Charles W., Jr., dan Eugene R. Wittkoff. *American Foreign Policy: Pattern and Process*. London: Macmillan Education, 1987.
- Kelsay, John. *Islam and War: A Study in Comparative Ethics*. Louisville, KY: Westminster/John Knox Press, 1993.
- Kemp, Geoffrey. *Forever Enemies: American Policy and the Islamic Republic of Iran*. Washington, DC: The Carnegie Endowment for International Peace 1994.
- Kepel, Gilles. *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*. Terj. Alan Braley. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994.
- Kissinger, Henry. *White House Years*. Boston: Little, Brown & Company, 1979.
- Klare, Michael T., dan Daniel C. Thomas, ed. *World Security: Challenges for a New Century*, edisi kedua. New York: St. Martin's Press, 1994.
- Kung, Hans, dan Jurgen Moltmann, ed. *Islam: A Challenge for Christianity*. London: SCM Press, 1994.
- Lenczowski, George. *American Presidents and the Middle East*. Durham, NC: Duke University Press, 1990.
- Lesch, David W., ed. *The Middle East and the United States: A Historical and Political Reassessment*. Boulder CO: Westview Press, 1996.
- Lewis, Bernard. *Islam and the West*. New York: Oxford University Press, 1993.
The Emergence of Modern Turkey. New York: Oxford University Press, 1961.
The Political Language of Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
- Lueg, Andrew. "The Perception of Islam in Western Debate." Dalam *The Next Threat: Western Perceptions of Islam*. Ed. Jochen Hippler dan Andrea Lueg. Boulder, CO: Pluto Press, 1995.
- Macrides, Roy C., ed. *Foreign Policy in World Politics*. Englewood Cliffs, NJ:

Prentice-Hall, 1985.

- Makovsky, Alan. "Israeli-Turkish Relations: A Turkish 'Periphery Strategy'?" Dalam *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in the Middle East*. Ed. Henry J. Barkey. Washington, DC: United Institute of Peace Press, 1996.
- Marr, Phebe, dan William Lewis, ed. *Riding the Tiger: The Middle East Challenge after the Cold War*. Boulder, CO: Westview Press, 1993.
- Marty, Martin E., dan R. Scott Appleby, ed. *Fundamentalism Observed*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- Mayall, Simon V. *Turkey: Thwarted Ambition*. Paper 56. Washington, DC: National Defense University, Januari 1997.
- Mazrui, Ali A. *Cultural Forces in World Politics*. London: James Currey, 1990.
- McDowall, David. *A Modern History of the Kurds*. London: I. B. Tauris, 1996.
- Mirskv, Y., Matt Ahrens, dan J. Sultan, ed. *Challenges to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, Mei 1993.
- Mohaddessin, Mohammed. *Islamic Fundamentalism: The New Global Threat*. Washington, DC: Seven Locks Press, 1993.
- Mountcastle, Colonel W. "Foreword." Dalam *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs*. Ed. Stephen J. Blank, Stephen C. Pelletiere, dan William T. Johnson. N.c.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1993.
- Moushabeck, Michel, dan Phyllis Bennice, ed. *Altered States: A Reader in the New World Order*. New York: Olive Branch Press, 1993.
- Muslih, Muhammad. "Syria and Turkey: Uneasy Relations." Dalam *Reluctant Neighbor: Turkey's Role in the Middle East*. Ed. Henry J. Barkey. Washington, DC: United Institute of Peace Press, 1996.
- Mustapha, Hala. *The State and the Islamic Opposition Movements: Between Truce and Confrontation During the Sadat and Mubarak Administrations*. Cairo: Markaz Al-Mahrousa Lilnasahr, 1995.
- Ozubudun, Ergun. "Islam and Politics in Modern Turkey." Dalam *The Islamic Impulse*. Ed. Barbara Freyer Stowasser. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1996.
- Payne, Richard J. *The Clash with Distant Cultures: Values, Interests, and Force in American Foreign Policy*. New York: State University of New York Press, 1995.

- Pelletiere, Stephen C. "Turkey and the United States in the Middle East: The Kurdish Connection." Dalam *Turkey's Strategic Position at the Crossroads of World Affairs*. Ed. Stephen J. Blank, Stephen C. Pelletiere, dan William T. Johnson. N.c.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1993.
- Perkins, "The American Approach to Foreign Policy." Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Peters, Cynthia, ed. *Collateral Damage: The New World Order at Home and Abroad*. Boston: South End Press, 1992.
- Pierre, Andrew J. dan William B. Quandt. *The Algerian Crisis: Policy Options for the West*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1996.
- Pipes, Daniel. "Political Islam Is a Threat to the West." Dalam *Islam: Opposing Viewpoints*. N. ed., n.c. USA: Greenhaven Press, 1995.
- Piscatori, James P. *Islam in a World of Nation-States*. New York: Cambridge University Press, 1986.
- Piscatori, James P., ed. *Islamic Fundamentalists and the Gulf War*. Chicago: American Academy of Arts and Sciences, 1991.
- Pollack, David, dan Elaine El Assal, eds. Dalam *In the Eye of the Beholder: Muslim and Non-Muslim Views of Islam, Islamic Politics, and Each Other*. Washington, DC: Office of Research and Media Reaction, United States Information Agency, Agustus 1995.
- Pryce-Jones, David. *At War with Modernity: Islam's Challenge to the West*. London: Institute for European Defense and Strategic Studies, 1992.
- Quandt, William B. *Camp David: Peacemaking and Politics*. Washington, DC: The Brookings Institution, 1986.
- Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 1967-1976*. Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1977.
- Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993.
- Ramazani, Rouhollah K., ed. *Iran's Revolution*. Washington, DC: Middle East Institute, 1990.
- Reagan, Ronald. *An American Life: The Autobiography*. New York: Pocket Books, 1990.
- Rodinson, Maxime. *Europe and the Mystique of Islam*. Roger Veinus, terj. London: I. B. Tauris, 1987.
- Rubin, Barry. *Paved with Good Intentions: The American Experience and*

- Iran*. New York: Oxford University Press, 1980.
- Rugman, Jonathan. *Ataturk's Children: Turkey and the Kurds*. London: Cassell, 1996.
- Said, Edward. *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. New York: Pantheon Books, 1981.
- Orientalism*. New York: Vintage Books, 1978.
- Satloff, Robert. "An American Strategy to Respond to Political Islam." Soref Symposium. Dalam *Challenge to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*. Ed. Y. Mirsky, Matt Ahrens, dan J. Sultan. Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, Mei 1993.
- Saunders, Harold. "Diplomacy and Pressure, November 1979-Mei 1980" dan "The Crisis Begins." Dalam *American Hostages in Iran: The Conduct of a Crisis*. Ed. Warren Christopher. New Haven, CT: Yale University Press, a Council on Foreign Relations Book, 1985.
- Schleiermacher, Friedrich. *Der Christliche Glaube im Samtliche Werke*. 2d ed., vol. 3, pt. 1. Berlin: 1842. *The Christian Faith*. Terj. Inggris. Edinburgh, 1928.
- Sha'ban, Fuad. *Islam and Arabs in Early American Thought: The Roots of Orientalism in America*. Durham, NC: The Acorn Press, 1991.
- Shawcross, William. *The Shah's Last Ride*. London: Pan Books, 1989.
- Sick, Gary. *All Fall Down: America's Fateful Encounter with Iran*. London: I. B. Tauris, 1985.
- "Islam and the Norms of Democracy." Dalam *Under Siege: Islam and Democracy*. Occasional Papers 1. Ed. Richard W. Bulliet. New York: The Middle East Institute of Columbia University, 1994.
- "Military Options and Constraints." Dalam *American Hostages in Iran: The Conduct of a Crisis*. Ed. Warren Christopher. New Haven, CT: Yale University Press, a Council on Foreign Relations Book, 1985.
- Sigal, Leon V. *Reporters and Officials: The Organization and Politics of Newsmaking*. Lexington, MA: D. C. Heath, 1973.
- Sisk, Timothy D. *Islam and Democracy: Religion, Politics, and Power in the Middle East*. Washington, DC: United States Institute for Peace, 1992.
- Smith, Tony. *America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the 20th Century*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- Southern, R. W. *Western Views of Islam in the Middle Ages*. Cambridge: Harvard University Press, 1980.

- Spanier, John, dan Steven W. Hook. "American Foreign Policy Since World War II". Washington, DC: *Congressional Quarterly*, 13th ed., 1995.
- Steel, Ronald. *Temptations of a Superpower*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- Stowasser, Barbara Freyer, ed. *The Islamic Impulse*. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1987.
- Suleiman, Michael W. *The Arabs in the Mind of America*. Brattleboro, VT: Anana Books, 1988.
- "The Effects of American Perceptions of Arabs on Middle East Issues." Dalam *Split Vision: The Portrayal of Arabs in the American Media*. Ed. Edmund Ghareeb. Washington, DC: American-Arab Affairs Council, 1983.
- Suleiman, Michael W., ed. *U.S. Policy on Palestine: From Wilson to Clinton*. Normal, IL: Association of Arab American University Graduates, 1995.
- Tapper, Richard, ed. *Islam in Modern Turkey*. London: I. B. Tauris, 1991.
- Tapper, Richard, dan Nancy Tapper. " 'Thank God We're Secular!' Aspects of Fundamentalism in a Turkish Town." Dalam *Studies in Religious Fundamentalism*. Ed. Lionel Caplan. London: Macmillan, 1987.
- Turan, Ilter. "Religion and Political Culture in Turkey." Dalam *Islam in Modern Turkey*. Ed. Richard Tapper. London: I.B. Taurus, 1991.
- Vance, Cyrus. *Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy*. New York: Simon & Schuster, 1983.
- Wales, Charles, *Prince of Islam and the West*. New York: Oxford Centre for Islamic Studies, 1993.
- Weinberger, Caspar. *Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon*. New York: Warner Books, 1990.
- Woodward, Bob. *Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987*. New York: Simon & Schuster, 1987.
- Wolfowitz, Paul. "Challenges to U.S. Interests in the Middle East." Dalam *Challenges to U.S. Interests in the Middle East: Obstacles and Opportunities*. Ed. Y. Mirsky, Matt Ahrens, dan J. Sultan. Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy, Mei 1993.
- Wright, Robin. *Sacred Rage: The Wrath of Militant Islam*. New York: Simon & Schuster, 1985.

Jurnal

- Abdallah, Ahmed. "Egypt's Islamists and the State." *Middle East Report* (Juli/ Agustus 1993).
- Abramowitz, Morton I. "Dateline Ankara: Turkey After Ozal." *Foreign Policy*, no. 91 (Summer 1993).
- Ahmad, Feroz. "Politics and Islam in Modern Turkey." *Middle Eastern Studies* 27, no. 1 (Januari 1991).
- Ajami, Fouad. "The Sorrows of Egypt." *Foreign Affairs* 74, no. 5 (September/Oktobre 1995).
- Ali, M. M. "Refah Foreign Affairs Expert: Turkey's Outreach to Muslim States 'Realistic.'" *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (April/Mei 1997).
- Al-Marayati, Salam. "The Rising Tide of Hostile Stereotyping of Islam." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Juni 1994).
- Al-Sayyid, Mustapha K. "A Civil Society in Egypt." *Middle East Journal* 47, no. 2 (Spring 1993).
- Amuzegar, Jahangir. "The Truth and Illusion of Islamic Fundamentalism." *SAIS Review* 13 (Summer/Fall 1993).
- Ayata, Spencer. "Patronage, Party, and State: The Politicalization of Islam in Turkey." *Middle East Journal* 50, no. 1 (Januari 1995).
- Bann, U.A.B., dan Razia Akhter Banu. "Fundamentalist Islam: A Threat to the West?" *Islamic Studies* 32 (Spring 1993).
- Barracrough, Colin. "Roll Over Ataturk." *Middle East Insight* 11, no. 2 (Januari/Februari 1995).
- Bill, James A. "The United States and Iran: Mutual Mythologies." *Middle East Policy* 2, no. 3 (1993).
- Bird, Gene. "Administration Official Assures Middle East the 'Crusades Are Over'." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* 11, no. 2 (Juli 1992).
- Brown, James. "Islamic Fundamentalism and Turkey." *Journal of Politics and Military Sociology* 16 (Fall 1998).
- Brzezinski, Zbigniew, Brent Scowcroft, dan Richard Murphy. "Differentiated Containment." *Foreign Affairs* 76, no. 3 (Mei/Juni 1997).
- Cassandra. "The Impending Crisis in Egypt." *Middle East Journal* 49, no. 1 (Winter 1995).

- Chase, Robert S., Emily B. Hill, dan Paul Kennedy. "Pivotal States and U.S. Strategy." *Foreign Affairs* 75, no. 1 (Januari/Februari 1995).
- Christopher, Warren. "America's Leadership, America's Opportunity." *Foreign Policy*, no. 98 (Spring 1995).
- Chubin, Shahram. "Does Iran Want Nuclear Weapons." *Survival* 37, no. 1 (Spring 1995).
- Clarke, Duncan L., dan Daniel O'Connor. "U.S. Base-Rights Payments after the Cold War." *Orbis* 37, no. 3 (Summer 1993).
- Clawson, Patrick. "Liberty's the Thing, not Democracy: Ripostes." *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994).
- Connelly, Mathew. "Deja Vu A11 Over Again: Algeria, France and U.S." *National Interest*, no. 42 (Winter 1995-6).
- Coulombis, Theodore, dan Thanos Veremis. "In Search of New Barbarians: Samuel P. Huntington and the Clash of Civilizations." *Mediterranean Quarterly* 5 (Winter 1994).
- Dallal, Shaw J. "Islam and the U.S. National Interest." *The Link* 26 (Februari/Maret 1993).
- Djerejian, Edward P. "One Man, One Vote, One Time." *New Perspectives Quarterly* 10, no. 3 (Summer 1993).
- Dorsey, James M. "Erbakan Striking Balance Between Islamic Neighbors and Secular Army." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Oktober 1996).
- "Troubled Turkey Getting Seventh Government in Two Years." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Juli 1996).
- "Turkish Military 'Advice' Reins in Islamist Erbakan Government." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Juni/Juli 1997).
- "With Friends Like Qaddafi, Islamist Erbakan Doesn't Need Enemies." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (November/Desember 1996).
- Drake, Laura. "Still Fighting the Last Cold War." *Middle East Insight* 10 (September/Oktober 1994).
- Esposito, John L. "Political Islam: Beyond the Green Menace." *Current History* 93 (Januari 1994).
- "Fehim Adak: Erbakan Seeks Cooperation with America." Wawancara dalam *Middle East Quarterly* (Maret 1997).
- "Focus — Islam and Turkey: The Regional Impact." *Bulletin of Regional Cooperation in the Middle East* 6, no. 2 (Summer 1997).

- Fuller, Graham E. "The Appeal of Iran." *National Interest* (Fall 1994).
 "The Next Ideology." *Foreign Policy*, no. 98 (Spring 1995).
- Gerges, Fawaz A. "Clinton and the Middle East: Lost Opportunities?" *Foreign Policy* (Winter 1997).
 "Egyptian-Israeli Relations Turn Sour." *Foreign Affairs* 74, no. 3 (Mei/Juni 1995).
 "The Kennedy Administration and the Egyptian-Saudi Conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism." *Middle East Journal* 49, no. 2 (Spring 1995).
- Gole, Nilufer. "Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites." *Middle East Journal* 51, no. 1 (Winter 1997).
- Haass, Richard. "Paradigm Lost." *Foreign Affairs* (Januari/Februari 1995).
- Hadar, Leon T. "What Green Peril?" *Foreign Affairs* 72 (Spring 1993).
- Hashemi, William D. "Nixon's Children: Bill Clinton and the Permanent Arms Bazaar." *World Policy Journal* 12 (Summer 1995).
- Heper, Metin. "Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation." *Middle East Journal* 51, no. 1 (Winter 1997).
- Herman, Edward S. "The Media's Role in U.S. Foreign Policy." *Journal of International Affairs* 47, no. 1 (Summer 1993).
- Howe, Marvine. "Tensions Between Islamists and Secularists Grow in Turkey." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Mei/Juni 1996).
- "House Imposes New Limits on U.S. Military Aid Programs." *Arms Control Today* (Juli/Agustus 1994).
- Hunter, Jane. "Making Islam the Enemy." *Israeli Foreign Affairs* 8 (Mei/Juni 1994).
- Huntington, Samuel. "America's Changing Strategic Interests." *Survival* 33 (Januari/Februari 1991).
 "If Not Civilizations, What?: Paradigms of the Post-Cold War World." *Foreign Affairs* 72 (November/Desember 1993).
 "Religion and the Third wave." *National Interest* (Summer 1991).
 "The Clash of Civilizations?" *Foreign Affairs* (Summer 1993).
 "The Islamic-Confucian Connection." Wawancara dengan Nathan Gardels. *New Perspectives Quarterly* 10 (Summer 1993).
 "Will More Countries Become Democratic?" *Political Science Quarterly* 99, no. 2 (Summer 1984).

- Indyk, Martin. "Beyond the Balance of Power: America's Choice in the Middle East." *National Interest*, no. 26 (Winter 1991-2).
- "Interview With James A. Baker III." *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994).
- Karabell, Zachary. "The Wrong Threat: The United States and Islamic Fundamentalism." *World Policy Journal* 12 (Summer 1995).
- Kechichian, Joseph, dan Jeanne Nazimek. "Challenges to the Military in Egypt." *Middle East Policy* 5, no. 3 (September 1997).
- Kuniholm, Bruce. "Turkey and the West." *Foreign Affairs* (Spring 1991).
- Kurkcii, Ertugrul. "The Crisis of the Turkish State." *Middle East Report* (April/Juni 1996).
- Lake, Anthony. "Confronting Backlash States." *Foreign Affairs* 73, no. 2 (Maret/April 1994).
- Layne, Christopher, dan Benjamin Schwarz. "American Hegemony Without an Enemy." *Foreign Policy* 92 (Fall 1993).
- Lewis, William A. "Algeria at 35: The Politics of Violence." *Washington Quarterly* (Summer 1996).
- Lowrie, Arthur L. "The Campaign Against Islam and American Foreign Policy." *Middle East Policy* 4, no. 1-2 (September 1995).
- Makovsky, Alan. "Erbakan on the Ropes." *Policywatch*, no. 239. Diterbitkan oleh Washington Institute for Near East Policy, 12 Maret 1997.
- "How to Deal with Erbakan." *Middle East Quarterly* 4, no. 1 (Maret 1997).
- Makram, Ebeid. "Democratization in Egypt: The 'Algeria Complex.'" *Middle East Policy* 3, no. 3 (1994).
- Margulies, Ronnie, dan Ergin Yildizoglu. "The Political Uses of Islam in Turkey." *Middle East Report* (Juli/Agustus 1988).
- Marr, Phebe. "Islamic Revival: Security Issues." *Mediterranean Quarterly* 3 (Fall 1992).
- McArthur, Shirl. "Turkey Defies Iran Sanctions." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Oktober 1996).
- Middle East Policy Council. "The Middle East: What Is Our Long-Term Vision?" Diskusi dengan Bruce Riedel, William Quandt, Richard Falk, dan Thomas R. Mattair dalam *Middle East Policy* 3, no. 3 (1994).
- Miller, Judith. "Faces of Fundamentalism." *Foreign Affairs* 73, no. 6 (November/Desember 1994).
- "The Challenge of Radical Islam." *Foreign Affairs* (Spring 1993).

- Muravchik, Joshua. "Blaming America First." *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994).
- Noorbaksh, Mehdi. "The Middle East, Islam and the United States: The Special Case of Iran." *Middle East Policy* 2, no. 3 (1993).
- Nurhan, Aydin. "Turkey and Middle Eastern Stability." *Vital Speeches of the Day* 63, no. 5 (15 Desember 1996).
- Orris, Ziya. "Turkey in the Post-Cold War Era: In Search of Identity." *Middle East Journal* 49, no. 1 (Winter 1995).
- Paris, Jonathan S. "When to worry in the Middle East," *Orbis* (Fall 1993).
- Pierre, Andrew J., dan William B. Quandt. "Algeria's "at on Itself." *Foreign Policy*, no. 99 (Summer 1995).
- Pipes, Daniel. "Fundamentalist Muslims: Between America and Russia." *Foreign Affairs* 64 (Summer 1986).
- "Interview with Jesse Helms." *Middle East Quarterly* (Maret 1995).
- "Interview with Martin Indyk on 13 November 1993 - Perspectives from the White House." *Middle East Quarterly* 1, no. I (Maret 1994).
- Roberson, Barbara Allen. "Islam and Europe: An Enigma or a Myth?" *Middle East Journal* 48 (Spring 1994).
- Robins, Philip. "Between Sentiment and Self-Interest: Turkey's Policy Toward Azerbaijan and the Central Asian States." *Middle East Journal* 47, no. 4 (Autumn 1993).
- Rodman, Peter W. "Policy Brief: Co-opt or Confront Fundamentalist Islam?" *Middle East Quarterly* (Desember 1994).
- Rouleau, Eric. "The Challenge to Turkey." *Foreign Affairs* 72, no. 5 (November/Desember 1993).
- "Turkey Beyond Ataturk." *Foreign Policy*, no. 91 (Summer 1993).
- Sadowski, Yahya. "The New Orientalism and the Democracy Debate." *Middle East Report* 23 (Juli/Agustus 1983).
- Said, Abdul Aziz. "Islamic Fundamentalism and the West." *Mediterranean Quarterly* 3 (Fall 1992).
- Salame, Ghassan. "Islam and the West." *Foreign Policy*, no. 90 (Spring 1993).
- Salt, Jeremy. "Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey." *Middle East Studies* 31, no. 1 (Januari 1995).
- Sayari, Sabri. "Turkey: The Changing European Security Environment and the Gulf Crisis." *Middle East Journal* 46, no. 1 (Winter 1992).
- "Turkey's Islamist Challenge." *Middle East Quarterly* 3, no. 3

- (September 1996). ,
- Shahak, Israel. "With Iraq Neutralized, Israelis Seek Catalyst for War with Iran." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (April/Mei 1993).
- Shirlev, Edward G. "The Iran Policy Trap." *Foreign Policy*, no. 96 (Fall 1994).
- Sick, Gary. "A Sensible Policy Toward Iran: Consistency in American Policy Should Be a Top Priority." *Middle East Insight* (Juli/Agustus 1995).
- "The United States and Iran: Truths and Consequences." *Contention* 5, no. 2 (Winter 1996).
- Slade, Shelley. "The Image of the Arab in America: Analysis of a Poll on American Attitudes." *Middle East Journal* 35, no. 2 (Spring 1981).
- Stav, Arve. "The Muslim Threat to the Western World." *Midstream* 39 (Januari 1993).
- Sullivan, Denis J. "State and Civil Society in Conflict in Egypt." *Journal of Middle East Affairs* 3, no. 1-2 (Winter/Spring 1997).
- "Symposium: Resurgent Islam in the Middle East." Transkrip dalam *Middle East Policy* 3, no. 2 (1994).
- Thompson, John. "Exaggeration of American Vulnerability." *Diplomatic History* 16 (Winter 1992).
- "Turkey: The Emerging Market Bridging East and West." *Foreign Affairs* 75, no. 3 (Mei/Juni 1996).
- Twing, Shawn L. "Mideast Policy Makers Conference Examines Peace Process, Gulf Security." *Washington Report on Middle Eastern Affairs* (Oktober/ November 1995).
- Unal, Hasan. "Bosnia II: A Turkish Critique." *World Journal Today* 1, no. 7 (Juli 1995).
- Van Bruinessen, Martin. "Turkey's Death Squads." *Middle East Report* (April/Juni 1996).
- Voll, John O., dan John L. Esposito. "Islam's Democratic Essence." *Middle East Quarterly* 1, no. 3 (September 1994).
- White, Jenny B. "Pragmatists or Ideologues? Turkey's Welfare Party in Power." *Current History* (Januari 1997).
- Wright, Robin. "Islam, Democracy, and the West." *Foreign Affairs* (Summer 1992).
- Zubaida, Sami. "Turkish Islam and National Identity." *Middle East Report* (April/Juni 1996).

Koran dan Majalah

Adams, James. "Mubarak at Grave Risk of Being Overthrown by Maret of Islam." *Sunday Times*, London, 20 Februari 1994.

Al-Din, Randa Taqi. "France's Algeria Policy Is in Crisis." *Al-Hayat*, 1 Februari 1997.

Alemdar, Zeynep. "Turk Military on Anti-Islam Offense." *Associated Press*, 10 Juni 1997.

"Turkey to Combat Islam Influence." *Associated Press*, 11 Juni 1997.

"Algeria Calls on France Not to Interfere in Its Affairs." *Al-Hayat*, 2 Januari 1997.

"Algerian Elections Were Not Problem-Free." *New York Times*, 18 Juni 1997.

"Algeria's Sham Elections." Editorial. *New York Times*, 7 Juni 1997.

Al-Husseini, Jihan, dan Ishraf al-Fiqi. "Mubarak: The Terrorists in Britain; No Dialogue with Them Because It Strengthens Them." *Al-Hayat*, 24 November 1997.

Al-Majid, Wahid Abd. "A Fundamentalist Threat?" *Al-Hayat*, 28 Juli 1997.

"America and Islam: A Wobbly Hand of Friendship." *Economist*, 26 Agustus 1995.

"America Arms Turkey's Repression." Editorial. *New York Times*, 17 Oktober 1995.

"America Reviews Its Policy in Algeria: No Fundamental Shift Is Expected." *Al-Hayat*, 19 Oktober 1997.

"Amnesty International Requests 'International Investigation' of Massacres in Algeria." *Al-Hayat*, 19 November 1997.

"An Arab-International Consensus on Condemning the Luxor Attack." *Al-Hayat*, 19 November 1997.

"An Interview With Ronald Reagan." *Time*, 17 November 1980.

"Anwar Haddam Is on Food Strike: Grant Me Political Asylum or Hand Me in to Algeria." *Al-Hayat*, 16 Mei 1997.

"ARCO to Produce Oil with Algerians." *New York Times*, 16 Februari 1996.

Avineri, Shlomo. "The Return to Islam." *Lies of Our Times*, Maret/April 1993.

Baram, Haim. "The Demon of Islam." *Middle East International*, 2 Desember 1994.

- Baram, Zeyno. "Too Little Stability in Turkey." *Christian Science Monitor*, 18 Februari 1997.
- Barzin, Saeed. "Iran Rides High." *Middle East International*, 16 Agustus 1996.
- "Ben Bellah: Nobody Knows Who Kills in Algeria." *Al-Hayat*, 19 November 1997.
- Bermudes, Robert W. "Jihad: Violence or Spiritual Struggle?" *Middle East International*, 18 Februari 1994.
- Bin Jida, Ghassan. "Khomeini Stresses the Need to Preserve Fundamentalism and Warns Against the 'Threat of Cultural Invasion.'" *Al-Hayat*, 11 Desember 1996.
- Blustein, Paul. "House Passes Measure Against Foreign Firms Investing in Iranian, Libyan Oil." *Washington Post*, 24 Juli 1996.
- Bohlen, Celestine. "European Parliament Admits Turkey to Its New Customs Union." *New York Times*, 14 Desember 1995.
- "Turkish Army in New Battle." *New York Times*, 30 Maret 1996.
- Borderwich, Fergus M. "A Holy War Heads Our Way: A Rising Tide of Islamic Radicalism Is Sweeping over the Middle East and Threatening Western Security Interests." *Readers Digest*, Januari 1995.
- Borowiec, Andrew. "French-U.S. Clash over Algeria Policy Escalates." *Washington Times*, 5 Agustus 1994.
- Brooke, James. "Attacks on U.S. Muslims Surge Even as Their Faith Takes Hold." *New York Times*, 28 Agustus 1995.
- Cohen, Richard. "If Turkey Went the Way of Iran." *Washington Post*, 29 Juni 1995.
- Cohen, Roger. "A Chance to Try to End an Agony." *New York Times*, 2 Februari 1997.
- "Algeria Says Charter Passes, But Critics Charge Vote Fraud." *New York Times*, 30 November 1996.
- "Algerian Links Rebels to 'Foreign Interests.'" *New York Times*, 25 Januari 1997.
- "Algerians Seem Poised to Embrace Authority." *New York Times*, 29 November 1996.
- "Algeria's Main Rebel Faction Takes Risks and Calls Truce." *New York Times*, 25 September 1997.
- "Divisions Deepen Among Algeria's Military Rulers." *New York Times*, 11 September 1997.

"In Algeria, Oil and Islam Make a Volatile Mixture." *New York Times*, 28 Desember 1996.

"Islamic Front in Algeria Calls for Truce and Peace Talks." *New York Times*, 28 September 1997.

"Military Tightens Grip in Algeria Elections." *New York Times*, 7 Juni 1997.

"West's Fear in Bosnia: 1) Chaos 2) Islam." *New York Times*, 13 Maret 1994.

"With Leading Party Banned, Algeria Elects a New Parliament." *New York Times*, 6 Juni 1997.

Coll, Steve. "The U.S. Case Against Iranian Nukes." *Washington Post*, 15-21 Mei 1995, *National Weekly edition*.

"Condemnation of Luxor Massacre Continues and Consensus Regarding Its Harm to Islam." *Al-Hayat*, 20 November 1997.

Couturier, Kelly. "Ignoring U.S., Turkey and Iran Sign Trade Accords." *Washington Post*, 22 Desember 1996.

"New Turkish Leader's Islamic Vision Clouded by Political Reality." *Washington Post*, 25 Juli 1996.

"Turkey, Israel Launch a Military Partnership." *Washington Post*, 16 April 1996.

"Turkish Parties Vow Coalition to Keep Islamists out of Power." *Washington Post*, 26 Desember 1995.

"Turk's Libya Trip Causes Political Crisis at Home." *Washington Post*, 8 Oktober 1996.

Cowell, Alan. "Berlin Court Says Top Iran Leaders Ordered Killings." *New York Times*, 11 April 1997.

"Mixed Response from Europe on Ruling Linking Iran to Killings." *New York Times*, 30 April 1997.

"U.S. Fails to Enlist European Allies in Iranian Trade Embargo." *New York Times*, 3 Mei 1995.

Crossman, Daniel. "U.S. and Iran Cooperating on Ways to End Afghan War." *New York Times*, 15 Desember 1997.

Crossette, Barbara. "Democracies Love Peace, Don't They?" *New York Times*, Minggu, 1 Juni 1997.

"U.S. Aide Calls Mushin Militants Big Concern in World." *New York Times*, 1 Januari 1992.

Darnton, John. "Discontent Seethes in Once-Stable Turkey." *New York*

- Times*, 2 Maret 1995.
- "Delicate Relations with Turkey." Editorial. *New York Times*, 8 Maret 1997.
- Dergham, Rhagida. "Amman Reserves Request to Call for Dialogue in Algeria." *Al-Hayat*, 12 September 1997.
- Dickey, Christopher. "Islam Is Not the Issue." *Newsweek*, 30 Mei 1994.
- Driefus, Claudia. "Who's the Enemy Now?" *New York Times*, Minggu, 21 Mei 1995, *Magazine section*.
- "Egypt Is Upset by Britain's Noncooperation in Combatting Terrorism." *Al-Hayat*, 30 November 1997.
- Emerson, Steven. "The Great Satan Wins One." *Wall Street Journal*, 25 Juni 1993.
- Evans, Rowland, dan Robert Novak. "Ripe for Retaliation." *Washington Post*, 1 Agustus 1996.
- "Fadallah Accuses Israel and America in the Luxor Operation." *Al-Hayat*, 21 November 1997.
- Farhan, Haq. "Algeria-U.S.: Washington Reaches Out to Muslim Moderates." *Inter Press Service*, 6 Maret 1995.
- Feldman, Trude B. "Christopher: Mideast Gains Will Hold." *Washington Times*, 18 Januari 1995.
- Frazer, Suzan. "Turkey Islamic Leader Cedes Power." *Associated Press*, 13 Juni 1997.
- Friedman, Robert I. "One Man's Jihad." *Nation*, 15 Mei 1995.
- Friedman, Thomas L. "Baker's Trip to Nations Unready for Independence." *New York Times*, 16 Februari 1992.
- "Republics Promise to Protect Rights." *New York Times*, 13 Februari 1992.
- "Too Much of a Good Thing." *New York Times*, 18 Juni 1995.
- "Fundamentalist Fear." *Economist*, 6-12 Agustus 1994.
- Gelb, Leslie. "U.S. Sees Opportunities and Risks in Mideast after War in Lebanon." *New York Times*, 31 Oktober 1982.
- Glastris, Steve. "A Fundamental Turn by the Bosphorus." *US. News and World Report*, 26 Februari 1996.
- Glazer, Nathan. "Debate on Aliens Flares Beyond the Melting Pot." *New York Times*, 23 April 1995.
- Goshko, John 1M. "U.S. Modifies Statement on Algerian Move."

Washington Post, 15 Januari 1992.

Greenhouse, Steven. "U.S. Gives Russia Secret Data on Iran to Fight Atom Deal." *New York Times*, 3-4 April 1995.

"U.S. Support for Turks' Anti-Kurd Campaign Dims." *New York Times*, 29 Maret 1995.

Haberman, Clyde. "Israel Focuses on the Threat Beyond the Arabs-in Iran." *New York Times*, 8 November 1992.

Hasan, Daoud. "Iranian President To Mubarak: Foreign Powers Conspire Against Egypt." *Al-Hayat*, 20 November 1997.

Hasan, Sana. "My Lost Egypt." *New York Times*, Minggu, 22 Oktober 1995, seksi majalah.

Hedges, Chris. "Iran Mei Be Able to Build an Atomic Bomb in Five Years, U.S. and Israeli Officials Fear." *New York Times*, 5 Januari 1995.

Hoagland, Jim. "Political Con Game in Turkey." *Washington Post*, 11 Juli 1996.

Hoffman, David. "Israel Seeking to Convince U.S. That West is Threatened by Iran." *Washington Post*, 13 Maret 1993.

Holmes, Steven A. "U.S. Says Terrorist Attacks Dropped Sharply in 1992." *New York Times*, 1 Mei 1993.

Hope, Hugh. "The New Middle: Turks Add Their Voices to Contest of Generals and Fundamentalists." *Wall Street Journal*, 14 Maret 1997.

Howaidi, Fahmi. "Political Thinking!" *Al-Ahram*, 2 Maret 1993.

Hussain, Mushahid. "America's Quest for an Islam Policy." *Middle East International*, 3 Maret 1995.

Ibrahim, Youssef. M. "Algeria Gains a Vote of Confidence with Foreign Oil Contracts," *New York Times*, 12 Desember 1995.

Ignatius, David. "Islam in the West's Sights: The Wrong Crusade?" *Washington Post*, 8 Maret 1992.

"Iran Eases Stand on Peace Process." *Jordan Times*, 4 Juli 1995.

Islam, Shada. "Cautious EU Response." *Middle East International*, 5 Juli 1996.

"Turkey and NATO." *Middle East International*, 21 Februari 1997.

"It's Racist, But Hey, It's Disney." *New York Times*, 14 Juli 1993.

Jehl, Douglas. "Egypt Is Playing Down Sheik's Jail Term in U.S.," *New York Times*, 20 Januari 1996.

"In the Face of Criticism, Egypt Sentences 54 Muslim Leaders," *New*

- York Times*, 24 November 1995.
- "In Uneasy Time, Saudi Prince Provides a Hope of Stability." *New York Times*, 19 Januari 1996.
- "Iran-Backed Terrorists are Growing More Aggressive, U.S. Warns." *New York Times*, 18 Maret 1993.
- "Iranian President Calls for Opening Dialogue with the U.S." *New York Times*, 15 Desember 1997.
- "Islamic Militants' War on Egypt: Going International," *New York Times*, 20 November 1995.
- "Killings Erode Cairo's Claim to 'Control' Militants." *New York Times*, 15 Maret 1997.
- "Shake-up in Cairo Follows Tourists' Killings." *New York Times*, 20 November 1997.
- "Jospin Criticizes the Violence of the Government and the Islamists in Algeria." *Al-Hayat*, 1 Oktober 1997.
- Kamal, Hassam. "Egyptian Official Blames America for the 'Arab Afghani' Phenomenon." *Al-Hayat*, 26 klay 1997.
- Kamal, Hassam, dan Mohammed Saleh. "_A1-Alfi: No Dialogue with al-Jama'a al-Islarnivya in Egypt," *Al-Hayat*, 7 September 1997.
- Kaplan, Robert. "Tales From the Bazaar." *Atlantic Monthly*, Agustus 1992.
- Kashana, Rashid. "Algerian Massacres and the Reconciliation Project." *Al-Hayat*, 25 September 1997.
- Kennedy, Paul, dan Matthew Connelly. "Must It Be the Rest Against the West?" *Atlantic Monthly*, Desember 1994.
- "Kharazi: Relations with America Do Not Conflict with Revolution's Principles." *Al-Hayat*, 16 September 1997.
- Khatami, Mohammed. "The Dialogue of Civilizations and Its Difficulties." *Al-Hayat*, 11 Juli 1997.
- "Khatami Promises to Adhere to His Program: We Will Avoid Discord with the World." *Al-Hayat*, 5 Agustus 1997.
- Kifner, John. "Alms and Arms: Tactics in a Holy War." *New York Times*, 15 Maret 1995.
- King, John. "A 'Clash of Civilizations': Pentagon Rhetoric on the 'Islamic Threat.'" *Middle East International*, 3 Maret 1995.
- Kinzer, Stephen. "Brussels Meeting Dims Turkey's Bid to Join European Union." *New York Times*, 11 Maret 1997.
- "Europeans Shut the Door on Turkey's Membership in Union." *New*

York Times, 27 Maret 1997.

"In Defense of Secularism, Turkish Army Warns Rulers." *New York Times*, 2 Maret 1997.

"Islam and Liberty: Struggles in Two Lands." *New York Times*, 22 Juni 1997.

"Meeting U.S. Envoy, Turkish Premier Takes Pro-Arab Stance." *New York Times*, 3 Juli 1996.

"Once the Hope of Secular Turks, Ex-Leader Is Now Widely Reviled." *New York Times*, 6 April 1997.

"Pro-Islamic Premier Steps Down in Turkey Under Ariny Pressure." *New York Times*, 19 Juni 1997.

"The Islamist Who Runs Turkey, Delicately." *New York Times*, 23 Februari 1997, seksi majalah.

"Turkey Sending Envoy to U.S. to Clear up 'Misunderstanding.'" *New York Times*, 27 Desember 1996.

"Turkey's Islamic Leaders Vow to Keep Secularism." *New York Times*, 14 Maret 1997.

"Turkish Ex-Premier's Comeback Hits a Snag." *New York Times*, 2 Juli 1997.

"Turkish Generals Raise Pressure on Premier." *New York Times*, 13 Juni 1997.

"Turkish Judge Scolds U.S. for Opposing a Ban on an Islamic Party." *New York Times*, 28 November 1997.

"Turk's Chief Surprisingly Silent on Iraq." *New York Times*, 14 September 1996.

"Turks March in Campaign to Preserve Secularism." *New York Times*, 16 Februari 1997.

Kohen, Sami. "Dollars vs. Diplomacy: Turks Differ with 'U.S.'" *Christian Science Monitor*, 25 Mei 1995.

"In a First Test, Pro-Islamic Turkey Stays the Course on Western Ties." *Christian Science Monitor*, 26 Juli 1996.

"Islamic Party Jumps Out Front." *Christian Science Monitor*, 29 November 1995.

"Islamic Party Win Worsens Turkey's East vs. West Woes." *Christian Science Monitor*, 27 Desember 1995.

"Pro-Islamic Premier Stays in Power, but the Future of Turkey Still Murky." *Christian Science Monitor*, 10 Oktober 1997.

- "Regional Conflicts on U.S.-Turkey Agenda." *Christian Science Monitor*, 18 Oktober 1993.
- "Secular Turks Hope to Check Nation's First Islamic Leader." *Christian Science Monitor*, 1 Juli 1996.
- "To U.S., Turk Leader's Tour Goes to All the Wrong Places." *Christian Science Monitor*, 3 Oktober 1996.
- "Turkey's Military Tries Political Moves to Squelch Premier's Islamic Ambition." *Christian Science Monitor*, 3 Juli 1997.
- "Who Runs Turkey?" *Christian Science Monitor*, 9 Mei 1997.
- "With Islam's Crescent Rising over Turkey, the Army Howls." *Christian Science Monitor*, 2 Juni 1997.
- Kramer, Martin. "Islam vs. Democracy." *Commentary*, Januari 1993.
- "The Jihad Against the Jews." *Commentary*, Oktober 1994.
- Krauthammer, Charles. "Iran: Orchestrator of Disorder." *Washington Post*, 1 Januari 1993.
- Lake, Anthony. "The Middle East Moment: At the Heart of Our Policy, Extremism Is the Enemy." *Washington Post*, 24 Juli 1994.
- Lane, Charles. "Rock the Casbah." *New Republic*, 27 Februari 1995.
- Larsen, Alan P. "Building U.S.-Turkey Economic Cooperation." Pidato di U.S.-Turkey Business Council, 20 Februari 1997, dimuat dalam *Turkish Times*, 1 Maret 1997.
- Lauter, David. "Clinton Seeks to Build Bridge to Muslim World." *Los Angeles Times*, 27 Oktober 1994.
- Law, John. "Martin Indyk Lays Out the Clinton Approach." *Middle East International*, 11 Juni 1993.
- Lewis, Anthony. "This is America." *New York Times*, 1 Mei 1995.
- Lewis, Bernard. "Islam and Liberal Democracy." *Atlantic Monthly*, Februari 1993.
- "The Roots of Muslim Rage." *Atlantic Monthly*, September 1990.
- Lippman, Thomas W. "No More Mr. Nice Guy: On the Subject of Iran, Warren Christopher Is the Hardest of the Hard-Liners." *Washington Post*. 15-21 Mei 1995, *National Weekly edition*.
- "State Dept. Human Rights Report Chastises Several U.S. Allies." *Washington Post*, 31 Januari 1997.
- "U.S. Prepared to Airlift Dissidents." *Washington Post*, 12 September 1996.

- "Living with Islam." *Economist*, 17 April 1992.
- "Living with Islam." *Economist*, 18-24 Maret 1994.
- "Makeup of Iran's Cabinet Defies the Hard-Liners." *New York Times*, 13 Agustus 1997.
- Marquand, Robert. "Religious Right Elbows Way onto World's Political Stage." *Christian Science Monitor*, 13 Juni 1996.
- McDowall, David. "The Destruction of Turkey's South East." *Middle East International*, 6 Desember 1996.
- "Military Meddling in Turkey." Editorial. *New York Times*, 14 Juni 1997.
- Millward, William. "The Rising Tide of Islamic Fundamentalism I," *Commentary* (Ottawa), April 1993.
- "The Rising Tide of Islamic Fundamentalism II." *Commentary* (Ottawa), April 1993.
- Mitchell, Alison. "Clinton Sees Hope in the Election of Moderate as President of Iran." *New York Times*, 30 Mei 1997.
- Mohammed, Hazem. "Changes in the Egyptian Security Apparatus Highlights the Role of 'Political Security.'" *Al-Hayat*, 21 November 1997.
- "Muslims Don't Fare Well in Poll," *Pantagraph*, 13 Mei 1993.
- Mustapha, Hala. "The Brothers and the Egyptian State: New Confrontation." *Al Wasat*, 7 Agustus 1995.
- Myers, Steven Lee. "White House Says Iran Won't Violate Sanctions Act." *New York Times*, 28 Juli 1997.
- Nasser, Salim. "Zeroual Attempts to Clean the Reputation of the Military Institution." *Al-Hayat*, 18 Oktober 1997.
- Neff, Donald. "Agony in Washington." *Middle East International*, 10 Oktober 1997.
- "Clinton Places U.S. Policy at Israel's Bidding." *Middle East International*, 31 Maret 1995.
- "U.S. and Iran: Congressional Cowboys." *Middle East International*, 17 November 1995.
- "U.S. and Iran: Policy under Fire." *Middle East International*, 2 Mei 1997.
- Negus, Steve. "Copts Massacred." *Middle East International*, 7 Maret 1997.
- "Tourists Slain in Cairo." *Middle East International*, 26 September 1997.

- Olson, Robert. "An Israeli-Kurdish Conflict?" *Middle East International*, 5 Juli 1996.
- "Democratization and the Kurdish Question." *Middle East International*, 7 Maret 1997.
- "Israel and Turkey — Consolidating Relations." *Middle East International*, 4 April 1997.
- "PKK the Target." *Middle East International*, 21 Februari 1997.
- "The Turkey-Israel Agreement and the Kurdish Question." *Middle East International*, 24 Mei 1996.
- Onaran, Yalman. "Muslim Leaders Pledge Cooperation." *Associated Press*, 15 Juni 1997.
- "Turkey's Military Boycotts Islam." *Associated Press*, 7 Juni 1997.
- "Outlawing Islam." Editorial. *New York Times*, 19 Juni 1997.
- Pelletreau, Robert. "Symposium: Resurgent Islam." Artikel opini. *New York Times*, 2 Oktober 1995.
- Perlmutter, Amos. "Wishful Thinking about Islamic Fundamentalism." *Washington Post*, 19 Januari 1992.
- Peterson, Scott. "Mideast Balance of Power Shifts as an 'Axis' Is Born." *Christian Science Monitor*, 29 Agustus 1996.
- "Turkey's Army Keeps the Faith at Bay." *Christian Science Monitor*, 9 April 1996.
- "Turkey Ties Trade Knot with Iran, Sparks Alarm." *Christian Science Monitor*, 24 Desember 1996.
- Phillips, James. "The Rising Threat of Revolutionary Islam in Algeria." *The Heritage Foundation: Backgrounder*, 9 November 1995.
- Pianin, Eric. "Clinton Approves Sanctions for Investors in Iran, Libya." *Washington Post*, 6 Agustus 1996.
- Pipes, Daniel. "Same Difference: The Islamic Threat — Part I", *National Review*, 7 November 1994.
- "The Muslims Are Coming! The Muslims Are Coming!" *National Review*, 19 November 1990.
- Pomfret, John. "Turkey's Identity Crisis." *Washington Post*, 17 April 1995.
- Pope, Hugh. "A Troubled System." *Middle East International*, 8 November 1996.
- "Attempt on Demirel's Life." *Middle East International*, 24 Mei 1996.
- "Erbakan at the Helm." *Middle East International*, 5 Juli 1996.

"Erbakan's Strange Travels." *Middle East International*, 25 Oktober 1996.

"The Erbakan Whirlwind Sweeps Through Turkey." *Middle East International*, 19 Juli 1996.

"Turkey's Generals Behind the Israel Axis." *Middle East International*, 16 Mei 1996.

Pope, Nicole. "Long Live Provide Comfort." *Middle East International*, 10 Januari 1997.

"The Crisis Drags On." *Middle East International*, 13 Juni 1997.

"The End of Provide Comfort?" *Middle East International*, 6 Desember 1996.

"Turbulent Times." *Middle East International*, 7 Maret 1997.

"Turkey: Erbakan Versus the Generals." *Middle East International*, 2 Mei 1997.

"Turkey Goes Back into Iraq." *Middle East International*, 30 Mei 1997.

"Punishing Iran." *Economist*, 6 Mei 1996.

Purdum, Todd S. "Clinton Fears Partisan Fight on Anti-Terrorism Proposal." *New York Times*, 29 April 1997.

"Clinton Pays Homage to an Extraordinary Generation." *New York Times*, 9 Mei 1995.

"Clinton to Order a Trade Embargo Against Teheran." *New York Times*, 1 Mei 1995.

"Rafsanjani: We Support the Palestinian Struggle but We Reject Any Terrorist Act." *Al-Hayat*, 12 Maret 1996.

"Rebel Group Forswears Tourist Attacks in Egypt." *New York Times*, 9 Desember 1997.

"Reform to Confront Terrorism." *Al-Hayat*, 23 November 1997.

Rodman, Peter W. "Mullah Moola." Dalam "The Islamic Threat," pt. 2. *National Review*, 7 November 1994.

Rosenfeld, Stephen S. "Through the Minefield of Political Islam." *Washington Post*, 31 Maret 1995.

Rosenthal, A. M. "How to Trade with Iran." *New York Times*, 24 Maret 1995.

"Things America Can Do to Curtail Terrorism, Domestic and Foreign." Kolom *New York Times*. Dimuat ulang di *International Herald Tribune*, 26 April 1995.

“Rules of Engagement.” *Economist*, 2 Oktober 1993.

Safire, William. “Sending in Marines.” *New York Times*, 14 Februari 1980.

Said, Edward W. “The Phony Islamic Threat.” *New York Times*, Minggu, 21 November 1993, seksi majalah.

Saleh, Heba. “‘Rigged’ Elections.” *Middle East International*, 7 November 1997.

“The FIS Calls a Cease-Fire.” *Middle East International*, 10 Oktober 1997.

Saleh, Mohammed. “Egypt: ‘Al-Jama’a al-Islamiyya’ Decides to Stop Operations Against Tourism.” *Al-Hayat*, 8 Desember 1997.

“Egypt: Confrontation Between the Government and Human Rights Organizations.” *Al-Hayat*, 10 Agustus 1995.

“Egypt: Failure of Attempts to Convince Leaders of ‘al-Jama’a’ and Jihad’ Overseas to Support the Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 4 Agustus 1997.

“Egypt: Imprisoned Leaders of ‘al jama’a’ Considered the Luxor Operation a Violation of the Safety Vows.” *Al-Hayat*, 23 November 1997.

“Egypt: Leaders of ‘al jama’a’ and ‘Jihad’ Join the Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 13 Juli 1997.

“Egypt: Leaders of the ‘al jama’a al-Islamiyya’ Decide to Cease Hostilities.” *Al-Hayat*, 6 Juli 1997.

“Egypt: The Moment of Reckoning for the Islamic Brothers.” *Al-Wasat*, 7 Agustus 1995.

“Egypt: Two Leaders of Jihad Join the Declaration of Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 10 Juli 1997.

“Investigations Inside the ‘al Jama’a al-Islamiyya’ Look at Irregularities in the Luxor Operation.” *Al-Hayat*, 29 November 1997.

“Members in ‘al-Jama’a’ and ‘Jihad’ Join Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 25 Juli 1997.

“Mubarak: ‘The Brothers’ Practice Terrorist Activities.” *Al-Hayat*, 27 September 1995.

“‘The Case of Big Assassination’ in Egypt: The Accused Support the Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 25 September 1997.

Saleh, Mohammed, dan Hussain Kamal. “Leaders of ‘al-Jama’a’ and ‘Jihad’ Overseas Reject the Cease-Fire.” *Al-Hayat*, 12 Juli 1997.

Saleh, Mohammed, Hussam Kamal, dan Hazem Mohammed. “Egypt: The

- Army Participates for the First Time in the Protection of Tourist Areas." *Al-Hayat*, 23 November 1997.
- Schmitt, Eric. "Republicans Warn Russia That Its Deal with Iran Threatens Aid." *New York Times*, 8 Mei 1995.
- Schwed, Barry. "Albright Backs Secular Turkey." *Associated Press*, 13 Juni 1997.
- Sciolino, Elaine. "Calling Iran an 'Outlaw State,' Christopher Backs U.S. Trade Ban." *New York Times*, 2 Mei 1995.
- "Christopher Proposes Tighter Curbs on Trade with Iran." *New York Times*, 31 Maret 1995.
- "Christopher Signals a Tougher U.S. Line Toward Iran." *New York Times*, 31 Maret 1993.
- "C.I.A. Asks Congress for \$19 Million to Undermine Iraq's Rulers and Rein in Iran." *New York Times*, 12 April 1995.
- "Egypt Warned U.S. of Terror, Mubarak Says." *New York Times*, 5 April 1993.
- "In World of Flux, a Constant: U.S. and Iran Still Foes." *New York Times*, Minggu, 29 Desember 1996.
- "Iranian Leader Says U.S. Move on Oil Deal Wrecked Chance to Improve Ties," *New York Times*, 16 Mei 1995.
- "The Point Man: Berger Manages a Welter of Crises in the Post-Cold War White House." *New York Times*, 18 Mei 1998.
- "The Red Menace Is Gone. But Here's Islam." *New York Times*, Minggu, 21 Januari 1996.
- "U.S. Asserts Iranians Plotted to Disrupt Rally in Germany." *New York Times*, 25 Juni 1995.
- "U.S. Pressure Put on Iran and Iraq." *New York Times*, 5 April 1995.
- Singer, David E. "Two-Edged Sword: Anti-Terrorism Law Risks American Relations with Allies." *New York Times*, 30 September 1997.
- "Sixty-Six Percent of Egyptians Do Not Pay Attention to Politics." *Al-Hayat*, 19 April 1997.
- Swanson, David. "Secular Turkey Teeters over Plan to Close Islamic Schools." *Christian Science Monitor*, 12 Juni 1997.
- "The Clinton Administration Condemned the Outrageous Massacres in Algeria." *Al-Hayat*, 4 September 1997.
- "Turkey Crosses a Line." Editorial. *New York Times*, 25 Maret 1995.
- "Turkey Is a European Country." Wawancara dengan Menteri Luar Negeri

- Abdullah Gul. *Turkish Times*, 1 Maret 1997.
- "Turkey, Star of Islam." *Economist*, 14 Desember 1991.
- "Turkey's Meddlesome Generals." Editorial. *New York Times*, 25 Maret 1997.
- "Turkish Prosecutor Seeks to Outlaw Islamic Party." *New York Times*, 22 Mei 1997.
- "U.S. Criticizes Turkish Leader for Libya Trip and Trade Deal." *New York Times*, 8 Oktober 1996.
- "U.S. Views Threat by Iraq as Strategy to Split Critics." *New York Times*, 25 September 1990.
- "U.S. Voices Support for Algeria Bid to End Civil Strife." *Reuters*, 12 April 1996.
- "Washington and the Kurds." Editorial. *New York Times*, 4 April 1995.
- "Washington Supports the Algerian Government in Its Military Effort." *Al-Hayat*, 11 September 1997.
- Weaver, Mary Ann. "The Battle for Cairo." *New Yorker*, 30 Januari 1995.
- Weiner, Tim. "U.S. Plan to Change Iran Leaders Is an Open Secret Before It Begins." *New York Times*, 26 Januari 1996.
- Weymouth, Lally. "Saddam's New Friend." *Washington Post*, 30 Juli 1996.
- "Turkey: An Anti-Western Tilt?" *Washington Post*, 23 Januari- 1996.
- "What Turkey Needs." Editorial *Washington Post*. Dimuat ulang dalam *International Herald Tribune*, 21-22 Juni 1997.
- "Where Islam Recruits." *Economist*, 12 November 1994.
- Wright, Robin. "Islamist's Theory of Relativity." *Los Angeles Times*, 27 Januari 1995.
- Zuckerman, Mortimer. "Beware the Religious Stalinists." *US. News and World Report*, 22 Maret 1993.

Survei, Dokumentasi, Makalah, dan Laporan-laporan lain

- American Arab Anti-Discrimination Committee. *1990 ADC Annual Report on Political and Hate Violence*. Washington, DC: American-Arab Anti Discrimination Committee, Februari 1991.
- Barkey, Henry J. "Turkish Politics after the Elections." Makalah tak diterbitkan, disampaikan pada Komisi Keamanan dan Kerja Sama di

Eropa, 25 Januari 1996.

Council on American-Islamic Relations (CAIR). "A Rush to Judgments." Laporan khusus tentang bias dan pelecehan anti-Muslim menyusul pengeboman Oklahoma City, Juni 1995.

Davis, Edward B. "Changing National Security Policy in the Clinton Administration." Makalah tak diterbitkan, disampaikan pada pertemuan tahunan International Studies Association, Chicago, IL, Januari 1995.

Entelis, John P. "Islam and Democracy: A Dilemma for U.S. Policy — A Panel Discussion." Pada "Islam and the U.S.: Challenges for the Nineties," Soref Symposium, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, DC, 27 April 1992.

"Islamic Activism in North Africa: The View from Within — Algeria and Tunisia." Makalah tak diterbitkan, disampaikan di Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Department of Defense, Washington, DC, 29 Maret 1996.

Jihad in America. Dibuat untuk PBS oleh wartawan Steven Emerson dan ditayangkan pada 21 November 1994. SAE Productions, 1994.

Khomeini's Message to Gorbachev. BBC Summary of World Broadcast, ME/ 0354/A/4-6, 10 Januari 1989.

Makovsky, Alan. "Assessing the Intentions of Turkey's Refah Party." Dalam *Muslim Politics Report*, diterbitkan oleh Council on Foreign Relations, New York, November/Desember 1996.

Middle East Watch. *Behind Closed Doors: Torture and Detention in Egypt*. New York: Human Rights Watch, 1992.

Egypt: Hostage-Taking and Intimidation by Security Forces. New York: Human Rights Watch, Januari 1995.

Egypt: Trials of Civilians in Military Courts Violate International Law. New York: Human Rights Watch, Juli 1993.

Mufti, Malik. "Daring and Caution in Turkish Foreign Policy." Makalah tak diterbitkan, disampaikan pada Middle East Studies Association, Providence, RI, November 1996.

Naveh, Chanan. "Foreign Policy of Regional Powers in the 1990s: The Cases of Israel and Turkey." Makalah tak diterbitkan, disampaikan pada Konvensi nasional ke-35 International Studies Association, Washington, DC: 29-31 April/Mei 1994.

Survei yang disponsori oleh American Muslim Council dan dilakukan oleh John Zogby Group International. Jumlah responden: 905. Waktu survei: 16-23 Maret 1993.

Survei yang disponsori oleh National Conference on Inter-Group Relations, Ford Foundation, dan Joyce Foundation. Dilakukan oleh L. H. Research. Jumlah responden: 2755. Waktu survei: 6-8 Agustus 1993.

Indeks

- Abdel-Nasser, Gamal 50
Abdul Rahman, Omar 65, 130
Afghan 225
Afghanistan 76, 82, 83, 86, 87,
175, 194, 224, 225, 251
Afrika 52, 57, 91, 129, 188, 193
AIPAC 161
AIS 206
Al Gore 228
Al Haram 54, 82
Al Islamiyah 222
Al-Alfi, Hassan 232, 234, 235
Al-Bashir, Omar Hassan 89, 235
Albright, Madeline 112, 114, 154,
257, 258, 270, 294
Al-Jamaah 222-224, 226, 228,
231-235, 238-300
Aljazair 19, 35, 56, 59, 89-95, 98-
101, 114, 123, 124, 128, 134,
136, 138, 139, 159, 166, 167,
185-212, 221, 222, 226, 228,
229, 235, 236, 238, 240, 250,
257, 262, 269, 271, 272, 274,
298, 300-303, 305, 308, 310
Aljir 87, 189, 198, 200, 206, 210,
301, 302
Allison, Robert 9, 10
Amman 138
Anadarko 203
Ankara 250-256, 258-261, 267-
269, 271-273, 276, 277, 303,
304, 309
Annan, Kofi 207
Anti-Amerika 12, 56, 57, 78, 82,
137, 264, 302
Anti-Amerikanisme 39, 58, 65
Anti-Barat 5, 26, 27, 33-35, 56,
58, 85, 91, 120, 131, 132,
137, 166, 240, 252, 262, 263,
265, 297, 302, 305
Anti-Castro 57
Anti-Iran 66, 156
Anti-Islam 2, 17, 59
Anti-Israel 137, 261
Anti-Semitisme 55
Anti-Soviet 83, 265
Arab-Israel 11, 12, 16, 37, 41, 51,
61, 63, 85, 93, 95, 101, 113,
132, 133, 135, 136, 150, 153-
155, 160, 161, 164, 166, 169,
174, 196, 200, 222, 237, 254,
255, 294, 296, 299, 306, 307,
311, 312
ARCO 203
Asia 93, 119
Asimilasionis 49
AS-Iran 10, 79, 83, 87, 88, 149,
150, 305, 307
AS-Soviet 13, 82
Ataturk, Mustafa Kemal 249
Badui 8

- Baghdad 88, 310
 Bahrain 136, 154, 167
 Baker, James 92, 93, 98, 111, 112, 294
 Balkan 251, 252
 Bangladesh 264
 Barat 2, 3, 5, 7, 14, 16, 17, 19, 27-37, 39, 40, 47, 48, 51, 53, 56, 58, 62, 64, 77-79, 83, 87, 91-93, 96, 97, 101, 115-120, 122, 126, 129, 130, 132, 135, 150, 152, 156, 161, 170, 173, 174, 185, 187, 201, 203, 204, 206, 209, 210, 211, 232, 249, 250-254, 259-266, 271-275, 279, 296, 297, 304, 306, 307, 312
 Beirut 101
 Benghazi 87
 Berger, Samuel 112, 129
 Bhutto, Benazir 119
 Bill, James 77, 78
 Bir, Cevik 258
 Blix, Hans 171
 Bolshevik 27
 Bosnia 175
 Brooke, James 56
 Brzezinski, Zbigniew 51, 76-79, 81, 83, 164
 Bulliet, Richard 38, 55
 Bush, George 3, 8, 18, 35, 41, 75, 89-95, 97-102, 111, 112, 115, 117, 119, 132, 137, 138, 154, 186, 227, 252, 254, 255, 293-297, 300, 310
 Carter, Jimmy 1, 18, 51, 52, 75-85, 154, 158, 159
 Casey, William 87
 Christendom 30
 Christopher, Warren 55, 112, 114, 150, 154, 157-160, 165, 268, 294
 Chubin, Shahram 159
 CIA 10, 65, 87, 152, 156, 165, 194, 306
 Ciller, Tansu 249, 257, 261, 268, 271, 275
 Cina 170
 Clawson, Patrick 138
 Clinton, Bill 58, 102, 111, 112
 Cohen, William 112
 Conoco 157, 173
 Cottam, Richad 88, 152
 Crusader 47
 Cyprus 256, 268
 D'Amato, Alfonse 157
 Debray, Regis 17
 Dekolonisasi 48
 Demirel 272
Desert Storm 8
 Djerejian, Edward 94-100, 101, 117, 121, 122, 125, 126, 131, 188, 190, 294
 Eisenhower 50, 128
 Erbakan, Necmetin 249, 257-259, 261-269, 271, 273-275, 279, 302, 303, 304
 Esposito, John L. 34, 39, 137

- Eurasia 255
 Evren, Kenan 260
 Fadallah, Mohammad 235
 Faisal, Raja 51
 FBI 57
 FIS 89-92, 94, 134, 138, 186-189, 192, 194-198, 203-206, 226, 235, 301
 Front 89, 160, 186, 207
 Fuller, Graham 10, 39, 40, 152, 159
 Fundamentalisme 27, 30, 37, 54, 61-63, 77, 83, 85, 91, 92, 122, 136, 138, 236, 252, 259, 272, 277
 Gaddis, John 6
 Gallup 8
 Gaza 56, 114, 124, 159, 166
 GCC 101
 Geertz, Clifford 7
 Ghana 129
 GIA 188, 192, 206, 210
 Gilman, Benjamin 65, 66, 150
 Gingrich 64, 65, 66
 Green Peril, The 60
 Gul, Abdullah 264, 266
 Hadar, Leon 34, 60
 Haddad, Yvonne 137
 Haddam, Anwar 187, 197, 198
 Haig, Alexander 251
 HAM 32, 33, 35, 36, 119, 127, 186, 188, 211, 224, 230, 231, 238, 239, 256, 268, 277, 278
 Hamas 56, 153, 160, 172, 235
 Hamilton, Lee 98
 Hassan, Omar 235
 Hassan, Raja 119
 Herzog 62
 Hill, Capitol 66, 121
 Hippler, Jochen 35
 Hitlerisme 150
 Hizbullah 56, 160, 161, 163, 167, 172, 235
 Hoagland, Jim 262
 Holbrooke, Richard 252, 255
 Hourani, Albert 47
 Hunter, Shireen T. 82
 Huntington, Samuel 27, 28, 130
 Hussein, Saddam 112, 167, 175
 Huyser, Robert 77
 IAEA 171
 Ikhwanul Muslimin 134, 167, 223-227, 230, 234, 236, 239, 261, 299, 300
 IMF, Dana Moneter Internasional 198, 252, 264, 265
 Indonesia 5, 120, 264
 Indyk, Martin 27, 32, 123, 124, 126, 137, 139, 151, 157, 294
 INS 197
International, Amnesty 206, 231
 Intervensionis 6, 31
 Irak 8, 14, 28, 41, 63, 93, 101, 113, 116, 123-125, 133, 135,

- 139, 151, 156, 165, 167, 170, 175, 222, 254-257, 264-266, 269, 310
- Iran, Mullah 52, 159, 163, 187, 306
- Iran, Republik Islam 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 28, 30, 41, 52-55, 60, 62, 63, 65-67, 76-84, 86-89, 92, 93, 96, 101, 112, 113, 116, 122-125, 133, 135, 139, 149, 150-174, 194-197, 224, 225, 235, 250-252, 256, 257, 259, 262-268, 271, 272, 274, 275, 294, 302, 305, 306
- Iran, Revolusi 7, 51-53, 76, 81, 82, 151, 164, 166, 167, 237, 307
- Iran, Rezim 149, 151, 152, 157, 170
- Iran-gate 87, 88
- Iran-Irak 88, 167
- Islamabad 87
- Islamique 89
- Islamis 7, 10, 11, 13-19, 26, 27, 31-41, 48, 54-57, 59, 63, 75, 76, 81-83, 86, 87, 89-115, 121-127, 129, 132-139, 152, 153, 163, 165, 166-168, 186-192, 194-199, 201, 203, 205-207, 209-212, 221-241, 249-251, 256-262, 265, 266, 268, 270-279, 293-296, 299-306, 308-310, 312
- Islamisme 11, 17, 26, 49, 53, 84, 86, 102, 114, 260, 261, 269, 294, 298
- Islam-Kristen 34
- Isolasionisme 6
- Israel 3, 16, 27, 36, 41, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 85, 101, 112, 115, 119, 123, 138, 153-155, 158, 163, 169, 172, 222, 255, 256, 260-262, 264-267, 269, 302, 311, 312
- Istanbul 266
- Istiqlal, Masjid 120
- Jakarta 120
- Jepang 66
- Jerman 48, 111, 162, 174, 252, 255
- Jibril, Ahmad 160
- Jihad 14, 30, 138, 153, 160, 161, 222, 226, 231-234, 297, 300
- Johnson, Lyndon 51
- Jordan, Hamilton 79, 82
- Jospin, Lionel 162
- Kabul 86
- Kairo 87, 138, 221-223, 228-234, 240, 261
- Kant, Immanuel 94
- Kapitalisme 5
- Kaukasia 175
- Kemalis 250, 258, 259, 273, 275, 276, 278, 279
- Kennedy 50, 128, 214, 236
- Kepel, Gilles 27
- Kharazi, Kamal 173, 174
- Khatami, Mohammad 168, 169, 171, 173, 174, 235
- Khomeini, Ayatullah 5, 52, 53, 77-83, 87, 122, 167, 225

- Kinzer, Stephen 263
- Kirkpatrick, Jeane 32
- Kissinger, Henry 53
- Komunisme 11, 13, 14, 16, 26, 29, 50, 60, 62, 76, 83-86, 89, 91, 122, 152, 254, 296
- Konfrontasionalis 15, 18, 25-37, 40, 41, 56, 58, 75, 87, 96, 116-118, 122-124, 132, 135, 137, 138, 153, 165, 261-263, 296
- Kongres 1, 3, 18, 49, 61, 64-67, 131, 136, 156, 157, 164, 165, 256, 268, 277, 298
- Kramer, Martin 123, 137, 138, 194
- Kristen 9, 27, 29, 30, 37, 47, 48, 75, 85, 101, 118, 120, 139, 174, 251
- Kristen-Yahudi 121
- Kurdi 256, 259, 265, 268, 275, 276, 309
- Kuwait 28, 54, 82, 112, 136
- Lake, Anthony 112, 115
- Larson, Alan 269
- Lebanon 27, 54, 56, 85, 86, 87, 123, 124, 153, 159, 163, 166, 167, 172, 311
- Legalisme-moralisme 5
- Lesser, Ian O. 39, 40
- Lewis, Bernard 27, 28
- Liberalisme 30
- Libya 52, 82, 85, 113, 116, 124, 125, 185, 267, 268
- Likud 112
- London 48, 221
- Lowrie, Arthur 63
- Luxor 223, 224, 232, 234, 235, 241
- Machiavelli 62
- Madani, Abbasi 206
- Madrid 112
- Malaysia 5, 134, 162, 264
- Manichaeisme 137
- Maroko 185, 190, 197
- McCain, John 164
- McDougall, Walter 29
- Meridian House, Pidato 18, 94, 95, 97-102, 115, 122, 294
- Mesir 5, 16, 19, 50, 51, 54-56, 59, 89, 93, 100, 101, 114, 123, 124, 128, 129, 134, 136, 138, 139, 167, 169, 185, 190, 196, 200, 221-241, 250, 255, 257, 260, 261, 264, 269, 298-302, 305, 308, 310
- Middle East Watch 231
- Miller, Judith 32, 33, 137
- Mitterand, Francois 90, 196, 302
- Mubarak, Hosni 55, 221-241, 261, 299, 300
- Muhammad, Nabi 47, 54, 118
- Mujahidin 76, 86, 87, 225
- National Intelligence Estimate* 221
- NATO 28, 162, 251, 253-255, 265, 267, 270, 273, 303, 305
- Nazi 27
- Nazisme 62, 85, 150

- Netanyahu, Benjamin 311
 Newmann, Ronald 208
 Nicholas, Burns 257, 258
 Nigeria 264
 Nixon, Richard 29, 53, 76
 NSC, Dewan Keamanan Nasional
 163, 164, 193, 209, 227, 237,
 263

 Oklahoma City 57, 58
 Oklahoma, Pengeboman 13, 57,
 58
 Oliver 47
Omnibus Counterterrorism 58
 OPEC 51
 Oriental 266
 Ottoman 48, 249
 Ozal, Turgut 254, 255
 Ozden 304
 Ozden, Gungor 304

 Paderborn 47
 Pahlevi, Reza 78
 Pakistan 5, 82, 87, 97, 119, 134,
 264
 Palestina 112, 153, 172, 235, 311,
 312
 Palestina-Israel 153
 Panama 294
 Pan-Islam 30, 138
 Paris 48, 78, 190, 196-199
 Paris, Jonathan 30
 Paris, Mark 138, 189, 294
 Pasqua, Charles 196

 PBB 10, 55, 114, 207, 254, 257,
 266
 Pelletreau, Robert 61, 66, 115,
 117, 120-126, 131, 132, 188,
 190, 191, 199-202, 210, 294,
 295
 Peres, Shimon 62
 Perlmutter, Amos 27
 Perry, William J. 112
 Persia, Teluk 11, 12, 35, 53, 76,
 82, 83, 95, 135, 136, 151,
 161, 175, 197, 273
 Pierre, Andrew 193
 Pipes, Daniel 29, 30, 31, 137
 PKK, Partai Buruh Kurdistan 256,
 277
 Pope, Laurence 59, 151
 Prancis 47, 48, 90, 162, 170, 174,
 186, 190, 191, 196-199, 202,
 204, 210, 211, 302
 Prancis-Rusia-Malaysia 162
 Precht, Henry 78
 pro-Amerika 11, 261
 pro-Barat 3, 5, 14, 15, 16, 30, 32,
 50, 85, 93, 119, 134, 154,
 167, 256, 262, 271, 273, 296,
 307
 pro-Israel 27, 157, 311
 Protestan 15
 Puerto Rico 57
 Purdum, Todd S. 66

 Qabbani, Nizar 311
 Qaddafi, Muammar 40, 52, 85
 Quandt, William B. 123, 163, 193,
 236

- Quayle, Dan 85
- Rabin, Yitzhak 62
- Rafsanjani, Ali Akbar Hashemi 172, 173
- Rasialisme 7, 116
- Reagan, Ronald 12, 18, 75, 76, 85-89, 154, 251, 298
- Refah, Partai 249, 256-266, 268, 269, 272-275, 278, 303, 304, 305
- Riedel, Bruce 191
- Riyadh 87
- Rodinson, Maxime 47
- Rodman, Peter W. 30
- Ros-Lehtinen, Ileana 64
- Rushdie, Salman 153
- Rusia 29, 76, 82, 87, 91, 156, 157, 162, 164, 170
- Satloff, Robert 33
- Schleiermacher, Friedrich 48
- Sciolino, Elaine 63, 64
- Scoliano, Elain 64
- Scowcroft, Brent 164
- Sekularisasi 275
- Sekularisme 250, 252, 257, 260, 262, 270
- Shalikashvili, John 160
- Shamir, Yitzhak 112
- Shultz, George 85
- Sick, Gary 10, 79, 80, 81, 159, 164
- Soviet, Uni 11, 13, 14, 31, 33, 50, 62, 76, 83, 84, 86-89, 91, 95, 101, 111, 112, 119, 152, 193, 194, 225, 251-254, 296
- Spanyol 49, 112
- St. Egidio Society* 192, 198
- Sudan 14, 56, 89, 96, 101, 113, 116, 122-124, 133, 135, 139, 159, 163, 166, 167, 224, 225, 230, 235, 263, 308
- Sullivan, William 77
- Sunders, Harold 80
- Sunni 30, 168
- Suriah 172, 256, 259
- Syah Iran 53
- Syariah 260, 273, 274
- Syiah 53, 83, 85, 93, 167, 168
- Talbott, Strobe 112
- Tarnoff, Peter 161, 257, 258, 266
- Teheran 54, 65, 77, 78, 80, 83, 87, 88, 150, 152-155, 157-159, 163, 165-169, 171-174, 267, 306, 310
- Tel Aviv 255, 261, 311
- Teokrasi 16, 32
- Tepi Barat 56, 114, 124, 159, 166
- Terorisme 11-14, 52-59, 64, 65, 85, 96, 101, 116, 117, 119-122, 124-126, 132, 134, 136, 150-153, 155, 158, 160, 163, 164, 169, 172, 174, 189, 191, 196, 200, 207, 224, 225, 230, 233, 234, 235, 237, 259, 264, 306, 311
- Times, Los Angeles* 35
- Times, New York* 7, 14, 56, 57, 64,

- 66, 137, 198, 204, 261, 263
Times, Washington 165
 TPP, Partai Jalan Sehati 303
 Truman, Harry S. 50
 Tunisia 5, 89, 101, 114, 185, 190, 197
 Turabi, Hassan 167
 Turki 5, 16, 19, 93, 101, 119, 134, 136, 139, 162, 249-279, 302-304, 309, 310
 UE 259
 Universitas Columbia 38, 55
 Universitas Georgetown 137
 Universitas Harvard 27
 Vance, Cyrus 53, 81-83
 Velayati, Ali Akbar 153
 Vincennes, USS 88
 Washington 4, 5, 6, 12, 13, 17, 33, 36, 39, 41, 49, 52, 82, 87, 89, 93, 94, 99, 113, 125, 128, 129, 135-138, 151, 155, 156, 158, 159, 162, 163-166, 171, 173, 174, 187, 190, 191, 193-198, 201, 202, 209, 222, 225, 227, 228, 230, 236, 239, 250-255, 257-259, 261, 262, 264, 265, 267-269, 271, 276, 277, 293-295, 296, 298-301, 303, 306, 307, 309, 311
Washington Institute for Near East Policy 27, 33, 115, 123
 Weinberger, Caspar 85, 88
 Welch, David C. 191, 192
 Wirth, Timothy 121
 Wolfowitz, Paul 237
World Jewish Congress 66
World Trade Center 55, 56, 225
 Wright, Robin 35, 39
 Yahudi-Kristen 14, 28, 47
 Yilmaz, Mesut 249, 272
 Yordania 89, 114, 124, 138, 308
 Yordania, Parlemen 63, 116, 118, 119, 166, 297
 Yunani-Romawi 47
 Yunani-Turki 268
 Zeroual, Liamine 186, 189, 191, 198-203, 205-210, 301, 302
 Zuckerman, Mortimer 29

Pujian untuk *Amerika dan Politik Islam*

Analisis Gerges yang dingin dan cemerlang mengungkapkan lebarnya jurang antara ucapan dan perbuatan Amerika. Meski orang mungkin mengeluh tentang tiadanya kebijakan Timur Tengah AS yang koheren, wawasan yang lengkap dan jujur seperti terekam dalam buku ini dapat menjadi awal sebuah kearifan.

— **Richard Bulliet**, *Columbia University*

Uraian Gerges tentang kebijakan-kebijakan Carter, Reagan, Bush dan Clinton bersifat adil dan sekaligus kritis. Rekomendasi-rekomendasi kebijakannya meyakinkan dan patut mendapat perhatian serius. Buku ini merupakan tambahan yang berharga bagi kepustakaan tentang kebijakan luar negeri Amerika pada umumnya dan kebijakan AS tentang Timur Tengah khususnya.

— **Michael C. Hudson**, *Georgetown University*

Buku ini merupakan hasil dari penelitian dan perenungan bertahun-tahun tentang hubungan antara Barat dan dunia Islam. Ia menangani subjek yang bukan hanya tepat tapi juga amat penting. Fawaz Gerges sungguh sangat memenuhi syarat untuk menulis subjek ini. Dia memadukan tinjauan mendalam tentang politik Timur Tengah dengan analisis yang canggih dan subtil tentang kebijakan Amerika terhadap Islam politik.

— **Avi Shlaim**, *St. Antony's College, Oxford University*

FAWAZ A. GERGES adalah profesor dalam Studi Politik International dan Timur Tengah di Sarah Lawrence College. Dia lulus dari Oxford University dan London School of Economics, dan sebelumnya menjadi peneliti di Universitas Harvard and Princeton. Dia menulis *The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics*, dan artikel-artikelnya muncul di sejumlah jurnal paling bergengsi di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Kini Gerges sedang meneliti buku berikutnya yang berjudul sementara *The Islamists and the West: Ideology versus Pragmatism?*

ISBN 979>3064>04>8



9 789793 064048

